

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH KALIMANTAN

2019

LAPORAN KINERJA



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH KALIMANTAN

Komplek Balai Diklat LHK Samarinda
Jl. P. Untung Suropati, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda-Kalimantan Timur



PENGESAHAN

LAPORAN KINERJA BPPHLHK WIL. KALIMANTAN
TAHUN 2019

Samarinda, Januari 2020

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI
OLEH :



KEPALA BALAI,

Subhan, S.Hut., M.Si

NIP. 19730320 199903 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan Tahun Anggaran 2019 dapat disusun dan diselesaikan sesuai target.

Laporan Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan Tahun Anggaran 2019 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan dalam menyampaikan informasi kepada publik tentang pencapaian berbagai kegiatan yang telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2019, sekaligus sebagai gambaran kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan.

Pada kesempatan ini tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya sehingga proses penyusunan berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Kami sangat berharap adanya masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan serta perbaikan penyusunan Laporan Kinerja ke depan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya pihak-pihak yang memerlukan informasi-informasi yang terkandung di dalamnya.

Samarinda, Januari 2020

Kepala Balai



Subhan, S.Hut, M.Si

NIP. 19730320 199903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Kondisi Umum	2
2. Tipologi Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	2
3. Struktur Organisasi	3
4. Sumber Daya Manusia	4
5. Sumber Dana	5
6. Sarana dan Prasarana.....	5
B. Permasalahan Utama	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Prioritas Nasional.....	9
1. Indikator Kinerja Program.....	13
2. Indikator Kinerja Kegiatan.....	14
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan.....	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Pengukuran Kinerja	21
C. Analisis Capaian Kinerja	23
D. Realisasi Anggaran	33
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	36
B. Rekomendasi.	36
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sebaran Pegawai BPPHLHK Wilayah Kalimantan s/d Tahun 2019
Tabel 2	Sebaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
Tabel 3	Uraian Perencanaan Anggaran Tahun 2019 Sesuai dengan Jenis Belanja
Tabel 4	Posisi Barang Milik Negara dalam Neraca per 31 Desember 2019
Tabel 5	Sasaran dan Indikator Kinerja Program (Renstra 2015-2019)
Tabel 6	Sasaran Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tabel 7	Penanggung Jawab Kegiatan, Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra 2015-2019)
Tabel 8	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan Output dan Komponen Kegiatan
Tabel 9	Kriteria Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (X)
Tabel 10	Pengukuran Kinerja
Tabel 11	Tipologi Pengaduan yang Masuk
Tabel 12	Sumber Pengaduan yang Masuk
Tabel 13	Tipologi Sektor Pengawasan
Tabel 14	Rekap Ketaatan Izin
Tabel 15	Realisasi Anggaran 2019 Berdasarkan Jenis Belanja
Tabel 16	Laporan Kemajuan Pelaksanaan Anggaran Per Output Kegiatan

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Tipologi Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Gambar 2 Struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan
- Gambar 3 Pagu Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2019
- Gambar 4 Aset Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan
- Gambar 5 Logic Model Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Gambar 6 Logic Model Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Gambar 7 Logic Model Sasaran, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Gambar 8 Logic Model Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Gambar 9 Grafik Perbandingan Luas Hutan yang diamankan Tahun 2018 dan 2019
- Gambar 10 Kegiatan Puldasi Terkait Karhutla di Kabupaten Sintang oleh Seksi Wilayah III Pontianak
- Gambar 11 Operasi Fungsional Pengamanan Hutan di Kawasan TN Gunung Palung Kayong Utara oleh Seksi Wilayah III Pontianak
- Gambar 12 Operasi Gabungan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Perbatasan Negara Indonesia - Malaysia oleh Seksi Wilayah III Pontianak
- Gambar 13 Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di Kabupaten Kutai Kartanegara
- Gambar 14 Pengadaan Kendaraan Roda 4 Intelijen
- Gambar 15 Pengadaan Kendaraan Roda 2 Intelijen
- Gambar 16 Pengadaan Teleconferece
- Gambar 17 Pengadaan HT
- Gambar 18 Pembuatan Parkir Kendaraan Seksi Wilayah III
- Gambar 19 Renovasi Aula Tahap II dan Atap Aula
- Gambar 20 Renovasi Mess dan Atap Mess
- Gambar 21 Kegiatan Verifikasi Lapangan Tindak Lanjut Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhutla di Kawasan PT. Kebun Ganda Prima, Provinsi Kalimantan Barat
- Gambar 22 Kegiatan Verifikasi Lapangan Tindak Lanjut Pengaduan Tambang Ilegal di Desa Pampang, Samarinda Kalimantan Timur

- Gambar 23 Kegiatan Pengawasan di PT Lanna Harita Indonesia di Kutai Kartanegara
- Gambar 24 Pengadaan Laptop dan Portable Multiparameter
- Gambar 25 Pengadaan Perlengkapan Lapangan Kegiatan PPSA
- Gambar 26 Jumlah Kasus P21 Tahun 2018 dan 2019 berdasarkan Tipologi Kasus
- Gambar 27 Pengadaan Kendaraan Roda 4 Mobilisasi Personil

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja 2019

Lampiran 2. Rekap Hasil Kegiatan Operasi Penegakan Hukum LHK Tahun 2019

Lampiran 3. Rekap Hasil Kegiatan Penanganan Pengaduan Tahun 2019

Lampiran 4. Rekap Hasil Kegiatan Pengawasan Tahun 2019

Lampiran 5. Rekap Kasus P.21 Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sangat diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka terbentuklah UPT (Unit Pelaksana Teknis) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kalimantan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Kalimantan menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- b. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan.
- c. Penyusunan rencana program penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan.
- d. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.
- e. Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- f. Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan.
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum.
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

1. Kondisi Umum

Lingkup kondisi yang dimaksud dalam hal ini adalah selain kondisi institutif juga kondisi substantif. Adapun kondisi institutif secara generik meliputi perihal manajemen, administrasi dan organisasi. Sedangkan kondisi substantif meliputi substansi yang relevan dengan bidang tugas dan fungsi BPPHLHK Wilayah Kalimantan, seperti kondisi lingkungan hidup dan hutan serta kondisi kesehatan ekologis dan kondisi keberfungsian ekosistem yang dapat berubah oleh keberhasilan upaya BPPHLHK Wilayah Kalimantan, yaitu menurunkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Keberhasilan di atas merupakan dampak dan/atau manfaat dari keluaran dari kegiatan penegakan hukum oleh BPPHLHK Wilayah Kalimantan, yang secara garis besar meliputi:

- Peningkatan layanan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan;
- Peningkatan layanan penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup dan kehutanan;
- Peningkatan ketaatan usaha/kegiatan atas kewajiban, larangan dan/atau persyaratan mengenai pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup;
- Pencegahan dan pengamanan asset hutan yang pengelolaannya dikuasakan kepada Kementerian LHK;
- Penurunan tindakan pelanggaran hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan;

2. Tipologi Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan BPPHLHK Wilayah Kalimantan dapat lebih baik mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas penegakan hukum tersebut, pendekatan penegakan hukum dibuat untuk mendukung pendayagunaan strategi yang akan diimplementasikan dan diharapkan dapat memberikan terobosan-terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum. Pendekatan penegakan hukum yang akan digunakan antara lain: peningkatan kapasitas penegakan hukum, penerapan multi instrumen hukum, penerapan multi rejim hukum (*multidoors*) dan penerapan kebijakan simbolik.



Gambar 1. Tipologi Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPPHLHK Wilayah Kalimantan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan

Berdasarkan Peraturan tersebut bahwa Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan berada di Samarinda, sedangkan Seksi Wilayah I di Palangkaraya; wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Kalimantan Selatan; sedangkan Seksi Wilayah II di

Samarinda, wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Provinsi Kalimantan Utara; sedangkan Seksi Wilayah III di Pontianak, wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPPHLHK Wilayah Kalimantan memiliki Personil 5 (lima) orang pejabat struktural, 8 (delapan) Orang pegawai nonstruktural, 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan, 134 tenaga fungsional Polhut, dan Calon PPLH 16 Orang. Berikut sebaran pegawai BPPHLHK LHK Wilayah Kalimantan.

Tabel 1. Sebaran Pegawai BPPHLHK Wilayah Kalimantan s/d Tahun 2019

NO	UNIT KERJA	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1.	BPPH LHK Wilayah Kalimantan	10	9	8	8
2.	Seksi Wilayah I Palangkaraya	41	40	45	46
3.	Seksi Wilayah II Samarinda	44	43	57	57
4.	Seksi Wilayah III Pontianak	50	49	51	53
	JUMLAH	145	141	161	164

BPPHLHK Wilayah Kalimantan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya memiliki Tenaga Kontrak/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada Tahun 2019 sebanyak 27 orang. Adapun sebarannya sebagai berikut:

Tabel 2. Sebaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

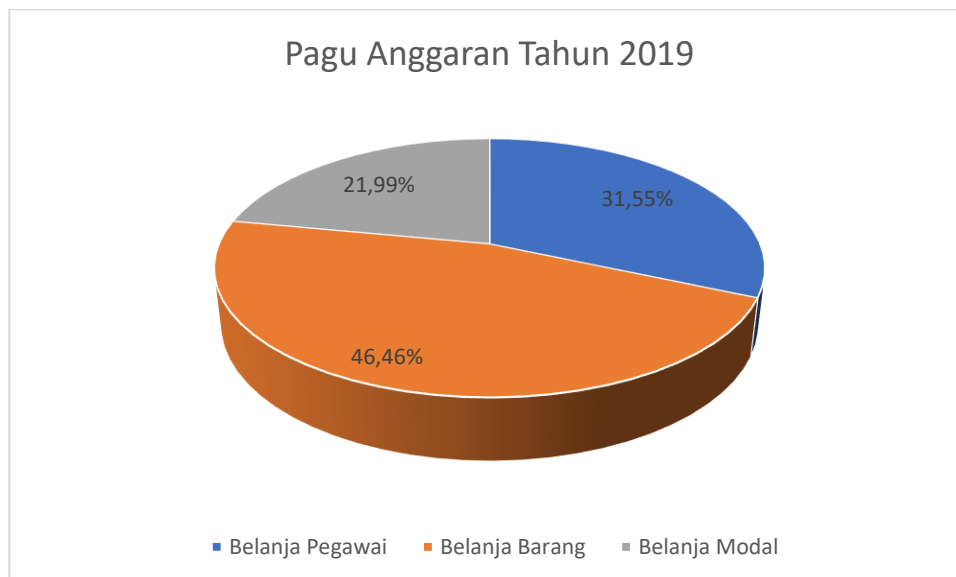
NO	UNIT KERJA	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1.	BPPH LHK Wilayah Kalimantan	4	4	9	8
2.	Seksi Wilayah I Palangkaraya	4	5	6	6
3.	Seksi Wilayah II Samarinda	2	6	7	7
4.	Seksi Wilayah III Pontianak	4	6	6	6
	JUMLAH (Orang)	14	21	28	27

5. Sumber Dana

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya BPPHLHK Wilayah Kalimantan pada Tahun Anggaran 2019 memiliki Pagu Awal Sebesar Rp60.440.151.000 sedangkan setelah direvisi dana menjadi sebesar Rp59.886.498.000,- Adapun uraian Pembagian Pagu Anggaran sesuai jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Uraian Perencanaan Anggaran Tahun 2019 Sesuai dengan Jenis Belanja

URAIAN	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI
Belanja Pegawai	16.814.330.000	18.896.724.000
Belanja Barang	30.624.239.000	27.820.495.000
Belanja Modal	13.001.582.000	13.169.279.000
Jumlah Belanja	60.440.151.000	59.886.498.000



Gambar 3. Pagu Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2019

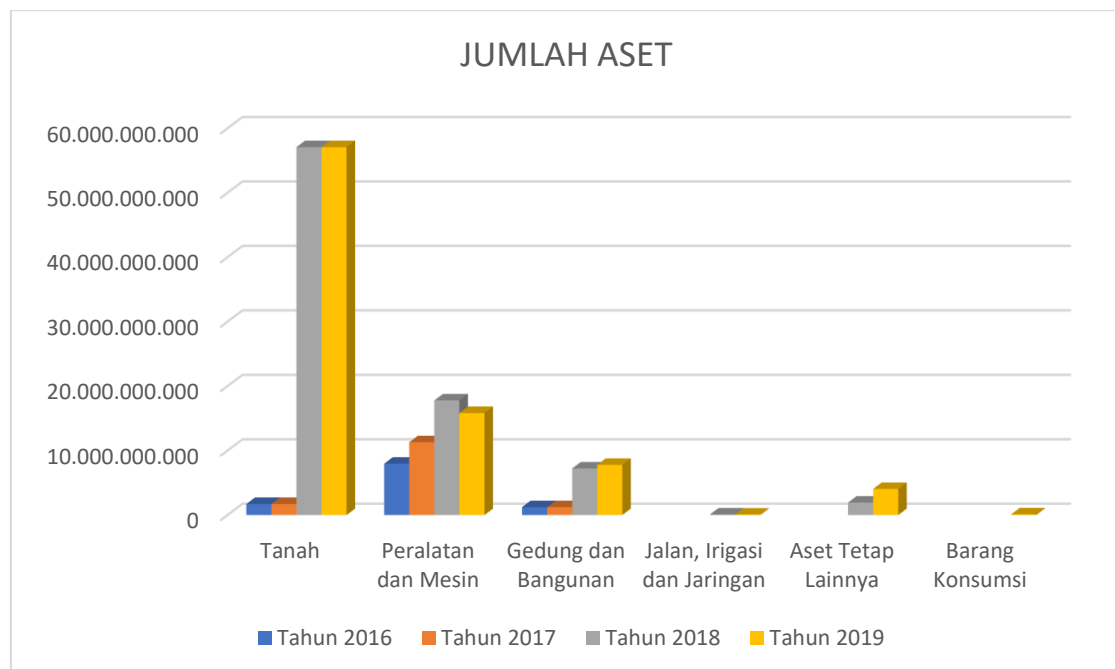
6. Sarana dan Prasarana.

Sampai dengan per 31 Desember 2019 sarana dan prasarana BPPHLHK Wilayah Kalimantan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Posisi Barang Milik Negara dalam Neraca per 31 Desember 2019

NO.	URAIAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Tanah	1.715.980.000	1.715.980.000	57.079.698.000	57.079.698.000
2	Peralatan dan Mesin	7.971.059.914	11.296.081.469	17.782.753.702	15.824.924.932

NO.	URAIAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
3	Gedung dan Bangunan	1.226.979.000	1.226.979.000	7.228.118.800	7.787.608.470
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan			94.291.000	74.254.162
5	Aset Tetap Lainnya			1.930.232.100	4.050.701.700
6	Barang Konsumsi				109.281.118
	Jumlah Aset Tetap	10.954.018.914	14.626.414.469	84.115.093.602	84.926.468.382



Gambar 4. Aset Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan

Aset tersebut merupakan hasil Pengadaan Barang/Jasa Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 serta Serah Terima dari Satker Ditjen KSDAE.

B. Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum memiliki banyak faktor-faktor yang dapat menjadi potensi dalam penegakan hukum namun dalam saat yang bersamaan juga menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal. Identifikasi permasalahannya sebagai berikut:

INTERNAL

- Kapasitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, terutama kapasitas sumberdaya manusia dan kapasitas teknologi pirantinya, relatif belum memadai untuk menghadapi/mengatasi tantangannya, mengingat pertumbuhan kapasitas lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan problematik yang mesti dihadapi/diatasnya, seperti misalnya pada kasus kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi tiap tahun, kasus ancaman terhadap kepunahan sejumlah spesies dan penurunan keanekaragaman hayati yang cenderung meningkat.
- Sumberdaya aparatur pada tingkat operasional belum memadai relatif dibandingkan dengan tantangannya. Prasarana dan sarana belum memadai relatif dibandingkan dengan permasalahan teknis yang harus diatasi. Jumlah PPNS dan PPLH tidak cukup untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pidana.
- Kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih terkendala dengan ketersediaan data dan informasi, antara lain data/informasi yang berkenaan dengan izin-izin usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Akses informasi bagi publik yang dinilai masih harus diperbaiki, antara lain agar publik dapat berperan serta, antara lain melalui mekanisme whistle blower, kontrol sosial, pengaduan, dan peranserta dalam mata rantai pengawasan dalam rangka penegakan hukum administrasi.
- Peningkatan penegakan hukum melalui pendekatan “*multidoors*” masih terkendala oleh kapasitas operasionalisasinya, baik pada tingkat gerakan maupun pada tingkat lapangan.
- Kinerja yang masih belum memadai untuk mengefektifkan koordinasi dan sinergitas antar unit kerja, terutama dengan Ditjen-Ditjen yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin dan menetapkan aturan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Peraturan perundang-undangan pada tingkatan prosedur operasional belum lengkap dan atau perlu dimutakhirkan.

EKSTERNAL

- Regulasi yang diperlukan sebagai dasar hukum untuk efektivitas pelaksanaan.
- Peraturan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih cukup banyak yang harus ditetapkan, antara lain peraturan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, peraturan pelaksanaan mengenai keanekaragaman hayati, peraturan pelaksanaan mengenai perizinan lingkungan hidup, kepastian dan kejelasan hukum tentang batas-batas kawasan hutan dan lahan.

- Pembagian tugas-tugas penegakan hukum antara “pusat dan daerah” perlu segera dimutakhirkan aturan penyelarannya, untuk mencegah terjadinya saling lempar urusan dari daerah ke pusat dan atau sebaliknya, karena perubahan cara kerja dan koordinasi di tingkat Pusat dan tingkat Daerah, yang merupakan implikasi dari penggabungan dua kementerian menjadi Kementerian LHK.
- Kapasitas penegakan hukum di kabupaten berada pada nilai indeks yang terendah, sedangkan di tingkat nasional pada nilai indeks yang tertinggi. Kesejangan nilai indeks tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan perubahan manajemen, baik oleh jajaran pemerintah di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, agar penegakan hukum menjadi lebih berhasil.
- Besarnya harapan rakyat akan keadilan, kemungkinan turunnya kepercayaan publik atas efektifitas penegakan hukum perlu diantisipasi. Meningkatnya kompleksitas dan moda baru perilaku kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Perubahan paradigma pemerintah yang ingin memberikan akses besar terhadap masyarakat menimbulkan banyaknya pendudukan hutan secara illegal. Jumlah dan kompleksitas kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang cenderung meningkat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Prioritas Nasional

Rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019 (selanjutnya disingkat menjadi RPJMN 2015-2019) telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Oleh karena seluruh aktivitas pembangunan diarahkan untuk memenuhi visi dan misi Presiden Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019, maka visi dan misi Kementerian LHK adalah sama dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia, demikian pula halnya dengan seluruh unit kerja dibawah kementerian LHK, termasuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (disingkat Ditjen PHLHK).

Sasaran Strategis Kementerian LHK untuk kurun waktu Tahun 2015-2019, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat;
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk pembangunan berkelanjutan.

Pencapaian tiga Sasaran strategis Kementerian LHK 2015-2019 tersebut di atas akan dilakukan melalui 13 Program. Satu diantara 13 Program termaksud di atas, adalah “Program Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan”.

Sasaran Program dari “Program Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan” ini secara substantif terdiri atas dua sub sasaran Program, yang masing-masingnya memiliki satu indikator Kinerja Program. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel sasaran Program di bawah ini:

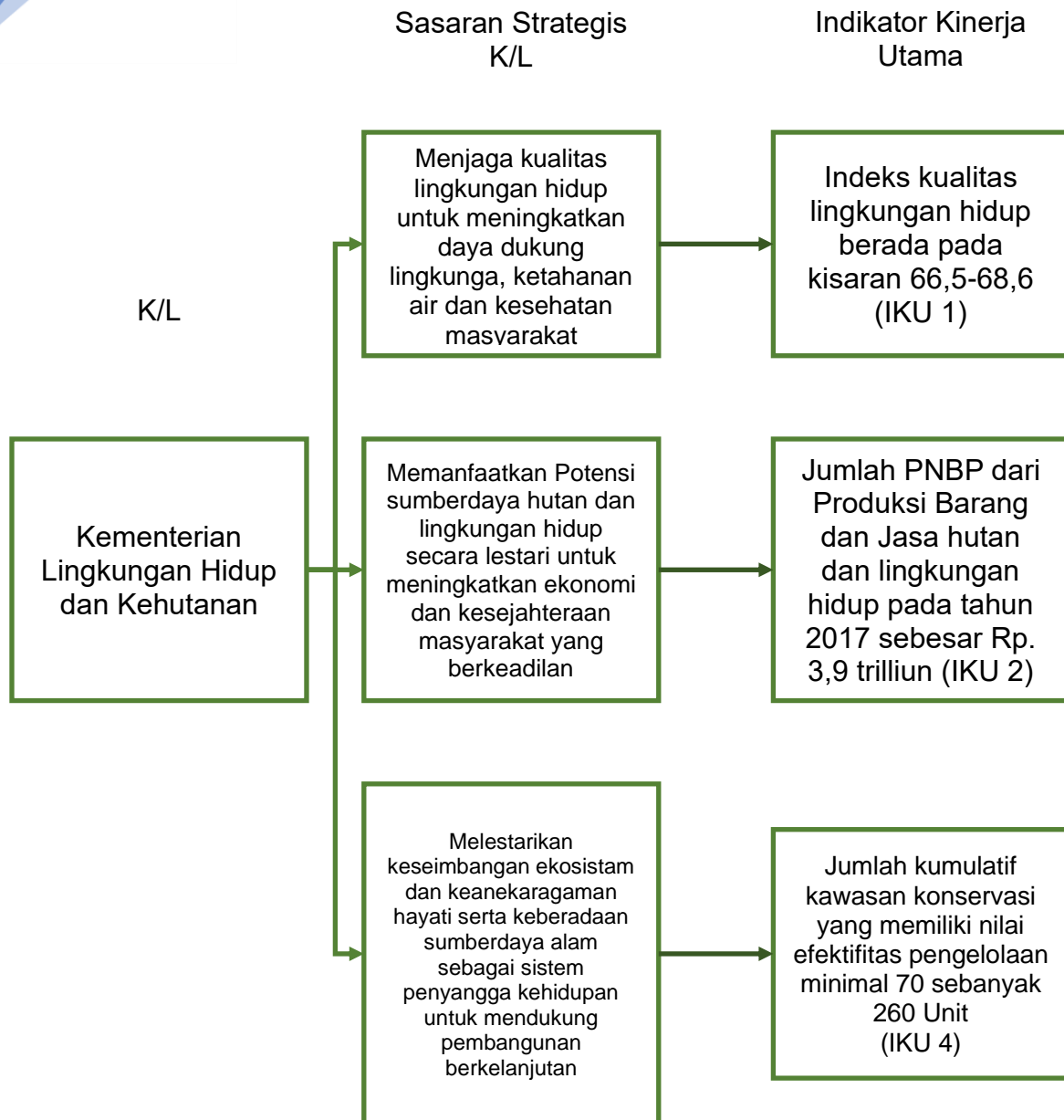
Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja Program (Renstra 2015-2019)

Sasaran Program		Indikator kinerja program
Sub sasaran A	Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum LHK	Persentase penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum LHK meningkat setiap tahun
Sub Sasaran B	Meningkatnya pencegahan dan pengamanan hutan	Luas hutan yang dipertahankan dari gangguan keamanan hutan, meningkat setiap tahun

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor; P.78/MenLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 3 (Tiga) dari 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai yang tertera pada Pasal 1 yaitu:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2018 berada pada rentang 66,5-68,6 (IKU I);
- b. Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak dari produksi barang dan jasa hutan dan lingkungan hidup pada tahun 2019 sebesar 3,9 Triliun (IKU II);
- c. Jumlah Kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektifitas pengelolaan minimal 70 pada Tahun 2019 sebanyak 260 Unit (IKU IV);

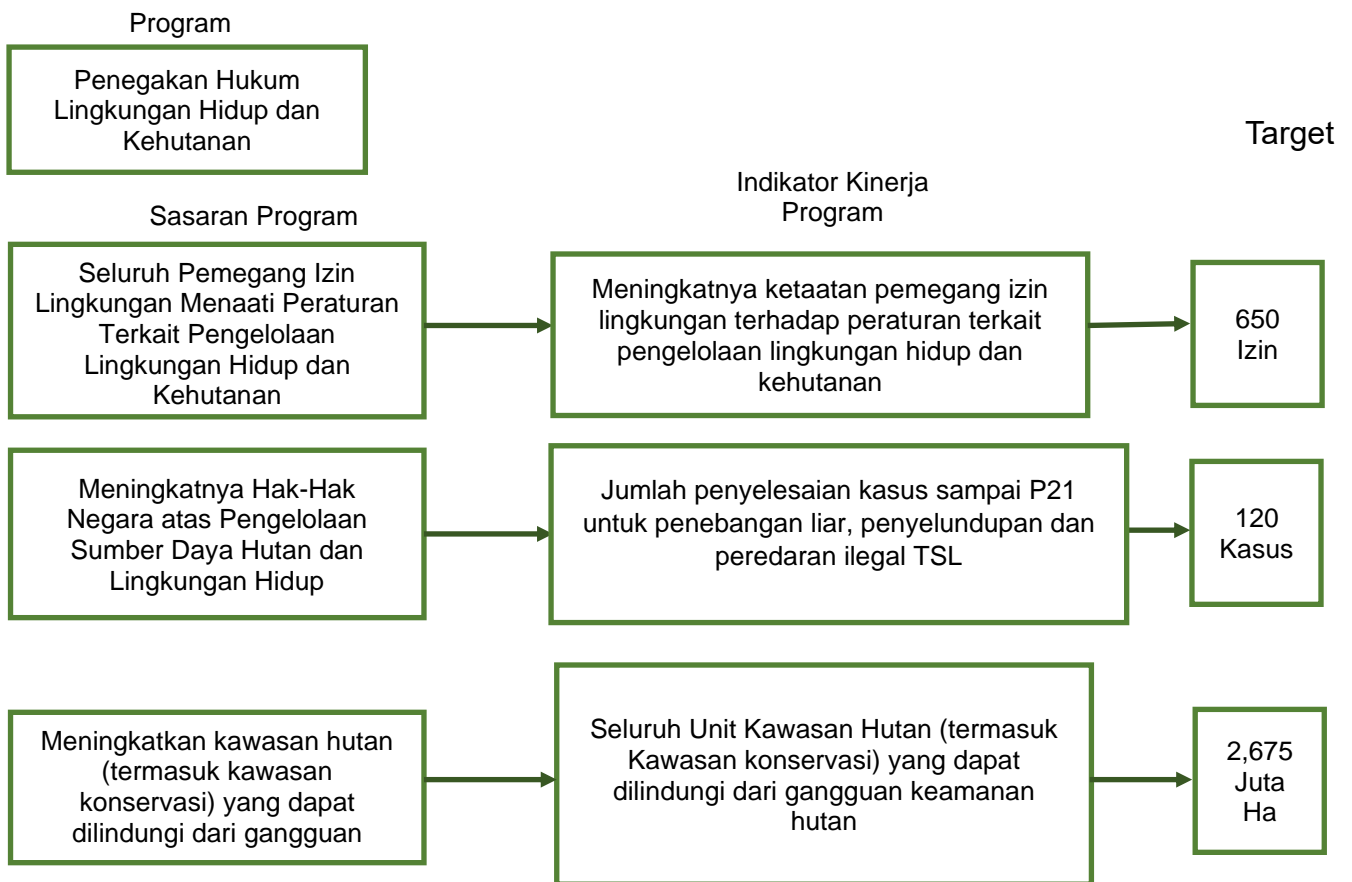
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kinerja yang akan digunakan menyusun laporan akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian.



Gambar 5. Logic Model Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Indikator Kinerja Program

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Perubahan Target Indikator Kinerja Program Eselon I adalah sebagai berikut:



Gambar 6. Logic Model Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran program Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di atas akan dicapai melalui lima kegiatan, sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK, yaitu:

1. Kegiatan penanganan pengaduan, pengawasan, dan sanksi Administrasi;
2. Kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup

3. Kegiatan penegakan hukum pidana
4. Kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan
5. Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Ditjen PHLHK

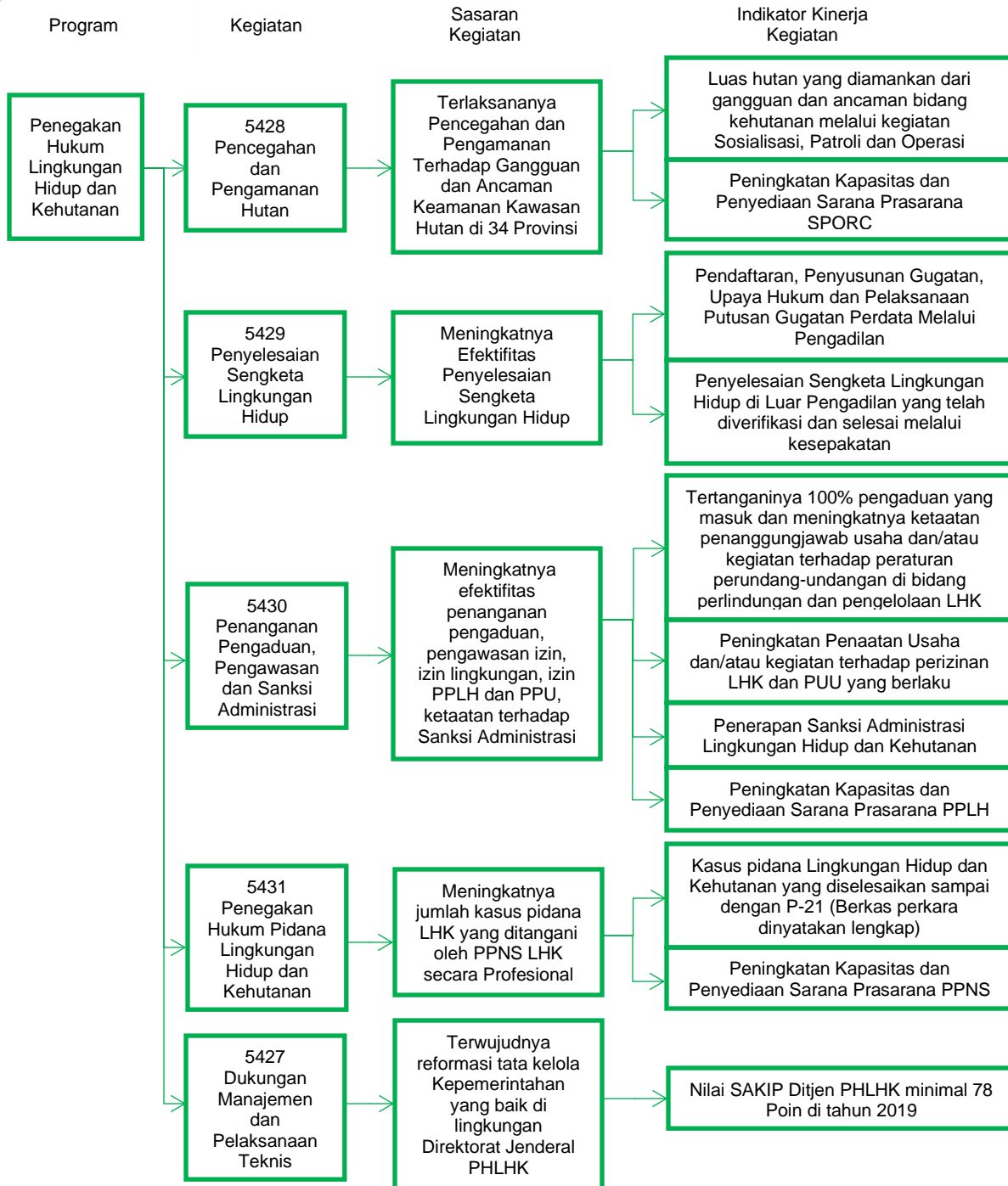
Adapun tabulasi dari sasaran program dan kegiatan serta sasaran kegiatan, ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Sasaran Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN
A. Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum LHK	1. Penanganan pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan; pengawasan izin lingkungan izin PPLH, dan PUU; ketaatan terhadap sanksi administrasi
	2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektifitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup
	3. Penegakan Hukum Pidana	Meningkatnya efektifitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan
B. Meningkatnya pencegahan dan pengamanan hutan	4. Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi
C. Meningkatnya dukungan manajemen	5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Ditjen PHLHK	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHLHK

2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari tiap Sasaran Kegiatan tersebut di atas ditunjukkan pada tabel Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan berikut:



Gambar 7. Logic Model Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/MENLHK-II/2015, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini terdiri atas lima unit kerja eselon satu dan

setiap unit kerja eselon satu tersebut merupakan penanggung jawab kegiatan dari program “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan” sebagaimana ditunjukkan dengan matriks pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Penanggung Jawab Kegiatan, Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra 2015-2019)

KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan; pengawasan izin lingkungan izin PPLH, dan PUU; ketaatan terhadap sanksi administrasi	Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi
Meningkatnya efektifitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Meningkatnya efektifitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Direktorat Penegakan Hukum Pidana
Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi	Direktorat Pencegahan dan Penagamanan Hutan
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHLHK	Sekretariat Direktorat Jenderal

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan merupakan unit Pelaksana Teknis Dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dalam susunan Rencana Kerjanya tidak lepas dari sasaran kegiatan Ditjen Penegakan Hukum LHK. Adapun sasaran kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan adalah **“Menurunkan Gangguan, Ancaman dan Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan”**

Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan Sasaran Kegiatan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja

kegiatan. Oleh karena itu perlu ditetapkan Indikator Kinerja Unit Pelaksana Teknis, dimana kegiatan dan targetnya akan dipengaruhi oleh Rencana Kerja Pemerintah di tahun ke depan, sehingga Kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis akan Sinergis dengan Kegiatan di Pusat dengan Hasil Koordinasi Kegiatan untuk Menentukan Target Per Lokasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 8 Logic Model Sasaran, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas maka dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan.
3. Penanganan Pengaduan,
4. Pengawasan
5. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam rangka untuk mendukung sasaran kegiatan tersebut di atas disusun rencana kerja yang terdiri dari beberapa indikator kegiatan, Output dan Komponen Kegiatan dari Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Kalimantan

Tabel 8 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan Output dan Komponen Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Pencegahan dan pengamanan hutan	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	450.000 Hektar
		Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi
3	Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	100% dari Pengaduan yang Masuk (150 Pengaduan)
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	75 Izin

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi
4	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	33 Kasus P-21
		Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran selama satu tahun, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan hasil capaian kerjanya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun salah satu alat yang digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja (LKj) yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dalam susunan Rencana Kerjanya tidak lepas dari sasaran kegiatan Ditjen Penegakan Hukum LHK. Adapun sasaran kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan.
3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi.
4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Masing-masing sasaran tersebut memiliki indikator kinerja agar pengukuran keberhasilan sasaran dapat lebih mudah dilaksanakan. Berikut disajikan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan selama periode Tahun 2019 yang kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui berhasil atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan

evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

$$C = \frac{R}{T} \times 100\%$$

dimana

C : Tingkat capaian target kinerja

R : Realisasi capaian target kinerja

T : Target kinerja

Untuk memudahkan dalam mengetahui tingkat keberhasilan kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, nilai capaian kinerja sasaran akan dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 9. Kriteria Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (X)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Ket
1.	X > 85 %	Sangat Berhasil	Hijau
2.	70 < X < 85 %	Berhasil	Biru
3.	55 < X < 70 %	Cukup Berhasil	Kuning
4.	X < 55 %	Tidak Berhasil	Merah

Sumber: Permendagri No 54 Tahun 2010

B. Pengukuran Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan Tahun 2019 disajikan dan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 10. Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	
				Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
2	Pencegahan dan pengamanan hutan	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	450.000 Hektar	1.067.124,83 Hektar	237,14
		Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi	1 Lokasi	100
3	Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	100% dari Pengaduan yang Masuk (150 Pengaduan)	213 Pengaduan	142
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	75 Izin	193 Izin	257,33

		Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi	1 Lokasi	100
4	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	33 Kasus P-21	44 Kasus P-21	133,33
		Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi	1 Lokasi	100

C. Analisis Capaian Kinerja

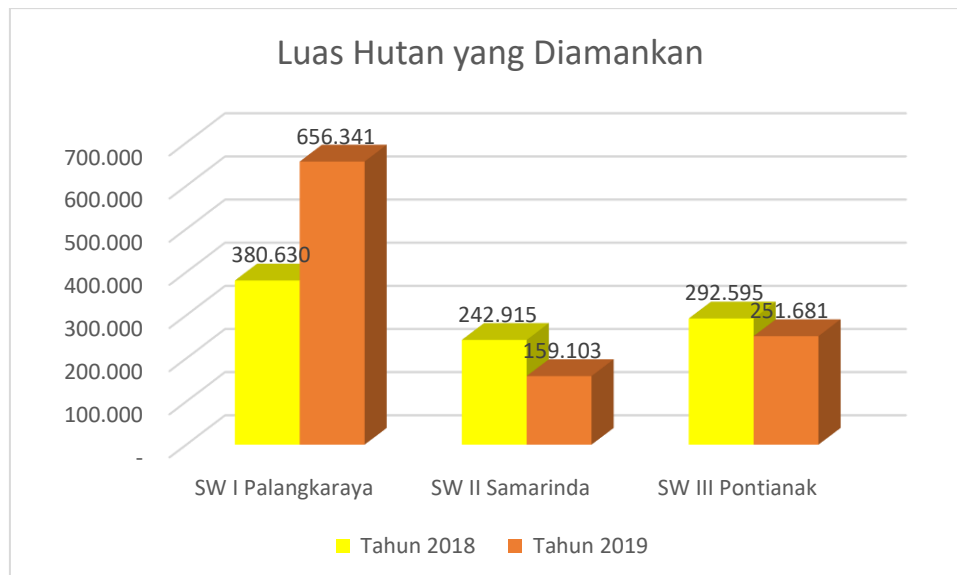
Hasil Analisis Capaian Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan berdasarkan tabel pengukuran kinerja kegiatan dari 4 (empat) Sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Tabel pengukuran kinerja 100%, penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Layanan Perkantoran Target 1 Layanan terlaksana 1 Layanan atau 100%. Hal ini dikarenakan kegiatan yaitu:
 - a. Pembayaran Gaji terlaksana 12 Bulan
 - b. Operasional Perkantoran dan Pimpinan terlaksana 12 Bulan
2. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan berdasarkan tabel pengukuran kinerja rata-rata nilai 168,57% penilaian capaian kinerja **sangat berhasil** hal ini dikarenakan sasaran tersebut memiliki 2 (dua) indikator Kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi dengan target 450.000 Hektar terealisasi 1.067.124,83 Hektar atau 237,14%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Seksi Wilayah I Palangkaraya Seluas 656.340,53 Hektar, melalui kegiatan Operasi Penegakan Hukum LHK sebanyak 10 Kali, melalui Kegiatan Operasi Fungsional 15 Kali kegiatan, Operasi Peredaran Hasil Hutan sebanyak 4 Kali dan Kegiatan Pengumpulan data dan Informasi Pencegahan dan Pengamanan hutan sebanyak 11 Kali.
- Seksi Wilayah II Samarinda Seluas 159.102,99 Hektar, melalui kegiatan Operasi Penegakan Hukum LHK sebanyak 8 Kali, melalui Kegiatan Operasi Fungsional 22 Kali kegiatan, Operasi Peredaran Hasil Hutan sebanyak 1 Kali dan Kegiatan Operasi Gabungan sebanyak 1 Kali serta Kegiatan Pengumpulan data dan Informasi Pencegahan dan Pengamanan hutan sebanyak 15 Kali.
- Seksi Wilayah III Pontianak Seluas 251.681,31 Hektar, melalui kegiatan Operasi Penegakan Hukum LHK sebanyak 7 Kali, melalui Kegiatan Operasi Fungsional 16 Kali kegiatan, Operasi Peredaran Hasil Hutan sebanyak 3 Kali dan Kegiatan Operasi Gabungan sebanyak 1 Kali serta Kegiatan Pengumpulan data dan Informasi Pencegahan dan Pengamanan hutan sebanyak 8 Kali.

Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan secara detil terdapat dalam lampiran. Adapun capaian kinerja Tahun 2018 Luas Hutan yang diamankan sejumlah 916.140 Hektar.

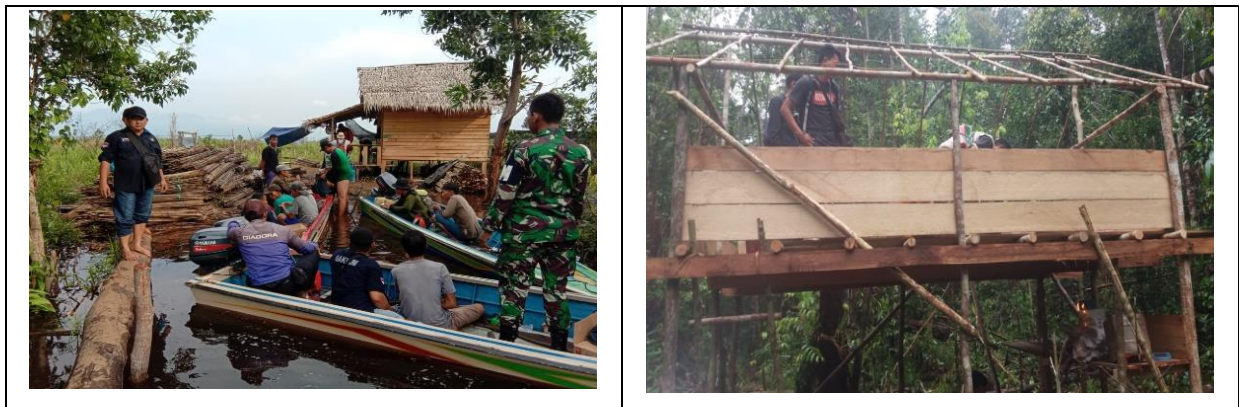
Perbandingan Tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 9. Grafik Perbandingan Luas Hutan yang diamankan Tahun 2018 dan 2019



Gambar 10. Kegiatan Puldasi Terkait Karhutla di Kabupaten Sintang oleh Seksi Wilayah III Pontianak



Gambar 11. Operasi Fungsional Pengamanan Hutan di Kawasan TN Gunung Palung Kayong Utara oleh Seksi Wilayah III Pontianak

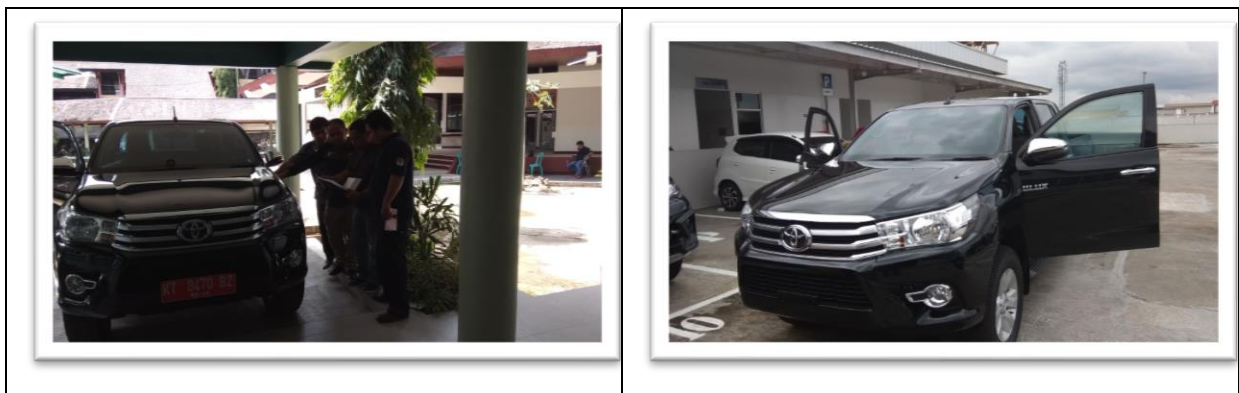


Gambar 12. Operasi Gabungan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Perbatasan Negara Indonesia - Malaysia oleh Seksi Wilayah III Pontianak



Gambar 13. Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di Kabupaten Kutai Kartanegara

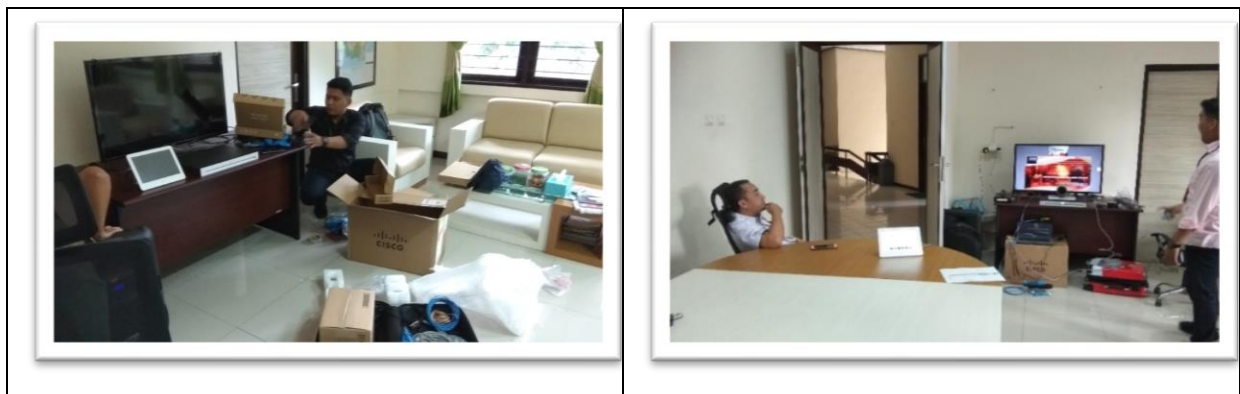
- b. Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum dengan target 1 lokasi terealisasi 1 lokasi atau 100%. Target tersebut tercapai melalui kegiatan sebagai berikut:
- ~ Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan.
 - ~ Pengadaan kendaraan roda 4 dan roda 2 fungsional pengamanan.
 - ~ Pembuatan gedung dan bangunan.
 - ~ Renovasi fisik gedung dan bangunan.



Gambar 14. Pengadaan Kendaraan Roda 4 Intelijen



Gambar 15. Pengadaan Kendaraan Roda 2 Intelijen



Gambar 16. Pengadaan Teleconferece



Gambar 17. Pengadaan HT



Gambar 18. Pembuatan Parkir Kendaraan Seksi Wilayah III



Gambar 19. Renovasi Aula Tahap II dan Atap Aula



Gambar 20. Renovasi Mess dan Atap Mess

3. Sasaran Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi berdasarkan tabel pengukuran kinerja capaian nilai kinerja 166,44% dengan penilaian kinerja **Sangat Berhasil**. Hal ini dikarenakan sasaran tersebut memiliki 3 (Tiga) indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah pengaduan yang masuk tertangani dengan target 150 Pengaduan terealisasi sebanyak 213 Pengaduan yang ditangani atau 142%. Daftar Pengaduan yang ditangani yaitu sebagai berikut.

Tabel 11. Tipologi Pengaduan yang Masuk

No	Sektor	Jumlah
1	Lingkungan Hidup	104
2	Kehutanan	88
3	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	21
Jumlah		213

Tabel 12. Sumber Pengaduan yang Masuk

No	Sumber Pengaduan	Jumlah
1	Langsung	39
2	Surat	56
3	SMS	5
4	Email	
5	Telepon	1
6	Komnas HAM	
7	Website	11
8	Aplikasi (GAKKUM, LAPOR)	3
9	Lain-Lain (WA, Berita)	98
10	Sumber tidak terdata	
Jumlah		213

Adapun capaian indikator kinerja Tahun 2018 jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sejumlah 119 Pengaduan sehingga mengalami peningkatan sebesar 78,99% pada Tahun 2019.



Gambar 21. Kegiatan Verifikasi Lapangan Tindak Lanjut Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhutla di Kawasan PT. Kebun Ganda Prima, Provinsi Kalimantan Barat



Gambar 22. Kegiatan Verifikasi Lapangan Tindak Lanjut Pengaduan Tambang Ilegal di Desa Pampang, Samarinda Kalimantan Timur

- b. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan dengan target 75 Izin yang diawasi terealisasi sebanyak 193 izin usaha yang diawasi atau 257,33% dengan hasil 15 izin yang ditaati dan 178 izin yang tidak taat.

Tabel 13. Tipologi Sektor Pengawasan

No	Sektor Industri	Jumlah
1	Industri, Prasarana dan Jasa	27
2	Kehutanan	-
3	Sumber Daya Alam	166
Jumlah		193

Tabel 14. Rekap Ketaatan Izin

No	Sektor Industri	Hasil Pengawasan			
		Taat	Tidak Taat	Tutup	Total
1	Industri, Prasarana dan Jasa		27		27
2	Kehutanan				-
3	Sumber Daya Alam	15	151		166
Total Izin		15	178		193



Gambar 23. Kegiatan Pengawasan di PT Lanna Harita Indonesia di Kutai Kartanegara

- c. Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang memenuhi standar minimum dengan target 1 lokasi terealisasi 1 lokasi atau 100%. Hal ini terlaksana melalui pengadaan sarana prasarana PPLH yaitu peralatan dan mesin (laptop, portable multiparameter, GPS, dan lain-lain) serta barang persediaan untuk kegiatan pengaduan/ pengawasan (sepatu safety, masker respirator, kacamata, sarung tangan, coverall, dan lain-lain).



Gambar 24. Pengadaan Laptop dan Portable Multiparameter

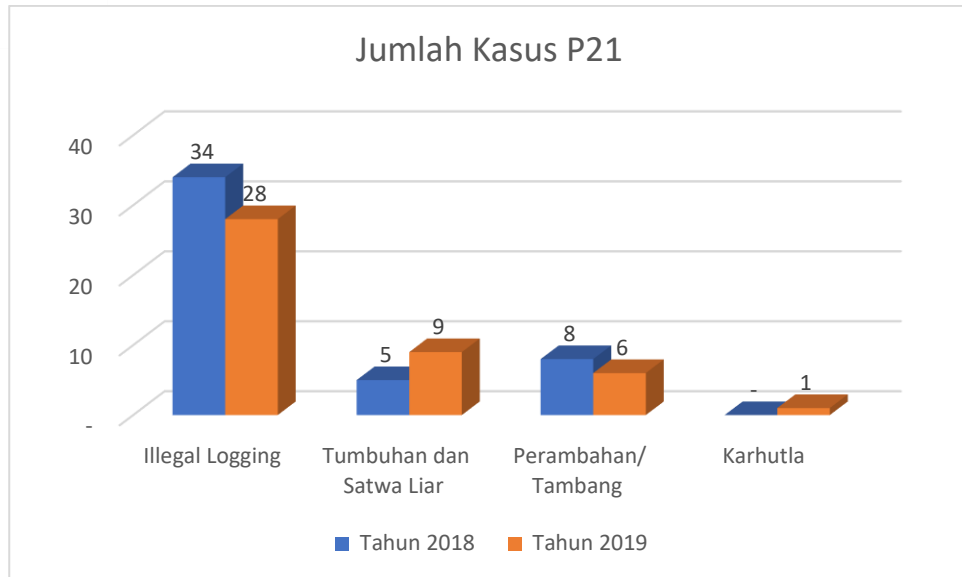


Gambar 25. Pengadaan Perlengkapan Lapangan Kegiatan PFSA

4. Sasaran kegiatan Terlaksananya Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan capaian nilai kinerja 116,67% dengan Penilaian Kinerja **Sangat Berhasil**. Hal ini dikarenakan sasaran tersebut memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut.
 - a. Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) dengan target 33 Kasus terealisasi sebanyak 44 Kasus atau 133,33%. Adapun Jumlah Kasus P.21 di masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:
 - Seksi Wilayah I Palangkaraya sebanyak 11 Kasus yang sudah P.21.
 - Seksi Wilayah II Samarinda sebanyak 14 Kasus yang sudah P.21.
 - Seksi wilayah III sebanyak 19 Kasus yang sudah P.21.

Sedangkan capaian Tahun 2018 Penyelesaian Tindak Pidana sampai P21 sebanyak 47 Kasus yang ditangani sampai dengan P.21 (berkas dinyatakan lengkap).

Adapun grafik perbandingan penyelesaian kasus Tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:



Gambar 26. Jumlah Kasus P21 Tahun 2018 dan 2019 berdasarkan Tipologi Kasus

- b. Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK yang memenuhi standar minimum dengan target 1 lokasi terealisasi 1 lokasi melalui kegiatan sebagai berikut:
- Pengadaan sarana dan prasarana penyidik.
 - Pengadaan kendaraan roda 4 mobilisasi personil.



Gambar 27. Pengadaan Kendaraan Roda 4 Mobilisasi Personil

D. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan pada Tahun Anggaran 2019 dialokasikan anggaran sebesar Rp.60.440.151.000,-. Pada tanggal 14 Mei 2019 terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,- untuk penyelamatan SDA di Tanah Papua sehingga anggaran menjadi sebesar Rp58.440.151.000,-. Pada tanggal 5 September

2019 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp1.000.000.000,- untuk belanja pegawai sehingga anggaran menjadi sebesar Rp59.440.151.000,-. Pada tanggal 22 November 2019 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp446.347.000,- untuk belanja pegawai sehingga anggaran menjadi sebesar Rp59.886.498.000,-. Adapun uraian jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 15. Realisasi Anggaran 2019 Berdasarkan Jenis Belanja

URAIAN	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI
Belanja Pegawai	16.814.330.000	18.896.724.000	18.778.653.453
Belanja Barang	30.624.239.000	27.820.495.000	27.671.950.977
Belanja Modal	13.001.582.000	13.169.279.000	13.169.038.621
Jumlah Belanja	60.440.151.000	59.886.498.000	59.619.643.051

Berdasarkan tabel tersebut realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp59.619.643.051,- atau 99,55% dari Pagu anggaran sebesar Rp59.886.498.000,-. Adapun laporan kemajuan pelaksanaan anggaran per 31 Desember 2019 per output kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Anggaran Per Output Kegiatan

Kode Kegiatan	Program/Jenis Kegiatan	PAGU SETELAH REVISI	Realisasi	
			Rp	%
5427 970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	900.000.000	897.672.285	99,74
5427 994	Layanan Perkantoran	21.922.545.000	21.789.782.667	99,39
5428 001	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	9.875.103.000	9.839.258.629	99,64
5428 004	Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum	10.507.487.000	10.475.625.905	99,70

Kode Kegiatan	Program/Jenis Kegiatan	PAGU SETELAH REVISI	Realisasi	
			Rp	%
5430 001	Pengaduan yang masuk tertangani	2.856.504.000	2.838.872.144	99,38
5430 002	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	1.308.691.000	1.306.096.731	99,80
5430 005	Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang memenuhi standar minimum	718.068.000	717.071.000	99,86
5431 001	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	9.322.146.000	9.279.416.000	99,54
5431 006	Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK yang memenuhi standar minimum	2.475.954.000	2.475.847.600	100
	TOTAL	59.886.498.000	59.619.643.051	99,55

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi terhadap seluruh Sasaran dan Kinerja Kegiatan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Tabel pengukuran kinerja 100%, penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**.
2. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan berdasarkan tabel pengukuran kinerja rata-rata nilai 168,57% penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**.
3. Sasaran Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi berdasarkan tabel pengukuran kinerja capaian nilai kinerja 166,44% dengan penilaian kinerja **Sangat Berhasil**.
4. Sasaran kegiatan Terlaksananya Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan capaian nilai kinerja 116,67% dengan Penilaian Kinerja **Sangat Berhasil**.
5. Realisasi Penyerapan Anggaran BPPHLHK Wil.Kalimantan realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp59.619.643.051,- atau 99,55% dari Pagu anggaran sebesar Rp59.886.498.000,-.

B. REKOMENDASI

1. Peningkatan Kapasitas SDM serta sarana dan prasana di semua bidang mutlak diperlukan agar peningkatan kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan dapat lebih optimal.
2. Perlu adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk dapat lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha/atau kegiatan terkait ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH.
3. Koordinasi dan kerjasama terhadap para Pemangku Kawasan dan para penegak Hukum lainnya perlu ditingkatkan sehingga tujuan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kalimantan dapat tercapai lebih baik lagi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Subhan, S.Hut., M.Si

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPHLHK Kalimantan,

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Subhan, S.Hut., M.Si
NIP 19730320 199903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	450.000 Hektar
		Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi
2	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	100% dari Pengaduan yang Masuk (150 Pengaduan)
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	75 Izin
		Sarana Prasarana Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi
3	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	33 Kasus P-21
		Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK yang memenuhi standar minimum	1 Lokasi
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Pencegahan dan Pengamanan Hutan; | Rp. 20.000.000.000 |
| 2. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi; | Rp. 5.650.000.000 |
| 3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. | Rp. 14.050.000.000 |
| 4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rp. 20.740.151.000 |

Total Anggaran

Rp. 60.440.151.000

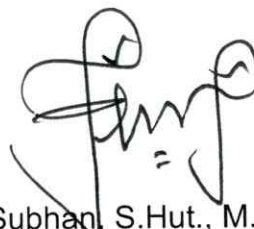
Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal Penegakan Hukum
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pihak Pertama,
 Kepala Balai PPHLHK
 Kalimantan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
 NIP 19660711 199203 1 018



Subhan S.Hut., M.Si
 NIP 19730320 199903 1 004

**REKAPITULASI KEGIATAN
OPERASI PENEGAKAN HUKUM DAN OPERASI FUNSIONAL
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
TAHUN 2019**

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerawanan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SEKSI WILAYAH I PALANGKARAYA													
1	Operasi Fungsional Penegakan Hukum di Taman Nasional Tanjung Puting dan sekitarnya Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	Seksi Wilayah I Palangka Raya	KPA Wilayah SPTN Wilayah I Pembuang Hulu Taman Nasional Tanjung Puting	Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tanjung Puting	16 s.d 25 Januari 2019	Perambahan Kawasan Taman Nasional	1.130,00	2°40'17,5" S 112°5'19,59" E 40' 21,61" 112° 5' 11,5" E	- Melakukan koordinasi dengan kepala SPTN wilayah I Pembuang Hulu. - Patroli darat dilakukan lebih intensif selama operasi. - Tidak ditemukan pelaku penanaman lahan sawit di dalam kawasan. - Tidak ditemukan pelaku penambangan ilegal di dalam kawasan.		
2	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan di Cagar Alam Selat Laut dan sekitarnya, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Kawasan Cagar Alam Selat Laut	Kawasan Suaka Alam (KSA)	23 Januari s.d 1 Februari 2019	Perambahan Kawasan Cagar Alam Selat Laut	12,00	3°15'38,1" S 116°05'36,1" E 3°15'33,8" S 116°05'42,3" E 00°14'52,8" S 116°06'56,8" E	- Telah melakukan koordinasi dengan stakeholders di sekitar kawasan - Telah memberikan penyuluhan terhadap masyarakat Desa Tarjun dan Desa Langadai tentang manfaat CA Selat Laut. - Terdapat tambak-tambak masyarakat yang masuk kedalam kawasan - Terdapat perjanjian kerjasama antara BKSDA kalsel dengan PT.Pelayaran Raya Katulistiwa.		
3	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan di Taman Nasional Sebangau, SPTN Wilayah I Palangka Raya dan sekitarnya, Kotamadya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Kawasan Taman Nasional Sebangau	Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Sebangau	23 Januari s.d 1 Februari 2019	Illegal logging di Kawasan Taman Nasional Sebangau	10,00	S 2° 02' 45" E 113° 45' 31"	- Tim melalui jalan Tjilik Riwt Km. 44 masuk menelusuri jalan timbunan sejauh 4 sampai dengan 6 km menuju ke dalam Kawasan Taman Nasional Sebangau yang berbatasan dengan Kelurahan Habaring Hurung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya. - Patroli darat dilakukan lebih intensif selama operasi. - Tidak ditemukan tidak pidana Illegal Logging di dalam kawasan. - Pada jalan Tjilik Riwt Km. 23 terdapat parit yang di tabat masyarakat dan jalan masuk ke arah kawasan Taman Nasional Sebangau terdapat pondok masyarakat.		
4	Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Kapuas dan sekitarnya	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Desa Batapah Kec. Timpah Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah	Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Pelestarian Alam	6 s.d 15 Februari 2019	Illegal Logging	8,00	S 01°39' 54,0" E 114°34' 46,8"	- Tim menemukan truk dengan nomor polisi KH 8313 DF mengangkut kayu olahan di Desa Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas pada ruas jalan menuju Desa Batapah pada posisi koordinat S 01°39' 54,0" dan E 114°34' 46,8" yang tidak dilengkapi dokumen dari pejabat yang berwenang. - Selanjutnya tim mengamankan truk dengan nomor polisi KH 8313 DF mengangkut kayu olahan dan Erwin Wijaya selaku sopir truk tersebut. - Tim melakukan pemindahan barang bukti berupa truk dengan nomor polisi KH 8313 DF beserta kayunya sebanyak kurang lebih 9 m3 dan Erwin Wijaya selaku sopir truk tersebut menuju Kantor Seksi Wilayah I Palangka Raya (Mako SPORC) guna proses penyelidikan lebih lanjut.		
5	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan di SM Pelahari dan sekitarnya, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan Tengah	Kab. Tanah Laut	Seksi Wilayah I Palangka Raya	SM Pelahari Tanah Laut (Wilayah Kecamatan Jorong dan Kecamatan Panyipatan Kab. Tanah Laut)	Kawasan Suaka Alam (KSA)	6 s.d 15 Februari 2019	Illegal Logging dan pemukiman ilegal di dalam Kawasan SM Pelahari	3.500,00	114°41'27,80" - 114°55'51,53" Bujur Timur dan 3°59'46,93" - 4°10'33,90" Lintang Selatan	-Tim melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Pelahari terkait kegiatan Operasi Fungsional Penegakan Hukum dilakukan dengan persuasive (pembinaan dan penyuluhan) - Tim telah memberikan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar kawasan SM Pelahari agar tidak melakukan lagi kegiatan pembalakan liar dan perusakan hutan lainnya serta mengajak untuk menjaga kawasan SM Pelahari. -Tim melakukan operasi di dalam kawasan SM Pelahari dengan melakukan patroli menuju daerah Sungai Swarangan dan tidak ditemukan adanya gangguan keamanan hutan. Selanjutnya tim melakukan kepada masyarakat sekitar untuk tidak menangkap ikan di dalam kawasan SM Pelahari. -Tim melakukan operasi di dalam kawasan SM Pelahari dengan melakukan patroli ke daerah sungai Alur dan tidak ditemukan adanya gangguan keamanan hutan. -Tim melakukan koordinasi dengan kepala resort SM Pelahari di Kecamatan Jorong. Dari hasil koordinasi diperoleh informasi bahwa areal sungai Swarangan dan Sungai Alur sangat minim terdapat gangguan keamanan hutan.		
6	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan di TWA Tanjung Keluang dan sekitarnya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Wilayah Taman Wisata Alam Tanjung Keluang	Cagar Alam / Taman Wisata Alam	6 s.d 15 Februari 2019	Pencurian telur peny. penambangan pasir ilegal dan menebang pohon yang terdapat madu lancing hitam.	2.558,00	X. 2939112 Y. 111686657 dan X. 2938514 Y. 111686059	- Telah melakukan koordinasi dengan stakeholders di sekitar kawasan. - Tim melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat desa kubu untuk turut serta menjaga kelestarian kawasan TWA TanjungKeluang. - Selama melakukan kegiatan Operasi di TWA Tanjung Keluang tidak ditemukan kegiatan penambangan pasir pua, penebangan pohon oleh masyarakat pencari madu dan tidak ditemukan adanya peny. yang bertelur sehinggaTim tidak menemukan adanya pelanggaran hukum di bidang kehutanan.		
7	Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau dan sekitarnya, Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Wilayah Desa Bukit Rawi dan sekitarnya	Hutan Produksi (HP)	19 s.d 28 Februari 2019	Illegal Logging	11.500,00	S 02° 05' 36,1" E 113° 57' 04,7"	- Di sekitar jalan Palangka Raya – Bukit Rawi Tim menghentikan sebuah Truk yang mengangkut kayu, sopir Truk tersebut yaitu Sdr. MANSYAH Alian ANJU tidak dapat menunjukkan dokumen berupa surat keterangan sahny hasil hutan yang seharusnya menyertai pengangkutan kayu tersebut. - Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut Tim mengamankan Sdr. MANSYAH Alias ANJUL dan barang bukti berupa kayu olahan dan Truk dengan Nomor Polisi DA 9039 MO ke markas komando SPORC untuk diserahkan kepada PPNs SPORC Brigade Kalawet		

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerawanan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau dan sekitarnya, Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Wilayah Desa Bukit Liti	Hutan Produksi (HP)	6 s.d 15 Maret 2019	Illegal Logging	12.500,00	S 1° 58' 18.57" E 113° 57' 5.26"	-Tim telah mengamankan pelaku (tersangka an. IRWAN Bin (Alm) H. MANSYUR dan barang bukti 1 (satu) unit Truk KH 8058 AN yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan tersangka an. IRWAN Bin (Alm) H. MANSYUR, adapun barang bukti yang diamankan berupa : 1 (satu) buah Truk Nopol KH 8058 AN Kabin Warna Kuning, Bak Warna Kuning, Merek Mitsubishi Type Cold Diesel FE74S (4x2), Kayu olahan ± 7 M ³ , 1 (satu) buah STNK Truk Nopol KH 8058 AN dengan nomor 08388326 dan 1 (satu) buah kunci kontak Truk Nopol KH 8058 AN. -Tim melakukan pengamanan terhadap pelaku dan barang bukti kemudian dibawa ke Kantor SPORC di Palangka Raya untuk diperiksa kemudian diserahkan kepada Penyidik SPORC guna kepentingan proses hukum.		
9	Operasi Fungsional Penegakan Hukum di Kabupaten Gunung Mas dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Wilayah KPHP Gunung Mas, Desa Dahyan Tambuk, Desa Telok Nyatu, Desa Sel. Hanyo, Desa Rabambang, Desa Tangki Dahyan dan Desa Tewah.	Hutan Produksi (HP)	19 s.d 28 Februari 2019	Illegal Logging	13.500,00	S 1° 17' 13.2" E 113° 55' 40.7"; S 1° 9' 54.0" E 113° 53' 41.9"; S 1° 5' 13.2" E 113° 53' 41.9"; S 1° 13' 11.9" E 113° 28' 20.3" dan S 1° 16' 58.7" E 113° 24' 32.4"	- Hasil pemeriksaan Tim terhadap kendaraan truck yang melalui jalan dari arah wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Gunung Mas yang diduga mengangkut kayu illegal, tidak ditemukan adanya kegiatan tipihut. -Tim tidak menemukan tindak pidana kehutanan di Desa Dahyan Tambuk, Desa Telok Nyatu dan daerah yang rawan terjadinya kegiatan illegal logging wilayah Kabupaten Gunung Mas.		
10	Operasi Fungsional Penegakan Hukum di Cagar Alam Pararawin dan sekitarnya Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Cagar Alam Pararawin I dan II	Kawan Suaka Alam (KSA)	19 s.d 28 Februari 2019	Perambahan/ Penyerobotan Kawasan	15.000,00		-Tim melakukan koordinasi dengan Kepala SKW III Muara Teweh. -Tim melakukan koordinasi dengan kepala Resort Ca Pararawin I dan II untuk melakukan kegiatan operasi pengamanan bersama-sama, tim tidak menemukan tindak pidana dibidang kehutanan. -Tidak ditemukan kegiatan illegal logging di sekitar kawasan hutan CA, Pararawin II. -Selanjutnya tim melakukan kegiatan operasi pada trayek C4, C5 dan C6 dan sekitarnya banyak dijumpai di luar areal CA, Pararawin I dan II yang berdekatan dengan pertambangan batu bara sehingga kawasan Cagar Alam sehingga dimungkinkan terjadi perambahan kawasan karena di takutkan akan terjadi perluasan areal pertambangan. -Tim melakukan pengawasan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan menurut informasi warga setempat berburu binatang di dalam kawasan CA, Pararawin I dan II dan sudah menjadi pekerjaan rutin warga pedalaman Desa Pendreh dan Desa Lemo Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. -Tim melakukan penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan di Desa Pandreh dan Desa Lemo yang berbatasan langsung dengan kawasan CA, Pararawin I dan II. -Tim melakukan pengecekan Tapal batas kawasan CA, Pararawin I dan II dalam pengecekan tapal batas tim tidak menemukan tindak pidana di bidang kehutanan		
11	Operasi Fungsional Penegakan Hukum di Tahura Sultan Adam dan sekitarnya, Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kab. Banjarbaru dan Kab. Tanah Laut	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Taman Hutan Rakyat Sultan Adam	Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	21 s.d 30 Maret 2019	Perambahan/ Penyerobotan Kawasan	11.200,00		-Tim melakukan koordinasi dengan kepala Tata Usaha Tahura Sultan Adam, yaitu Bpk. Paisal Riza dan Kepala Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan yaitu Bpk. Martison. -Di Pulau Bekantan terdapat Lahan kelompok masyarakat yang didalamnya lahan karet yang sudah dapat disadap oleh masyarakat, adapun Luas areal tersebut ± 27 Ha dan areal tersebut sudah dikelola oleh Tahura Sultan Adam untuk tempat Penangkaran Rusa Sambar terdapat 1 (satu) Pasang dan Anak-anak Bekantan Hasil sitaan Bidang KSDAE Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan 5 (lima) ekor untuk Pelepas liaran Bekantan selanjutnya. Berada dititik koordinat S = 03°31'35,9" dan E = 115°02'59,0" dan S = 03°31'49,3" dan E = 115°03'12,8" -Pulau Rusa dengan luas areal ± 4 Ha terdapat Penangkaran Rusa Totor yang didatangkan dari Istana Bogor sebanyak 7 (tujuh) Ekor dan terdapat 4 (empat) Ekor owa-owa hasil sitaan Bidang KSDAE Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan dan 3 (tiga) Ekor Ayam Mutiara, sedangkan hutan Vegetasi terdapat Pohon Pinus, Sungkai dan Jati, berada di titik koordinat S = 03°32'04,2" dan E = 115°01'55,2" -Tim bersama dengan kepala Seksi Perencanaan dan Kepala Resort Tahura Sultan Adam melakukan patroli atau pemeriksaan lapangan di daerah Kecamatan Tanah Laut yang merupakan wilayah Tahura Sultan Adam Pada titik koordinat S = 03°40'13,2" dan E = 114°55'40,8" ditemukan rumah warga dan lahan masyarakat dan Pada titik koordinat S = 03°39'06,4" dan E = 114°56'02,2" ditemukan kebun kelapa sawit, yang berada dalam kawasan Tahura Sultan Adam, adapun lahan tersebut dikuasai oleh warga setempat sebelum Tahura Sultan Adam ditetapkan, Permasalahan tersebut telah diketahui dan didata oleh Pihak Pengelola Tahura Sultan adam dan sudah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan.		
12	Operasi Peredaran Hasil Hutan di wilayah kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Desa Patas I Kec. Gunung Bintang Awai	Hutan Produksi (HP)	8 s/d 17 April 2019	Illegal Logging	10.200,00	S 1° 34' 24" E 115° 9' 25"	Tim mengamankan truck dengan nomor polisi DH 8656 BO mengangkut kayu olahan di Desa Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan pada ruas Jalan Negara Ampah – Muara Teweh tanpa dilengkapi nota angkut yang di syah dari pejabat yang berwenang, dengan volume kayu ± 10 m ³ dan Sdr. Fahmi Arif bin MUARA Hatta selaku sopir truck. Tim melakukan pemindahan barang bukti berupa truck dengan nomor polisi DA 8656 BO beserta kayunya sebanyak kurang lebih ± 10 m ³ dan Sdr. Fahmi Arif bin MUARA Hatta selaku sopir truck tersebut menuju Kantor Seksi Wilayah I Palangka Raya (Mako SPORC) guna proses penyidikan lebih lanjut.		
13	Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di wilayah Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Desa Patas I, Kecamatan Gunung Bintang Awai Desa Muara Singan, Kecamatan Bintang Awai	Hutan Produksi (HP)	8 s/d 17 April 2019	Illegal logging	5.800,00	S 103047" dan E 1150940".	Tim Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK telah berhasil mengamankan sopir truk an. FAHMI ARIF Bin M. HATTI A mengangkut kayu olahan dan truk dengan nomor polisi DA 8656 BO beserta karyawan Bansaw IPHHK Hasrat Bersama an. JUNAI DI Bin (Alm) H. HASANAL BASRI untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait legalitas kayu dan dokumen.		

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerawanan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Operasi Fungsional Penegakan Hukum di Taman Nasional Sebangau dan sekitarnya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	Seksi Wilayah I Palangka Raya	wilayah SPTN II TN. Sebangau Resort Mangkok	Kawasan Pelestarian Alam	23 april s/d 3 Mei 2019	Illegal Logging	8.000,00	lat -2,57914, long 114,03867	Tim menemukan dua unit klotok pengangkut kayu galam yang berada di dalam kawasan TN. Sebangau, tidak ditemukan pelaku. Tim bersama-sama dengan personil Balai TN. Sebangau melakukan pemusatan kayu galam tersebut. Tim mengamankan dua unit klotok beserta mesin dan sampel kayu galam ke resort Kereng bangkirai. Tim melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kampung Sebangau Sanitra Indah, kampung Rasau yang berada di dalam kawasan TN Sebangau.		
15	Operasi Peredaran Hasil Hutan di Kawasan SM. Lamandau Kab. Kotawaringin Barat. Prov. Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Pos Mangkung, Pos 25, Pos Rasau, Camp Rasak, Pos S. Buluh, Pos Taringin Lama	Kawasan Suaka Alam (KSA)	15 s/d 24 Mei 2019	Illegal Logging	48,50	S 02° 38.578' E 111° 23. 850' S 02° 38.347' E 111° 23. 738'	kawasan SM. Lamandau yang berada dan berdekatan dengan Desa Babual Baboti sekitar Camp Rasak yang merupakan lokasi pelepaslaran Orangutan dan satwa liar lainnya, masih rawan gangguan kawasan khususnya dari kegiatan penebangan pohon (illegal logging) terbukti ditemukannya bekas kegiatan penebangan pohon, pondok kerja, dan pengangkutan kayu keluar kawasan menggunakan gerobak menuju Desa Babual Baboti di posisi titik koordinat TKP I (S 02° 38.578' E 111° 23. 850') dan TKP II (S 02° 38.347' E 111° 23. 738'). Serta adanya klaim warga Desa Babual Baboti yang mengakui bahwa sebagian kawasan SM. Lamandau adalah miliknya yang berasal dari nenek moyangnya. Dengan bukti adanya tanam tumbuh karet, Cempedak, Mangga, Rambutan, dan tanaman kebun yang sudah besar. Tim telah memberikan penyuluhan terkait pentingnya keberadaan dan fungsinya SM. Lamandau bagi masyarakat sekitar (warga Desa Babual Baboti) dan tim juga memberikan peringatan kepada warga supaya jangan merusak keutuhan kawasan SM. Lamandau, apabila ada warga yang ketahuan melakukan perusakan kawasan maka akan berhadapan dengan hukum dengan konsekuensi menjalani pidana penjara.		
16	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi di wilayah Kab. Katingan dan sekitarnya Prov. Kalimantan Tengah.	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Desa Telangkah Kec Katingan Hilir, Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir	Areal Penggunaan Lainnya (APL)	21 s/d 30 Juni 2019	Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar		S 02° 38.578' E 111° 23. 850' S 02° 38.347' E 111° 23. 738'	Tim mengamankan sdr. M. Ainul Yaqin beserta barang bukti sebanyak 62 ekor Burung Tioang Emas/Beo, 45 ekor burung Serindit Melayu dan 6 buah sangkar/kandang burung di jalan Tjilik Riwt Km. 14,5 Desa Telangkah, Kec. Katingan Hilir. Tim mengamankan sdr. Suryadi alias Yadi beserta barang bukti sebanyak 12 ekor Burung Cica Daun Besar, 2 buah kptang kandang dari kardus dan 1 buah sangkar burung di Jalan Baun Bangu, Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir. Tim mengamankan dan membawa tersangka serta barang bukti menuju Mako SPORC Seksi Wilayah I Palangka Raya.		
17	operasi fungsional peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar di Wilayah Kota Palangka Raya dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Kel. Langkai, Kec. Phandut, Kota Palangka Raya	Areal Penggunaan Lainnya (APL)	1 s/d 10 Juli 2019	Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar		S 01° 14'59.6" E 113° 43'56.9"	Tanggal 1 Juli 2019, Koordinasi dengan Kepala Seksi BKSDA Kalimantan Tengah, yaitu terkait informasi terbaru terhadap kegiatan perdagangan satwa dilindungi yang ada di Kota Palangka Raya. Tanggal 1 Juli 2019, pada saat tim melakukan operasi, salah satu anggota tim mendapatkan informasi terkait adanya pengiriman satwa yang diduga dilindungi jenis burung dari arah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah menuju Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan menumpang transportasi Bus. Tim melakukan penghadangan perihal informasi tersebut, tim mendapati seseorang yang lagi sedang menurunkan barang jenis kotak kardus dan langsung hendak menaiki transportasi travel, tim kemudian langsung mendatangi orang tersebut dan menanyakan isi kardus-kardus tersebut, kemudian didapati satwa burung jenis Cucu Daun Besar dan Jenis Murai Batu, tim langsung mengamankan orang tersebut beserta barang bukti ke Mako SPORC Brig. Kelawit Kalimantan Tengah. Tanggal 2 s/d 10 Juli 2019, Tim melanjutkan Operasi terkait hasil pengembangan dari informasi tersangka terdahulu yang sudah diamankan serta melakukan operasi sesuai dengan rencana target sasaran yang sudah di susun atau yang sudah direncanakan. Tim tidak menemukan atau mendapati satwa yang dilindungi berdasarkan Permen LHK No. P. 108 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi.		
18	Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum di wilayah Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Desa Karya Bersama, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur	Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lainnya (APL)	1 s/d 10 Agustus 2019	Illegal Logging	10.000,00	S 01°57'04.6" E 112°43'56.9"	Tim Operasi pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan peredaran hasil hutan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saudara Syahrimal selaku pengemudi 1 (satu) unit truk yang sedang mengangkut kayu olahan jenis ulin tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu sebanyak ± 9,5 m3		

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerawanan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Operasi Pengamanan dan Penegakkan Hukum di wilayah Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Desa Karya Berama, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	Hutan Produksi (HP) dan Areal Penggunaan Lainnya (APL)	1 s/d 10 Agustus 2019	Illegal Logging	115,03	S 01°55'29,7" E 112°42'03,9"	<p>1. Tim melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) buah Damptruk dengan Nomor Polisi KH 8330 LN, yang sedang mengangkut kayu olahan dari jenis Ulin dan Meranti yang tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Dengan posisi berada antara jalan Parenggean - Sangai Km. 18 Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada titik koordinat S : 01°55'29,7" dan E : 112°42'03,9".</p> <p>2. Terhadap Damptruk No Pol KH 8330 LN yang dikemudikan oleh SIHIR WILAYANTO Bin (Alm) ISMAN sedang mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan, barang bukti dan alat angkut / kayu illegal tersebut berupa: Kayu olahan jenis Ulin sebanyak ± 95 potong, Kayu gergajian Jenis Meranti sebanyak ± 385 Keping, 1 (satu) Unit Mobil Damptruk dengan Nomor Polisi KH 8330 LN kabin warna kuning, Merek Mitsubishi, Type FE Super HDX HI GEAR Nomor Rangka MHMFE75PFJK010445 dan Nomor Mesin 4D34TS58365, 1 (satu) buah STNK Damptruk No. Pol KH 8330 LN dengan nomor 8364244, 1 (satu) buah kunci kontak Damptruk No. KH 8330 LN.</p> <p>3. Kemudian Pelaku dan Barang bukti tersebut diserahkan kepada PPNS SPORC Seksi Wilayah I Palangka Raya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut.</p>		
20	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan di Taman Wisata Alam (TWA) Tanjung Keluang Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Taman Wisata Alam (TWA) Tanjung Keluang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	Taman Wisata Alam (TWA) Tanjung Keluang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	24 September s/d 3 Oktober 2019	Illegal Logging	10	S 02°55'33,1" dan E 111°38'01,2"	<p>1. Tim melakukan patroli pengamanan melalui darat dengan berjalan kaki pada malam hari yang mengarah ke titik-titik rawan atau lokasi bertelurnya penyusut di dalam Kawasan TWA Tanjung Keluang untuk mencegah pencurian telur penyusut dan melakukan tindakan hukum apabila ditemukan kegiatan pencurian telur penyusut. Tim tidak menemukan adanya pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan dan lingkungan hidup.</p> <p>2. Tim melakukan patroli pengamanan melalui jalur air dengan menggunakan alat transportasi air berupa klotok dan speed boat menuju titik rawan penambangan liar pasir puya di sekitar pantai di dalam kawasan TWA, Tanjung Keluang, Tim memberikan penyuluhan terhadap penambang pasir yang dijumpai untuk tidak melakukan penambangan pasir pada Kawasan TWA Tanjung Keluang.</p> <p>3. Tim melakukan patroli pengamanan melalui jalur darat pada siang hari mengarah ke areal berhutan di dalam kawasan TWA, Tanjung Keluang guna mencari dugaan pengambilan madu lanceng hitam oleh masyarakat Desa Kubu, pengambilan madu oleh masyarakat dilakukan dengan cara menebang pohon yang terdapat madu lanceng hitam, tim tidak menemukan adanya pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan.</p> <p>4. Tim melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat nelayan desa kubu yang ditemui saat patroli untuk tidak merusak lingkungan hidup turut serta berperan aktif menjaga kelestarian kawasan TWA Tanjung Keluang.</p> <p>5. Tim juga melakukan patroli pengamanan ke lokasi rehabilitasi Kawasan TWA, Tanjung Keluang dengan luasan 10 Ha, dengan koordinat S 02°55'33,1" dan E 111°38'01,2".</p> <p>6. Selama melakukan kegiatan operasi fungsional pengamanan hutan di TWA Tanjung Keluang tidak ditemukan kegiatan penambangan pasir puya, penambangan pohon oleh masyarakat pencari madu dan tidak ditemukan adanya penyusut yang bertelur sehingga Tim tidak menemukan adanya aktifitas pencurian telur penyusut.</p> <p>7. Luasan Kawasan TWA, Tanjung Keluang yang telah diamankan adalah seluas ± 2.527 ha.</p>		

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerawanan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan di Suaka Marga Satwa Pelahari dan Sekitarnya Wilayah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Suaka Marga Satwa Pelahari dan Sekitarnya Wilayah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	Suaka Marga Satwa Pelahari dan Sekitarnya Wilayah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan	24 September s/d 3 Oktober 2019	Illegal Logging	2.700,00	114°41'27,80" 114°55'51,53" Bujur Timur dan 3°59'46,93" - 4°10'33,90"	<p>1. Hasil koordinasi dengan stakeholders di sekitar kawasan yaitu Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Pelahari Balai KSDA Kalimantan Selatan dan Kepala Resort KSDA Kalsel Suaka Margasatwa Pelahari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diharapkan agar tindakan Operasi fungsional penegakan hukum yang dilakukan lebih bersifat persuasif (pembinaan dan penyuluhan). - Penyuluhan dan sosialisasi telah dilakukan terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Suaka Margasatwa Pelahari Seksi Konservasi Wilayah I Pelahari Balai KSDA Kalimantan Selatan tentang batas-batas Kawasan Suaka Margasatwa Pelahari. - Rata-rata pelaku pembalakan liar didalam dan di sekitar Kawasan Suaka Margasatwa Pelahari adalah pihak pendatang. - Kawasan Suaka Margasatwa Pelahari Seksi Konservasi Wilayah I Pelahari Balai KSDA Kalimantan Selatan secara administratif pemerintahan termasuk dalam wilayah Desa Balakan, Desa Kandangan Lama, Desa Sabuhur, Desa Jorong dan Desa Swarangan Kecamatan Jorong dan Kecamatan Panyipatan. - Kegiatan Operasi fungsional pengamanan hutan di Kawasan Suaka Margasatwa Pelahari hendaknya dilakukan dengan lebih kearah persuasif atau pembinaan. - Tim diharapkan mencermati dahulu keadaan dan kondisi lapangan / areal lokasi yang rawan kegiatan pembalakan liar didalam dan sekitar Kawasan Suaka Margasatwa Pelahari. - Tim juga diharapkan untuk mempelajari kebiasaan / culture para pembalak liar (masyarakat didalam dan sekitar Kawasan Suaka Margasatwa Pelahari), sebelum mengambil keputusan atau tindakan yang lebih jauh / represif. <p>2. Tim telah memberikan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar Kawasan Suaka Margasatwa Pelahari Seksi Wilayah I Pelahari Balai KSDA Kalimantan Selatan serta mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan lagi kegiatan pembalakan liar dan kegiatan perusakan hutan lainnya di dalam kawasan Suaka Margasatwa Pelahari. Selain itu tim juga mengajak masyarakat agar mereka mau berperan serta dalam menjaga dan mengamankan kawasan Suaka Margasatwa Pelahari.</p> <p>3. Tim melakukan operasi dengan melakukan patroli menuju daerah Sungai Swarangan yang merupakan Kawasan Suaka Margasatwa Pelahari. Adapun lokasi berupa pantai yang banyak ditumbuhi oleh tanaman kayu Galam. Tidak terdapat gangguan keamanan hutan di wilayah tersebut, kerawanan hanya berupa pencarian ikan di dalam Kawasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Swarangan yang mata pencahariannya sebagai nelayan. Tim melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar untuk tidak melakukan kegiatan menangkap ikan di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Pelahari, dan masyarakat sudah mengetahui akan hal tersebut sehingga daerah Sungai Swarangan hampir tidak terdapat gangguan keamanan hutan.</p> <p>4. Tim melakukan operasi dengan melakukan patroli ke daerah Sungai Alur yang merupakan areal Kawasan Suaka Margasatwa Pelahari. Pada daerah ini terdapat taruman kelapa sawit, dan PT. Inhutani III yang sudah tidak aktif lagi. Adapun perkebunan Kelapa Sawit berada di luar Kawasan Suaka Margasatwa Pelahari. Tidak ditemukan gangguan keamanan hutan pada daerah tersebut, terlebih lagi dikarenakan pada perkebunan Kelapa Sawit para pengelola memasang pagar untuk menutup akses jalan yang merupakan akses jalan menuju Suaka Margasatwa Pelahari, sehingga untuk masuk ke Kawasan Suaka Margasatwa Pelahari menjadi sulit.</p> <p>5. Tim melakukan koordinasi dengan Kepala Resort Suaka Margasatwa Pelahari, Balai KSDA Kalimantan Selatan di Kecamatan Jorong. Dari hasil koordinasi di dapatkan informasi bahwa areal Sungai Swarangan dan Sungai Alur sangat minim terdapat gangguan keamanan hutan dan pihak Balai KSDA Kalimantan Selatan telah melakukan kegiatan dengan masyarakat Sungai Swarangan untuk membentuk koperasi dalam pengusahaan ikan, sehingga ancaman hampir tidak terdapat pada kedua areal tersebut.</p> <p>6. Luasan Kawasan Suaka Margasatwa Pelahari yang telah diamankan sekitar ± 2.700 Ha.</p>		

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerawanan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Operasi Pengamanan dan penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Sepanjang jalan Sangai-Pelataran wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekitarnya, Provinsi Kalimantan Tengah	Taman Nasional	10 s/d 19 Oktober 2019	Illegal Logging	7.500,00	S 01°58'07,2"; E 112°44'37,8";	<p>1. Berdasarkan informasi awal dari Tim Pengumpulan data dan Informasi /Tim Intelijen Satuan Polisi Kehutanan Rodesi Cegah Seksi Wilayah I Palangka Raya bahwa di sepanjang jalan Sangai-Pelataran sering dijumpai truk-truk yang mengangkut kayu ilegal tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.</p> <p>2. Tim telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 unit truk warna kuning dengan bak tertutup terpal warna Hitam di jalan Paken Kecamatan Serenau , Kabupaten Kotawaringin Timur setelah dilakukan pemeriksaan truk tersebut sedang mengangkut tanah urug guna pembangunan rumah penduduk</p> <p>3.Tim telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 unit truk warna kuning dengan bak tertutup terpal warna biru di jalan Antang Kalang Kecamatan Antang Kalang , setelah dilakukan pemeriksaan truk tersebut sedang mengangkut Kayu .dan disertai dokumen yang syah serta tidak ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan.</p> <p>4.Tim Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Kapten Setiawan dari P.M dan Korwas Birpka I Nyoman Swarsana.S.H dan Ijda Sunyalin.S.H telah mengamankan 1 (satu) unit Dump truk yang sedang mengangkut kayu olahan Swan Timber (Kayu Gergajian Jenis Meranti jumlah total 60 (enam Puluh) Keping dengan Volume 8,7819 M 3 (Delapan Koma Tujuh Delapan satu Sembilan) dikemudian oleh Saudara Tonny Sugiantoro Alias Tony</p> <p>Ops. Gakkum Kotim Oktober 2019 9 Bin (Alm) Nyoto Wyono pada titik koordinat S 01°58'07,2"; E 112°44'37,8". Pengemudi Dump truk dan barang bukti kemudian diamankan ke kantor Seksi Wilayah I Palangka Raya. Hasil pemeriksaan awal diduga bahwa:</p> <p>a. Kayu olahan Swan Timber (Kayu Gergajian Jenis Meranti jumlah Total 60 (Enam puluh) Keping dg Volume 8,7819 M 3 (Delapan Koma Tujuh Delapan Satu Sembilan) tidak disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) .</p> <p>b. Alat angkut yang digunakan adalah Dump Truk No. Pol KH 8173 FF Kabin Warna Kuning, Dump Warna Kuning, Merek Mitsubishi Type Cold Diesel FE74 HD , Nomor Rangka MHMFE74P59K020769 Dan Nomor Mesin 4D34TE61848, satu buah Stnk Dump Truk No. Pol KH 8173 FF ,satu buah kunci kontak Dump Truk , Satu Kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor Nomor : CC.05.1.007037.</p> <p>Lokasi penangkapan Saudara Tonny Sugiantoro Alias Tony Bin (Alm) Nyoto Wyono adalah di jalan Parenggean-Sangai Km. 11, wilayah Administrasi Desa Mekar Jaya, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur.</p> <p>5. Tim melakukan periksaan terhadap 1 unit truk warna kuning dengan bak tertutup terpal warna coklat di jalan Jln H.M Arsyad Kecamatan Mentaya Hilir Selatan setelah dilakukan pemeriksaan truk tersebut sedang mengangkut Semen dan tidak ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan.</p> <p>6. Kegiatan patroli dilanjutkan menuju ke jalan Rimba , Kecamatan Parenggean Tim melakukan penytopan/membentahkan truk yang diduga mengangkut kayu ilegal, hasil pemeriksaan truk tersebut sedang mengangkut kornel/cangkrang sawi dan tidak ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan.</p> <p>7. Tim Operasi melakukan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar Kecamatan Parenggean daerah tersebut perihal terkait larangan melakukan kegiatan ilegal bidang kehutanan.</p> <p>8. Dari Traking lapangan Tim Operasi Fungsional Peredaran Hasil Hutan, perkiraan kawasan hutan yang dapat diamankan adalah seluas ± 7.500 Hektar.</p>		
23	Operasi Pengamanan dan penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan di Taman Nasional Sebangau, SPTN Wilayah III Kabupaten Katingan, provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kabupaten Katingan	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Taman Nasional Sebangau, SPTN Wilayah III Kabupaten Katingan, provinsi Kalimantan Tengah	Taman Nasional	14 s/d 23 Oktober 2019	Illegal Logging	230.500,00		<p>1. Tim telah memberikan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar Kawasan Taman Nasional Sebangau SPTN Wilayah III Kabupaten Katingan serta mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kegiatan ilegal logging dan kegiatan perusakan hutan lainnya di dalam kawasan Taman Nasional Sebangau. Selain itu tim juga mengajak masyarakat agar mereka mau berperan serta dalam menjaga dan mengamankan kawasan Taman Nasional Sebangau.</p> <p>2. Dalam melaksanakan kegiatan Operasi Pengamanan dan penegakan Hukum lingkungan Hidup dan Kehutanan di SPTN wilayah III pada Resort Baun Bango tidak ditemukan adanya kegiatan ilegal dalam kawasan.</p> <p>3. Pada wilayah Resort Muara Bulan saat dilakukan operasi ke lokasi tersebut masyarakat sekitar telah mengalami perubahan kehidupannya atau taraf hidupnya telah mulai bangkit kembali setelah beberapa tahun yang lalu daerah tersebut merupakan target operasi ilegal logging besar-besaran sehingga masyarakatnya setempat sempat mengalami kesulitan kehidupannya, untuk saat ini masyarakat setempat sudah menyadari betapa pentingnya keberadaan kawasan Taman Nasional Sebangau sebagai penyangga kehidupan bagi masyarakat luas. Hal ini berkat kepedulian para pemegang wilayah untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi pentingnya keberadaan hutan tersebut, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk melakukan usaha secara mandiri untuk tidak ketergantungan dengan wilayah TNS, sepeerti halnya berusaha membuat bangunan sarang burung walet, bercocok tanam atau berkebun dan budidaya ikan keramba</p> <p>4. Pada pelaksanaan kegiatan Operasi Pengamanan dan penegakan Hukum lingkungan Hidup dan Kehutanan di Resort Mendawai keberadaan masyarakat setempat tidak jauh berbeda dengan daerah Resort lainnya yang ada di SPTN Wilayah III Kabupaten Katingan.</p> <p>5. Dalam pelaksanaan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di wilayah SPTN Wilayah III Kabupaten Katingan tidak ditemukan adanya kegiatan tindak pidana bidang kehutanan, hal ini dikarenakan adanya aktifitas secara aktif dari pihak SPTN Sebangau untuk melakukan pendekatan dan penyuluhan / sosialisasi terhadap masyarakat disekitar kawasan berjalan dengan baik.</p>		

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerawanan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Melaksanakan kegiatan Operasi Fungsional Penegakan Hukum di TN. Sebangau, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kabupaten Pulang Pisau	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Taman Nasional Sebangau, SPTN Wilayah II Kabupaten Pulang Pisau, provinsi Kalimantan Tengah	Taman Nasional	14 s/d 23 Oktober 2019	Illegal Logging	7.500,00		1. Operasi Fungsional Pengamanan di wilayah Taman Nasional Sebangau Kabupaten Sebangau dan sekitarnya dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 23 Oktober 2019 berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.189/BPPLHK-IV-SW/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019. 2. Luas kawasan Taman Nasional Sebangau luas membentang sekitar 568.700 hektare, mengalami perubahan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor : 529/Menhut-II/2012 dengan luas menjadi 542.141 hektare. Adapun luas kawasan hutan SPTN II Pulang 174.896,7 Ha 3. Tim sebelumnya tim melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Wilayah II Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau dari hasil koordinasi tim di dampingi oleh Kepala Resort Bangah dan Resort Paduran beserta staf dari Seksi Wilayah II Pulang Pisau untuk melakukan operasi fungsional pengamanan. 4. Kawasan Taman Nasional Sebangau sangat rawan terhadap tindak pidana dibidang kehutanan kawasan ini di kelilingi oleh DAS Sebangau sehingga sangat mudah untuk melakukan pembalakan liar seperti penebangan kayu Galam, Gembor serta mencari ikan di dalam kawasan Taman Nasional Sebangau terutama di wilayah SPTN Wilayah II Pulang Pisau, kabupaten Pulang Pisau. 5. Untuk mengantisipasi kerawanan kawasan hutan Taman Nasional Sebangau tim melakukan operasi dengan cara patroli dan penjagaan di di daerah rawan terhadap pembalakan liar yang sering terjadi di wilayah desa Garong terutama di daerah kanal atau anak sungai yang aksesnya menuju Taman Nasional Sebangau, mengingat daerah tersebut banyak masyarakat yang mencari Gembor dan penebang kayu Galam.		
25	Melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan di Wilayah Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kabupaten Katingan	Seksi Wilayah I Palangka Raya	SPTN Wilayah I P. Raya Balai Taman Nasional Sebangau dengan wilayah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah	KSA/KPA/APL	21 s/d 30 Oktober 2019	Illegal Logging	157.059,00	S = 01°56'33,8" dan E = 113°35'15,6"	1. Kegiatan Operasi berjalan sesuai yang diharapkan, walau banyak pergerakan-pergerakan Tim Operasi yang diluar dugaan. Hal ini terjadi karena sikap dan watak pelaku kegiatan Illegal Logging atau peredaran kayu ilegal yang sudah terbiasa dan tidak takut terhadap keberadaan petugas. 2. Tim telah melakukan Operasi Peredaran Hasil Hutan di desa – desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Katingan. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan mobil patroli dan berjalan kaki. Tim tidak menemukan adanya tindak pidana dibidang kehutanan. 3. Tim melakukan patroli ke wilayah batas antara SPTN Wilayah I P. Raya Balai Taman Nasional Sebangau dengan wilayah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, hasil kegiatan di KM. 53 Jln. Cilik Riwit yang berdasarkan Peta Lamp. Keputusan Menhut No. SK. 529/Menhut-II/2012, tanggal 25 September 2012 ada pembuatan jalan baru, jalan baru tersebut sebagian masuk dalam wilayah TNS seksi Wilayah I Palangka Raya dan sebagian berada di wilayah Kabupaten Katingan. Pada jalan baru tersebut ditemukan adanya tumpukan kayu olahan dari jenis kayu rimba campuran dengan berbagai ukuran dengan jumlah sekitar ± 450 potong dari hasil kegiatan illegal logging disekitar wilayah jalan tersebut Pada titik koordinat S = 01°56'33,8" dan E = 113°35'15,6", dan menurut informasi yang diperoleh dari 2 orang pekerja/buruh tersebut, bahwa kayu tersebut miliknya HAJI LUAL diangkut secara estafet dengan menggunakan alat berat. Menurut informasi dari saksi bernama SURYA Bin Alm. JAKARSI dan SUPIANI Bin Alm. ABDUL RASID (pekerja/buruh) bahwa barang bukti kayu itu miliknya pekerja yang beralamat di Kasongan Lama, Kabupaten Katingan. 4. Barang Bukti (BB) berupa Kayu olahan sebanyak 450 potong dari berbagai ukuran dari jenis kayu rimba campuran dan bagian alat - alat Sirkel telah diangkut dan diamankan di mako SPORC seksi Wilayah I Palangka Raya. 5. Terhadap Saksi 2 orang/pekerja dan Barang Bukti (BB) tersebut telah diserahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai GAKKUM seksi Wilayah untuk dipenka lebih lanjut. 6. Untuk mesin Sirkel yang ada didalam hutan sudah dilepas atau dibongkar dan diangkut oleh pemiliknya yaitu H. LUAL dibawa pulang ke kasongan sehari sebelum Tim melakukan operasi pada daerah tersebut (berdasarkan keterangan 2 orang saksi / pekerja), dan bagian alat atau bagian-bagian mesin sirkel tidak sempat diangkut keburu ada Tim operasi dan barang tersebut diamankan ke mako SPORC seksi I Palangka Raya. 7. Untuk BB alat berat yang dipergunakan untuk kegiatan illegal dan pembukaan lahan untuk peruntukan kebun sengon, kebun buah naga dan kebun jagung sdh ditangani oleh PPNS untuk proses lebih lanjut.		
26	Melaksanakan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Barat	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Kab. Kotawaringin Barat, Desa Amin Jaya, Kec. Pangkalan Lada, Kec. Arut Selatan dan Simpang Runtu		25 Oktober s/d 3 November 2019	Illegal Logging	17.500,00	S 2°29' 34,051" E 111°43'57,022" , Desa Amin Jaya pada titik koordinat S 2°28' 13,368" E 112°2' 43,973" , Kecamatan Pangkalan Lada pada koordinat S 2°36' 59,450" E 111°42' 41,749" , dan Kecamatan Arut Selatan pada koordinat S 2° 20' 52,048" E 111° 42' 20,333" .	1. Tim melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi BKSDA Kalteng Wilayah II Pangkalan Bun terkait peredaran TSL. 2. Tim melakukan koordinasi dengan KPHP Kotawaringin Barat terkait dengan peredaran hasil hutan di wilayah Kotawaringin Barat. 3. Tim melakukan Koordinasi dengan Kepala Desa Amin Jaya, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengumpulkan informasi mengenai gangguan keamanan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Desa Amin Jaya, Kepala Desa Amin Jaya sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah I Palangka Raya (SPORC Kalteng). 4. Tim melakukan operasi pengamanan dan penegakan hukum di sekitaran daerah yang diperkirakan sering terjadi tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan tepatnya di Simpang Runtu pada titik koordinat S 2°29' 34,051" E 111°43'57,022" , Desa Amin Jaya pada titik koordinat S 2°28' 13,368" E 112°2' 43,973" , Kecamatan Pangkalan Lada pada koordinat S 2°36' 59,450" E 111°42' 41,749" , dan Kecamatan Arut Selatan pada koordinat S 2° 20' 52,048" E 111° 42' 20,333" . Selama melaksanakan kegiatan tidak ditemui adanya pelanggaran dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Tim melakukan penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terhadap masyarakat Desa Amin Jaya. 5. Selama melakukan kegiatan operasi di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak ditemukan kegiatan pelanggaran tindak pidana di bidang kehutanan.		

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerawanan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	Melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan di Wilayah Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kapuas	Seksi Wilayah I Palangka Raya	Kota Kapuas dan sekitarnya		25 Oktober s/d 3 November 2019	Illegal Logging	125.075,00		1. Tim melakukan rapat persiapan dan pengecekan sarana dan prasarana yang akan dipergunakan dalam kegiatan lapangan. Tim mendapatkan arahan dan pembinaan dari pimpinan terkait kegiatan lapangan dan sasaran yang ingin dicapai. Tim berangkat menuju lokasi kegiatan ke daerah Kabupaten Kapuas dan sekitarnya. 2. Tim berkoordinasi dgn instansi KPHP Kabupaten Kapuas Tengah terkait data kerawanan hutan yang ada di wilayahnya, berkenaan dengan masalah peredaran hasil hutan baik tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Tim melakukan patroli terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi ke daerah pasar Kabupaten Kapuas, tim tidak menemukan adanya tindak pidana bidang kehutanan. 3. Tim berpatroli ke daerah Kecamatan Kapuas Tengah terkait peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di wilayah Pujon, hasil kegiatan tidak ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang ditemui untuk tidak melakukan kegiatan penangkapan satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi undang-undang. 4. Tim berpatroli ke wilayah Kapuas Hulu hal ini dilakukan operasi terkait peredaran terhadap hasil hutan kayu yang dilindungi maupun peredaran yang tidak dilindungi, patroli dilakukan di daerah yang dianggap rawan daerah Sungai Hanyo, hasil kegiatan tidak ditemukan adanya tindak pidana bidang kehutanan. 5. Tim melakukan patroli ke wilayah Kapuas Seberang kegiatan ini dilakukan untuk meminimalisir adanya peredaran hasil hutan kayu dan satwa liar yang dilindungi undang-undang dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar untuk tidak melakukan penangkapan dan memperjual belikan terhadap satwa liar yang dilindungi undang-undang. 6. Tim melakukan patroli ke wilayah Kecamatan Timpah kegiatan dilakukan untuk meminimalisir adanya peredaran hasil hutan kayu maupun satwa liar yang dilindungi, dan melakukan sosialisasi terhadap larangan melakukan kegiatan ilegal bidang kehutanan, selama melakukan kegiatan tidak terdapat tindak pidana bidang kehutanan. 7. Tim melakukan patroli ke wilayah Mandumai kegiatan dilakukan untuk sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan ilegal bidang kehutanan, dan selama kegiatan berlangsung tidak dijumpai adanya tindak pidana bidang kehutanan. 8. Tim melakukan patroli ke wilayah Penda Ketapi Kabupaten Kapuas terkait dengan peredaran hasil hutan kayu dan satwa liar yang dilindungi, hasil kegiatan tidak ditemukan adanya pelanggaran bidang kehutanan. 9. Tim melakukan patroli peredaran hasil hutan di wilayah Dadahop sekitarnya dan sekaligus melakukan sosialisasi larangan untuk melakukan penangkapan dan memperjual belikan terhadap satwa liar yang dilindungi dan pengrusakan keberadaan hutan dalam hal ini kegiatan illegal logging di wilayah tersebut, hasil kegiatan tidak ditemukan adanya tindak pidana bidang kehutanan. 10. Tim melakukan patroli peredaran hasil hutan di wilayah Sungai Tatas dan sekitarnya dan sekaligus melakukan sosialisasi larangan untuk melakukan penangkapan terhadap satwa yang dilindungi, hasil kegiatan tidak ditemukan adanya tindak pidana bidang kehutanan.		
28	Operasi Melaksanakan kegiatan Operasi Fungsional Penegakan Hukum di Cagar Alam Pararawein dan sekitarnya, Kab. Barito Utara, Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	Seksi Wilayah I Palangka Raya	CA Pararawein	KSA/KPA	4 s/d 13 November 2019	Illegal Logging	3.415,00	S = 01°01'13,8" dan E = 114°42'51,3"			
29	Melaksanakan kegiatan Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di Wilayah Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	Seksi Wilayah I Palangka Raya			9 s/d 18 Desember 2019	Illegal Logging					
JUMLAH LUASAN SW I PALANGKARAYA									656.340,53				
SEKSI WILAYAH II SAMARINDA													
1.	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan	Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	KPHP Meratus	Samboja dan Semoi	Produksi	22 Januari - 31 Januari 2019	Penguasaan lahan/perambahan, ilegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	6.152,00	S.01°01'32,1" E.116°51'56,3"	Pengelola Hutan Wisata Bukit Bangkirai melakukan pembakaran dalam upaya membersihkan lahan yang rencananya akan dibangun Guest House sementara kondisi alam sedang kemarau/keing dengan tupan angin yang kencang	Tim melakukan sosialisasi, penyuluhan dan himbauan terhadap pengelola hutan agar melakukan pembersihan lahan tidak dengan cara dibakar menghindari kebakaran lahan yang lebih luas.	
					Daerah Kolam Kuning	Lindung Sungai Wain	22 Januari - 31 Januari 2019			S.01°04'06,4" E.116°54'12,3"	Tim melaksanakan penelusuran daerah Kolam Kuning dan ditemukan aktivitas pembukaan lahan sekitar 100 hektar oleh oknum masyarakat yang berupa lahan yang baru dilakukan penintasan sekitar 50 hektar, dan satu lokasi lagi seluas sekitar 30 hektar, berupa kebun lada dan buah naga	Tim melakukan himbauan kepada masyarakat agar tidak melaksanakan pembukaan lahan dengan pembakaran karena sedang musim kemarau sehingga tidak berdampak pada kawasan hutan lindung Sungai Wain	
2.	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan	Kalimantan Timur	Kutai Barat	KPHP Batu Ayau	Cagar Alam Padang Luway	Konservasi	22 Januari - 31 Januari 2019	Penguasaan lahan/perambahan, ilegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	2.790	S0.301063,E115.718 134 S0.242210,E115.885 244	Tim melaksanakan penelusuran daerah Cagar Alam Padang Luway dan tidak ditemukan adanya aktivitas ilegal terkait tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Tim menghimbau UPTD KPHP Batu Ayau agar dan BKSDA Katim agar rutin melaksanakan patroli penjagaan Cagar Alam Padang Luway	
											Tim melaksanakan penelusuran di daerah Sakaq Tada dan sekitarnya sebagai jalur aktivitas peredaran hasil hutan. Tim menjumpai beberapa kebun milik masyarakat dan beberapa rumah walet. Tim tidak menemukan adanya aktivitas ilegal terkait tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Tim melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar agar tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan melaporkan kepada pihak berwenang jika menjumpai aktivitas ilegal	

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerawanan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Operasi Penegakan Hukum LHK	Kalimantan Timur	Kutai Timur	KPH Bengalon	Bengalon	Produksi	11 Februari - 20 Februari 2019	Pengusahaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	10.076	N.00°49'52,22" E.117° 16'53, 79" (Tempat Penangkapan); N. 00°50'51,15" E.117° 11'44, 79"(Tempat Penumpukan Kayu)	Tim telah berhasil mengamankan 1(satu) unit truck Mitsubishi Fuso berwarna kuning dengan Nomor Polisi KT 8414 MT yang di kemudikan Sdr Hemarusli dan 1(satu) truck Mitsubishi Fuso berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9160 UDC yang dikemudikan oleh Sdr. Supriono sedang mengangkut kayu gergajian tanpa dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan. Barang Bukti untuk sementara diamankan di kantor Seksi II Wilayah Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan untuk dilakukan pemeriksaan dan diminta keterangan oleh Penyidik PNS BPPHLHK Wilayah Kalimantan atas dugaan penggunaan dokumen yang tidak sah	Proses Penyidikan	
	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan	Kalimantan Utara	Tana Tidung	KPH Tanah Tidung	Desa Seputuk Kecamatan Muruk Rian	Produksi	18 Februari - 27 Februari 2019	Pengusahaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	7.455	N.03°31'21.03"; E.116°58'30.96"	Tim menjumpai kegiatan penebangan pohon yang kemudian diolah menjadi balok dan papan berbagai ukuran yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Tim menduga bahwa lokasi penebangan merupakan wilayah areal konsesi PT. Intraca Hutani Lestari. Tim kemudian melakukan wawancara dan didapat informasi bahwa pekerja merupakan masyarakat pendatang yang dimodali oleh Pak Syahrul untuk menebang pohon sebagai bahan material pembangunan proyek perumahan di Kabupaten Tana Tidung.	Tim memberikan sosialisasi kepada kelompok masyarakat untuk tidak melakukan penebangan di dalam kawasan hutan serta tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.	
					Desa Rian Rayo					N.03°32'51.63"; E.116°49'22.34"	Tim melakukan kegiatan operasi di camp PT Intraca Hutani Lestari. Diketahui bahwa pada areal konsesi perusahaan, pelanggaran kehutanan yang terjadi adalah adanya perambahan kawasan disertai pembalakan liar serta klaim masyarakat terhadap beberapa lokasi yang menjadi areal konsesi perusahaan dan dikalim lebih dominal oleh masyarakat.	Tim menghimbau kepada perusahaan agar selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada aparat dan masyarakat desa.	
5	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Balai Gakkum Wilayah 2 Samarinda	Desa Jak Luay, Kec. Mauara Wahau, yakni IPHHK CV Karya Long Hajiep Utama	Produksi	7 Maret - 16 Maret 2019	Pengusahaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	4.486	N.00°59'09.96"; E.116°57'12.84"	Tim melakukan pemeriksaan di IPHHK CV Karya Long Hajiep Utama. Di lokasi tersebut, tim hanya menemukan seorang pekerja. Setelah tim melakukan interogasi kepada pekerja tersebut, didapatkan keterangan bahwa beliau hanya bertugas menjaga barang-barang yang masih tertinggal. Sedangkan perusahaan CV Karya Long Hajiep Utama sudah 1 tahun lebih tidak beroperasi.	Tim melakukan pendataan bahwa perusahaan tersebut sudah tidak aktif.	
					Gunung Kudung (PT Anugerah Energitama)					N.00°53'56.84"; E.117°07'04.11"	Tim melakukan penelusuran di lokasi tersebut dimana lokasi tersebut merupakan jalur keluar masuknya truk-truk untuk mengangkut kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah. Selama penelusuran tim tidak menjumpai truk/mobil yang mengangkut hasil hutan berupa kayu.	Tim melakukan himbauan serta sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan ancaman hukuman apabila masyarakat melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan/penebangan pohon tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.	
6	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Universitas Unmul	Tahura Bukit Soeharto (KHDTK Unmul)	Dengan Tujuan Khusus	11 Maret - 20 Maret 2019	Pengusahaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	720	S.00°51'41.01"; E.117°02'26.66"	Dalam kegiatan pengamanan di KHDTK Unmul tepatnya di menara pengawasan 30 pusruht Unmul tim mendapati tali sleng yang merupakan pengaman vital menara pantau telah hilang yang diduga dicuri oleh masyarakat sekitar. Tidak jauh dari lokasi tersebut, tim menemukan jembatan penghubung sebagai akses menuju kebun ilegal milik masyarakat yang berada di dalam KHDTK Unmul.	Ujwa dari tim agar masyarakat tidak melaksanakan kegiatan ilegal di dalam kawasan KHDTK Unmul yakni berupa perambahan dengan membuat kebun ; tim melakukan pembongkaran jembatan sebagai akses menuju ke KHDTK Unmul.	
										S.00°50'37.78"; E.117°06'50.34"	Tim menemukan aktivitas illegal logging yang dilakukan oleh seseorang yaitu masyarakat Handil dimana orang tersebut telah tertangkap tangan oleh tim membawa beberapa potong papan dengan menggunakan kendaraan roda 2.	Tim memberhentikan pelaku, melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh pelaku untuk tidak melakukan kegiatan tindak pidana kehutanan. Barang bukti yang dibawa oleh pelaku disita oleh tim kemudian dilakukan pemusnahan dengan cara dicincang oleh tim.	
7	Operasi Pengamanan dan Penegakan hukum di Kab. PPU	Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	Gakkum Wilayah 2 Samarinda	Areal Konsesi PT PPCI	Produksi	12 Maret - 21 Maret 2019	Pertambangan batubara ilegal	6.944	(1)S.01°22'21.62";E.116°47'3.85" (2)S.1°13'38.44"; E.116°47'53.92"	Tim menemukan dua lokasi pengeboran di areal konsesi PT. PPCI di luar izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.	Tim menyita dan mengamankan ke kantor seksi wilayah 2 samarinda ; 2 unit alat pengeboran sebagai alat bukti kegiatan pengeboran secara ilegal tersebut. Dilaksanakan penyelidikan sebagai tindak lanjut kegiatan operasi.	
	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan	Kalimantan Utara	Nunukan	KPH Nunukan	Tembalang, Sebuku	Produksi	18 Maret - 27 Maret 2019	Pengusahaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	5.156	N.04°13'57.98"; E.117°02'53.01"	Tim menemukan tumpukan kayu ulin dalam bentuk balok. Menurut informasi yang diberikan oleh salah satu pekerja a.n Bapak Sulaiman yang sedang tidak melakukan kegiatan penebangan, bahwa kayu tersebut milik Bapak Jasmin yang nantinya kayu tersebut dibawa ke daerah Sedadap dan para pekerja disini hanya bertugas untuk menebang pohon dan membelah menjadi papan dan balok.	Tim melakukan sosialisasi dan mengingatkan untuk tidak melakukan kegiatan illegal logging dan akan menindak siapa saja yang terbukti melakukannya di dalam kawasan hutan khususnya Wilayah Kerja KPH Nunukan.	
					Kecamatan Simanggaris kearah Desa Sekaduyan Taka					(1)N.04°16'26.93";E.117°12'47.38" (2)N.04°17'07.95" ; E.117°18'57.48" (3)N.04°12'03.39" ; E.117°26'27.28" (4) N.04°12'21.12" ; E.117°26'19.13"	Ditemukan sebanyak 4 titik api selama perjalanan menuju Desa Sekaduyan Taka. Dari 4 (empat) titik kebakaran pada titik 1 dan 2 diduga terjadi karena pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat sedangkan pada titik 3 dan 4 diduga terjadi karena dilakukan oleh salah seorang pemburu yang membakar entah sengaja atau tidak sengaja. Menurut keterangan masyarakat ada yang menjumpai pemburu tersebut.	Sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi kebakaran untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran serta menjelaskan mengenai dampak dan sanksi terhadap pelaku pembakaran lahan maupun hutan beserta cara menanggapi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Koordinasi ke Kantor Desa Sekaduyan Taka terkait sebelumnya tim memperoleh informasi bahwa di daerah tersebut banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan serta lokasi yang dekat dengan perbatasan antara Indonesia-Malaysia.	
					Kecamatan Simanggaris					N.04°13'00.72; E.117°13'58.57,"	Tim Operasi Fungsional Pengamanan Hutan di Kecamatan Simanggaris menerima informasi dari Personil Polhut KPH Nunukan jika terdapat penumpukan kayu ilegal Pak Anton yang tidak mempunyai dokumen ijin di Daerah Perum, Desa Tabur Lestari. Kemudian tim melakukan penelusuran ke daerah tersebut dan menemukan tumpukan kayu ulin ukuran 5x8 sebanyak ± 1 kubik dan ukuran 10x10 sebanyak ± 2 kubik. Kayu ulin tersebut milik H. Setak yang diberikan kepada Pak Uli.	Melaporkan seluruh kegiatan temuan terkait tindak pidana kehutanan di wilayah KPH Nunukan kepada pimpinan (Kepala Seksi Wilayah 2 Samarinda) dan menunggu arahan selanjutnya.	

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerawanan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
9	Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Balai Gakkum Wilayah 2 Samarinda	Desa Berambai (Konsesi PT Insani Bara Perkasa)	Budi Daya Kehutanan	21 Maret - 30 Maret 2019	Pertambangan batubara ilegal	3.869	(1)S.00°18'02.42; E.117°11'01.83" (2) S.00°18'02.24; E.117°11'02.06" (3) S.00°18'02.82; E.117°11'01.84"	Pada pukul 20.00 WITA di Wilayah Berambai, tim menemukan 3 unit alat berat yang diduga melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah konsesi PT. IBP. Di lokasi kejadian, tim tidak menemukan pelaku.	Ketiga alat berat tersebut diamankan di kantor seksi wilayah 2 Samarinda BPPHLHK Wilayah Kalimantan. Dari kegiatan tersebut, tim menyerahkan 3 unit alat berat tersebut kepada penyidik untuk dilakukan proses penyelidikan. Di lokasi kejadian, tim memasang garis polhut line untuk memastikan tidak ada lagi kegiatan penambangan batubara secara ilegal di lokasi tersebut.	
10	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan	Kalimantan Timur	Kutai Timur	KPHP Bengalon	Jalan Poros Semoi hingga wilayah Bongan Kutai Barat Kecamatan Kaubun dan Kailorang	Produksi	24 Maret - 2 April 2019	Penguasaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	8.800	N0.803592, E117.266883 N0.881290,E117.803917	Tim menelusuri kawasan pertambangan PT.Indexim. Tim melakukan perjalanan melewati jalan yang menjadi jalur aktifitas peredaran hasil hutan. Tim menjumpai beberapa kebun milik masyarakat sekitar kawasan hutan Eks PT Porodisa. Tidak ditemukan aktivitas ilegal di sekitar area penelusuran. Tim menjumpai industri primer pengolahan kayu UD Ganda Alam Makmur di KM 26 Jalan Hauling PT.Indexim selanjut tim memeriksa dokumen TUK dan tidak ditemukan pelanggaran. Selanjutnya tim menuju kawasan pelabuhan Maloi, memeriksa muatan kapal kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan. Tidak ditemukan aktivitas ilegal di sekitar area penelusuran.	Tim melakukan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan. Melaporkan kegiatan penelusuran kepada pimpinan dan memberi saran kepada pemangku kawasan yakni KPHP Bengalon untuk selalu melaksanakan kegiatan pengawasan berupa patroli PAMHUT untuk meminimalisir kegiatan illegal logging.	
11	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan	Kalimantan Utara	Nunukan	KPH Nunukan	Kecamatan Sebuku	Produksi	28 Maret - 6 April 2019	Penguasaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	10.297	N : 03°53'22.47" dan E : 116°51'35.34" N : 04°00'18.78" dan E : 117°01'27.26"	Tim melakukan patroli dan pemeriksaan keamanan di areal Konsesi PT. Adindo Hutani Lestari dengan cara menyusuri dan berkeliling jalan logging PT. Adindo Hutani Lestari Estate Sembakung. Terdapat bekas aktifitas pengolahan kayu ilegal jenis ulin yang diduga aktifitas tersebut dilakukan masyarakat setempat yang memanfaatkan kayu ulin yang telah tumbang atau rebah. Aktifitas tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari PT. Adindo Hutani Lestari Estate Sembakung. Tim melakukan patroli dengan menyusuri jalan-jalan logging yang ada di Kecamatan Sebuku diantaranya Jalan Logging milik PT. Adindo Hutani Lestari (PT. AHL), Jalan Logging milik PT. Nunukan Bara Sukses (PT. NBS) dan Jalan Logging milik PT. GAL (Kontraktor PT. Inutani I UMH Kuyit-Simendurut. Ditemukan adanya aktifitas illegal logging di beberapa titik lokasi pada jalan Logging PT. Gema Alam Lestari (PT. GAL) yang merupakan areal Konsesi IUPHHK-HA PT. Inutani I UMH Kuyit-Simendurut. Temuan di lokasi tersebut berupa kayu siap angkut dengan total ± 3 m3 dengan berbagai ukuran diantaranya 15cmx15cmx3m, 5cmx15cmx12m, dan 10cmx10cmx4m, dengan jenis kayu berupa Meranti Putih dan Kuning, serta Ulin. Pada koordinat N : 04°00'23.99" dan E : 117°01'19.84" Temuan lokasi tempat pelaku illegal logging melakukan pembelahan kayu menjadi berbagai ukuran di dalam hutan, dan juga ditemukan kayu-kayun sisa belahan.	Tim melaporkan kepada pimpinan terkait pemetaan daerah yang rawan terhadap tindak pidana kehutanan. Tim melaporkan kepada pimpinan yaitu kepala seksi wilayah 2 samarinda terkait illegal logging tersebut agar dapat dilakukan operasi referesif (penindakan) secara hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana kehutanan di areal konsesi PT. AHL.	
12	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan	Kalimantan Timur	Paser	KPH Kendilo	Kecamatan Batu Sopang	Lindung, Produksi, Produksi Terbatas	18 April - 27 April 2019	Penguasaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	4.500	S : 01°48'24.52" dan E : 115°54'56.556"	Tim operasi menuju ke daerah batu kajang Desa Kasungai. Setelah masuk ke dalam sampailah di Sungai yang diduga menjadi tempat muat kayu yang dikeluarkan lewat jalur sungai. Tim menemukan satu unit Truck yang diduga akan memuat kayu. Tim juga menemukan bekas aktifitas yang diduga adalah bekas kegiatan bongkar muat kayu	Tim mengumpulkan masyarakat dan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan dampak bahaya dari penggundulan hutan.	Telah dilaporkan pada pimpinan
13	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan	Kalimantan Timur	Kutai Barat	KPH Batu Ayyau	Kec. Nyuatan	Produksi	27 April - 6 Mei 2019	Penguasaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	5.000	S. 00°27'50.39" E. 115°25'55.53"	Tim menuju daerah kampung Lendian dengan menelusuri jalan raya simpang kaleng sampai ke Lendian. Disepanjang jalan terlihat ada brong- lorong bekas kegiatan illegal logging. Tim menemukan tumpukan kayu jenis ulin hasil penebangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.	Tim melanjutkan kearah desa Sambung kecamatan Siliu ngurai, namun tim tidak menemukan atau menjumpai pelaku illegal logging	Telah dilaporkan pada pimpinan
14	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara	KHDTK Samboja / Baltek KSDA	Kec. Semboja		27 April - 6 Mei 2019	Penguasaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	3.200	S. 00°58'39.12" – E. 116°54'59.86"	Tim menjumpai lorong yang diduga sebagai jalan masuk aktifitas perambahan maupun illegal logging. Tim menjumpai masyarakat sedang memikul beberapa potong kayu. Menurut pengakuan mereka, kayu yang dipikul tersebut hanya akan digunakan membuat pondok kebun saja.	Tim mengambil tindakan dengan memberikan pengarahan kepada masyarakat tersebut dan mereka menyadari kesalahan yang mereka lakukan serta mereka bersedia untuk membuat surat pernyataan agar tidak lagi melakukan aktifitas illegal terkait tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan di daerah tersebut.	Telah dilaporkan pada pimpinan

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerawanan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan	Kalimantan Utara	Bulungan	KPH Tarakan	Kecamatan Sekatak	Lindung, Produksi	29 April - 8 Mei 2019	Penguasaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	8.042	N : 03°16'11.94" dan E : 117°02'33.64" N : 03°19'04.00" dan E : 117°06'39.56"	Tim Operasi Fungsional Pengamanan Hutan melakukan patroli dengan menyusun jalan logging yang ada di Kecamatan Sekatak yaitu Jalan Logging PT. Intraca Wood Manufacturing diperoleh hasil : kegiatan pemuatan kayu ilegal kedalam truk yang dilakukan oleh masyarakat pemilik kayu sekaligus pemilik truk yaitu Pak Elik warga Sekatak Bujir. Stock kayu berbagai ukuran sortimen siap angkut didalam hutan ±20 m3 dengan jenis meranti dan kenuing. Kayu dikirim ke Tarakan kepada pak wahyu pemilik salah satu penumpukan kayu di Tarakan, pengiriman dilakukan berdasarkan pesanan dari Tarakan. Pengiriman menggunakan kapal kecil yang mampu mengangkut ±10 m3 dalam sekali pengiriman. Jalur pengiriman menggunakan sungai sekatak tembus batupasak dan bongkar di Idek Sungai Pemusian Tarakan. Tim operasi fungsional pengamanan hutan melakukan kegiatan operasi dengan melakukan pengamatan dan pendataan kegiatan pengolahan emas ilegal di dalam kawasan hutan diperoleh informasi sebagai berikut : Kegiatan pengolahan emas tersebut berada di dalam Kawasan Hutan yang memiliki fungsi sebagai Hutan Produksi, dan merupakan areal konsesi PT. Adindo Hutani Lestari. Kegiatan pengolahan emas di lokasi tersebut merupakan kegiatan pengolahan emas dengan metode perendaman milik pak yayat yang mengontak di Desa Sekatak, kegiatan pengolahan dilakukan dengan mengolah ampas sisa pengolahan emas dengan tromol. Dalam kegiatan perendaman tersebut menggunakan larutan kimia berupa NaCN (Natrium Sianida). Kegiatan pengolahan emas tersebut memiliki potensi untuk terjadinya pencemaran lingkungan akibat adanya penggunaan bahan kimia di dalamnya, apalagi kegiatan pengolahan emas tersebut berdekatan dengan sungai.	Keterbatasan personil pengamanan dan sarana-prasarana pada UPT KPH Tarakan, merupakan salah satu permasalahan tersendiri yang dihadapi pengelola dalam melakukan kegiatan pengamanan dan pencegahan perusakan hutan di wilayah KPH Tarakan.	
16	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan	Kalimantan Timur	Kabupaten Berau	KHDTK Labanan		Hutan Penelitian	14 - 18 Mei 2019	Penguasaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	7.959	N : 01°56'28.7" dan E : 117°13'28.3"	Tim menemukan tumpukan kayu siap angkut kemudian setelah dilakukan penelusuran lebih jauh ditemukan jumlah yang lebih besar dan ttgkak pohon serta log kayu yang merupakan hasil perusakan hutan yang dilakukan pelaku illegal logging. Tim terus melakukan penyusuran jalan dan menemukan adanya kegiatan langsir kayu dengan Truk Merk Dutro 130 warna merah dengan Nopol DN8641MA yang dilakukan oleh 3 orang, a.n. Ahmad Sukahar, Ricki Irawan dan Saludin. Tim juga menemukan pondok keijr milik pelaku illegal logging dan dijumpai seorang tukang chainsaw dan seorang kuli angkut	Tim melakukan interogasi awal terhadap 3 orang yang berhasil diamankan di lokasi tersebut guna mendapatkan informasi lebih jauh dari pelaku yang di temui di lapangan. Tim operasi membawa ketiga orang tersebut ke kantor KHDTK Labanan di Tanjung Redep untuk dilakukan pemeriksaan dan pembuatan surat pernyataan.	Telah dilaporkan pada pimpinan
17	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan			KHDTK Unmul			21-25 Mei 2019	Widodo HR, Suratno, Dedy Diana, Lubis, Usman, Hery, Jalal, Walesa, Martin	1.500	S: 00°53'11.68" dan E: 117°02'25.50"	Adanya perambahan dari masyarakat yang sudah terjadi sangat lama untuk membuat kebun, antara lain: sawit, karet, nanas, buah naga, dll. Kebun sawit sudah cukup berumur dan sudah kurang produktif. Kebun buah naga dibiarkan terbelengkalai karena penyakit dan tidak dirawat. Kebun nanas semakin luas dan ada beberapa puluh hektar yang ditinggalkan pemiliknya sehingga kebunnya tidak terawat.	Tim melakukan pendataan pemilik kebun dan pondok kerja. Tim memberikan sosialisasi tentang kawasan hutan KHDTK Pusrehut Unmul yang dirambah oleh masyarakat yang sebagian besar adalah pendatang karena adanya isu tentang rencana perpindahan ibukota negara di Tahura.	
18	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan			KHDTK BDLHK Samarinda			22-26 Mei 2019	Penguasaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	4.330	S : 00°44'10.7" dan E : 117°01'04.5"	Tim menemukan adanya aktivitas pembuatan di jalan di batas KHDTK yang dilakukan oleh PT Beringin Inti Bara menggunakan alat berat Excavator Caterpillar CAT 320 D.	Tim membawa operator ke kantor balai Gakkum untuk dimintai keterangan. Tim membuat berita acara klarifikasi operator alat berat, BA klarifikasi pengawas lapangan dan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan kegiatan yang berada di kawasan Bukit Suharto dan apabila melakukan kegiatan akan dikenakan sanksi.	
19	Ops Gabungan di CA Teluk Adang Kab. Paser						14-23 Juni 2019	Penguasaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	3.500		Kawasan cagar alam teluk apar. Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di cagar alam teluk apar terdapat sebuah kapal KLM Kartika yang bermuatan kayu galam. Tim bekerja sama dengan BKSDA Kaltim, dan Polda Kaltim untuk mengamankan KLM Kartika yang berisi kayu galam.	KLM Kartika dan 3 orang yang diduga tersangka untuk dibawa ke Samarinda dan diproses lebih lanjut untuk diserahkan kepada PPNS Seksi II.	
20	Op Fung di KPH Nunukan						30 Juni - 9 Juli	Penguasaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.					

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerawanan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Op Fung Kab Kutim	Kalimantan Timur	Kutai Timur	KPHP Bengalon	Desa Tebangan Lembak, Kec. Bengalon	Produksi	2-9 Juli	Penguasaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	546	N 00° 55' 04,82"; E 117° 33' 02,25"	Tim menuju desa Tebangan Lemak yang menurut informasi di desa tersebut banyak terjadi penebangan kayu secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat desa sekitar hutan khususnya Kec. Bengalon. Kegiatan tersebut di atas dilakukan karena sedang ada perbaikan jalan loggng milik HPH PT Panambangan yang melintasi kawasan hutan milik HPH Kalawit. Kemudian tim menelusuri jalan loggng tersebut untuk pengecekan dan mendapatkan beberapa tumpukan kayu yang ada di sepanjang jalan loggng yang sedang diperbaiki. Julah setiap tumpukan ± 1-3 m ³ . karena cuaca saat itu turun hujan dan jalanan becek, Tim tidak menemukan pelaku penebangan liar dan tidak bisa mengangkat kayu tersebut. Hanya menemukan beberapa orang yang sedang melakukan reboisasi.	Tim memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menebang pohon tanpa ijin dengan pihak yang berwenang dan menyuruh supaya mereka kembali ke desa mereka masing masing	Telah dilaporkan pada pimpinan
					Desa Keraitan, Kec. Bengalon	Lindung				N 00° 53' 56,84"; E 117° 07' 04,11 dan N 00° 55' 36,65"; E 117° 31' 14,91"	Tim melakukan penelusuran kawasan hutan yang melewati Desa Keraitan yang menurut informasi koridor tersebut sampai di kawasan hutan lindung. Tim menemukan beberapa tumpukan kayu jenis ulin di titik koordinat N 00° 53' 56,84"; E 117° 07' 04,11 dan titik Koordinat N 00° 55' 36,65"; E 117° 31' 14,91 tim menemukan 1 buah chainsaw dan beberapa potong kayu log dan mengemkannya.	Tim mengamankan 12 buah kayu yang ditemukan dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter 70cm. Tim menitipkannya ke Dinas Kehutanan Provinsi. Barang bukti berupa 1 buah chainsaw diamankan di kantor Balai Gakkum Kalimantan SW II Samarinda	Telah dilaporkan pada pimpinan
22	Op Fung Balikpapan	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	BKSDA Kaltim Seksi Konservasi Wilayah III Balikpapan	Perumahan Orlando Blok DA No.2 Balikpapan Baru, Kota Balikpapan	-	4-8 Juli	Perburuan satwa			Setelah melakukan pengamatan dan menyusun strategi, tim operasi melakukan pengamanan terhadap satwa (burung) berjumlah 6 (enam) ekor yaitu: 2 (dua) ekor Kakatua Jambul Kuning, 1 (satu) ekor Kakatua Raja, 2 (dua) ekor Nuri Kepala Hitam, dan 1 (satu) ekor Kakatua jambul orange yang terdapat di Perumahan Orlando Blok DA No.2 Balikpapan Baru, Kota Balikpapan. Tim operasi melakukan permintaan keterangan kepada saudara PUJIARTO, sebagai perawat burung yang bertanggungjawab merawat burung di Rumah tersebut). Kemudian dilanjutkan Permintaan Keterangan terhadap saudara HARI WISNU WIJAYA, yang merupakan rekan PUJIARTO, yang diminta tolong untuk menawarkan burung-burung tersebut melalui media sosial. Berdasarkan keterangan dari PUJIARTO dan HARI WISNU WIJAYA bahwa burung-burung tersebut merupakan milik dr. Edi Iskandar (Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan) yang merupakan kakak kandung PUJIARTO. dr. Edi Iskandar bemiat menyerahkan burung-burung tersebut kepada pihak yang berwenang karena mau pindah tugas.	Tim operasi mengamankan burung-burung tsb dan menitipkan kepada Seksi Konservasi Wilayah III Balikpapan, BKSDA Kalimantan Timur untuk dijaga dan dirawat.	Telah dilaporkan pada pimpinan
23	Op Gakkum Nunukan	Kalimantan Utara	Nunukan	KPHL Nunukan	Nunukan Barat, Kec. Nunukan	Hutan Produksi	10-19 Juli	Illegal Logging	8.800	1), 4°07'57,8"N 117°38'04,8"E dan ; 2), 4°07'59,1"N 117°38'14,6"E	Berdasarkan hasil informasi data intelijen tim puldasi BPPHLHK SW II Samarinda, terdapat 2 target operasi yang ditentukan yaitu aktivitas penampungan dan perdagangan kayu olahan ilegal, Wilayah Kabupaten Nunukan, Prov. Kaltara pada koordinat 1), 4°07'57,8"N 117°38'04,8"E dan ; 2), 4°07'59,1"N 117°38'14,6"E. Tim menemukan ada 2 lokasi penampungan/penumpukan kayu olahan, ±2.089 potong sortimen papan/balok kayu olahan (setara dengan 44 meterkubik) dengan berbagai jenis dan ukuran, dan 2 (dua) unit circle saw. Tim memeriksa dokumen untuk perijinan dan pemilik tidak bisa menunjukkannya. Tim mengamankan 3 orang pelaku usaha penampungan dan perdagangan kayu ilegal.	Tim melakukan pengamanan dan pengawasan 3 (tiga) orang pelaku usaha penampungan dan perdagangan kayu ilegal menuju kantor Balai Gakkum SW II Samarinda. Tim meminta backup Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan untuk pengamanan barang bukti.	
24	Operasi Peredaran Hasil Hutan di Kab.Nunukan	Kalimantan Utara	Nunukan	KPHL Nunukan	Nunukan Timur, Kec. Nunukan	Hutan Produksi	10-19 Juli	TSL, dan Illegal Logging	8.800	4°08'39,0"N 117°39'58,7"E	Berdasarkan hasil informasi data intelijen tim puldasi BPPHLHK SW II Samarinda, terdapat target operasi dan tim operasi peredaran hasil hutan memutuskan untuk fokus menangani penyelundupan gading gajah yang berasal dari Malaysia. - Tim Operasi Peredaran Hutan selanjutnya berkoordinasi dengan Bea Cukai, dan didapatkan informasi bahwa di Pelabuhan Tunontaka Nunukan petugas Bea Cukai Nunukan telah menemukan pelaku yang dicurigai membawa gading gajah. Tim kemudian bergerak menuju lokasi, dan segera menangkap pelaku yang dicurigai membawa gading gajah. Setelah itu tim operasi memeriksa barang bawaan pelaku berupa drum plastik warna biru yang ternyata di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) potong gading gajah. Dari pemeriksaan awal, pelaku atas nama Domilamadeke Petrus merupakan warga Negara Indonesia yang bekerja di Sabah, Malaysia. Gading gajah tersebut akan dia bawa ke Adonara, Laranutka, Nusa Tenggara Timur sebagai mahar perkawinan untuk anak laki-lakinya.	Tim kemudian mengamankan pelaku dan barang bukti berupa drum plastik warna biru dan 10 (sepuluh) potong gading gajah ke penginapan untuk selanjutnya diserahkan kepada PPNS untuk proses penyidikan. Selama proses pemeriksaan oleh PPNS tim operasi tetap bersiaga untuk melakukan pengamanan dan menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah PPNS BPPHLHK Seksi Wilayah II Samarinda memeriksa pelaku dan menetapkan tersangka terhadap pelaku, tim kemudian bersama-sama dengan PPNS mengawal tersangka menuju POLRES Nunukan untuk selanjutnya di titipkan/ditahan di RUTAN POLRES Nunukan sampai proses penyidikan selesai.	
					Nunukan Barat, Kec. Nunukan					1), 4°07'57,8"N 117°38'04,8"E dan ; 2), 4°07'59,1"N 117°38'14,6"E	Tim membackup tim operasi gakkum yang tengah mengawal 3 (tiga) orang pelaku usaha penampungan dan perdagangan kayu ilegal menuju kantor Balai Gakkum Kalimantan SW II Samarinda. Tim melakukan pengamanan barang bukti kayu olahan ilegal yang masih berada di TKP bersama Polres Nunukan. Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan bersama dengan 10 (sepuluh) orang anggota Polres Nunukan selanjutnya mengamankan barang bukti yakni 2 (dua) lokasi penampungan/penumpukan kayu olahan, ±2.089 potong sortimen papan/balok kayu olahan (setara dengan 44 meterkubik) dengan berbagai jenis dan ukuran, dan 2 (dua) unit circle saw.	Kayu olahan diamankan dan dititipkan ke KPHP Nunukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Selain barang bukti hasil dari Operasi Penegakan Hukum LHK, tim operasi juga menitipkan barang bukti berupa drum warna biru ke KPHP Nunukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan untuk 10 (sepuluh) potong gading gajah di bawa /diamankan ke Kantor BPPHLHK Samarinda.	Sudah dilaporkan pada pimpinan
25	Op Fung di Wilayah KPH Santan	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	KPH Santan	Kec. Samarinda Utara		6-13 Agustus	Penguasaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	4.600	0°21'42,1"S 117°12'46,7"E	Tim melakukan penelusuran pada wilayah kerja KPH Santan untuk pengamanan wilayah dari ancaman, gangguan, dan pelanggaran hukum. Ketika kegiatan sedang berlanjut, tim diminta untuk backup tim operasi gakkum yang melakukan pengamanan barang bukti di Desa Pampang karena di khawatirkan akan ada massa/teror pada saat pengamanan barang bukti.	Tim ikut melakukan pengamanan dan pengawasan 3 orang pelaku ke Balai Gakkum Kalimantan SW II Samarinda untuk diperiksa dan diminta keterangan oleh PPNS.	Sudah dilaporkan pada pimpinan

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerawanan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Operasi Gakkum di Desa Pampang, Kota Samarinda	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	-	Kec. Samarinda Utara	-	7-16 Agustus	Pertambangan batubara ilegal	10	0°21'38"S 117°12'44"E	Berdasarkan hasil verifikasi lapangan pengaduan di desa pampang oleh tim puldasi, terdapat 1 target operasi pertambangan ilegal di desa pampang. Tim menuju ke lapangan dan menemukan 3 orang pelaku (operator alat berat, mandor lapangan, pemilik lahan) yang diduga melakukan penambangan ilegal. Kemudian tim mengamankan 3 pelaku tersebut untuk dibawa ke Balai Gakkum Kalimantan untuk dimintai keterangan.	Tim melakukan pengawasan dan pengamanan 3 orang pelaku ke Balai Gakkum Kalimantan SW II Samarinda untuk diperiksa dan dimintai keterangan oleh PPNS.	
										0°21'42.1"S 117°12'46.7"E	Keesokan harinya, tim menuju ke lapangan kembali dan menemukan barang bukti berupa 1 buah Excavator tipe PC 300 yang digunakan telah dimobilisasi oleh anggota pelaku ke titik 0°21'42.1"S 117°12'46.7"E.	Tim membawa dan mengamankan barang bukti ke Balai Gakkum Kalimantan SW II Samarinda	Sudah dilaporkan pada pimpinan
27	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan	Kalimantan Timur		KHDTK Samboja / Baltek KSDA			14-23 September	Penguasaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.		S. 00°57'48.50" – E. 116°58'09.37".	Tim kembali bergerak menuju Kawasan KHDTK Samboja dan sekitarnya. Tim melakukan pengecekan areal kebun nanas dengan luas ± 6 Ha Tim menjumpai beberapa pondok kebun milik masyarakat. Menurut pengakuan mereka, mereka ditugaskan mengelola/menjaga kebun saja.	Tim mengambil tindakan dengan memberikan pengarahannya kepada masyarakat tersebut dan mereka menyadari kesalahan yang mereka lakukan serta mereka bersedia untuk membuat surat pernyataan agar tidak lagi melakukan aktifitas ilegal terkait tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan di daerah tersebut.	Sudah dilaporkan pada pimpinan
										S. 01°02'59.44" – E. 117°03'28.46"	Tim bergerak menuju areal Waduk Samboja dan sekitarnya. Tim melakukan pengecekan kawasan Waduk Samboja dan sekitarnya. Terjadi peristiwa Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) yang diduga berada di dalam Kawasan Tahura Bukit Suharto. Tim mendapat informasi dari petugas irigasi Bendungan Samboja, bahwa kejadian karhutla sudah berlangsung sekitar 4 (empat) hari, dengan luasan ± 60 Ha. Kemudian sudah dilakukan pemadaman oleh tim Dalkarhutla dari Posko Dalkarhutla Bukit Suharto, namun tim dalkarhutla tidak sanggup mengatasi dikarenakan keterbatasan alat.	Tim operasi segera berkoordinasi dengan Posko Dalkarhutla Bukit Suharto guna melakukan pemadaman kembali. Sekitar pukul 16.00 wita, tim dari Posko Dalkarhutla Bukit Suharto tiba dan tim operasi langsung bergabung bersama tim dalkarhut melakukan pemadaman	Sudah dilaporkan pada pimpinan
28	Operasi Gakkum	Kalimantan Timur	Kutai Barat dan Kutai Kartanegara		Desa Suakong, Kec. Bentian Besar	Konservasi	4 - 23 September 2011	Penguasaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	430	S. 00°45'89,0" – E. 115°46'36,9"	Tim melakukan pemeriksaan terhadap truk-truk yang memuat kayu olahan dari wilayah Kutai Barat menuju Kukar/Samarinda. Dalam pemeriksaan semua truk mengangkut kayu olahan disertai dengan dokumen yang sah berupa nota angkutan.	Karena di wilayah Kutai Barat tidak ditemukan pelanggaran, tim bergerak menuju Kutai Kartanegara yang diduga telah terjadi tindak pidana kehutanan yakni illegal mining di wilayah Tahura, Bukit Soeharto	Sudah dilaporkan pada pimpinan
					Kawasan Tahura Bukit Soeharto, Kec. Semboja					S. 00°59'58,0" – E. 117°01'06,3" dan S. 01°00'01,5" – E. 117°01'03,8"	Tim menemukan dua alat berat di dua tempat berbeda di dalam kawasan hutan Tahura Bukit Soeharto sedang melakukan aktivitas pertambangan.	Tim memberhentikan dua orang operator alat berat tersebut kemudian dua operator dan dua unit alat berat diamankan oleh tim, untuk diserahkan kepada PPNS Balai Gakkum di Kantor SW II Samarinda, Balai Gakkum Kalimantan di Samarinda.	Sudah dilaporkan pada pimpinan
29	Operasi Gakkum di wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Sekitarnya	Kalimantan Timur	Kutai Barat	-	Kec. Bentian		31 Oktober-7 November	Penguasaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	8222,34	0° 39' 59,332" S 115° 59' 55,896" E	Tim menuju lokasi kegiatan illegal logging dan menunggu di jalan poros keluar karena sudah mendapat informasi dari intelijen ada satu unit truk sudah memuat dan mengangkut kayu dari lokasi. Tim operasi langsung bergerak dan standby menunggu truk yang akan melintas. Pada pukul 14.08 wita tim operasi menghentikan truk dengan no polisi KT 8779 VS yang membawa kayu. Di dalam truk terdapat supir dan kernet yang kemudian dimintai keterangan oleh tim operasi mengenai asal-usul kayu yang dibawa dengan meminta dokumen kayu tersebut. Supir dan kernet tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang dibawa. Kemudian tim meminta keterangan siapa yang memiliki kayu tersebut dan langsung mengamankan truk untuk dibawa ke kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda.	Truk dikawal oleh 4 anggota SPORC Brigade Enggang seksi wilayah II Samarinda untuk dibawa ke kantor. Tim Operasi melakukan pengembangan dengan mencari pemilik dari kayu yang ditangkap kemarin. Dari keterangan supir dan kernet truk pemilik kayu tinggal di sekitar Kamp Baru, Kutai Barat. Tim operasi dan PPNS melakukan pengecekan dan pemeriksaan di rumah pemilik kayu namun tidak ada orang di rumah tersebut.	Sudah dilaporkan pada pimpinan
											Tim bergerak menuju lokasi pelaku untuk melakukan penangkapan. Pada pukul 22.00 wita tim bergerak ke lokasi dan didapat pondokan yang ditempati oleh pelaku. Tim Operasi melakukan penggerebekan di pondokan pelaku. Pelaku sempat melarikan diri dari pondokan dan terjadi kejar-kejaran dengan tim operasi di dalam hutan. Setelah 20 menit melakukan pengejaran akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh tim operasi yang dipimpin oleh Ari Santoso. Pelaku bernama Mansur yang memiliki kayu olahan jenis ulin sebanyak 85 potong ukuran 10 x 10 x 400 cm, 5 x 10 x 400 cm sebanyak 64 potong dan 164 potong ukuran 2 x 20 x 400 cm yang diangkut dengan truk bermerk isuzu dengan nopol KT 8779 VS yang diamankan oleh tim operasi tanggal 2 November 2019.	Menyerahkan tersangka ke PPNS Seksi Wilayah II Samarinda untuk dilakukan penyidikan.	Sudah dilaporkan pada pimpinan

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerusakan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan Kab Tanah Tidung, Provinsi Kaltara	Kalimantan Utara	Tana Tidung	KPH Tana Tidung	Kec. Sesayap Ilir		31 Oktober - 7 November 2019	Pengusahaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	7.918,55	3° 32' 16" N 117° 9' 14" E 3° 35' 20" N 117° 10' 59" E	Tim menjumpai tumpukan kayu jenis meranti dan melakukan penaksiran dengan ukuran 2x20x400 cm dengan jumlah 210 lembar dan ukuran 5x7x400cm dengan jumlah 70 lembar Tim menuju kantor PT Pipit Mutiara Jaya untuk mencari informasi dan keterangan terkait kejadian longsor yang terjadi di akses jalan tambang dari disposal menuju pit 9 utara. Tim bertemu dengan Pak Joko selaku KTT PT Pipit Mutiara Jaya. Dari keterangan yang diberikan bahwa lokasi terjadi pada jalan tambang yang mengalami patah dan amblas dimana tanah overburdn tidak bisa menampung aliran air di atasnya dan masuk ke dalam bukaan tambang pit 9. sebelumnya pada hari Rabu, 29 Oktober 2019 terjadi hujan deras pada daerah tersebut. ada 6 unit alat berat yang tertimbun aitu 3 excavator, 1 Dozer, 1 ADT, 1 LV. Tim melakukan pengecekan lokasi longsor dan benar adanya terjadi longsor pada jalan yang patah dan amblas sehingga mengakibatkan longsor masuk dalam bukaan pit 9 pada kawasan IPPKH PT Pipit Mutiara Jaya. Terdapat beberapa alat berat yang tertimbun pada kedalaman 10-15 meter.	Tim memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar dan di dalam kawasan hutan untuk tidak melakukan perambahan kawasan. Tim menyampaikan kepada masyarakat yang berada di sekitar maupun dalam kawasan hutan untuk tetap menjaga hutan secara lestari dan sesuai peraturan pemerintah yang sudah berlaku agar tidak melakukan kegiatan illegal logging.	Sudah dilaporkan pada pimpinan
31	Operasi Fungsional di KPH Meratus	Kalimantan Timur					31 Oktober - 7 November 2019			S 0.44430, E 116.82534	Tim menemukan aktivitas pertambangan di daerah APL. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa pertambangan tersebut tidak memiliki izin (illegal). Kemudian tim memanggil!		
32	Operasi PPH	Kalimantan Timur	Kutai Barat	KPH Batu Ayau	Desa Anan Jaya, Kec. Bentian Besar	Produksi dan Produksi Terbatas	13 - 21 November 2019	Pengusahaan lahan/perambahan, illegal logging, pertambangan batubara ilegal, galian c, perburuan satwa dan kebakaran hutan.	15.000,00	S. 00° 55' 48,077" – E. 115° 37' 7,064" dan S. 00° 23' 19,334" – E. 115° 23' 29,116"	Lanjutan dari operasi selanjutnya, tim mendapatkan informasi dan data bahwa banyak terdapat kegiatan illegal logging kayu olahan tanpa pemilik. Dari data tersebut tim melakukan pengamanan barang bukti.	Tim menemukan kayu olahan dan diamankan ke kantor Balai Gakkum di Samarinda dengan menggunakan alat angkut berupa truk. Kayu temuan yang diamankan berupa kayu olahan dengan jenis kayu ulin, bengkirai dan kapur kurang lebih sebanyak 50m3.	
JUMLAH LUAS HUTAN YANG DIAMANKAN SEKSI WILAYAH II SAMARINDA									159.102,99				
SEKSI WILAYAH III PONTIANAK													
1	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Batu Lapis, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Kotapang Dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Kotapang	Seksi Wilayah III Pontianak	Kawasan Hutan Produksi Batu Lapis wilayah Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Kotapang	HP Batu Lapis	28 Januari 2019 s/d 06 Februari 2019	Illegal Logging	9.000	01°24.564' LS - 110°54.676' BT 01°24.596' LS - 110°54.692' BT 01°24.628' LS - 110°54.745' BT	- Tim menemukan pondok kerja sebanyak 5 (Lima buah) dengan kondisi yang sudah rusak sebanyak 3 (Tiga) buah maupun yang masih bisa digunakan sebanyak 2 (Dua) buah di kawasan Hutan Produksi Batu Lapis. Namun tim tidak menemukan pelaku penebangan liar. Selanjutnya tim menghancurkan pondok kerja tersebut. -Tim juga menemukan jalan gerobak sepanjang ± 1.150 M, yang biasa digunakan para penambang liar untuk mengangkut hasil tebangannya dari dalam hutan ke tempat pengumpulan di tepi sungai dengan kondisi yang sudah rusak dan tertimpa pohon roboh. Jalan gerobak ini diperkirakan sudah tidak dipergunakan sekitar 2-3 bulan. Selanjutnya tim menghancurkan jalan gerobak tersebut. -Tim juga menjumpai 1 (Satu) keluarga penduduk desa Batu lapis yang melakukan ladang berpindah di kawasan Hutan Produksi Batu Lapis. Selanjutnya tim memberikan pengarahannya dan penyuluhan agar tidak melanjutkan kegiatan ladang berpindah dan segera pulang setelah panen selesai. -Kegiatan Penebangan Liar/Illegal Logging yang terjadi di kawasan Hutan Produksi Batu Lapis hanya terjadi di sekitar KM 81 karena ada akses sungai Gentawang yang dijadikan masyarakat sebagai jalur satu-satunya untuk -keluar masuk kawasan. Namun pada saat kegiatan operasi, tim sudah tidak menemukan aktifitas penebangan liar di kawasan Hutan Produksi Batu Lapis.		
2	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Kerali Kundang, Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Kotapang Dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Kotapang	Seksi Wilayah III Pontianak	Kawasan Hutan Lindung Kerali Kundang wilayah Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Kotapang	HL Kerali Kundang	28 Januari 2019 s/d 06 Februari 2019	Illegal Logging	11.000,00	-1,432225°LS - 110,918802°BT -1,431260° LS - 110,921870° BT -1,432630° LS - 110,920040° BT 1,432910°LS - 110,919580°BT	-Bahwa telah terjadi penebangan kayu jenis ulin / belian (illegal logging) di dalam Kawasan hutan lindung Kerali Kundang Di Kecamatan Hulu Sungai Kabupaten Kotapang tepatnya di daerah aliran sungai gentawang yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan lindung diantaranya yang berhasil diamankan petugas adalah Sdr. WANDI HARTONO Alias KARITING BIN NURDIN dengan alamat Dusun Laman Liku, Rt : 03 / Rw : 01, Desa Lubuk Kakap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Kotapang Propinsi Kalimantan Barat. -Bahwa salah satu oknum pemodal / cukong dari kegiatan illegal logging di dalam Kawasan Hutan Lindung Kerali Kundang adalah Sdr. Adam dengan alamat Desa Batu Lapis, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Kotapang. -Selain di daerah aliran sungai gentawang, Tim tidak menemukan kegiatan illegal logging maupun kegiatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundangan di bidang kehutanan ataupun penecegan dan pemberantasan perusakan hutan di dalam kawasan hutan lindung kerali kundang.		
3	Operasi Pengamanan Dan Penegakan Hukum Paredan Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Dilindungi Undang-Undang Di Kabupaten Melawi Dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Melawi	Seksi Wilayah III Pontianak	Jalan Raya Poros Provinsi Km.5, Dusun Sapan Batu RT.004/ RW.002, Desa Kelakik, Kecamatan Nanga Pinoh	-	4 Maret 2019 s/d 13 Maret 2019.	Peredaran TSL		-0,368493 LS - 111,755262 BT -0,35912 LS - 111,755289 BT -0,390792 LS - 111,768308 BT	-Ditemukan ± 3,2 (Tiga koma dua) Kg Sisik Trenggiling (Manis javanica) di dalam karung ukuran 10 Kg warna putih ruko (gudang) tempat usaha Sdr. Edi Susianto yang terletak di Jalan Raya Poros Provinsi Km.5, Dusun Sapan Batu RT.004/ RW.002, Desa Kelakik, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (Samping Toko Mandiri Jaya), berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Sdr. Edi Susianto bahwa ± 3,2 (Tiga koma dua) Kg Sisik Trenggiling (Manis javanica) tersebut milik Sdr. Udong Bin Kadus. Terhadap Sdr. Udong Bin Kadus dan Sdr. Edi Susianto beserta barang bukti diamankan ke Markas Komando SPORC Brigade Bekantan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -Bahwa selain Sdr. Udong Bin Kadus yang menyimpan ± 3,2 (Tiga koma dua) Kg Sisik Trenggiling (Manis javanica), tidak ditemukan lagi aktifitas kegiatan jual-beli dan atau Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Dilindungi Undang-Undang Di Wilayah Kabupaten Melawi Dan Sekitarnya.		

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerawanan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Panghian Lambuanak Kabupaten Kapuas Hulu dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Kapuas Hulu	Seksi Wilayah III Pontianak	Kawasan Hutan Lindung Panghian Lambuanak Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu dan Sekitarnya	HL Panghian Lambuanak	19 Maret 2019 s/d 28 Maret 2019	Illegal Logging	20.000 BT	0,73721 LU - 113,16854 BT 0,72417 LU - 113,18809 BT	- Dalam kegiatan ini tim menemukan pondok kerja sebanyak 3 (tiga) buah dengan kondisi yang masih baru dan ditemukan 10 orang lelaki yang akan bekerja serta di temukan barang bukti 1 buah cansaw. Selanjutnya pondok kerja tersebut di bongkar sendiri oleh pelaku. Kepada para pelaku diberi peringatan dengan pernyataan tertulis, mengingat mereka baru rencana mau bekerja dan merupakan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan. -Terhadap temuan barang bukti kayu olahan kurang lebih 500 batang telah di tangani oleh pihak KPH Kapuas Hulu Timur sebagai Pengelola Kawasan, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. -Tim juga menemukan jalan gerobak sepanjang ± 500 M, yang biasa digunakan para penambang liar untuk mengangkut hasil tebangannya dari dalam hutan ke tempat pengumpulan di tepi jalan umum dengan kondisi yang sudah rusak dan tertimpa pohon roboh. Jalan gerobak ini diperkirakan sudah tidak dipergunakan sekitar 3-4 bulan. -Kegiatan Penebangan Liar/Illegal Logging yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Panghian Lambuanak hanya terjadi di sekitar jalan lintas karena ada akses jalan Putussibau - Nanga Inap yang dijadikan masyarakat sebagai jalur untuk keluar masuk antar desa atau kampung.		
5	Operasi fungsional pengamanan kawasan hutan produksi gunung raya kabupaten sambas dan sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas	Seksi Wilayah III Pontianak	Kawasan Hutan Produksi Gunung Raya, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas dan sekitarnya	HP Gunung Raya	19 Maret 2019 s/d 28 Maret 2019	Illegal Logging	15.000	1,981688 LU - 109,563215 BT 1,915385 LU - 109,522958 BT 1,969394 LU - 109,543295 BT 1,913096 LU - 109,511142 BT	Tim Operasi masih menjumpai kegiatan ilegal di dalam Kawasan HP Gunung Raya yaitu Perambahan (perkebunan kelapa sawit), illegal Logging, Perburuan Satwa Liar yang dilindungi undang undang, serta pembangunan rumah sarang burung walet. Beberapa informasi dan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa tingginya kebutuhan bahan bangunan di Temajuk saat ini adalah untuk pembangunan rumah-rumah wisata yang dibangun oleh penduduk lokal maupun investor dari luar Temajuk. Adapun bahan baku diduga berasal dari kawasan Hutan Produksi Gunung Raya. Ditemukan rencana tempat latihan militer Kodam XII Tanjung Pura di sekitar KM. 7 sd Km. 9 Akses Jalan Paralel dari Temajuk ke Sajingan. Bahwa TKP kegiatan ilegal di dalam Kawasan HP Gunung Raya dan tempat latihan militer berada di dalam jln PT. Fajar Wana Lestari yang sejak SK keluar pada tahun 2013 hingga saat ini ada aktifitasnya. Tidak ditemukan pengangkutan kayu menuju ke Malaysia.		
6	Operasi fungsional pengamanan kawasan Hutan Produksi Terbatas Nyaban Lambuanak, kabupaten Kapuas Hulu dan sekitarnya	Kalimantan Barat	kabupaten Kapuas Hulu	Seksi Wilayah III Pontianak	Kawasan Hutan Produksi Terbatas Nyaban Lambuanak, Kecamatan Putussibau Selatan dan Kalis, kabupaten Kapuas Hulu dan sekitarnya	HPT Nyaban Lambuanak	19 Maret 2019 s/d 28 Maret 2019	Illegal Logging	35.000,00	0°42'58,8" LU - 113°08'04,9" BT 0°40'57,8" LU - 113°04'15,4" BT 0°42'05" LU - 113°06'39,2" BT 0°41'19,2" LU - 113°05'13,2" BT	- Kegiatan ini tim menjumpai tumpukan kayu olahan/gergajian di kawasan Hutan Produksi. Kawasan Hutan Produksi ini adalah konsesi HPH/IUPHHK-HA PT Kawedar Wood Industri. Namun tim tidak menemukan pelaku penebangan liar. Menurut informasi dari KPH Kapuas Hulu Timur, kegiatan penebangan ini dilakukan oleh sdr Afuk yang memiliki Industri Primer di desa Ingko Tambe. Di lokasi ini tim menemukan tumpukan kayu olahan/gergajian berjumlah ± 6.000 batang. -Setelah dikonfirmasi dengan sdr Afuk, dia mengakui melakukan kegiatan penebangan tersebut. Namun dia berdalil bahwa dia menebang di lokasi Hutan Desa milik Desa Nanga Raun dan ada perjanjian tertulis dengan masyarakat adat desa Nanga Raun. Untuk selanjutnya tim meminta kepada sdr Afuk untuk menghentikan kegiatannya dan tidak melanjutkannya sebelum berkoordinasi dengan KPH Kapuas Hulu Timur guna memastikan legalitas kegiatannya. -Setelah berkoordinasi dengan KPH Kapuas Hulu Timur, tim mendapatkan SK Hutan Desa Nanga Raun tetapi tidak mendapatkan lampiran petanya. Selanjutnya tim mengarahkan KPH Kapuas Hulu Timur untuk memonitor kayu hasil penebangan sdr Afuk agar tidak diangkat terlebih dahulu sebelum ada kejelasan mengenai lokasi Hutan Desa Nanga Raun. -Hasil koordinasi dengan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat, tim memperoleh peta Hutan Desa Nanga Raun serta dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) desa Nanga Raun. Dan setelah dilakukan overlay dengan titik koordinat tumpukan kayu yang ditemukan dilapangan, terlihat bahwa tumpukan kayu tersebut berada diluar konsesi Hak Pengelolaan Hutan Desa Nanga Raun dan berjarak sekitar 4-5 Km dari batas kawasan Hutan Desa Nanga Raun. Dari lokasi tumpukan kayu dengan kawasan Hutan Desa Nanga Raun terhubung dengan jalan Main Road PT Kawedar Wood Industri. -Tim juga menemukan pemukiman penduduk di kawasan HPT Nyaban Lambuanak yaitu desa Ribang Kadang. Menurut informasi dari petugas KPH Kapuas Hulu Timur, desa Ribang Kadang masih dalam proses TORA. -Tim juga menjumpai 3 unit sawmill mini yang berada di kawasan Hutan Produksi Sungai Mandai-Sungai Suruk. Untuk pekerja dan pemilik sawmill diberikan pengarahan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi dan melanjutkan kegiatannya. Untuk sawmill yang tidak ditemukan pekerja dan pemiliknya, tim hanya mendata dan mendokumentasikannya. -Tim juga melakukan pendataan industri Pengolahan kayu Primer yang berada di wilayah KPH Kapuas Hulu Timur. Dalam pendataan ini tim telah mendata 2 (Dua) buah Industri Primer yaitu PD. Inti Alam Sayut yang beralamat di desa Ingko tambe jalan Lintas Timur. Industri ini adalah milik sdr Yasmin Muchsin (Pontianak) dan yang bertanggung jawab adalah sdr Afuk. Industri Primer yang satunya adalah CV. Niaga Gemilang yang beralamat di desa Nanga Kalis, jalan Lintas Selatan. Menurut informasi yang diperoleh, pemilik industri primer CV. Niaga Gemilang adalah sdr Dirman (Pontianak). Dan diduga kios industri primer ini merupakan penampung hasil hutan ilegal yang berasal dari kawasan hutan di wilayah kabupaten Kapuas Hulu. -Untuk kayu olahan yang berada di desa Nanga Raun, mengingat status hukumnya belum jelas, pengawasannya di serahkan kepada KPH Kapuas Hulu Timur sebagai pengelola kawasan, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.26/Menhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.		

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerawanan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Loban Papau – Nanga Sibau di Kecamatan Putussibau Utara wilayah KPH Kapuas Hulu Utara Sekitarnya	Kalimantan Barat	kabupaten Kapuas Hulu	Seksi Wilayah III Pontianak	Kawasan HPT Loban Papau-Nanga Sibau wilayah kecamatan Putussibau Utara, kabupaten Kapuas Hulu	HPT Loban Papau-Nanga Sibau	29 April s/d 08 Mei 2019	Illegal Logging	15.613,00	0.929055 LU - 112.831713 BT 0.94031 LU - 112.826846 BT 1.098831 LU - 112.64527 BT 1.08878 LU - 112.651671 BT	- Tim menemukan tiga orang warga desa Sungai Buluh/Lauk Kecamatan Putussibau Utara, sepeda motor milik warga tersebut satu unit dan Chain saw sebanyak 1 unit, serta kayu olahan yang masih berada di TKP Penebangan di kawasan Hutan Produksi Terbatas Loban Papau – Nanga Sibau berjumlah 95 batang dari jenis Meranti yang dititipkan kepada Kepala KPH Kapuas Hulu Utara. - Terhadap warga desa tersebut diberikan penyuluhan untuk tidak melakukan penebangan illegal, apabila membutuhkan bahan bangunan untuk memperbaiki rumah maka diperbolehkan selama tidak untuk dijual ke pihak lain/pengusaha kayu. - Tim menemukan tumpukan kayu yang diduga berasal dari kawasan HPT Loban Papau – Nanga Sibau di Dusun Sagon Desa Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara dengan ukuran 9 cm x 18 cm x 4 meter sebanyak 498 batang. Terhadap tumpukan kayu kemudian dibuat Berita Acara Kayu Temuan, Berita Acara Penitipan dan Berita Acara Serah Terima Barang Temuan ke Kepala KPH Kapuas Hulu Utara sehingga kayu temuan tersebut sesuai dengan peruntukannya sesuai peraturan. - Tim tidak menemukan pelaku penebangan di TKP setelah menyusuri jalan angkutan kayu. Tim menemukan 2 buah sepeda yang digunakan untuk mengangkut kayu dan pondok kerja. Dilakukan pemusnahan terhadap sepeda dan pondok kerja. - 2 (dua) sawmill yang diperiksa memiliki ijin SITU, SIUP, HO yaitu sawmill Meli Abadi, dan Sawmill Lintas Sibau. - 1 (satu) sawmill yaitu Sawmill Lintas Sibau memiliki ijin Primer yang dikeluarkan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.		
8	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Sungai Palin – Sungai Mendalam di Kabupaten Kapuas Hulu dan sekitarnya	Kalimantan Barat	kabupaten Kapuas Hulu	Seksi Wilayah III Pontianak	Kawasan HP Sungai Palin - Sungai Mendalam, desa Tanjung Lasa, kecamatan Putussibau Utara, kabupaten Kapuas Hulu	HP Sungai Palin - Sungai Mendalam	29 April s/d 08 Mei 2019	Illegal Logging	12.045,00	0.980391 LU - 112.951504 BT 0.981781 LU - 112.95573 BT 0.981364 LU - 112.962791 BT	- Menemukan tumpukan kayu yang berada di sebuah sawmill di Desa Tanjung Lasa Kecamatan Putussibau dengan ukuran 9 cm x 18 cm x 4,2 meter sebanyak 647 batang jenis Kelansau, Kawi, Mabang dan Resak milik Adrian Darmawan. - Tidak ditemukan pekerja di TKP Penebangan, Tim menemukan sepeda sebanyak satu unit yang digunakan untuk mengangkut kayu dan pondok kerja sebanyak 2 buah dalam keadaan kosong. Tumpukan kayu olahan diduga berasal dari kawasan Hutan Produksi Sungai Palin – Sungai Mendalam. - Terhadap kayu temuan dibuat Berita Acara penitipan dan Berita Acara Serah Terima Barang Temuan ke Kepala KPH Kapuas Hulu Utara sehingga kayu temuan tersebut sesuai dengan peruntukannya sesuai peraturan. - Tim melakukan pendataan terhadap industri pengolahan kayu yang berada di wilayah KPH Kapuas Hulu Utara. 3 dari 5 sawmill yg diperiksa dalam kondisi kosong/tidak ada orang sehingga tidak diperoleh keterangan dari pemilik/pengurus/pekerja. - Sedangkan 2 sawmill yang diperiksa memiliki ijin SITU, SIUP, HO yaitu sawmill Sawmill Putri Lestari dan Sawmill Jaya Mandiri namun keduanya tidak memiliki ijin Primer Hasil Hutan Kayu		
9	Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mandor di kecamatan Mandor, kabupaten Landak dan sekitarnya	Kalimantan Barat	kabupaten Landak	Seksi Wilayah III Pontianak	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Wilayah Desa Retok, Kec. Kuala Mandor B dan Desa Sumsun, kec. Mandor	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	29 April s/d 08 Mei 2019	Illegal Logging	15000	00o11'45,9" LU - 109o24'51,9" BT 00o11'11,1" LU - 109o25'27,6" BT 00o14'50,2" LU - 109o25'02,6" BT 00o14'32,6" LU - 109o25'26,1" BT	- Untuk kegiatan operasi di desa Retok, tim berhasil menemukan barang bukti temuan berupa : Pondok kerja sebanyak 1 buah, Sepeda angkut sebanyak 4 unit, Jalan sepeda sepanjang ± 2.500 M, Kayu Bulat Kecil sebanyak 529 batang, Kayu gergajian/olahan sebanyak 105 batang - Seluruh barang temuan berupa pondok kerja, sepeda angkut, jalan sepeda dan kayu olahan/gergajian di hancurkan/dimusnahkan. Sedangkan barang bukti temuan berupa kayu bulat kecil (KBK) sebagian di musnahkan dengan cara dibuang ke sungai Memperigang dan sisanya ditiptkan kepada Kepala Desa Retok. - Tim juga mendata beberapa sawmill mini yang beroperasi di desa Retok. Kepada pemilik sawmill mini tersebut tim memberikan penyuluhan dan surat pernyataan untuk tidak mengambil bahan baku yang berasal dari Kawasan KHDTK Universitas Tanjungpura. - Untuk kegiatan di desa Sumsun, tim berhasil menemukan barang bukti temuan berupa : Pondok kerja sebanyak 2 buah, Sepeda angkut sebanyak 3 unit, Jalan sepeda sepanjang ± 1.500 M, Kayu Cerucuk sebanyak 650 batang, Kayu gergajian sebanyak 472 batang Berbagai jenis dan ukuran, Ajir/tunjar kacang sebanyak 20 kat - Tim juga menemukan 2 (Dua) orang pelaku pengambil kayu cerucuk di Kawasan KHDTK. Untuk kedua pelaku tersebut tim memberikan arahan/sosialisasi serta memberi surat pernyataan untuk tidak melanjutkan dan mengulangi perbuatannya lagi. - Untuk seluruh barang bukti temuan di desa Sumsun dimusnahkan/ dihancurkan dengan cara dipotong menggunakan chain saw dan parang. - Seluruh barang bukti temuan yang dimusnahkan, baik yang berada di desa Retok maupun yang berada di desa Sumsun dibuatkan Berita Acara Identifikasi Barang Temuan serta Berita Acara Pemusnahan Barang Temuan. - Untuk Barang Bukti temuan yang ditiptkan kepada Kepala Desa Retok dibuatkan Berita Acara Penitipan Barang Temuan.		

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerawan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Hutan Lindung S.Tebedak Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Kubu Raya	Seksi Wilayah III Pontianak	Kawasan Hutan Lindung S.Tebedak, Desa Gunung Tamang dan Desa Pulau Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya	Hutan Lindung S.Tebedak	29 April s/d 08 Mei 2019	Illegal Logging	8.142,00	x 109,835737 y - 0,190665 x 109,813287 y - 0,173837 x 109,835737 y - 0,190665 x 109,830368 y -0,19036 x 109,82901 y -0,162788 x 109,828905 y - 0,164576 x 109,813287 y - 0,173837 x 109,828926 y - 0,189333	- Tim menemukan 18 (delapan belas) orang pelaku penebang dan penarik kayu yang berasal dari Sambas dan Pulau Limbung beserta 12 (dua belas) unit sepeda pengangkut kayu yang sudah dimodifikasi di titik koordinat x 109,835737 y -0,190665 dan x 109,813287 y -0,173837, selanjutnya Tim melakukan interogasi, pendataan, pembuatan surat pernyataan dan melakukan pengusiran terhadap para pelaku untuk tidak kembali dan bekerja di Hutan Lindung S.Tebedak. - Tim menemukan dan menghancurkan 9 (sembilan) buah pondok/ bagan pekerja semi permanen dengan penemuan di titik koordinat x 109,835737 y -0,190665 (2 buah pondok), x 109,830368 y - 0,19036 (2 buah pondok), x 109,82901 y -0,162788 (2 buah pondok), x 109,828905 y -0,164576 (2 buah pondok), x 109,813287 y -0,173837 (1 buah pondok) dengan cara dirobokkan dan dipotong menggunakan chain saw. - Tim menemukan jalan gerobak/ jalan sepeda dengan total panjang ± 6 Km selanjutnya Tim melakukan penghancuran dan pembongkaran di beberapa titik dengan cara dipotong-potong menggunakan chain saw. - Tim menemukan 6 (enam) unit gerobak pengangkut kayu di titik koordinat x 109,828926 y -0,189333 yang selanjutnya dimusnahkan dengan cara dibocorkan bannya dan ditenggelamkan di parit/ sungai kecil. - Berdasarkan hasil interogasi dari para pelaku diperoleh nama yang menyuruh untuk melakukan kegiatan penebangan di HL.S.Tebedak yaitu Sdr. Herman dan Sdr. Muin alamat Dusun Selat, Desa Pulau Limbung Kecamatan Sul. Raya Kabupaten Kubu Raya, dan yang memberikan modal adalah Sdr. Bambang alamat Dusun Teluk Bakung.		
11	Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di kawasan Hutan Kabupaten Sambas dan sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas	Seksi Wilayah III Pontianak	Kawasan Hutan TWA Gunung Melintang dan HL Gunung Bentarang, Desa Senatab, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas	TWA Gunung Melintang dan HL Gunung Bentarang	01 Juli s/d 10 Juli 2019	Illegal Logging	8700	N 01,73094° - E 109,60656° - N 01,74376° - E 109,63564° - N 01,74337° - E 109,63067°	- Tim menangkap seorang pelaku penebangan liar di kawasan TWA Gunung Melintang dan HL Gunung Bentarang bernama Iswandi alias Anies bin Zainudin warga Dusun Batang Air, desa Senatab, kecamatan Sajingan Besar, kabupaten Sambas. Untuk selanjutnya pelaku diamankan dan dibawa ke kantor Pontianak untuk dilakukan proses hukum/penyidikan oleh PPNS BPPHLHK Seksi Wilayah III Pontianak. - Lokasi penangkapan Iswandi alias Anies bin Zainudin pada koordinat N 01,73094° - E 109,60656° dalam kawasan TWA Gunung Melintang dan lokasi penebangannya di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang dengan koordinat N 01,74376° - E 109,63564° dan koordinat N 01,74337° - E 109,63067°, dengan barang bukti berupa kayu Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 20 batang dan kayu Batu ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 120 batang. - Setelah dilakukan penyisihan barang bukti, selanjutnya tim memusnahkan barang bukti berupa kayu gergajian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m dengan jenis kayu Balau sebanyak 120 batang dan kayu Belian sebanyak 20 batang dengan cara dipotong menggunakan chain saw menjadi potongan kecil yang tidak bisa digunakan lagi. - Seluruh barang bukti yang dimusnahkan dibuatkan Berita Acara Identifikasi Barang Bukti serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti.		
12	Operasi Fungsional Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kawasan Hutan Kabupaten Sambas dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas	Seksi Wilayah III Pontianak	Hutan Lindung Gunung Bentarang yang berada di wilayah desa senatap dusun Batang Air, kecamatan Sajingan Besar, kabupaten Sambas	HL Gunung Bentarang	1 Juli s/d 10 Juli 2019	Illegal Logging	5.500	X 109,629231 Y 01,741110 X 109,630544, Y 01,762820 X 109,631936, Y 01,759160	-Tim Menangkap satu orang pelaku penebangan liar atas nama Claudius Misteritol alias Itol anak Wilhelmus Mango warga dusun batu hitam Desa Senatab Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. - Tim melakukan pemusnahan kayu ukuran 4x20cmx4m sebanyak 120 batang di titik koordinat X 109,630544, Y 01,762820 - Tim melakukan pemusnahan kayu ukuran 4x20cmx4m sebanyak 380 batang di titik koordinat X 109,631936, Y 01,759160		
13	Operasi Fungsional Pengamanan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi Undang-undang di Kabupaten Sanggau dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Sanggau	Seksi Wilayah III Pontianak	Kecamatan Tayan Hulu dan Tayan Hilir	-	2 Juli s/d 11 Juli 2019	Peredaran TSL	-	-	- Masih adanya aktifitas perdagangan jual beli Peredaran Hasil Hutan Tumbuhan dan Satwa liar yang dilindungi Undang undang Kec tayan Hulu, hal ini disebabkan kurangnya informasi mengenai jenis jenis Tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang Undang. - Bahwa aktifitas masyarakat yang berkaitan dengan peredaran Hasil hutantumbuhan dan Satwa yang dilindungi Undang undang di KabupatenSanggau telah sangat menurun aktifitasnya. Hal ini disebabkan sudah semakin berkurangnya pasokan hasil hutan Tumbuhan dan satwa liar yang hendak di perjualbelikan di Kabupaten Sanggau. - Masih terbatasnya informasi mengenai peraturan perundang undangan yang mengatur masalah peredaran Hasil Hutan tumbuhan dan Satwa Liar Yang dilindungi di Kabupaten Sanggau.		
14	Operasi Fungsional Pengamanan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi Undang-undang di Kabupaten Sanggau dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Sanggau	Seksi Wilayah III Pontianak	Kecamatan Tayan Hulu dan Tayan Hilir	-	2 Juli s/d 11 Juli 2019	Peredaran TSL	-	-	- Perlu meningkatkan intensitas kerja sama antar aparat penegak hukum di wilayah perbatasan, sehingga terjadi hubungan timbal baik yang saling berkesinambungan dalam pengawasan peredaran hasil hutan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang undang. - Memperdayakan masyarakat sekitar kawasan perbatasan dalam melakukan pengamanan dan penjagaan mengenai peredaran hasil hutan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang undang. - Kurangnya aparat penegak hukum khususnya dari pihak KSDAE dalam memberikan penyuluhan, pembinaan dan pengenalan tumbuhan dan satwa yang dilindungi Undang undang. - Kurangnya informasi dan pembinaan tentang arti pentingnya sumber plasmanutah keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar menjadikan beberapa masyarakat dapat menyelundupkan hasil hutan tumbuhan dan satwa liar ke negara tetangga Malaysia		

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerawanan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Operasi Gabungan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kawasan Hutan Perbatasan Negara Indonesia Malaysia Kabupaten Sambas dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas		Desa Sungai Bering, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas	TWA Gunung Melintang dan Hutan Lindung Gunung Bentarang	1 Agust s/d 10 Agust 2019	Illegal Logging	21.900	X109,64233, Y 01,76586	Dalam kegiatan ini tim berhasil mengamankan 17 (tujuh belas) yang di duga melakukan penebangan liar dan merakit serta pengangkut kayu ilegal di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang. Selanjutnya para tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Seksi BPPHLHK Wilayah III Pontianak untuk di serahkan ke PPPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) BPPHLHK Wilayah Kalimantan guna dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut. Kegiatan perburuan liar masih ditemukan di dalam kawasan Hutan Konservasi TWA Melintang dan Kawasan Hutan lainnya. Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang sudah banyak terbuka akibat adanya jalan Propinsi. Akses Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang setelah banyak di buka jalan Propinsi rawan dengan Kasus illegal Logging, dan perambahan serta perburuan liar di dalam kawasan hutan. Pemusnahan barang bukti berupa kayu olahan/gergajian dilakukan dengan cara dipotong menggunakan chain saw. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan dibuatkan Berita Acara Identifikasi Barang Bukti serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti.		
16	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Wilayah Kabupaten Sintang dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang		Desa Rasau, Kecamatan Senaning	HPT Ketungau Hulu	5 Agst s/d 14 Agst 2019		7.400	110,843576 BT 0,914159 LS 111,850197 BT 0,898902 LS	- Tim melakukan sosialisasi tentang kebakaran hutan di Desa Rasau - Tim menemukan beberapa lokasi ladang berpindah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan mengingat pada saat kegiatan operasi sedang musim berladang untuk masyarakat setempat. - Tim menjumpai sebuah lokasi bekas penebangan yang sudah lama ditinggalkan. Terdapat beberapa batang kayu olahan yang belum diangkat oleh warga pada koordinat 0,898902 LS dan 111,850197 BT.		
17	Operasi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Tumbuhan dan Satwa Liar Yang dilindungi Undang-undang di Wilayah Kabupaten Ketapang dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Ketapang		Desa Kualan Tengah, Kecamatan Simpang Hulu	-	12 Agst s/d 21 Agst 2019		-	110,469992 BT - 0,450819 LS 110,435651 BT - 0,42514 LS	- Tim menemukan dua buah sepeda motor yang diduga untuk mengangkut kayu, tim juga menemukan sekitar 15 batang kayu olahan dengan ukuran 8 x 8 x 4 meter dari jenis Meranti (Bengkirai) untuk selanjutnya dimusnahkan dan dibuat Berita Acaranya. - Tim menjumpai banyaknya warga yang mulai membakar lahan yang sudah disiapkan untuk menanam padi, sebagian warga ada yang sudah membakar namun beberapa warga masih menunggu hingga akhir bukan untuk membakar lahannya. Pada bulan Agustus ini banyak dijumpai hotspot di Provinsi Kalimantan Barat, Tim dilapangan bersama dengan aparat desa setempat berupaya untuk meningkatkan pemahaman warga masyarakat untuk mengurangi kemungkinan tidak terkendalinya api pada waktu membakar lahan.		
18	Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya Kabupaten Sintang dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang		Resort Meroboi, Desa Meroboi, Kecamatan Serawai	Taman Nasional Bukit Baka dan Bukit Raya	10 (sepuluh) hari, 13 September s/d 22 September 2019	Illegal Mining	1.331,31	S.0°31'13,4" E.112°42'17,5" S.0°31'19,2" E.112°42'17,4" S.0°31'20,9" E.112°42'180'	-Tim menemukan beberapa peralatan kerja yang ditinggalkan oleh pelaku PETI di dalam kawasan TN Bukit Baka Bukit Raya dan sekaligus melakukan pemusnahan terhadap bagan kerja dan barang lain yang ditemukan. -Tim memberikan surat peringatan dan surat pernyataan diatas materai kepada tiga orang warga Desa Meroboi yang diduga telah melakukan penambangan emas di kawasan TN Bukit Baka Bukit Raya, bahwa yang bersangkutan dilaporkan oleh petugas Taman Nasional menggunakan mesin Robin dalam melakukan aktifitasnya. -Kepada Kepala Desa Meroboi disarankan untuk membuat konsep Perdes atau hukum adat terkait kegiatan illegal baik yang terjadi dikawasan TNBBR maupun di tanah adat. -Tim menemukan seekor kukang albino yang dipelihara oleh warga masyarakat di lokasi Sepan, tim mengamankan satwa liar yang dilindungi tersebut dan membawanya ke Nanga Pinoh untuk diserahkan ke Yayasan IAR di Nanga Pinoh.		
19	Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kawasan Hutan Wilayah Kabupaten Sambas dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas		Desa Senatab dan Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar	TWA Gunung Melintang	10 (sepuluh) hari, 14 Oktober s/d 23 Oktober 2019	Illegal Logging	2.750	1,752759 LU dan 109,628547 BT 1,755613 LU dan 109,628992 BT 1,758513 LU dan 109,630680 BT 1,759095 LU dan 109,631942 BT	-Dalam kegiatan ini tim berhasil menemukan Barang Bukti hasil kegiatan penebangan liar yang berada di kawasan TWA Gunung Melintang di beberapa lokasi/koordinat Untuk selanjutnya tim mendata/identifikasi dan mendokumentasikan sebelum dilakukan pemusnahan. -Adapun hasil pendataan/identifikasi Barang Bukti yang ditemukan adalah berjumlah 1.643 batang dengan rincian sebagai berikut : a.Jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm= 6 batang b.Jenis Meranti (Bengkirai, Keruing dan Kapur) - Ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm= 907 batang - Ukuran 6 cm x 8 cm x 400 cm= 4 batang - Ukuran 3 cm x 30 cm x 220 cm= 724 keping - Ukuran 2 cm x 15 cm x 400 cm= 2 keping - Dalam kegiatan operasi ini tim tidak menemukan pelaku penebangan liar di dalam kawasan TWA Gunung Melintang. -Tim juga melakukan penghancuran jalan sepeda sepanjang ± 500 M -Selanjutnya seluruh barang bukti yang ditemukan dimusnahkan dengan cara dipotong atau dicincang menggunakan Chain Saw. -Seluruh barang bukti yang dimusnahkan dibuatkan Berita Acara Identifikasi Barang Bukti serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti.		

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerusakan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kawasan Hutan Wilayah Kabupaten Sambas dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas		Desa Senatab dan Desa Sungai Bering Kecamatan Sajingan Besar	HL Gunung Bentarang	10 (sepuluh) hari, 14 Oktober s/d 23 Oktober 2019	Illegal Logging	4.200	1,740084 LU 109,628360 BT 1,743371 LU 109,630488 BT 1,760253 LU 109,632984 BT 1,762818 LU 109,631542 BT	-Dalam kegiatan ini tim berhasil menemukan Barang Bukti hasil kegiatan penebangan liar yang berada di kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang di beberapa lokasi/koordinat dan yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi Gunung Raya terapat satu lokasi. Untuk selanjutnya tim mendata/identifikasi dan mendokumentasikan sebelum dilakukan pemusnahan. -Adapun hasil pendataan/identifikasi Barang Bukti yang ditemukan yang berupa kayu olahan sebanyak 254 batang dengan rincian sebagai berikut : a. Jenis Belian - Ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm= 18 batang - Ukuran 4 cm x 8 cm x 400 cm= 6 batang - Ukuran 8 cm x 8 cm x 300 cm= 1 batang - Ukuran 10 cm x 10 cm x 100 cm= 5 batang b. Jenis Meranti (Bengkrai, Keruing dan Kapur) - Ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm= 145 batang - Ukuran 4 cm x 8 cm x 400 cm= 10 batang - Ukuran 8 cm x 12 cm x 200 cm= 6 keping - Ukuran 3 cm x 15 cm x 400 cm= 63 keping -Dalam kegiatan operasi ini tim tidak menemukan pelaku penebangan liar di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang. -Tim juga menemukan 2 (Dua) buah pondok kerja serta jalan sepeda di dua lokasi yang diperkirakan sepanjang ± 1.050 M. -Selanjutnya seluruh barang bukti yang ditemukan dimusnahkan dengan cara dipotong atau dicincang menggunakan Chain Saw. -Seluruh barang bukti yang dimusnahkan dibuatkan Berita Acara Identifikasi Barang Bukti serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti.		
21	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Produksi Sungai Ambawang Kabupaten Sanggau dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Sanggau		Desa Balai Ingin, Kecamatan Tayan Hilir	HP Sungai Ambawang	10 (sepuluh) hari, 16 Oktober s/d 25 Oktober 2019	Illegal Logging	6.000	N 00, 08813° E 110, 21848° N 00, 08719° E 110, 21902° N 00, 08856° E 110, 21848° N 00, 08634 E 110,22003 N 00, 08657 ° E 110, 22002 °	- Ditemukan adanya jalan kuda – kuda sebagai akses mengeluarkan kayu tebangan dari lokasi menuju sungai yang terbuat dari papan kayu dengan panjang ± 3 KM, jalan tersebut telah dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan Chain Saw. - Ditemukan alat angkut berupa sepeda yang sudah di modifikasi sebanyak 2 unit (koordinat N 00, 08813° - E 110, 21848° dan N 00, 08719° - E 110, 21902°), alat angkut tersebut telah dihancurkan dengan cara dibongkar. - Ditemukan adanya bekas Tempat Penyimpanan Kayu ditepi Sungai Munak (koordinat N 00, 08856° - E 110, 21848°), tetapi lokasi tersebut telah kosong karena semua kayu telah dikeluarkan oleh pelaku. - Ditemukan kayu olahan jenis campuran ukuran 20 cm x 20 cm x 4 meter sebanyak 46 batang (koordinat N 00, 08634 – E 110,22003), kayu temuan tersebut telah dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan Chain Saw sehingga tidak bisa digunakan lagi. - Ditemukan tunggul kayu bekas tebangan dengan diameter > 40 cm yang lokasinya tersebar sepanjang jalur kuda – kuda sebanyak 38 batang. - Ditemukan pondok kerja sebanyak 1 (satu) buah di koordinat N 00, 08657 ° - E 110, 22002 °, pondok kerja tersebut telah dihancurkan dengan cara dibongkar.		
22	Operasi Pengamanan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi Undang-undang di Kabupaten Kayong Utara dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Kayong Utara		Desa Sejahtera dan Rantau Panjang, Kecamatan Sukadana	TN Gunung Palung	10 (sepuluh) hari 26 Oktober s/d 4 November 2019	Illegal Logging		-1,308361 LS 110,072216 BT	-Dalam kegiatan ini tim telah memantau lokasi target operasi berupa sawmill mini milik saudara Wak Neng yang berlokasi di jalan/dusun Parit Bugis, Tanjung Gunung tepatnya pada koordinat -1,308361 LS dan 110,072216 BT. Selama memantau lokasi tersebut, tim tidak menemukan aktifitas maupun tumpukan bahan baku di lokasi sehingga tim tidak menemukan cukup bukti keterlibatannya dalam kegiatan penebangan di kawasan TN, Gunung Palung maupun kawasan hutan lainnya. -Tim juga membekap up penangkapan oleh TN, Gunung Palung dan melakukan Penyidikan dengan tersangka JONO BIN MUSTA'AN dengan Barang bukti kayu olahan dari jenis Meranti dan Keminting sebanyak 131 (Seratus Tiga puluh Satu) batang dan sebuah chain saw. -Tim juga melakukan operasi secara preventif terhadap beberapa tempat pembuatan meubel di wilayah kecamatan Sukadana dan Teluk Melano dengan melakukan penyuluhan.		
23	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Palung Kabupaten Kayong Utara dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Kayong Utara		Resort Tanjung Gunung, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana	TN Gunung Palung	10 (sepuluh) hari 26 Okt s/d 4 Nop 2019	Illegal Logging	2.750	-1,283987 LS 110,093109 BT -1,288585 LS 110,080727 BT	-Tim berhasil menemukan Barang Bukti hasil kegiatan penebangan liar yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung tepatnya pada koordinat -1,283987 LS dan 110,093109 BT berupa bekas pondok kerja, tumpukan kayu gergajian dan bekas jalan sepeda serta koordinat -1,288585 LS dan 110,080727 BT berupa tumpukan kayu gergajian dan jalan sepeda. Untuk selanjutnya tim mendata/identifikasi dan mendokumentasikan sebelum dilakukan pemusnahan. -Adapun hasil pendataan/identifikasi Barang Bukti yang ditemukan adalah berupa kayu olahan jenis Meranti (Kawi/Belangeran) dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 400 cm sebanyak 17 batang, ukuran 8 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 14 batang dan jalan sepeda sepanjang 450 Meter. -Dalam kegiatan operasi ini tim tidak menemukan pelaku penebangan liar di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung. -Tim juga melakukan penghancuran jalan sepeda sepanjang ± 450 M -Selanjutnya seluruh barang bukti yang ditemukan dimusnahkan dengan cara dipotong atau dicincang menggunakan Chain Saw. -Seluruh barang bukti yang dimusnahkan dibuatkan Berita Acara Identifikasi Barang Bukti serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti.		

No	Jenis Kegiatan	Provinsi	Kabupaten	INSTANSI	Detail Lokasi	Kawasan Hutan	Tanggal Pelaksanaan	Tipe Kerawanan/ Ancaman Bidang Kehutanan	Luas Area Cakupan Kegiatan	Koordinat Titik/ Pusat Area	Hasil	Tindak Lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Palung Kabupaten Kayong Utara dan Sekitarnya.	Kalimantan Barat	Kabupaten Kayong Utara		Resort Sedahan, Desa Mulia, Kecamatan Sukadana	TN Gunung Palung	10 (sepuluh) hari 26 Okt s/d 4 Nop 2019	Illegal Logging	5.150	-1,161627 LS 110,094969 BT -1,161620 LS 110,099740 BT	- tim berhasil menemukan Barang Bukti hasil kegiatan penebangan liar yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung tepatnya pada koordinat -1,161627 LS dan 110,094969 BT dan pada koordinat -1,161620 LS dan 110,099740 BT berupa pondok kerja, sepeda pengangkut, tumpukan kayu olahan dan jalan sepeda. Untuk selanjutnya tim mendata/identifikasi dan mendokumentasikan sebelum dilakukan pemusnahan. -Adapun hasil pendataan/identifikasi Barang Bukti yang ditemukan antara lain : 1.Kayu olahan/gergajian jenis Meranti ukuran 16 cm x 16 cm x 400 cm sebanyak 16 batang 2.Kayu gergajian jenis Meranti ukuran 12 cm x 12 cm x 400 cm sebanyak 11 batang 3.Pondok kerja sebanyak 1 (Satu) buah 4.Seoeda pengangkut sebanyak 1 (Satu) buah 5.jalan sepeda sepanjang 1.150 Meter. -Dalam kegiatan operasi ini tim tidak menemukan pelaku penebangan liar di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung. -Tim juga melakukan penghancuran jalan sepeda sepanjang ± 1.150 M -Selanjutnya seluruh barang bukti yang ditemukan dimusnahkan dengan cara dipotong atau dicincang menggunakan Chain Saw. -Seluruh barang bukti yang dimusnahkan dibuatkan Berita Acara Identifikasi Barang Bukti serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti.		
25	Operasi Fungsional Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Sambas dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas		Desa Asuansang, Kecamatan Paloh	TWA Gunung Asuansang dan HP Gunung Raya	10 (sepuluh) hari 26 Okt s/d 4 Nop 2019	Perambahan dan Illegal Logging	2.200	1, 94813 LU 109,54298 BT 1.88618 LU 109,47256 BT 1.88617 LU 109,47256 BT	- Tim menemukan tumpukan kayu, jalan kuda kuda di beberapa lokasi. - Pola pengangkutan kayu tersebut dilakukan secara tradisional yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan akan pembangunan masyarakat sekitar. -Terhadap temuan kayu, tim melakukan penghancuran dengan cara di cacah, sedangkan pada jalan kuda kuda dilakukan penghancuran dengan cara dipisahkan/ dibongkar, pada Pos jaga yang diperuntukan untuk Anggota KPHK, tim hanya mengambil dokumentasi dan akan berkoordinasi terkait dengan lokasi tersebut dikarenakan masuk dalam lokasi TWA Gn Asuansang. Sedangkan pada lahan masyarakat tim hanya melakukan pendataan dan sosialisasi terkait pengamanan dan perlindungan kawasan serta berpesan untuk ikut serta mengamankan kawasan Hutan Konservasi. Dari pengamatan Tim dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerusakan kawasan Hutan Konservasi TWA Gn Asuansang dan Hutan Produksi Gunung Raya ± 500 ha akibat perambahan kawasan, pembangunan jalan, perladangan dan pemukiman yang dilakukan oleh Masyarakat sekitar kawasan hutan		
26	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kabupaten Sintang dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang				10 (sepuluh) hari 7 Des s/d 16 Des 2019	Illegal Mining	8.000	0,555304 LS 112,544176 BT -0,557606 LS 112,545562 BT -0,560729 LS 112,544473 BT -0,563478 LS 112,545770 BT	Tim berhasil menemukan Barang Bukti hasil kegiatan Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yang berada di dalam kawasan TN. Bukit Baka Bukit Raya. Untuk selanjutnya tim mendata/mengidentifikasi dan mendokumentasikan sebelum dilakukan pemusnahan. - Adapun hasil pendataan/identifikasi Barang Bukti yang ditemukan adalah sebagai berikut : a.Mesin Robin (pompa air) + selang= 5 set b.Jerigen yang berisi minyak bensin= 12 buah c.Pondok kerja= 13 buah - Dalam kegiatan operasi ini tim tidak menemukan pelaku Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di dalam kawasan TN. Bukit Baka Bukit Raya. - Selanjutnya seluruh barang bukti yang ditemukan dimusnahkan dengan cara dibakar dan dibuang ke dalam sungai. - Seluruh barang bukti yang dimusnahkan dibuatkan Berita Acara Identifikasi Barang Bukti serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti.		
27	Operasi Fungsional Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang dan Sekitarnya	Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang				10 (sepuluh) hari 7 Des s/d 16 Des 2019	Illegal Logging	35.000	-0,60327778 LS 112,24125 BT -0,571 LS 112,228 BT -0,538 LS 112,254 BT -0,531 LS 112,314 BT -0,535 LS 112,301 BT.	- Masih terjadi kegiatan penebangan liar di dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya - Akses masuk ke kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya berdekatan dengan Desa maupun Dusun. dalam pelaksanaan Operasi hanya di temukan barang bukti kegiatan penebangan liar tanpa ada pelaku. Sehingga ada kemungkinan bahwa kegiatan Operasi ini telah di ketahui oleh para pelaku.		
JUMLAH LUAS HUTAN YANG DIAMANKAN SEKSI WILAYAH III Pontianak									251.681,31				

TOTAL LUAS YANG DIAMANKAN BALAI GAKKUM

1.067.124,83

REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2019																				
BALAI PENGAMANAN DAN PENEKAGKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN																				
WILAYAH KALIMANTAN SEKSI 1 PALANGKARAYA																				
NO.	No Registrasi			Tanggal Penerimaan	Nama Pengadu	Alamat	Lokasi Kejadian		Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Uraian Kejadian	Penyelesaian yang diinginkan	Tipologi (K/L/H/LHK)	Verifikasi		Hasil Verifikasi	REKOMENDASI	Status Penanganan Terakhir	Keterangan	
	Seksi	Online					Kota/ Kabupaten	Provinsi						Tanggal SPT	SPT No.					Verifikator
1	v	#190495	7 January 2019	Kantor Hukum NIE, SH & REKAN	Jalan Perdana No. 29 RTA Milono KM 7 Palangka Raya	Katingan	Kalimantan Tengah	PT DWIMA GROUP dan Kelompok Tani DAYAK MISIK	Illegal Logging	Terjadi illegal logging oleh oknum masyarakat setempat di wilayah area hutan Kelompok Tani Dayak Misik konsesi HPH PT DWIMA GROUP Desa Tumbang Mandurei, Kece. Marikit, Kab. Katingan	Agar BPPHLHK Wilayah 1 Palangka Raya dan HPH PT DWIMA GROUP untuk: 1) Segera menyelesaikan permasalahan IL tersebut dan Kelompok Tani Dayak Misik Desa Tumbang Mandurei siap membantu jika dibutuhkan dalam operasi guna menunjuk lokasi area perambahan hutan yang dimaksud; 2) Segera menindaklanjuti laporan secara cepat sesuai kondisi dan teknis kerja BPPHLHK Seksi Wilayah 1 Kalimantan	Agar BPPHLHK Wilayah 1 Palangka Raya dan HPH PT DWIMA GROUP untuk: 1) Segera menyelesaikan permasalahan IL tersebut dan Kelompok Tani Dayak Misik Desa Tumbang Mandurei siap membantu jika dibutuhkan dalam operasi guna menunjuk lokasi area perambahan hutan yang dimaksud; 2) Segera menindaklanjuti laporan secara cepat sesuai kondisi dan teknis kerja BPPHLHK Seksi Wilayah 1 Kalimantan	K	7 May 2019	ST.68/BPPHLHK-IV-SWI/5/2019	Yahya S, Agus S, Miskan	1. Bahwa lokasi yang diduga dalam oleh Kelompok Tani Dayak Misik berada di dalam areal izin konsesi IUPHHK-HA PT Hutani Mulya (PHM Dwima Group) berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat di lapangan, diowery ke dalam SK IUPHHK-HA No. SK 265/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 529 Tahun 2012; 2. Sampai saat ini sudah tidak ada lagi aktivitas illegal logging, baik berupa pengangkutan kayu, penebangan kayu dan pembukaan lahan dengan menggunakan chain saw dan alat berat berupa excavator di areal yang diduga diklaim oleh Kelompok Tani Dayak Misik.	Perlu dilakukan kegiatan penggabungan yang melibatkan instansi terkait (OY)	Dalam perencanaan operasi	Iny
2		#190107	16 January 2019	Sdr. Safrudin (Direktur Eksekutif Save Our Borneo)	Jalan Temengung Tilung Gang Savero No 84 Palangka Raya 73112 Kalimantan Tengah Telp (0536) 3225963 WA 08115220289	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah		Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan	Dugaan terjadinya praktek pembukaan lahan gambut dan hutan alam untuk perkebunan kelapa sawit skala besar dalam kawasan di Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil koordinasi terkait kegiatan tersebut, BRG telah melakukan pengecekan	Agar berkoordinasi dengan BRG untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan melaporkan hasil penanganannya kepada Direktur PPSA	K	22 January 2019	ST.11/BPPHLHK-IV-SWI/1/2019	Armanah, S.P., Anis Raba, Sutriyato	1. Terjadi pembukaan lahan di Kawasan Hutan Produksi (HP) dan tidak memiliki izin untuk perkebunan kelapa sawit seluas ±47 Ha dan yang dicanangkan sekitar 50 Ha di KM 15 Jalan Pangkajenean Bun - Kotawaringin Lama diduga menggunakan 1 unit alat berat excavator. 2. Kegiatan diinisiasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Mendawai Seberang atas dasar musyawarah dan mutakat dari anggota Kelompok Tani Barriaran Kelurahan Mendawai Seberang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memanfaatkan lahan yang masih kosong tanggal 17 November 2017.	Agar dilakukan penyelidikan oleh PPNS Kehutanan (PHN)	Dalam proses penyelidikan	Iny	
3		#180422	16 January 2019	PT. Antang Gunung Meratus	Jalan Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220	Kab. Banjar, Tapin dan HSS	Kalimantan Selatan	Kuasa Pertambangan Barubara	Penambangan ilegal tanpa izin	Perambangan ilegal tanpa izin di areal PKP2B PT. Antang Gunung Meratus	Kiranya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait disedrah dan melaporkan hasil penanganan pada Direktur PPSA	K	7 May 2019	ST.67/BPPHLHK-IV-SWI/5/2019	Syamsul Ilyas, Ahmad Nazmi, Muhammad Medika	1. Ditemukan adanya kegiatan penambangan batubara secara legal dalam areal PKP2B PT Antang Gunung Meratus sebanyak 6 titik; 2. Pada salah satu titik ditemukan alat berat berupa 3 excavator yang tidak beroperasi berada dalam kawasan IPPKH yang berada tidak jauh dari lokasi PETI 5 B B1-S yaitu di titik koordinat 020 54' 53,5" LS dan 1150 15' 47,5" BT yang diduga kuat telah melakukan kegiatan penambangan batubara; 3. Upaya penanganan terhadap PETI yang berada dalam konsesi PKP2B PT ACM telah dilakukan dengan melaksanakan penertagapan terhadap pelaku secara langsung di lapangan yang dilakukan oleh Polres setempat, Polda Kalsel, Baselkim Mabes Polri dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut chief security, kegiatan PETI tetap berjalan apabila tidak ada pengawasan oleh pihak perusahaan.	1. Agar perusahaan meningkatkan pengamanan dengan patroli secara rutin dengan melibatkan Kepolisian, TNI dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan; 2. Perusahaan menambur tenaga pengamanan kawasan; 3. Dilakukan penyelidikan terhadap pelaku dengan melibatkan instansi yang terkait seperti Polisi, TNI, Pohut dan SPORC Gakkum Sekwil Palangka Raya; 4. Agar perusahaan segera melapor ke Kepolisian, Pohut Kalsel dan SPORC Gakkum Sekwil I Palangka Raya apabila menemukan PETI dalam areal izin konsesi untuk	Dalam proses penyelidikan	Andy Mecs	
4	v	#190496	21 January 2019	Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli Tanah Air	Palangka Raya	Kab. Murung Raya	Kalimantan Tengah		Penebangan tumbuhan langka (Tengkawang)	Penebangan tumbuhan langka (Pohon Tengkawang) oleh PT. Samudera Rejeki Perkaasa	Agar segera ditindaklanjuti	K	7 May 2019	ST.70/BPPHLHK-IV-SWI/5/2019	Imam N. Danang D W, Sutriyato	1. PT Samudera Rejeki Perkaasa telah memiliki perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Pada lokasi pengecekan yang dilaporkan adanya perambahan/penebangan pohon tengkawang, telah dilakukan pengecekan dan tim tidak menemukan adanya tunggak bekas dari pohon tersebut; 3. Berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) Tahun 2018, No 9182 dan 9188 merupakan jenis Nyotah dan Kempas, fisk kayu sudah tidak ada di areal PT Samudera Rejeki Perkaasa karena telah terjual dan diangkut ke kontainer; 4. Berdasarkan pengecekan dokumen Laporan Hasil Produksi 2018 dengan kesesuaian di Buku Ukur 2018 pada pohon produksi No 9182 dan 9188 merupakan kelompok jenis meranti yaitu Nyotah dan Kempas; 5. Berdasarkan peraturan terbaru Menteri LHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LHK No P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2019 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Jenis Tengkawang tidak ada dalam lampiran daftar P.106 tersebut.	1. Agar PT Samudera Rejeki Perkaasa melakukan kegiatan sosialisasi mengenai peraturan LHK terbaru kepada karyawan dan masyarakat sekitar hutan; 2. Memperbanyak plang himbauan yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa yang dilindungi di dalam areal kerja PT Samudera Rejeki Perkaasa agar karyawan maupun masyarakat sekitar mengetahui tumbuhan dan satwa yang termasuk dilindungi (PTT)	Pengaduan Tidak Terbukti. Selesai.	Andy Mecs	
5		#190498	28 January 2019	Laporan melalui telepon dari Manajemen PT JBG Surat (Pak Rusadi)		Tanah Laut	Kalimantan Selatan	PT Jorong Baratama Greston	Kehutanan	Pendudukan lahan dengan cara sepihak atau okupasi oleh pihak lain di dalam area IPPKH PT JBG		K	22 April 2019	ST.59/BPPHLHK-IV-SWI/4/2019	Rusadi, Junaidi I Ketut P	Kegiatan dilakukan kelompok masyarakat pekerja lambang ilegal diduga milik kelompok penambang Dresi Dagar terjadi di sekitar IPPKH PT JBG. Kejadian ini berada di dalam kawasan hutan Hutan Produksi (HP) di Sungai Katal - Katal Desa Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, namun lokasi penambangan ilegal tersebut berada di luar perizinan IPPKH PT JBG.	Perlu dilakukan kegiatan pengamanan oleh Balai Gakkum PPHLHK Wilayah Kalimantan (OY)	Dalam perencanaan pengamanan	Iny	
6		#190499	1/2/2019	Lisan dari Direktur PPSA	Tamiang Layang	Barito Timur	Kalimantan Tengah		Kehutanan	Laporan atas penanganan kasus tindak pidana illegal logging kayu lahan yang ditangani pihak Polres Barito Timur		K	11 February 2019	ST.18/BPPHLHK-IV-SWI/2/2019	Karyono, S.Hut., Andy Mecs Gian, S.H.	1. Kasus yang ditangani yaitu tindak pidana kehutanan berupa bertangkap tangan sedang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu plat / balok jenis rimba campuran dengan berbagai macam ukuran yang berjumlah ± 17 MP (tujuh belas meter kubik) dengan menggunakan 1 (satu) unit RG Mitsubishi Fuso FM 517 H, No Pol DA 1301 AH, warna kuning tanpa dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Pelaku yang di sangkakan berjumlah 2 (dua) orang tersangka an. Supomo Bin Madsujangi dan tersangka an. Choirul Hudah Bin Hardi Munaj (Am); 3. Dalam hal penanganan perkara 2 (dua) orang tersangka tersebut an. Supomo Bin Madsujangi dan an. Choirul Hudah Bin Hardi Munaj (Am) sudah sampai dalam tahap P21 penyerahan tempona dan belum bukti pada Kejaksaan Negeri Barito Timur.	Pidana (sudah ditangani oleh Polres Barito Timur dan sudah sampai dalam tahap P21 penyerahan tersangka dan barang bukti pada Kejaksaan Negeri Barito Timur.) (-)	Selesai	Iny	

7	Limpahan dari Pusat (Dr. PPH) Nomor S.11/PPH/PPH/01/ GKM.2/2/2019	#190500	13 February 2019		Barito Utara	Kalimantan Tengah	PT Victor 2-3 Mega	Tumpang tindih perizinan kawasan hutan	Dugaan tumpang tindih PT Victor 2-3 Mega dengan Migas di kawasan Hutan Produksi wilayah Kecamatan Lahel Barat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah	Agar dilakukan pengumpulan data dan informasi di lapangan	K	7 May 2019	ST.71/BPPHLHK-IV-SWI/5/2019	Andhik S. Tri Handika P. Saife	1. Tidak ditemukan adanya tumpang tindih areal antara IPPKH untuk Operasi Produksi Batubara PT Victor Dua Tiga Mega dengan IPPKH untuk Kegiatan Eksploitasi SKK Migas-Ophr Indonesia; 2. PT Victor Dua Tiga Mega telah melaksanakan kegiatan operasi produksi (penambangan, pengangkutan, dan penjualan) sejak tahun 2004 dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 yaitu berada di Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPLL); 3. PT Victor Dua Tiga Mega telah memiliki IPPKH untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya dari MenLHK No SK.542/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2018 tanggal 27 November 2018; 4. PT Victor Dua Tiga Mega telah mengusulkan IPPKH dan sarana penunjangnya termasuk pelabuhan (jetty), kantor (site office), dan jalan hauling batubara sesuai Rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 522/0068/BPMDP tanggal 28 Januari 2015; 5. IPPKH dari Menteri LHK PT Victor Dua Tiga Mega diberikan secara bertahap karena lokasi pelabuhan khusus (jetty), bangunan kantor (site office), dan sebagian jalan hauling batubara belum termasuk ke dalam kajian AMDAL yang ada; 6. Berdasarkan analisis peta IPPKH di Provinsi Kalimantan Tengah, penggunaan jalan hauling batubara dan pelabuhan PT Victor Dua Tiga Mega dapat menggunakan jalan dan pelabuhan existing milik PT Pada id yang melewati areal tambang IPPKH PT Victor Dua Tiga Mega; 7. Berdasarkan hasil plotting titik koordinat lapangan Tim Pengawasan Pengendalian dan Pelembagaan SK Menhut No. 529 Tahun 2012, pelabuhan (jetty) dan bangunan kantor (site office) berada pada Kawasan Hutan Produksi yang Dapat dikomersi (HPK) dan berdasarkan peta lampiran Perda No. 6	1. Agar PT ASL segera melaksanakan kegiatan usaha penguasaan hutan yang ril di areal kerja PT ASL dan melakukan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang keberadaan PT ASL sebagai upaya menghentikan aktivitas penambangan liar di areal PT ASL; 2. Agar PT ASL meningkatkan kegiatan patroli pengamanan dan membuat papan himbauan, larangan dan informasi di dalam areal kerja PT ASL untuk menjaga dan mencegah gangguan kawasan hutan; (cek ke BABS agar bersurat ke GPH untuk melakukan sosialisasi pengamanan lahan)	Ditangani oleh Direktorat PHP	Iny		
8	WA dari Kepala KPHP Barito Hilir ke Pak Kasi SW 1	#190501	13 February 2019	Heredose (Kepala KPHP Barito Hilir)	Barito Timur	Kalimantan Tengah	Illegal Logging	Illegal logging di wilayah Barito Timur lokasi Kawasan Hutan Konservasi IUPPH Restorasi Ekosistem PT Alam Sukses Lestari pada jalan hauling PT Adaro KM. 22-25			K	7 May 2019	ST.72/BPPHLHK-IV-SWI/5/2019	Raden Yoyong C. Alwin K. Dwi P.	1. Tim verifikasi menemukan tiga titik lokasi dan menemukan lumpukan kayu bulat kecil, kayu olahan berbentuk balok, dan alat angkut berupa sampul/jukung kecil yang digunakan untuk mengangkut kayu dari lokasi tambang ke prangi jalan angkutan hauling batubara yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat sekitar dalam skala kecil karena nilai komersial kayu yang rendah; 2. Tim tidak menemukan aktivitas penguasaan hutan, sarana, dan prasarana PT ASL, baik bangunan fisik, sarana angkutan, dan alat berat serta tidak ada papan pengumuman dan larangan yang dibuat oleh PT ASL; 3. Hasil plotting titik koordinat lokasi temuan kayu bulat kecil dan kayu olahan pada tiga lokasi temuan pada Peta Lampiran SK Menhut No. 529 Th. 2012 menunjukkan bahwa ketiga lokasi tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap.	1. Tim verifikasi menemukan tiga titik lokasi dan menemukan lumpukan kayu bulat kecil, kayu olahan berbentuk balok, dan alat angkut berupa sampul/jukung kecil yang digunakan untuk mengangkut kayu dari lokasi tambang ke prangi jalan angkutan hauling batubara yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat sekitar dalam skala kecil karena nilai komersial kayu yang rendah; 2. Tim tidak menemukan aktivitas penguasaan hutan, sarana, dan prasarana PT ASL, baik bangunan fisik, sarana angkutan, dan alat berat serta tidak ada papan pengumuman dan larangan yang dibuat oleh PT ASL; 3. Hasil plotting titik koordinat lokasi temuan kayu bulat kecil dan kayu olahan pada tiga lokasi temuan pada Peta Lampiran SK Menhut No. 529 Th. 2012 menunjukkan bahwa ketiga lokasi tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap.	1. Tim verifikasi menemukan tiga titik lokasi dan menemukan lumpukan kayu bulat kecil, kayu olahan berbentuk balok, dan alat angkut berupa sampul/jukung kecil yang digunakan untuk mengangkut kayu dari lokasi tambang ke prangi jalan angkutan hauling batubara yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat sekitar dalam skala kecil karena nilai komersial kayu yang rendah; 2. Tim tidak menemukan aktivitas penguasaan hutan, sarana, dan prasarana PT ASL, baik bangunan fisik, sarana angkutan, dan alat berat serta tidak ada papan pengumuman dan larangan yang dibuat oleh PT ASL; 3. Hasil plotting titik koordinat lokasi temuan kayu bulat kecil dan kayu olahan pada tiga lokasi temuan pada Peta Lampiran SK Menhut No. 529 Th. 2012 menunjukkan bahwa ketiga lokasi tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap.	1. Tim verifikasi menemukan tiga titik lokasi dan menemukan lumpukan kayu bulat kecil, kayu olahan berbentuk balok, dan alat angkut berupa sampul/jukung kecil yang digunakan untuk mengangkut kayu dari lokasi tambang ke prangi jalan angkutan hauling batubara yang diduga dilakukan oleh oknum masyarakat sekitar dalam skala kecil karena nilai komersial kayu yang rendah; 2. Tim tidak menemukan aktivitas penguasaan hutan, sarana, dan prasarana PT ASL, baik bangunan fisik, sarana angkutan, dan alat berat serta tidak ada papan pengumuman dan larangan yang dibuat oleh PT ASL; 3. Hasil plotting titik koordinat lokasi temuan kayu bulat kecil dan kayu olahan pada tiga lokasi temuan pada Peta Lampiran SK Menhut No. 529 Th. 2012 menunjukkan bahwa ketiga lokasi tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap.	Selesai	Iny
9	Surat dari Balibang LHK Banjarbaru Nomor: S.21/BP2LHK.Bj/S/PLA.3.2/2/2019	#190502	20 February 2019	Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru	Jalan Ahmad Yani KM. 28.7 Gantung Manggis - Landisian Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Kalimantan Tengah	Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tumbang Nusa	Kehutanan	Indikasi pengalangan areal KHDTK Tumbang Nusa di Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya	Agar BPPHLHK Wilayah 1 Palangka Raya dapat melakukan pendataan atau tindakan-tindakan lain, serta mohon agar dapat terus dilakukan patroli atau tindakan-tindakan pengamanan lain di KHDTK Riam Kiwa di Kabupaten Banjar	K	22 February 2019	ST.26/BPPHLHK-IV-SWI/2/2019	Armanan, Biandegus, Rizky Ananella	1. Menurut fakta administrasi, lokasi KHDTK Tumbang Nusa hanya memiliki izin penunjukan kawasan hutan dengan tujuan Kehutanan; 2. Dari beberapa hasil pengambilan titik koordinat dan hasil plotting peta SK 529/Menhut/0/2012 areal tersebut berada di hutan lindung dan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.76/MENHUT/0/2005 berada di dalam areal KHDTK Tumbang Nusa; 3. Dari hasil pemeriksaan masyarakat dan Kepala Desa Tanjung Taruna, mereka membenarkan bahwa memiliki lahan di dalam Kawasan KHDTK Tumbang Nusa; 4. Kepala Desa Tanjung Taruna tidak akan mengeluarkan lagi Dokumen Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan yang berada di areal KHDTK Tumbang Nusa; 5. Dengan tidak adanya pal batas KHDTK Tumbang Nusa dan papan himbauan /larangan terkait keberadaan KHDTK Tumbang Nusa mengakibatkan ketidaktauan masyarakat terhadap areal KHDTK Tumbang Nusa sehingga masyarakat melakukan pengklaman lahan.	1. Rekomendasi agar Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru berkoordinasi dengan BPKH Wilayah XXI Palangka Raya terkait dengan kawasan KHDTK Tumbang Nusa yang belum tata batas; 2. Menyampaikan Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru agar melibatkan masyarakat dalam kegiatan KHDTK Tumbang Nusa. (Rek ke UL)	Dalam proses penyusunan surat ke pengadu	Iny		
10	Surat dari Direktorat PPSA Nomor: S.28/PPSA/PP/PGK M.0/2/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal bantuan strat PPLH	#190503	25 February 2019	Masyarakat	Barito Utara	Kalimantan Tengah	PT Antang Ganda Utama	Perubahan kawasan di tambang batubara	Dugaan perubahan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit PT Antang Ganda Utama		K	25 February 2019	ST.27/BPPHLHK-IV-SWI/2/2019	Andhik Setiawan, Muhammad Medika dan tim Subdit Pengaduan	1. PT AGU telah memiliki perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Tim belum memperoleh informasi terkait perizinan-perizinan dimaksud; 2. Adanya tidak serasian perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, dan Bupati Barito Utara mulai dari izin pelepasan kawasan hutan, hak guna usaha, dan izin lokasi yang kus dan letaknya tidak sesuai; 3. Terjadi perubahan kebijakan tata ruang di Provinsi Kalimantan Tengah yang turut mempengaruhi pemberian perizinan yang dikeluarkan pemerintah kepada PT AGU; 4. Berdasarkan overlay jalan hauling PT Austral Byna, rencana jalan izin pinjam paksa kawasan hutan PT Bumi Kenirai Perlewi, dan lokasi kebun kelapa sawit PT AGU ke dalam SK lampiran SK Menhut No. 529 Tahun 2012 berada dalam kawasan Hutan Produksi yang Dapat dikomersi (HPK) berdasarkan SK Menhut No. 529 Tahun 2012; 6. Tim masih memerlukan dokumen peta lampiran perizinan PT AGU untuk menganalisis permasalahan dugaan perubahan kawasan hutan oleh PT AGU; 7. Hasil pemantauan tim bahwa PT AGU tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sesuai dengan izin lingkungan; 8. DLH Kab Barito Utara telah membentuk sanksi administratif kepada PT AGU.	Rekomendasi Penetapan Sanksi Administrasi oleh DLH Kabupaten Barito Utara terkait Sanksi Administrasi	Sedang berkoordinasi dengan DLH Kabupaten Barito Utara terkait Sanksi Administrasi	Iny		

11	Disposisi Balai tanggal 5 Maret 2019	#190527	18 March 2019	Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Seruyan	Barito Utara	Kalimantan Tengah	CV Permata Indah	Pertambangan batubara	Klarifikasi terkait laporan dugaan pelanggaran oleh CV Permata Indah (Penegang IUP Operasi Produksi Batubara) di Kabupaten Barito Utara Prov Kalimantan Tengah. 1. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyampaikan informasi dari Ketua BPH Alansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kab Barito Utara atas dugaan pelanggaran oleh CV Permata Indah di Desa Teluk Melawai Kec. Lahai Barat Kab. Barito Utara sebagaimana surat Nomor: S.415/PPHPPHKN/GKM.2/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018. 2. Direktur CV PI melalui surat Nomor: 081/DIR-PI/XI/2018 tanggal 1 November 2018 mengajukan permohonan untuk kegiatan produksi batubara seluas ±777,10 Ha. 3. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyampaikan bahwa kawasan yang dimohon oleh CV PI berada pada kawasan Hutan Produksi (HP) seluas ±772,65 Ha, kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas ±8,82 Ha dan tubuh air seluas ±1,22 Ha	Agar BPPHLHK Seki Wilayah Kalimantan menindaklanjuti informasi tersebut dan melaporkan hasil pengumpulan data dan informasi serta langkah penegakan hukum yang telah ditempuh	K				1. Alansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Barito Utara mengeluarkan Surat Nomor 02/AMANDA/BU/2018 pada tanggal 25 November 2018, yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan KPK RI untuk mencabut serta mengklarifikasi surat kirmas sebelumnya Nomor : 09/AMANDA/BU/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal laporan dugaan pelanggaran oleh CV. Permata Indah. 2. Hasil pengecekan lapangan dan konfirmasi pada pihak CV. Permata Indah, bahwa areal pemohonan IPPKH CV. Permata Indah berdasarkan SK. Menhut Nomor : 529/Menhut-1/2012 berada pada kawasan Hutan Produksi (HP), sedangkan atas pertimbangan teknis terhadap pemohonan IPPKH an. CV. Permata Indah dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Surat Nomor : S.25/BPKH.XXI/PKH/AF/01/2018 tanggal 9 Januari 2018 owelity antara areal yang dimohon dengan peta perkembangan PKH Provinsi Kalimantan Tengah skala 1 : 250.000 berdasarkan SK. Nomor : 6025/MENLHK- PKTL/kuh/PLA/21/1/2017 areal tersebut berada pada Kawasan Hutan tetap (HP) seluas ± 3.547 Ha, Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas ± 19 Ha, kawasan perairan seluas 1 Ha, dan sudah dalam proses pemohonan izin pinjam pakai kawasan hutan an. CV. Permata Indah dengan bukti adanya landsa terima berkas kelengkapan dokumen persyaratan perzinian / non perzinian IPPKH pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tanggal 6 November 2018. 3. Pada lokasi areal pemohonan IPPKH an. CV Permata Indah saat ini belum ada aktivitas penambangan batubara.	Pengaduan Tidak Terbukti (PTT)	Selesai	
12	Limpahan dari DLH Prov Kalteng Nomor: 12/SB/DM/2019 tanggal 8 Maret 2019	#190585	21 March 2019	LSM Baritim Membangun	Jl. A. Yani No. 240 Dusun Tim Timang Lipang	Barito Timur	Kalimantan Tengah	PT Karya Inti Sakti Bara	Penambangan legal dan keausan lingkungan	Berdasarkan keputusan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal No. 68/III/PPM/2019 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Persetujuan Penyesuaian Penanganan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Batubara kepada PT Karya Inti Sakti Bara, ditemukan beberapa keajnggalan sebagai berikut: 1. Tidak membuat, melaporkan, dan mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebelum penambangan atau konstruksi dimulai; 2. Produkasi pertahun jumlahnya harus jelas; 3. Mengangkat dan menempatkan KTT sebelum melakukan kegiatan dan harus selalu berada di lokasi selama kegiatan penambangan/konstruksi karena yang bersangkutan sebagai penanggung jawab tambang; 4. Belum membayar Jaminan (Jamrek) dan Jaminan paska tambang berahki; 5. Sanksi dan denda serta kewajiban harus dibayar sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; PT KISB telah	Agar segera melakukan tindakan hukum kepada perusahaan guna mencegah kerugian negara, daerah, dan masyarakat setempat, serta menghentikan kegiatan PT KISB beserta perusahaan kontraktornya.	LH	7 May 2019	ST.73/BPPHLHK-IV-SWI/5/2019	Endrae, Arniawan, Andri R	1. PT KISB telah membuat 1 (satu) buah kolom penampungan limbah hasil produksi dengan ukuran sekitar 15 m x 20 m sehingga apabila hujan turun, air limbah produksi tambang tidak langsung masuk ke sungai di sekitar tambang; 2. Terkait laporan mengenai penggunaan solar bersubsidi oleh pihak perusahaan, KLRH tidak memiliki wewenang dalam menangan permasalahan penggunaan solar bersubsidi; 3. Terdapat 2 (dua) tumpukan batubara hasil produksi PT KIS yang dikerjakan oleh kontraktor PT Karya Insan Kalimantan dan PT Sinar Mula Abadi Jaya dan diperkirakan berjumlah 10 ribu metrik ton; 4. Berdasarkan informasi dari masyarakat dan sub kontraktor PT KIS serta hasil peninjauan lapangan, PT KISB sudah tidak beroperasi sejak bulan Februari 2019 karena ada permasalahan internal perusahaan yang belum selesai; 5. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, belum ditemukan adanya pelanggaran di bidang LHK karena saat ini berada di lapangan tidak ada aktivitas penambangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.	Rekomendasi pengawasaan oleh DLH Kab. Barito Timur (Rek ke UL)	Telah berkoordinasi dengan DLH Barito Timur	Iny
13	Pendampingan Tim PPSA	#190586	9 May 2019			Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	PT Bangun Jaya Alam Permai	Kehutanan	Dugaan pelanggaran tindak pidana penguasaan lahan hutan produksi PT Bangun Jaya Alam Permai	Mohon dukungan staf untuk melakukan verifikasi pengaduan secara bersama-sama	K	7 May 2019	ST.74/BPPHLHK-IV-SWI/5/2019	Hendro, Chairudin bersama Tim Pengaduan PPSA	Pengaduan Tidak Terbukti	Merunggu laporan dari Tim Pengaduan Pusat	Iny	
14	Disposisi Balai Nomor S.64/PPSA/PP/GK M.05/2019	#190384	23 May 2019	Ronal melalui PPSA (21 Maret 2019)	Dusun Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan HP. 08115033178	Kotabaru	Kalimantan Selatan	PT Alamraya Kencana Mas (Desa Mangka Kecamatan Pamukan Barat)	Pencemaran lingkungan di kebun dan pabrik kelapa sawit	1. PT PAKM diduga melakukan pembukaan di lokasi yang tidak berizin hingga hanya ke sungai yang dilakukan oleh warga; 2. Dampak yang diakibatkan dari kegiatan tersebut yaitu penyakit gatal, sakit perut, dan muntah darah yang dirasakan oleh warga.	Dilakukan pengecekan air limbah, penindakan terhadap pejabat yang melakukan pemboran, dan penutupan sementara kegiatan perusahaan	LH	24 May 2019	ST.80/BPPHLHK-IV-SWI/5/2019	Bambang, Ahmad Nazmi, Ti Handika P	1. Perusahaan telah mempunyai izin pembuangan air limbah ke tanah dari Bupati Kotabaru Nomor: 503/05/PPAL-BPP/TPM/2017 tanggal 2 April 2017 tentang Izin Pemeliharaan Air Limbah ke Tanah (Land Application) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Alamraya Kencana Mas yang berlaku selama 5 (lima) tahun; 2. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Mangka, memang ada warga yang mengeluhkan penyakit gatal-gatal namun tidak terfalu parah sampai menyebabkan muntah darah dan penyebabnya tidak bisa disimpulkan sebagai akibat dari luasan limbah perusahaan; 3. Berdasarkan data dan keterangan dari Puskesmas Desa Sengayam, tidak ada Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menyebabkan banyak warga yang mengeluhkan penyakit gatal-gatal, diare dan muntah darah sebagai akibat dari pencemaran limbah di Desa Mangka.	Pengaduan Tidak Terbukti (PTT)	Selesai	Iny
15	Media online (https://zonadramik anews.com/bidk/2019/06/11/dugaan-pembalakan-hutan-kalteng-lancar-tanpa-tersebut-hukum)	#190590	11 June 2019		Dusun Tanjung Jaya Desa Moroy Raya Kecamatan Mantangia dan Kampung Taubahan Atay Sei Mantang	Kipuas	Kalimantan Tengah		Illegal logging	Dugaan pembalakan hutan yang melibatkan oknum petugas dengan modus pembelian lahan untuk membuka kebun kelapa sawit. Di lokasi ditemukan tumpukan kayu dengan berbagai ukuran diameter serta sejumlah truk dan alat berat yang keluar masuk.	Agar pihak pemerintah dan aparat penegak hukum menindak oknum pembalak kayu tersebut	K	11 June 2019	ST.86/BPPHLHK-IV-SWI/6/2019	Raden Young C, Junaidi, Budi S	Pertindak dilakukan penyelidikan secara terbuka yang melibatkan PPNS dan anggota Unit Operasi Seksi Wilayah I Palangka Raya (PHF)	Dalam proses penyelidikan		
16	WhatsApp melalui Darbringung Seki 1	#190591	25 June 2019	(IC)		Tanah Laut	Kalimantan Selatan		Penambangan legal	Ditemukan 2 unit ekskavator dan 1 unit dozer yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan legal di area yang dikerjakan oleh Dani Dagar	Agar dilakukan penyelidikan terhadap pelaku dengan melibatkan instansi terkait (PHF)	LH	11 June 2019	ST.88/BPPHLHK-IV-SWI/6/2019	Muhammad Meika, Ahmad Nazmi, Adi S	1. Telah ditemukan adanya kegiatan penambangan batubara secara legal di kawasan hutan produksi di sekitar PKP2B/IPPKH PT Jorong Sutarna Greston. 2. Peta luasan penambangan tanpa izin tersebut diduga adalah kelompok Dani Deger dan Nang Kosim. 3. Di lokasi PETI, telah ditemukan alat-alat berat berupa excavator 2 unit, dump truck 5 unit, mesin pompa 2 unit, pondok kerja, lokasi bekas stockpile batubara, dua lubang tambang/void bekas kegiatan penambangan. 4. Upaya penanganan terhadap PETI yang berada kawasan hutan produksi di sekitar PKP2B/IPPKH PT BRC telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penerbitan yang dilakukan oleh SPORC Gakkum Seksi Wilayah I Palangka Raya pada Maret 2019. Namun menurut Chief Security kegiatan PETI tetap berjalan apabila tidak ada pengawasan oleh aparat berwenang (kepolisian, TNI, Dishtu Prov. Kaltel, SPORC Gakkum Sekwil I Palangka Raya).	Sudah dilakukan penyelidikan dan sudah tidak ada lagi kegiatan PETI		
17	WhatsApp melalui Darbringung Seki 1	#190592	25 June 2019	(IC)		Palangka Raya	Kalimantan Tengah		Kehutanan	Dugaan pembalakan lahan secara sporadis dalam kawasan konservasi Taman Nasional Sebangau	Dugaan pembalakan lahan secara sporadis dalam kawasan konservasi Taman Nasional Sebangau	K	11 June 2019	ST.87/BPPHLHK-IV-SWI/6/2019	Hardiana, Tri Handika P, Danang DW	Agar Balai TNS mempercepat tata batas kawasan, karena di lokasi yang ada saat ini sudah 3 kali terjadi perubahan SK dan perubahan batas kawasan yang mengakibatkan konflik antara TNS dan masyarakat. (Rek ke UL)	Dalam penyusunan draft surat tindak lanjut ke Balai TNS		

18	Informasi dari Kabalai PPHLHK Wilayah Kalimantan	#190680	3 July 2019		Pulang Pisau	Kalimantan Tengah		Kebakaran hutan	Terjadinya kebakaran di kawasan hutan lindung koordinat 2.34388890 S, 114.08611110 E	LH	3 July 2019	ST.101/BPPHLH K-IV-SWI/7/2019	Ida Mela Sofa, Arii Raba, Romhamdan Inayah	Dari hasil pengamatan di lapangan, telah terjadi kebakaran di area hutan lindung wilayah kerja KPHP Unit XXXI pada KPHP UPT Kahayan Hilir, Jalan Trans Kalimantan, Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Koordinat 2.343890 S, 114.086110 S) sejak 1 Juli 2019 dengan luas area terbakar kurang lebih 3 hektar dan telah dilakukan upaya pemadaman oleh Tim Lapangan Pos Jabiren yang terdiri dari MPA Desa Tumbang Taruna dan Tumbang Nusa, Polsek Kab. Pulang Pisau, BPBD Prov. Kalteng, Babinsa TNI AD. Sumber kebakaran masih belum diketahui dan masih dalam pemeriksaan oleh Polres Kabupaten Pulang Pisau.	Pengaduan selesai (-)	Hasil koordinasi, sudah ditangani oleh Polres Pulang Pisau	
19	Surat dari Direktur Utama PT Berkat Cahaya Timber Nomor: 103/1000-BCT/VI/2019 tanggal 26 Juli 2019	#190681	29 July 2019	Djoko Agung Priatno	Soveresth Plaza Jl. Tah Bonar Simatungang Kav. 36 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430	Kotawaringin Timur, Kotawaringin, dan Seruyan	Kalimantan Tengah	PT Berkat Cahaya Timber	Illegal Logging	K	29 July 2019	ST.110/BPPHLH K-IV-SWI/7/2019	Rusadi, Slamet, Sals	Di temukannya kegiatan indikasi pengangkutan illegal logging yang berasal dari kawasan BCT, pengangkutan dengan menggunakan truk	Agar dilakukan operasi terhadap truk pengangkut kayu oleh SPORC Bakum Seksi 1 (OV)	Sudah dilakukan kegiatan operasi dan sudah tidak ada lagi kegiatan illegal logging	
20	Limpahan dari Batai melalui surat dari PPSA Nomor: S.87/PPSA/PPGK M.05/2019 tanggal 21 Juni 2019	#190491	29 June 2019	LSM Betang Hagatang		Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	Perkebunan kelapa sawit ilegal milik Suharadi alias Alin Pincang	Perkebunan kelapa sawit ilegal 1. Suharadi alias Alin Pincang diduga menggarap lahan seluas 2.400 Ha di Kab. Kotim yang berada di kawasan hutan dan menamahi dengan kelapa sawit sejak tahun 2004 yang berada di 5 lokasi yaitu: a. Desa Tehang 60 Ha dengan koordinat 0705411 - 9785720, b. KM 14 J. Pelantaran - Parengan seluas 400 Ha dengan koordinat 0710374 - 9778354, c. KM 7 J. Pelantaran - Parengan seluas 320 Ha dengan koordinat 0720626 - 9784561, d. Perkebunan kelapa sawit, Jarak Sepakat Jaya 1.500 Ha dengan koordinat 0720625 - 9784560, e. BHL KM 7 seluas 500 Ha dengan koordinat 0720064 - 9781307, 2. Kelima perkebunan sawit tersebut diduga mengancam kawasan Katampok Tani Hutan Jarak Sepakat Jaya yang diketuai oleh Sdr. Iwan Setia Putra, S.H	Agar ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mohon menyampaikan hasil penanganan pengaduan kepada Direktur PPSA.	K		Andhik, Amawan,	Dalam proses telah	Dalam proses telah		
21	Informasi dari Kabalai PPHLHK Wilayah Kalimantan melalui WhatsApp	#191007	4 August 2019			Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	PT Menteng Kencana Mas	Kebakaran lahan	LH	5 August 2019	ST.116/BPPHLH K-IV-SWI/8/2019	Ida Mela Sofa, Hendro Praseto, Ahmad Nazemi	Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan informasi dari pihak perusahaan bahwa kebakaran terjadi pada senin, 29 Juli 2019 s/d 2 Agustus 2019 pada titik koordinat 205633.43° S, 1140335.32° E dan 20576.97° S, 1140334.03° E yang secara administratif masuk ke dalam wilayah Desa Kanamit, Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kebakaran terjadi di luar konsesi PT. MKM yaitu pada lahan milik masyarakat yang berbatasan langsung dengan PT. MKM Desa Kanamit, Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas area terbakar ±100Ha. Kebakaran telah di tangani oleh tim terpadu dakkarhulita kab.kapuas dan Tim Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigadakarhulita) PT MKM. Upaya pencegahan kebakaran telah dilakukan oleh pihak PT MKM melalui kegiatan patroli harian, Menurut informasi dari pihak PT MKM kebakaran diduga disebabkan kompartan api dari tempat kebakaran yang ada di pinggir jalan yang berada diluar konsesi PT. MKM. PT MKM telah melaporkan kejadian tersebut kepada Satgas Karhutla Kab. Pulang Pisau dengan nomor surat 07/ANMKM/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019.	Telah dilakukan pengawasan oleh KLRH (-)	Selesai	
22	Informasi dari Kabalai PPHLHK Wilayah Kalimantan melalui WhatsApp	#191008	4 August 2019			Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	PT Sangkowong Sinta	Kebakaran lahan	LH				Dugaan kebakaran lahan di area PT Sangkowong Sinta	Agar dilakukan pengecekan lapangan dan dilakukan pemadaman	Selesai di Verifikasi Administrasi (-)	Selesai
23	Informasi dari Kabalai PPHLHK Wilayah Kalimantan melalui WhatsApp	#191009	4 August 2019			Palangka Raya (Pulang Pisau)	Kalimantan Tengah		Terdapat 2 hotspot dalam HPK Sebangau	LH	12 August 2019	ST.121/BPPHLH K-IV-SWI/8/2019	I Ketut P, Imam Mustopa, Agus S	Benar terjadi kebakaran berdasarkan hotspot yang dilaporkan yang berada di Hutan Lindung Sebangau masuk wilayah Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangari, Kota Palangka Raya. Secara fakta lapangan areal tersebut merupakan lahan yang dikuasai oleh masyarakat, namun Tim kesulitan mencari identitas pemilik lahan masyarakat yang terbakar karena tidak ada tanda di lokasi.	Tim melakukan pendataan terhadap pemilik lahan (-)	Dalam proses pendataan	
24	Informasi dari Kabalai PPHLHK Wilayah Kalimantan melalui WhatsApp	#191010	4 August 2019			Pulang Pisau	Kalimantan Tengah		Terdapat 6 hotspot di dalam kawasan KPHL Kapuas-Kahayan (Jabiren)	LH	12 August 2019	ST.120/BPPHLH K-IV-SWI/8/2019	Dwi Purwono, Alvin K, Dading B P	Benar terjadi kebakaran berdasarkan hotspot yang dilaporkan. Secara fakta lapangan areal tersebut merupakan lahan yang dikuasai oleh masyarakat, namun Tim kesulitan mencari identitas pemilik lahan masyarakat yang terbakar karena tidak ada tanda di lokasi.	Tim melakukan pendataan terhadap pemilik lahan (-)	Dalam proses pendataan	
26	Laporan melalui WhatsApp	#191014	1 August 2019	Robert T Silon		Lamandau	Kalimantan Tengah	PT Sawit Lamandau Raya (SLR)	Illegal Logging	K			I Ketut P, Hendro P, Chairudin	Dalam proses telah	Dalam proses telah		
27	Laporan pemantauan data hotspot tanggal 16-31 Juli 2019 yang besumber dari http://modis-catalog.japan.go.jp/monitoring/hotspot/index.	#191015	5 August 2019			Kapuas	Kalimantan Tengah	PT Industrial Forest Plantation	Kebakaran hutan	LH	5 August 2019	ST.117/BPPHLH K-IV-SWI/8/2019	Rohmatun Inayah, Muhamad Medika, Chairudin	1. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan informasi dari pihak perusahaan bahwa kebakaran terjadi pada Sabtu, 20 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB pada titik koordinat 01o 32' 07.2" LS, 114o 09' 32.3" BT yang secara administratif masuk ke dalam wilayah Desa Moro Raya, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Kebakaran terjadi pada Petak F022/F023 yang berjarak sekitar 15 km dari Dusun Bereng Garong Desa Moro Raya Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dengan luas area terbakar ±5 Ha. 3. Kebakaran telah dilangani oleh Tim Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigadakarhulita) PT IFF sebanyak 2 Regu Inti yang berjumlah 30 orang sejak Sabtu, 21 Juli 2019 pukul 18.00 WIB hingga Minggu, 21 Juli 2019 pukul 17.00 WIB. Pada hari Senin, 22 Juli 2019 dilakukan pendnginan di lokasi kebakaran. 4. Akibat dari kejadian ini, PT Industrial Forest Plantation mengalami kerugian tanaman Eucalyptus berumur ±9 bulan dan Akasia ±10 bulan serta kayu bahan baku serpih yang telah dibayarkan PSDHDR-nya sebanyak 2.846,59 m ³ . 5. Upaya pencegahan kebakaran telah dilakukan oleh pihak PT IFF melalui kegiatan patroli harian, sosialisasi kepada warga Desa Lahaei, Humbang Raya dan Gawing sebelum memasuki musim kemarau serta dengan melakukan pemasangan papan larangan pembakaran hutan dan lahan di berbagai lokasi di area konsesi. 6. Menurut informasi dari pihak PT IFF, kebakaran diduga disebabkan oleh oknum warga yang berburu di sekitar areal tanaman. 7. PT IFF telah menyampaikan laporan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan ke Polsek Mantangai melalui surat Nomor 06/EHS-IPF/VI/2019 tertanggal 20 Juli 2019 namun hingga Berita Acara ini dibuat, pihak perusahaan masih menunggu	Agar dilakukan pengecekan lapangan	Agar dilakukan pengecekan lapangan	Pada hari Sabtu, 10 Agustus 2019 telah dilakukan pemasangan Papan Peringatan terhadap barang bukti temuan pada lokasi kebakaran hutan dan lahan oleh KLRH berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: ST.604/PPSA/PPGK/2019 tanggal 1 Agustus 2019. Dalam proses penyidikan.

28	Laporan Harian Pemantauan Hotspot di Kawasan Hutan dan Konsesi oleh Intelligence Center Ditjen Penegakan Hukum LHK	#191020	5 August 2019		Barito Timur dan Barito Selatan	Kalimantan Tengah	PT Mitra Jaya Agro Palm dan Areal APL di Dusun Hilir	Lingkungan	Terdapat 4 hotspot dalam area PT Mitra Jaya Agro Palm dan Areal APL di Dusun Hilir dan tidak berada dalam kawasan hidrologis gambut dan 3 hotspot dalam APL Dusun Hilir dan tidak berada dalam kawasan hidrologis gambut	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	12 August 2019	ST.119/BPPHLH K-IV-SWI/8/2019	Armanaw, Agus E. Benigetius T	1. Tim tidak dapat mencapai lokasi kebakaran yang dilaporkan karena tidak ada akses. Tim hanya mengambil koordinat dari posisi terdekat dari hotspot yang dilaporkan. 2. Berdasarkan buki-bukti yang didapat di lapangan di areal perusahaan sawit PT Mitra Jaya Agro Palm, tim tidak menemukan adanya areal kebakaran dalam perusahaan. 3. Berdasarkan keterangan Pak Rawat Ketua Regu Masyarakat Peduli Api Dusun Bumbuling Baru Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur hotspot yang terdeteksi oleh Inteligent Center Ditjen Cakum LHK sudah diindaklanjuti dan berada di luar perizinan PT Mitra Jaya Agro Palm dengan perkiraan luas areal yang terbakar 20 Ha yang merupakan lahan masyarakat.	Agar dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan. (PHP)	Dalam proses pubuket		
29	Foto surat pengaduan kepada Kapolri RI yang diembuskan kepada Kementerian Kehutanan perihal mala kayu legal di Banjarmasin	#191021	23 August 2019	Budi Londo alias Budi Sujarwo	Kota Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	PT JPT Samudera Jaya Sakti	Jasa Transportasi Darat & Laut	Terkait adanya laporan peredaran kayu ilegal dari tebangun masyarakat liar berupa kayu plat gesekan chain saw (plat bentangan) di Banjarmasin oleh Mafa Kelas Kakap	Agar dilakukan pengecekan lapangan	K	21 August 2019	ST.129/BPPHLH K-IV-SWI/8/2019	M.Rahmadi, Yudianto, Ahmad Nazemi	Penyidikan tidak terbukti. Tidak ditemukan adanya peredaran kayu legal dari tebangun masyarakat liar berupa kayu plat gesekan chain saw yang dikemas dalam kontainer di Banjarmasin.	Pengaduan Tidak Terbukti (PTT)	Selesai	Nazemi
30	Peta Sebaran Hotspot di Wilayah Pemangku Kawasan Kab. Tanah Laut dan Bala PPKHL Wilayah Kalimantan update 28 Agustus 2019 dan arahan Ditjen KLHK	#191022	28 August 2019	Dody Ronald H, S Hut, M.Sc (Kepala Manggala Agni) Dapps Tanah Laut, Bala PPKHL Wilayah Kalimantan	Kab. Tanah Laut	Tanah Laut	Kalimantan Selatan	Lahan masyarakat	Lahan masyarakat	Diduga telah terjadi kebakaran di Kec. Panyipatan dan Kec. Bati Bati yang diduga dibakar oleh masyarakat untuk membuka lahan	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	27 August 2019	ST.136/BPPHLH K-IV-SWI/8/2019	Yudianto, Ahmad Nazemi, M. Medika Al Fazzy	1. Telah terjadi kebakaran lahan di Kec. Bati Bati dan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kabasi yang diduga akibat ulah manusia. 2. Terdapat tanaman mudah terbakar di sekitar lokasi yaitu bondong, semak, kalang, purun. 3. Kedua wilayah kecamatan tersebut merupakan lahan gambut yang merupakan daerah rawan kebakaran setiap tahun pada musim kemarau.	Mengingat lokasi yang terbakar merupakan lahan masyarakat yang rawan terbakar, Tim meminta kepada instansi terkait (Tim Terpadu Kanhut) agar melakukan sosialisasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. (Rak ke UL)	Dalam penyusunan draft surat tindak lanjut	Nazemi
31	Peta Sebaran Hotspot di Wilayah Pemangku Kawasan Prov. Kalteng oleh Bala PPKHL Wilayah Kalimantan update 5 September 2019 pukul 16.30 WIB dan arahan Ditjen KLHK	#191023	6 September 2019		Kipuas		Kalimantan Tengah	PT Kahayan Agro Lestari	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan 2 hotspot di area konsesi PT Kahayan Agro Lestari (S -1.799653, E 114.439201)	Agar dilakukan pengecekan lapangan dan dilakukan pemasangan segel	LH	#####	ST.147/BPPHLH K-IV-SWI/9/2019	Armanaw, Ida Mela S. Rebet	Tim tidak dapat mencapai lokasi kebakaran yang dilaporkan karena tidak ada akses untuk mencapai titik hotspot. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan keterangan dari Dinas Lingkungan Kab. Kapuas, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalteng, masyarakat sekitar dan Kepala Desa Timpaq, PT Kahayan Agro Lestari sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2016 karena tersangkut kasus hukum. Area yang terbakar tidak dapat dipertimbangkan karena tim tidak dapat menjangkau lokasi dan tim tidak membawa drone. Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar dan Kepala Desa Timpaq, upaya penanganan tidak dilakukan oleh pihak perusahaan karena perusahaan sudah tidak aktif lagi. Dari masyarakat juga tidak ada upaya pemadaman karena lokasi kebakaran berada jauh di dalam hutan dan sulit menuju lokasi.	Verifikasi Lapangan	Selesai	Rozky Anamela
32	Peta Sebaran Hotspot di Wilayah Pemangku Kawasan Prov. Kalteng oleh Bala PPKHL Wilayah Kalimantan update 5 September 2019 pukul 16.30 WIB dan arahan Ditjen KLHK	#191024	6 September 2019		Pulang Pisau		Kalimantan Tengah	PT Bangun Cipta Mitra Perkasa	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan 7 hotspot di area konsesi PT Bangun Cipta Mitra Perkasa (S -3.219979, E 113.92437)	Agar dilakukan pengecekan lapangan dan dilakukan pemasangan segel	LH	#####	ST.143/BPPHLH K-IV-SWI/9/2019	Agus E. Sutriyanto, Rotmuanu Inayah	1. Tim tidak dapat mencapai lokasi kebakaran yang dilaporkan karena tidak adanya akses menuju lokasi, baik melalui jalur darat maupun melalui jalur air. 2. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau, warga dan perusahaan sekitar lokasi, PT Bangun Cipta Mitra Perkasa tidak beroperasi dan pihak-pihak tersebut belum pernah mendapatkan informasi mengenai perusahaan tersebut. 3. Benar terjadi kebakaran di area yang dilaporkan yaitu pada hotspot 2 yang mana asapnya dapat dilihat dari jarak kurang lebih 3 km yang merupakan batas area perkebunan sawit PT Karya Luhur Sejaht dan pada hotspot 7 yang asapnya dapat dilihat dari jarak kurang lebih 17 km yang merupakan area perkebunan sawit PT Bangun Cipta Mitra Perkasa. 4. Area yang terbakar diduga merupakan lahan tidur milik warga dan diduga disebabkan oleh oknum warga yang bekerja mencari ikan dan kurkura di sekitar lokasi dengan motif untuk memudahkan pekerjaannya. 5. Berdasarkan informasi dari PT Karya Luhur Sejaht, upaya penanganan telah coba dilakukan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari Polsek Kahayan Kuala, Polres Pulang Pisau, Danramil, Kodim, Manggala Agni Dapps Kipuas, perusahaan dan MPA sekitar namun Tim tidak dapat menjangkau lokasi kebakaran karena tidak adanya akses.	Agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap lokasi kebakaran serta dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan terhadap warga dan perusahaan-perusahaan di sekitar lokasi mengingat area yang terbakar berada jauh dari lokasi usaha dan/atau kegiatan. (PHP)	Dalam rencana penyelidikan	Inayah
33	Peta Sebaran Hotspot di Wilayah Pemangku Kawasan Prov. Kalteng oleh Bala PPKHL Wilayah Kalimantan update 5 September 2019 pukul 16.30 WIB dan arahan Ditjen KLHK	#191025	6 September 2019		Seruyan		Kalimantan Tengah	PT Petak Sawit Eka Harap	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan 8 hotspot di area konsesi PT Petak Sawit Eka Harap (S -3.106697, E 112.556183)	Agar dilakukan pengecekan lapangan dan dilakukan pemasangan segel	LH	#####	ST.144/BPPHLH K-IV-SWI/9/2019	Dwi P. Agus S, Sudi S	Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Mekar Indah (desa terdekat dari lokasi hotspot sasaran) tidak ditemukan adanya perizinan konsesi perusahaan kelapa sawit dan aktivitas lapangan oleh PT Petak Sawit Eka Harap. Dari hasil pengamatan dan pengecekan di lapangan, lokasi hotspot berada pada areal hutan dan tidak dikuasai oleh masyarakat atau konsesi perusahaan dan lokasi tidak dapat diakses melalui jalan darat maupun sungai. Dugaan hotspot muncul karena aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan mencanikan dan berburu yang melakukan pembakaran lahan dengan maksud mempermudah aksesnya di sekitar lokasi.	Tidak dapat menjangkau lokasi. Perusahaan tidak aktif. (-)	Selesai	Rozky Anamela
34	Peta Sebaran Hotspot di Wilayah Pemangku Kawasan Prov. Kalteng oleh Bala PPKHL Wilayah Kalimantan update 5 September 2019 pukul 16.30 WIB dan arahan Ditjen KLHK	#191026	6 September 2019		Kotawaring Timur		Kalimantan Tengah	PT Ramban Bina Makmur	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan 4 hotspot di area konsesi PT Ramban Bina Makmur (S -2.655272, E 112.829704)	Agar dilakukan pengecekan lapangan dan dilakukan pemasangan segel	LH	#####	ST.139/BPPHLH K-IV-SWI/9/2019	Raden Yoyong S. Suparno, Sutriyanto	Belum dapat dipastikan secara visual dan yuridis terhadap 4 koordinat titik hotspot yang diduga berada pada areal konsesi PT Ramban Bina Makmur. Tim tidak dapat mencapai lokasi dan berdasarkan informasi Kepala Sesi Pemerintahan Desa Ramban, PT Ramban Bina Makmur belum beroperasi.	Tidak dapat menjangkau lokasi. Perusahaan tidak aktif. (-)	Selesai	Rozky Anamela
35	Peta Sebaran Hotspot di Wilayah Pemangku Kawasan Prov. Kalteng oleh Bala PPKHL Wilayah Kalimantan update 5 September 2019 pukul 16.30 WIB dan arahan Ditjen KLHK	#191027	6 September 2019		Kotawaring Timur		Kalimantan Tengah	PT Eka Harap Itah	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan 3 hotspot di area konsesi PT Eka Harap Itah (S -2.858572, E 112.877441)	Agar dilakukan pengecekan lapangan dan dilakukan pemasangan segel	LH	14 October 2019	ST.190/BPPHLH K-IV-SWI/10/2019	Muhammad Medika, Ahmad Nazemi, Saeni Kurnia	Menurut DLH Kotawaring Timur belum ada aktivitas perusahaan, hasil citra satelit belum ada tanaman.	Selesai di Verifikasi Administrasi (-)	Selesai	

36	Peta Sebaran Hotspot di Wilayah Pemangku Kawasan Prov Kalteng oleh Balai PPKHL Wilayah Kalimantan update 5 September 2019 pukul 16.30 WIB dan tahun Dijen KLHK	#191028	6 September 2019		Lamandau	Kalimantan Tengah	PT Menhobi Mitra Lestari	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan 1 hotspot di area konsepsi PT Menhobi Mitra Lestari (S -1.856202, E 111.775357)	Agar dilakukan pengecekan lapangan dan dilakukan pemasangan segel	LH	21 October 2019	ST.196/BPPHLH-K-IV-SWI/10/2019	Syamsul Ilyas, Muhammad Medika, Ahmad Nazemi	1. Benar terjadi kebakaran lahan di Desa Nanga Kemujan, Kec. Bukit Timur, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah di 3 lokasi dengan koordinat sebagai berikut: a. Titik 1 010455.03' LS 1110402.65' BT diperkirakan seluas ±1 Ha, b. Titik 2 0104611.8' LS 1110397.37' BT diperkirakan seluas ±1,5 Ha, c. Titik 3 0104625.11' LS 1110397.97' BT diperkirakan seluas ±0,8 Ha; 2. Berdasarkan keterangan dari pihak perusahaan, lokasi kebakaran berada di lokasi plasma dalam areal pelepasan kawasan hutan PT Menhobi Mitra Lestari. Sumber kebakaran berasal dari pembukaan ladang berpindah masyarakat di areal plasma dan kebakaran terjadi pada 3 September 2019; 3. Upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan antara lain menyipakan sarana dan prasarana berupa embung air di lokasi penanaman, membuat pos pantau menara api, memadamkan kebakaran secara langsung oleh Tim Pemadam Kebakaran (BakarTiba) dengan melibatkan karyawan sekitar 10 orang bersama aparat desa setempat membuat papan larangan membakar lahan di areal HGU PT Menhobi Mitra Lestari; 4. PT Menhobi Mitra Lestari belum memiliki kelengkapan sarana kebakaran yang memadai, namun sudah memiliki struktur organisasi Tim Pemadam Kebakaran; 5. Pada saat dilakukan verifikasi lapangan, kondisi api sudah padam dengan vegetasi terlihat berupa pepohonan dan semak belukar.	Tidak ada tindak lanjut karena api berasal dari luar konsepsi/kebun masyarakat dan luas kebakaran 0,8 Ha (-) [Rekomendasi Teguran Tertulis/Paksaan Pemerintahan ke SA]	Selesai	
37			4 September 2019		Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	PT Mulla Agro Pemat	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan 3 hotspot dengan tingkat kepercayaan di atas 70% di area konsepsi PT Mulla Agro Pemat (S -2.46879, E 112.809). Kebakaran diperkirakan terjadi tanggal 4 September 2019 dan secara administratif masuk wilayah Kecamatan Telawang.	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.150/BPPHLH-K-IV-SWI/9/2019	Benedictus T, Imam M, I Ketu P	Tim PHP (Eko Novi, dkk)	Menunggu laporan dari Tim Pusat	Menunggu laporan dari Tim Pusat	
38	Laporan Harian Pemantauan Hotspot di Kawasan Hutan dan Konsepsi oleh Intelligence Center Ditjen Penegakan Hukum LHK	#190632	4 September 2019		Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	PT Sapta Karya Damai	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan 10 hotspot dengan tingkat kepercayaan di atas 70% di area konsepsi PT Sapta Karya Damai (S -2.6012 dan E 113.009, S -2.59989 dan E 113.018, S -2.60134 dan E 112.919). Kebakaran diperkirakan terjadi tanggal 4 September 2019 dan secara administratif masuk wilayah Kecamatan Seranau.	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.150/BPPHLH-K-IV-SWI/9/2019	Benedictus T, Imam M, I Ketu P	Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan tidak terjadi kebakaran pada lokasi hotspot berdasarkan laporan dari Inteligent Center Ditjen Penegakan Hukum LHK tanggal 4 September 2019. Lokasi hotspot yang dilaporkan tanggal 4 September 2019 di luar izin lokasi PT Sapta Karya Damai.	Pengaduan Tidak Terbukti (PTT)	Selesai	Rozky Anamelia
39	Peleporan dari Evaluasi Pelaporan Data dan Informasi pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	191412	4 September 2019		Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	PT Borneo Sawit Perdana	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan kebakaran hutan dan lahan di PT Borneo Sawit Perdana	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.146/BPPHLH-K-IV-SWI/9/2019	Dadang B P, Junaldi, Noparyajaya	1. Berdasarkan keterangan dari pihak PT. Borneo Sawit Perdana kebakaran lahan yang terjadi di perkebunan sawit sudah lama, setelah dilakukan pengecekan areal bekas kebakaran sudah ditumbuhi rumput alang-alang. 2. Dari hasil pemantauan di lapangan terdapat bekas kebakaran di areal perkebunan milik PT. Borneo Sawit Perdana lahan yang terbakar ± 3 Ha, berdasarkan titik koordinat yang diambil di areal perkebunan PT. Borneo Sawit Perdana. 3. Dari Kelempagaan Sistem, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan PT. Borneo Sawit Perdana sangat mendukung sesuai dengan standar operasi penanaman (SOP).	Rekomendasi dilakukan pengawasan (Rek ke P). Diakukan penyelidikan	Telah dilakukan pengawasan oleh Tim Satgas Karhutla KLHK. Sudah dilakukan penyelidikan.	
40	Peleporan dari Evaluasi Pelaporan Data dan Informasi pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	191413	4 September 2019		Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	PT Nusantara Sawit Perdana	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan kebakaran hutan dan lahan di PT Nusantara Sawit Perdana	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.146/BPPHLH-K-IV-SWI/9/2019	Dadang B P, Junaldi, Noparyajaya	1. Berdasarkan keterangan dari pihak PT. Nusantara Sawit Perdana kebakaran lahan yang terjadi di perkebunan sawit diduga disebabkan oleh kebakaran lahan masyarakat yang lebih dulu terbakar. 2. Dari hasil pemantauan di lapangan terdapat bekas kebakaran di areal perkebunan milik PT. Nusantara Sawit Perdana seluas ± 45 hektar berdasarkan titik koordinat yang diambil di areal perkebunan PT. Nusantara Sawit Perdana. 3. PT. Nusantara Sawit Perdana memiliki 10 Menara Pengawas Api yang tersebar di masing-masing Blok perkebunan sawit. 4. Dari Kelempagaan Sistem, Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan PT. Nusantara Sawit Perdana sangat mendukung sesuai dengan standar operasi penanaman (SOP).	Rekomendasi dilakukan pengawasan (Rek ke P). Diakukan penyelidikan	Telah dilakukan pengawasan oleh Tim Satgas Karhutla KLHK. Sudah dilakukan penyelidikan.	
41	Laporan Harian Pemantauan Hotspot di Kawasan Hutan dan Konsepsi oleh Intelligence Center Ditjen Penegakan Hukum LHK	#190655	23 June 2019		Kabupaten Tapin	Kalimantan Selatan	PT Binuang Mitra Bersama	Pertambangan batubara	Dugaan terdapat 2 hotspot dengan nilai kepercayaan 80%-100% di area konsepsi PT Binuang Mitra Bersama	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	25 June 2019	ST.95/BPPHLH-K-IV-SWI/6/2019	Nazemi, Medika, Adi Sunardi	Dari hasil pengamatan di lapangan telah terjadi kebakaran di dinding tambang (dinding pit) batubara pada areal IUP PT. Binuang Mitra Bersama Blok Dua. Sumber kebakaran berasal dari lepasan batubara muda atau batubara berkarat rendah yang mengalami proses oksidasi alami. Pihak PT Binuang Mitra Bersama menyatakan berkomitmen melakukan upaya mengurangi / meminimalisir dampak akibat kebakaran batubara, pemantauan batubara secara menyeluruh, pencegahan terjadinya kembali kebakaran batubara dan menyampaikan laporan perkembangan upaya-upaya tersebut kepada Balai PPKHL Wilayah Kalimantan, Balai PPKHL Wilayah Kalimantan, dan stakeholder terkait lainnya.	Apa hasilnya???	Selesai	Rizky Anamelia
42	(WA)	191325	26 July	Harudin B (Chief Security)	Tanah Laut	Kalimantan Selatan	PT Jorong Barutama Greston (JBG)	Pertambangan batubara	Tambang masyarakat di Asam Asam Kecamatan Jorong		LH	29 July 2019	ST.109/BPPHLH-K-IV-SWI/7/2019	Yudianto, Ahmad Nazemi, M. Medika Al Fazry	Dari hasil pengamatan lapangan, telah ditemukan adanya kegiatan penambangan batubara secara ilegal di kawasan hutan produksi di sekitar PKP2B/IPPKH PT Jorong Barutama Greston. Pelaku Penambangan tanpa izin tersebut diduga adalah kelompok Sdr. Ogan. Di lokasi Penambangan tanpa izin, telah ditemukan alat alat berat berupa 3 (tiga) bangunan berupa pondok tempat tinggal pekerja, 3 unit hauling truk, 1 unit dozer Ditch, 1 unit ekskavator PC-300-2 unit mobil double cabin, 1 unit mobil SUV merk Toyota Fortuner serta 1 pondok tempat makan bakar minyak.	Rekomendasi dilakukan penyelidikan (PHP)	Dalam rencana penyelidikan	ida M S

43	(WA)	191326	12 August 2019	Balai PPKHL Wilayah Kalimantan	Kapuas	Kalimantan Tengah	PT Dasa Intiga	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan hotspot di area konsesi PT Dasa Intiga	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	16 August 2019	ST.123/BPPHLH K-IV-SWI/8/2019	Andhik S. Bambang, Frans S.	1. Telah terjadi kebakaran pada lokasi hotspot berdasarkan laporan dari intelijen center Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 11 Agustus 2019; 2. Lokasi hotspot yang dilaporkan pada tanggal 11 Agustus 2019 berada di Blok E 34 yang berada luar Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK-HA PT. Dasa Intiga; 3. Kebakaran ladang di dalam areal IUPHHK-HA PT. Dasa Intiga adalah seluas ± 0,8 Ha dan telah berhasil dipadamkan oleh Tim Pemadam Kebakaran IUPHHK-HA PT. Dasa Intiga; 4. IUPHHK-HA PT. Dasa Intiga telah memiliki menara pemantau api di area kejanya; 5. IUPHHK-HA PT. Dasa Intiga telah memiliki regu pemadam kebakaran; 6. Terdapat papan-papan larangan membakar yang dipasang pada beberapa titik di area izin lokasi IUPHHK-HA PT. Dasa Intiga; 7. Terdapat sumber mata air dan sungai kecil di dalam area izin lokasi IUPHHK-HA PT. Dasa Intiga; 8. IUPHHK-HA PT. Dasa Intiga telah memiliki perlengkapan regu pemadam kebakaran tetapi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018; 9. IUPHHK-HA PT. Dasa Intiga telah memiliki struktur organisasi pemadam kebakaran hutan dan standard operating procedures (SOP) penanganan dan penanggulangan kebakaran/anggap darurat kebakaran lahan.	Rekomendasi dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan (PHP)	1. Telah dilakukan pulbakat dan gelar perkara di Jakarta. Tidak ada tindak lanjut karena kebakaran dilakukan oleh perorangan bukan ladang di tanah mineral dan luasnya 0,8 Ha. (Selesai)	
44		#191262	22 August 2019		Seruyan	Kalimantan Tengah	PT Gawi Bahandep Sawit Mekar	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan hotspot di area konsesi perkebunan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	22 August 2019	ST.131/BPPHLH K-IV-SWI/8/2019	Armawan, Andy Meca G, Rebel S	1. Titik yang dilaporkan tidak terjadi kebakaran; 2. Kebakaran hutan dan lahan terjadi pada koordinat S 030647,3' dan E 11202112,4' yang setelah di overlay merupakan kawasan Hutan Produksi berdasarkan SK Menhut No 529 Tahun 2012 dan berada di luar konsesi yang berbatasan langsung dengan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar; 3. Informasi kebakaran di batas HGU atau perzinan diterima dan diketahui pihak perusahaan mulai Selasa, 20 Agustus 2019 dan api pada batas blok F94 berhasil dipadamkan pada 20 Agustus 2019; 4. Lahan yang terbakar merupakan gambut dengan luas area terbakar sekitar 15 ha dengan jenis bahan bakar berupa semak belukar dan pohon kecil; 5. Pihak perusahaan telah melakukan upaya pemadaman dan pengamanan agar kebakaran tidak meluas dan masuk dalam areal perzinan, serta melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan patroli dan penanaman di area batas-batas perzinan	Tidak ada tindak lanjut karena kebakaran terjadi di luar konsesi (-)	1. Telah dilakukan pengawasan oleh Tim Satgas Kehutanan KLHK. Selesai	Inyah
45		#191263	22 August 2019		Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	PT Kumai Sentosa	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan hotspot di area konsesi perkebunan PT Kumai Sentosa	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	23 August 2019	ST.132/BPPHLH K-IV-SWI/8/2019	Syamsul Ilyas, Chairudin, Hendro P	1. Telah terjadi kebakaran berupa rawa gambut kering dalam konsesi perkebunan PT Kumai Sentosa dengan luas area kebun terbakar hingga 24 Agustus 2019 diperkirakan 709 ha dengan rincian sekitar 430 ha telah ditanami dan sekitar 279 ha belum ditanami; 2. Kebakaran berasal dari kawasan hutan Taman Nasional Tanjung Puting dan PT Kumai Sentosa telah mengetahui adanya kebakaran seminggu sebelum masuk areal kebun namun pihak perusahaan tidak langsung melaporkan kejadian kepada pihak pemangku kawasan (Balai TNTP)	Agar dilakukan pemeriksaan oleh ahli untuk proses pengentasan sanksi administrasi dan/atau proses penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. (PHP)	Dalam proses penyidikan oleh PPNS KLHK. Telah dilakukan pengawasan oleh KLHK.	Inyah
46		191327	2 September 2019	Doddy Ronald (Ka Manggala Agni Daops Tanah Laut, Balai PPI Wilayah Kalimantan)	Tapin, Balangan, Tabalong	Kalimantan Selatan	PT Kharisma Inti Usaha (Kab. Tapin), PT Adaro (Balangan)	Perkebunan Kelapa Sawit, Pertambangan Batubara	Dugaan hotspot di Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin diduga berdekatan dengan area konsesi PT Kharisma Inti Usaha (PT KIU) sedangkan di Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan diduga berada di area tambang PT Adaro Indonesia	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.138/BPPHLH K-IV-SWI/9/2019	Yudianto, Ahmad Nazemi, M. Medika Al Fazry	1. Telah terjadi kebakaran di lahan milik masyarakat yang berbatasan dengan PT Kharisma Inti Usaha (PT. KIU) Kab. Tapin yang dipisahkan oleh kanal yang diduga akibat ulah manusia (obskari) dan dilakukan kondisi alam yang didi oleh vegetasi bonding, punun dan ilalang yang kering pada koordinat U.S: 02° 56' 34.9" dan BT : 115° 02' 40.2". Pemadaman masih dilakukan oleh tim Manggala Agni Daops Tanah Laut saat tim melakukan peninjauan lapangan. 2. Masih terdapat kebakaran di dinding pit areal tambang batubara yang berada di areal Pinjam Pakai / Izin Usaha KP2B PT. Adaro Indonesia di kawasan hutan produksi yang berada di Kecamatan Juai, Kab. Balangan. Sumber kebakaran berasal dari lapisan batubara mudoakali rendah yang mengalami proses oksidasi alami. Pada saat di lapangan, pihak PT Adaro masih melakukan upaya pemadaman terhadap dinding pit yang terbakar dengan metode SOP yang dimiliki perusahaan	Verifikasi Lapangan	Selesai	Inyah
47		#191264	29 August 2019		Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	PT Menteng Jaya Sawit Perdana	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan kebakaran hutan dan lahan pada izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT Menteng Jaya Sawit Perdana	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.145/BPPHLH K-IV-SWI/9/2019	Andhik S.M Taufik, Suwardi	1. Telah terjadi kebakaran pada lokasi yang dilaporkan yang berada di dalam izin lokasi PT Mitra Jaya Sawit Perdana; 2. Telah dilakukan pemasangan papan larangan pada areal bekas kebakaran; 3. Tidak ditemukan adanya pembukaan lahan di lokasi dan sekitar areal bekas kebakaran; 4. Telah memiliki regu pemadam kebakaran, memasang papan larangan membakar pada beberapa titik, memiliki menara pemantau api, kolam-kolam penampungan air, memiliki perlengkapan regu pemadam kebakaran tetapi belum sesuai Permentan No 5 Tahun 2018, memiliki SOP penanganan dan penanggulangan kebakaran/anggap darurat kebakaran lahan.	Perlu dilakukan pengawasan dan tindak lanjut penanganan kebakaran (PHP)	Dalam proses penyidikan oleh PPNS Kehutanan. Telah dilakukan pengawasan oleh KLHK.	Inyah
48		191341	12 September 2019	Balai PPKHL Wilayah Kalimantan	Banjarbaru	Kalimantan Selatan		Dugaan hotspot dengan tingkat kepercayaan di atas 50% di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.154/BPPHLH K-IV-SWI/9/2019	Mikan, Endrae, Adi S	1. Telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kelurahan Syamsudin Noor, Kel. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang diduga disebabkan oleh kelalaian masyarakat sekitar; 2. Lokasi terbakar berupa tanaman, semak, ilalang, punun dan area yang terbakar merupakan daerah rawan kebakaran.	Mengingat lokasi yang terbakar merupakan lahan masyarakat yang rawan terbakar, Tim meminta kepada instansi terkait (Tim Terpadu Karhut) agar melakukan sosialisasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. (Bak ke LH)	Dalam penyusunan draft surat tindak lanjut	Inyah	

49	Laporan Harian Pemantauan Hotspot di Kawasan Hutan dan Konsesi oleh Intelligence Center DiJen Penegakan Hukum LHK	#191267	12 September 2019		Barito Kuala	Kalimantan Selatan			Terdeteksi 6 hotspot yang tersebar di wilayah Kabupaten Barito Kuala	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.155/BPPH K-IV-SWI/19/2019	Suparno, Hendro P, Anis R	1. Pada titik 114° 31' 52,089" E 3° 1' 13,650" S terjadi kebakaran terjadi pada kebun karet masyarakat dan kondisinya telah padam, luas yang terbakar 2,5 ha. Lokasi kebakaran berada diwilayah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. 2. kebakaran terjadi di lahan kosong dan hutan sekunder yang berbatasan dengan jalan swadaya masyarakat setempat, dengan kondisi masih mengeluarkan kepulan asap, upaya pemadaman belum dilakukan dikarenakan tidak tersedianya air untuk melakukan pemadaman, dengan posisi berada pada titik koordinat 114° 31' 56,674" E 3° 1' 46,829" S, luas areal yang terbakar 3 ha. 3. Lokasi kebakaran masuk dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan 4. Lokasi kebakaran terjadi di pinggir jalan swadaya masyarakat dan upaya pemadaman dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, luas areal yang terbakar 2,5 ha. Lokasi kebakaran masuk dalam wilayah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Lokasi kebakaran terjadi pada persawahan milik masyarakat setempat bukan pada lahan gambut dan tipe kebakaran termasuk kebakaran permukaan, posisi kebakaran berada dititik koordinat 114° 28' 53,900" E 5° 34' 900" S, luas areal yang terbakar 3 x 6,5 ha. Lokasi kebakaran masuk dalam wilayah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. 6. Kebakaran terjadi dititik koordinat 114° 29' 20,300" E 3° 5' 13,400" S, kebakaran terjadi diareal kebun sengon yang dimiliki masyarakat setempat, luas areal yang terbakar 113,42200 sesuai hotspot yang dilaporkan, 2. Berdasarkan overlay ke dalam peta konsesi HGU PT Arjuna Utama Sawit, lokasi kebakaran berada di dalam area konsesi yang belum terdapat tanaman pokok kelapa sawit dan masih berupa semak belukar serta tumbuhan kayu kecil. 3. Api berasal dari lahan masyarakat dan meluas hingga masuk ke dalam konsesi perusahaan yang masih sengketa dengan masyarakat adat sehingga perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan pemadaman langsung sampai ada izin dari masyarakat. 4. PT Arjuna Utama Sawit bersama tim karhutla terpadu dari desa terdekat, tim karhutla Kec. Kumpang, tim pemadam kab. Katingan, Manggala Agri, Polsek Kumpang dan BNPB telah melakukan pemadaman pada titik kebakaran tersebut; 5. Pada tanggal 14 September 2019 dilakukan pemasangan plang/tegel dan PPNS line terhadap bukti temuan pada lokasi kebakaran.	1. Perlu adanya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin terkait pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat diwilayah Kabupaten Barito Kuala dan di sekitar agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. 2. Perlu adanya pengawasan dari instansi yang berwenang terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan. 3. Perlu adanya sapra dan personil kebakaran disetap lembaga pemerintah daerah untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan 4. Penyeleksi oleh PPNSS BPPH/LHK Seksi Wilayah 1 (PWP)	Dalam penyusunan draft surat tindak lanjut	Inyah
50	Laporan Harian Pemantauan Hotspot di Kawasan Hutan dan Konsesi oleh Intelligence Center DiJen Penegakan Hukum LHK	#191268	4 September 2019		Katingan	Kalimantan Tengah	PT Arjuna Utama Sawit	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan kebakaran hutan dan lahan di areal konsesi PT Arjuna Utama Sawit	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.156/BPPH K-IV-SWI/19/2019	Agus E, Danang D W, Anitra N	1. Telah terjadi kebakaran pada koordinat S 02,30270 E 113,42200 sesuai hotspot yang dilaporkan, 2. Berdasarkan overlay ke dalam peta konsesi HGU PT Arjuna Utama Sawit, lokasi kebakaran berada di dalam area konsesi yang belum terdapat tanaman pokok kelapa sawit dan masih berupa semak belukar serta tumbuhan kayu kecil. 3. Api berasal dari lahan masyarakat dan meluas hingga masuk ke dalam konsesi perusahaan yang masih sengketa dengan masyarakat adat sehingga perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan pemadaman langsung sampai ada izin dari masyarakat. 4. PT Arjuna Utama Sawit bersama tim karhutla terpadu dari desa terdekat, tim karhutla Kec. Kumpang, tim pemadam kab. Katingan, Manggala Agri, Polsek Kumpang dan BNPB telah melakukan pemadaman pada titik kebakaran tersebut; 5. Pada tanggal 14 September 2019 dilakukan pemasangan plang/tegel dan PPNS line terhadap bukti temuan pada lokasi kebakaran.	Penyidikan oleh PPNSS BPPH/LHK Seksi Wilayah 1 (PWP)	Telah dilakukan pengawasan oleh Tim Satgas Karhutla KLHK. Dalam penyelesaian	Inyah
51	Laporan Harian Pemantauan Hotspot di Kawasan Hutan dan Konsesi oleh Intelligence Center DiJen Penegakan Hukum LHK	#191269	4 September 2019		Katingan	Kalimantan Tengah	PT Persada Era Agro Kencana	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan kebakaran hutan dan lahan di areal konsesi PT Persada Era Agro Kencana	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.161/BPPH K-IV-SWI/19/2019	Benedictus T, Chairudin, Hendro P	1. Telah terjadi kebakaran pada lokasi yang dilaporkan pada tanggal 4 September 2019 yang berada di dalam izin lokasi PT Persada Era Agro Kencana; 2. Di areal yang terbakar telah dilakukan penanganan Pihak Penyelidikan dan Police Line dari pihak penyidik Kepolisian setempat; 3. Pada saat dilakukan verifikasi lapangan, pihak perusahaan membantu masyarakat dan Satgas masih melakukan upaya pemadaman; 4. PT Persada Era Agro Kencana telah memiliki regu pemadam kebakaran, memasang papan larangan membakar pada beberapa titik, memiliki sarana pemantau api, kolam-kolam penampungan air, perlengkapan regu pemadaman tetapi belum sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 5 Tahun 2018, serta memiliki SOP penanganan dan penanggulangan kebakaran/terpapar diareal kebakaran lahan.	Penyidikan oleh PPNSS BPPH/LHK Seksi Wilayah 1 (PWP)	Dalam penyelidikan	Inyah
52	Laporan Harian Pemantauan Hotspot di Kawasan Hutan dan Konsesi oleh Intelligence Center DiJen Penegakan Hukum LHK	#191270	21 September 2019		Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	PT Tunas Agro Subur Kencana 3	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan kebakaran hutan dan lahan di areal konsesi PT TASK 3 sejumlah 3 tak	agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.166/BPPH K-IV-SWI/19/2019	Agus E, Rohmatun Inayah, Sale	1. Benar terjadi kebakaran di 3 hotspot yang dilaporkan. Lahan terbakar merupakan lahan masyarakat yang berbatasan langsung dengan Blok U 56 Adisling c3 Perkebunan PT TASK 3. 2. Total lahan terbakar sekitar 30 Ha dengan vegetasi pohon berbungga, semak belukar, dan sekitar 6 Ha berupa perkebunan kelapa sawit masyarakat seluas dengan umur sawit diperkirakan 6 tahun; 3. Berdasarkan informasi pihak perusahaan, kebakaran terjadi sejak 19 September 2019 pukul 19.00 WIB dan sudah dipadamkan pada 19 September 2019 pukul 24.00 WIB oleh Tim Pemadam Kebakaran PT TASK 3 dan Tim Terpadu yang terdiri dari Muspida Kecamatan Cempaga, Polsek Cempaga, MPA Desa Kandan dan MPA Desa Cempaga Mula Baru.	Tidak ada tindak lanjut karena kebakaran terjadi di luar konsesi (-)	Selesai	
53					Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	PT Binautama Gunajaya Abadi (BGA)	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan kebakaran hutan dan lahan di areal konsesi PT BGA	agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.167/BPPH K-IV-SWI/19/2019	Rahmadi, Hendro P, Andri	1. Tim tidak menemukan kebakaran di area konsesi PT Bumitama Gunajaya Abadi, akan tetapi kebakaran terjadi di area lahan perkebunan/ladang masyarakat yang berada di luar konsesi dan berbatasan langsung dengan PT Bumitama Gunajaya Abadi; 2. Area yang terbakar diduga merupakan kebun dan lahan milik masyarakat yang berbatasan langsung dengan PT Bumitama Gunajaya Abadi; 3. Pihak PT Bumitama Gunajaya Abadi sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi Sektor -Hanau dan Komando Rayon Miller-Hanau tentang adanya kebakaran di lahan masyarakat sisi barat dari izin lokasi PT Bumitama Gunajaya Abadi; 4. Berdasarkan informasi yang didapat dari pihak PT Bumitama Gunajaya Abadi bahwa perusahaan telah melakukan upaya pemadaman kebakaran mula pada tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019. Sarpras yang digunakan untuk pemadaman kebakaran dimaksud menggunakan Sarpras milik PT Bumitama Gunajaya Abadi.	Tidak ada tindak lanjut karena kebakaran terjadi di luar konsesi (-)	Selesai	
54	Peta sebaran hotspot LAPAN tanggal 20-21 dan 22 September 2019 pukul 17.38 WIB	191342	22 September 2019	LAPAN	Seruyan	Kalimantan Tengah	PT Sumur Pandan Wangi	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan kebakaran hutan dan lahan di areal konsesi PT SPW sebanyak 4 titik	agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.168/BPPH K-IV-SWI/19/2019	Bambang, Yahya S, Ida M S	1. Tim tidak menemukan kebakaran di area konsesi PT Sumur Pandanwangi, namun kebakaran terjadi di area lahan perkebunan masyarakat yang berada di luar konsesi dan berbatasan langsung dengan PT Sumur Pandanwangi yaitu sisi barat lokasi PT Sumur Pandanwangi, di Pranggan Blok A50/A51-A42/A43 Dukuh Manggala, sumber kebakaran masih dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian Kecamatan Hanau, c. Pihak PT Sumur Pandanwangi sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi Sektor Hanau dan Komando Rayon Miller Hanau tentang kejadian kebakaran; 3. Upaya pemadaman dilakukan oleh perusahaan dimulai pada tanggal 15 - 21 September 2019.	Tidak ada tindak lanjut karena kebakaran terjadi di luar konsesi (-)	Selesai	
55	Limpahan dari DLH Provinsi Kalimantan Tengah	#191127	7 October 2019	MUHYAR	Barito Utara	Kalimantan Tengah	PT Bangun Batara Raya	Perkebunan Kelapa Sawit	Tuntutan atas kegiatan Pembukaan jalan baru PT. Bangun Batara Raya	mengembalikan pohon-pohon besar maupun kecil yang tumbang akibat kegiatan yang dimaksud seperti sedia kala, sehingga selaku pemilik lahan tidak merasa dirugikan dan menuntut denda sesuai Peraturan Pemerintah, sebagaimana aturan yang mengatur tentang tata cara pembukaan lahan dan jalan yang dilakukan oleh para pemegang izin usaha termasuk perusahaan.	LH				Hasil telah, bukan merupakan pengaduan LHK. (non LHK)	Pengaduan non-LHK	Ida M S	

56	Limpahan dari DLH Provinsi Kalimantan Tengah	#191097	7 October 2019	Sumitro, Umbun		Barito Utara	Kalimantan Tengah	PT Mitra Barito Gemilang	Perkebunan Kelapa Sawit	terjadi pencemaran di sepanjang sungai Nunuk kin dan sungai nuruk kanan yang disebabkan aktifitas PT Mitra Barito Gemilang, sehingga warga masyarakat adat desa Beringhan tidak lagi mengonsumsi air sungai tersebut sejak tahun 2012.	Meminta kepastian plasma 20% atas lahan yang telah di lepaskan yang beretis nama SPT Warga masyarakat Bengahon, Meminta pemberdayaan dan pembinaan terhadap Pihak PT MBO untuk warga masyarakat disekitar lokasi perizinan, meminta menyipkan air bersih dengan segera untuk menggantikan air sungai nuruk yang sudah tercemar, menuntut denda adat sebesar Rp. 5.000 Bulat Bahanoi, 1 Bulat Bahanoi senilai 100.000 jadi 5000 Bulat Bahanoi Rp. 500.000.000 atau berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2006.	LH					Telah diverifikasi oleh DLH Barito Utara	Selesai di Verifikasi Administrasi (-)	Tengah dilakukan koordinasi dengan DLH Barito Utara	Ida M S
57	Limpahan dari DLH Provinsi Kalimantan Tengah	#191096	7 October 2019	Nurbani (Ketua tim koordinator desa Pemalihan), Mahdi (Perwakilan warga desa Pemalihan)	Desa Pemalihan, Kec. Kota Besi, Kotawaringin Timur	Kotawaringin timur	Kalimantan Tengah	PT Tunas Agro Subur Kencana Tiga	Perkebunan Kelapa Sawit	PT TASK 3 melakukan pembukaan perkebunan kelapa sawit dengan mengkonversi hutan, rawa dan gambut di sekitar sungai pemalihan yang mengakibatkan sungai tertutup karena ulah, PT TASK 3 membangun pabrik yang beskap kurang lebih 2 km dari pemukiman masyarakat desa pemalihan dan kolam limbah dibuat lokasi tanah gambut yang suatu saat pasti akan mengancam keselamatan/kesehatan warga, PT TASK melaggar UU kehutanan dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan sehingga mengakibatkan terganggunya kawasan penyangga sungai dan sekarang sungai menjadi dangkal mali fungsinya karena limbah dan lumpur akibat perusahaan besar-besaran mengkonversi hutan rawa gambut sehingga menyebabkan sepanjang sungai menjadi tidak bersih dan airnya menjadi tidak sehat lagi, PT TASK 3 dari tahun 2016 s/d 2018 masih menyalahgunakan aturan ijin yang semestinya ijin tersebut digunakan untuk pelebahan mynyk CPO akan tetapi digunakan menjadi ijin penanaman Laitri menggunakan	LH					Telah dilakukan verifikasi lapangan oleh DLH Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dugaan pencemaran. Telah dilakukan pengawasan oleh DLH Provisri Kalimantan Tengah.	Selesai di Verifikasi Administrasi (-)	Selesai	Ida M S	
58	WhatsApp	#191271	15 August 2019	Ateng	Kuala Kurun	Gunung Mas	Kalimantan Tengah	PT Berkala Maju Bersama	Perkebunan Kelapa Sawit	Agar dilakukan pengkondokan lapangan dan dilakukan tidak lanjut sesuai hukum	LH	21 October 2019	ST.197/BPPHLH K-IV-SWI/10/2019	Ida Meta Sofia, Rohmatun Inayah, Satriadi Kurnia	1. Telah terjadi kebakaran di lahan masyarakat yang ada di dalam konsesi PT Berkala Maju Bersama divisi 2 Blok 808 Estate Kurun Desa Tumbang Pajangle, Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas seluas 11,68 Ha, sumber kebakaran belum diketahui. 2. Terdapat beberapa titik kebakaran yaitu Blok M13, N13, K13, L12, C11, U28, X49 seluas kurang lebih 16,47 Ha. 3. Terdapat bekas kebakaran di Blok T 28, T29, T30, T31, T32 dan 3 hotspot berdasarkan pantauan satelit LAPAN yang berada di dalam konsesi PT BMB namun belum dilakukan pembebasan dan pembukaan lahan. 4. PT BMB telah menyampaikan laporan insidentil kejadian kebakaran secara lisan pada tanggal 15 September 2019 ke Polsek Kurun; 5. Upaya pemadaman telah dilakukan oleh PT BMB bekerja sama dengan Tim Pemadam Ponda Gunung Mas. 6. PT BMB memiliki sarana dan prasarana kebakaran lahan yang tidak memadai.	Rekomendasi dilakukan proses penyelidikan (PHP)	Dalam proses penyelidikan	Kabakaran terjadi di kebun atau lahan yang dikuasai masyarakat namun di dalam konsesi PT BMB		
59	WhatsApp	191343	27 October 2019			Barito Utara	Kalimantan Tengah	PT Permata Indah Sinergi	Pertambangan Batubara	Dugaan perubahan hutan produksi, pencemaran, dan perampasan hak-hak atas tanah warga desa oleh PT Permata Indah Sinergi. PT PIS diduga belum memiliki izin namun sudah melakukan kegiatan	K	4 November 2019	ST.208/BPPHLH K-IV-SWI/11/2019	Amawan, Raden Yoyong C, Dwi P	1. PT PIS belum melakukan kegiatan pertambangan batubara di areal IUP OP nya, kegiatan lapangan hanya sebatas inventarisasi batas tanah-tanah warga dalam areal IUP (dalam rangka pemberian tali asih) serta penataan batas IUP. Belum ada pembukaan lahan di areal IUP dan belum ada pembebasan lahan masyarakat karena masih dalam penyelesaian sengketa kepemilikan antarwarga. 2. Terhadap dugaan perubahan, PIS telah mendapatkan IPPKH dari menteri LH.	Pengaduan Tidak Terbukti (PTT)	Selesai			
60	Surat Nomor: 117/DIR-AGM/SRK/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019	#191272 #191150 (limpahan)	28 October 2019	Benito Mangkusbrotro (Chief External Affairs Officer)	Sahid Sudirman Center Lantai 56, Suite C-D, J. Jend. Sudirman No. 98 Jakarta 10220	Hulu Sungai Selatan, Tapin	Kalimantan Selatan	PT Antang Gunung Meratus	Pertambangan Batubara	Laporan aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) di areal PKP2B PT Antang Gunung Meratus sebagai berikut: 1. 2 Mei 2019 Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Selatan Bidang Perlindungan dan KSDAE telah melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di areal PKP2B dan IPPKH Desa Ida Manggala, Kec. Sungai Raya, Kab. Hulu Sungai Selatan dan mengamankan 1 unit excavator. 2. Operasi pengamanan PETI oleh PT AGM antara lain: a. Patroli tanggal 20 Mei 2019 di Desa Kembang Habang, Kec. Salam Bataks, Kab. Tapin dan mengamankan 1 unit excavator, b. Patroli 23 Mei 2019 di Desa Tatakan, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin dan mengamankan 1 unit excavator dan 1 orang operator, c. Patroli 29 Mei 2019 di sekitar wilayah pertambangan terbuka dan menggunakan 1 unit excavator; 3. 31 Mei 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bidang perlindungan dan KSDAE kembali melakukan OTT di areal PKP2B Desa Ida Manggala, Kec. Sungai Raya, Kab. Hulu Sungai Selatan dan mengamankan 1 unit excavator	Mohon dukungan dalam upaya menanggulangi permasalahan PETI dalam bentuk penanganan dan penindakan yang tegas atas kegiatan PETI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	LH	28 October 2019	ST.203/BPPHLH K-IV-SWI/10/2019	Bambang, Karyono, Iwantara	1. Hasil pengamatan lapangan, ditemukan 10 titik kegiatan penambangan batubara secara ilegal di dalam areal PKP2B dan IPPKH PT Antang Gunung Meratus; 2. Berdasarkan keterangan perusahaan terdapat 104 titik lokasi PETI di dalam area konsesi; 3. Upaya penanganan terhadap pelaku telah dilakukan melalui kegiatan penangkapan oleh instansi terkait seperti Polsek setempat, Polda Kalsel, Bareskrim Mabes Polri dan Dishut Kalsel, namun berdasarkan keterangan Chief Security kegiatan PETI tetap berjalan apabila tidak ada pengawasan.	Agar perusahaan meningkatkan kegiatan pengamanan dengan melaksanakan patroli rutin melibatkan pihak kepolisian, TNI, dan Dishut Kalsel serta menambah tenaga pengamanan. Rekomendasi dilakukan penyelidikan (PHP)	Proses penyelidikan		

61	Peta Sebaran Hotspot di Wilayah Pelaku Usaha Prov Kalimantan Tengah tanggal 28 Oktober 2019 oleh Balai PPKHL Wilayah Kalimantan	#191273	29 October 2019		Sukamara	Kalimantan Tengah	PT Sungai Rangit	Perkebunan Kelapa Sawit	Terpantau 2 hotspot dengan tingkat kepercayaan 69% dan 76% di area konsesi PT Sungai Rangit	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	28 October 2019	ST.205/BPPHLH K-IV-SWI/10/2019	Slamet, Syamsul Ilyas, Ida Melia S	1. Dari hasil pengamatan di lapangan, telah terjadi kebakaran dengan titik koordinat S -2.6001, E 111.3132 dan S -2.5988, E 111.3225 lahan yang terbakar merupakan lahan milik masyarakat yang berada di luar konsesi milik PT Sungai dengan luas yang terbakar ± 3 Ha. 2. Sumber api berasal dari kebakaran yang terjadi karena pembukaan ladang untuk menanam padi dan kelapa sawit oleh masyarakat yaitu warga desa Babual Baboti atas nama Sdr. Tarif, umur 47 Tahun. 3. Berdasarkan informasi pihak perusahaan kebakaran terjadi pada tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB dan kebakaran bila dipadamkan sekitar pukul 21.00 WIB yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Sungai Rangit dibantu warga Desa dengan jumlah personel pemadam sekitar 90 orang, dengan menggunakan sarana dan prasarana kebakaran yang ada berupa 2 unit Mobil Damkar, 2 unit Traktor Dongkey, 1 unit Motor Greder, 1 unit Mobil Triton Profil Tank, 15 buah Kap Solo, 4 unit mesin pemadam SIBAUARA;	Tidak ada tindak lanjut karena kebakaran terjadi di luar konsesi (-)	Selesai
62	Berita Barito Raya Post	191344	15 November 2019	Barito Raya Post	Barito Timur	Kalimantan Tengah	PT Senamas Energindo Mineral (SEM)	Pertambangan	Dugaan pencemaran Sungai Awang di area konsesi PT SEM	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH			Ida Melia S, Rohmatun Inaqah, Endrae	Pengaduan tidak terbukti	Pengaduan tidak terbukti	Telah dilakukan verifikasi lapangan dan pengawasan oleh DLH Kab. Barito Timur
63	WA dari Dijen Sakum melalui Kabatai	191351	19 November 2019	Doni Ka BNPB	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah			Dugaan pembakaran lahan gambut di Desa Tumbang Nusa, Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau berdasarkan rekaman drone DJI di koordinat 2.20.73321 S dan 114.0.84606 E seluas kurang lebih 80 Ha. Pengakuan operator ekskavator lahan milik pejabat Polda dan akan ditangani senjaja.	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.229/BPPHLH K-IV-SWI/11/2019	Andhik S, Tri Handika P, Danang D W	Dalam penyusunan laporan	Dalam penyusunan laporan	Dalam penyusunan laporan
64	Pemantauan data hotspot periode September-Oktober 2019 yang bersumber dari http://modis-catalog.lapan.go.id/monitoring/hotspot/index	191414	16 November 2019		Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	PT Suryamas Cipta Perkasa (SCP)	Perkebunan Kelapa Sawit	Terpantau beberapa hotspot periode bulan September hingga Oktober 2019 dengan tingkat kepercayaan >50%	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.231/BPPHLH K-IV-SWI/11/2019	Karyono, Syamsul Ilyas, Endrae	Dalam penyusunan laporan	Dalam penyusunan laporan	Dalam penyusunan laporan
65	Pemantauan data hotspot tanggal 23-26 September 2019 yang bersumber dari http://modis-catalog.lapan.go.id/monitoring/hotspot/index	191415	16 November 2019		Gunung Mas dan Kapuas	Kalimantan Tengah	PT Archipelago Timur Abadi (ATA)	Perkebunan Kelapa Sawit	Terpantau beberapa hotspot tanggal 23-26 September hingga Oktober 2019 dengan tingkat kepercayaan >50%	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.237/BPPHLH K-IV-SWI/11/2019	Iwantara, M Medika, Andri D R	Dalam penyusunan laporan	Dalam penyusunan laporan	Dalam penyusunan laporan
66	Peta Sebaran Hotspot di Wilayah Pelaku Usaha Prov Kalteng	191416	16 November 2019	Balai PPKHL Wilayah Kalimantan	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	PT Graha Inti Jaya	Perkebunan Kelapa Sawit	Hotspot pada koordinat Long 113.8370 Lat -2.8752 dengan tingkat kepercayaan 79% dan Long 113.8210 Lat -2.8723 dengan tingkat kepercayaan 86%	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.230/BPPHLH K-IV-SWI/11/2019	Yahya S, Arts R, Hendro P	Dalam penyusunan laporan	Dalam penyusunan laporan	Dalam penyusunan laporan
67	Pemantauan data hotspot periode Agustus-Oktober 2019 yang bersumber dari http://modis-catalog.lapan.go.id/monitoring/hotspot/index	191417	16 November 2019		Gunung Mas	Kalimantan Tengah	PT Kalimantan Ria Sejahtera (KRS)	Perkebunan Kelapa Sawit	Terpantau 9 hotspot periode bulan Agustus hingga Oktober 2019 dengan tingkat kepercayaan >50%	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.233/BPPHLH K-IV-SWI/11/2019	Armanaw, Ahmad Nazemi, M Taufik	Dalam penyusunan laporan	Dalam penyusunan laporan	Dalam penyusunan laporan
68	Pemantauan data hotspot tanggal 16-19 September 2019 yang bersumber dari http://modis-catalog.lapan.go.id/monitoring/hotspot/index	191418	16 November 2019		Gunung Mas	Kalimantan Tengah	PT Mulla Sawit Agro Lestari (MSAL)	Perkebunan Kelapa Sawit	Terdapat 5 titik api pada area perkebunan PT MSAL	Agar dilakukan pengecekan lapangan	LH	#####	ST.241/BPPHLH K-IV-SWI/11/2019	M Rahmadi, Ahmad Nazemi, Nopryanjaya	Dalam penyusunan laporan	Dalam penyusunan laporan	Dalam penyusunan laporan

**REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2019
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH KALIMANTAN SEKSI 2 SAMARINDA**

NO.	No Registrasi			Tanggal Penyerahan	Nama Pengadu	Alamat	Lokasi Kejadian		Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kejadian	Uraian Kejadian	Penyelesaian yang diinginkan	Tipologi (K/L/H/LHK)	Verifikasi			REKOMENDASI	Status Penanganan Terakhir	Keterangan
	Seksi	Online	4				Kota/ Kabupaten	Provinsi						Tanggal SPT	SPT No.	Verifikator			
1	P.SW2-19001	#190113	7-Jan-19	Surat PT. Adimira Lestari No. 010/DIRUT-SMD/PROD/V2019 (an Harianto - DirUt)	Samarinda	Nunukan	Kalimantan Utara	Perubahan hutan di wilayah hutan produksi PT. Adimira Lestari	Perambahan Hutan	Temuan aktivitas perambahan hutan di areal PT. Adimira Lestari di KM 31 RKT 2015 dan di KM 36 RKT 2016 yang dilakukan oleh masyarakat	Pengarahannya masyarakat dan penindakan hukum	Kehutanan	8-Feb-19	ST.43/BPHLHK-IV/SW.2/2/2019 (11-15 Feb 2019)	1. Frendy Tangke Pasarinn 2. Naval Pradika 3. Arrozaq Agung Darmawan	Pengaduan terbukti. Telah terjadi jual beli lahan di area IUPHHK-HA PT Adimira Lestari untuk dijadikan lahan perkebunan sawit oleh masyarakat yang sebagian besar pendatang dari Sulawesi. Diduga telah terjadi penjualan lahan IUPHHK-HA PT Adimira Lestari yang dilakukan oleh Kepala Desa Tinampak I dengan menerbitkan surat dari Desa yaitu "Surat Keterangan Pelepasan Tanah dan Semua	Rekomendasi ke Sektor Lain	Telah berkoordinasi secara langsung dengan Polda Kalimantan Utara	20
2	P.SW2-19002	#190114	9-Jan-19	WA LSM Lintas Sembilan (an Mahmud - 082351617700) via Kepala Balai	Malinau	Malinau	Kalimantan Utara	PT. Kayan Prima Utama Coal (KPUK)	Pertambangan legal	Dugaan PT. KPUK melakukan operasi produksi pertambangan di luar IUP	Klarifikasi ke perusahaan	Kehutanan	25-Jan-19	ST.31/BPHLHK-IV/SW.2/1/2019 (23-Jan-19 Feb 2019)	1. Mikrosli Agung 2. Sumarto 3. Adhya Darmawan Sintarya	Pengaduan Tidak Terbukti	Pengaduan Tidak Terbukti		
3	P.SW2-19003	#190115	9-Jan-19	WA LSM Lintas Sembilan (an Mahmud - 082351617700) via Kepala Balai	Malinau	Malinau	Kalimantan Utara	PT. Rimba Makmur Sentosa (RMS)	Illegal Logging	Dugaan PT. RMS melakukan penebangan di Hutan Lindung	Klarifikasi ke perusahaan	Kehutanan	25-Jan-19	ST.32/BPHLHK-IV/SW.2/1/2019 (23-Jan-19 Feb 2019)	1. Frendy Tangke Pasarinn 2. Naval Pradika 3. Lori Vambudi	Pengaduan Tidak Terbukti	Pengaduan Tidak Terbukti		
4	P.SW2-19004	#190116	9-Jan-19	WA masyarakat an Wahyumu Heriman - 081253714009 via Kepala Balai	Malinau	Malinau	Kalimantan Utara	PT. Rimba Karya Sentosa	Perambahan Hutan	Dugaan PT. RMS (perusahaan kayu bulat) melakukan kegiatan operasi di kawasan hutan lindung. Terdapat titik/jalan perusahaan yang masuk ke kawasan hutan lindung	Konfirmasi ke perusahaan terkait	Kehutanan	25-Jan-19	ST.32/BPHLHK-IV/SW.2/1/2019 (28-Jan-19 Feb 2019)	1. Frendy Tangke Pasarinn 2. Naval Pradika 3. Lori Vambudi	Pengaduan Tidak Terbukti	Pengaduan Tidak Terbukti		
5	P.SW2-19005	#190151	21-Jan-19	WA Wahyudi, Kabit PDAS RHL Dishub Kaltim via Kepala Balai	Samarinda	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	Pertambangan ilegal di IPPKH PT. Mahakam Sumber Jaya	Pertambangan ilegal	Temuan tumpukan batubara dan 3 unit alat berat di sekitar kawasan IPPKH PT. MSI di Kutai Kartanegara	Penindakan	Kehutanan	18-Jan-19	ST.20/BPHLHK-IV/SW.2/1/2019 (21-25 Jan 2019)	1. Widodo HR 2. Edy Hartono 3. Naval Pradika	Pengaduan Terbukti. Ditemukan sisa-sisa aktivitas penambangan ilegal di area konsesi PT Mahakam Sumber Jaya berupa stockpile batubara yang masih menumpuk di lokasi.	Rekomendasi Operasi Yustisi. (PT. MSI agar melakukan perlindungan hutan sesuai Pasal 8 ayat 4 PP No. 45 Tahun 2004)	Telah ditetapkan tersangka atas nama riky gunawan	
6	P.SW2-19006	#190185, #190186	30-Jan-18	Surat Centre for Orangutan Protection No. 06/HQ-01/COP/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Pencurian kayu di kawasan KBK (Ramadhani - Manager Perindungan Habitat COP)	Jakarta	Berau	Kalimantan Timur	Lestari.	Illegal Logging	Dugaan kegiatan ilegal di dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Kegiatan tersebut berupa pencurian kayu yang terletak di Kampung Sidobangan dan Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau.	Penghentian aktivitas	Kehutanan	22-Feb-19	ST.66/BPHLHK-IV/SW.2/2/2019 (25 Feb - 1 Mar 2019)	1. Agus Susanto 2. Dedy Diana 3. Waleisa Mitra	Pengaduan Terbukti. Ditemukan adanya aktivitas perambahan yang sudah ditinggalkan perambah yang merupakan habitat orangutan berada di areal penggunaan lain			
7	P.SW2-19007	#190197	11-Feb-19	Pendampingan pusat - Website dari M Darlansyah LSW Dewan Adar Jabatan Dayak Benuaq Tanjung dan Bentan)	Tenggarong	Kutai Barat	Kalimantan Timur	PT. Ketapang Agro Lestari	Pabrik Kelapa Sawit	Lembaga Dewan Adat Dayak Benuaq Tanjung dan Bentan menyampaikan laporan dugaan pencemaran Sungai Tamanyang akibat pembuangan air limbah dari kegiatan pabrik kelapa sawit PT Ketapang Agro Lestari. Dampak dari pembuangan air limbah tersebut mengakibatkan ikan sungai menjadi mati dan tidak bisa digunakan masyarakat untuk keperluan sehari-hari	Mencabut izin HGU dan UKL-UPL PT. Ketapang Agro Lestari	Lingkungan Hidup	11-Feb-19	ST.50/BPHLHK-IV/SW.2/2/2019 (13-17 Feb 2019)	1. Edy Hartono 2. Petrus Peledu 3. Hariyanti Hutabarat	Pengaduan tidak terbukti. Namun PT Ketapang Agro Lestari melakukan pelanggaran terhadap sebagian kewajiban di dalam izin lingkungan dan izin PPHU	Rekomendasi ke Pemerintah Daerah untuk penerapan Sanksi Administrasi	Telah dikirim surat dari Direktur Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi dengan nomor S.405/PPSA/PP/GKM.0/3/2019 tanggal 18 Maret 2019 Kepada Bupati Kutai Barat	
8	P.SW2-19008	#180715	11-Feb-19	Website dari Wahana Sumitra	Balikpapan	Balikpapan	Kalimantan Timur	Lamin Etam Ambors	Jasa Wisata	Satwa dilindungi dipelihara	Membebaskan satwa dilindungi	Kehutanan	11-Feb-19	ST.52/BPHLHK-IV/SW.2/2/2019 (11-15 Feb 2019)	1. Yonatan 2. Iwan Setyawan 3. Dwi Mustikawati, A.Md.	Pengaduan terbukti. Pada saat tim melakukan verifikasi lapangan benar telah ditemukan satwa dilindungi berupa rangkong. Namun yang ditemukan tim adalah rangkong dengan kondisi kaki yang diklat menggunakan tali, bukan menggunakan rantas seperti laporan yang diadukan. Tim juga menemukan beberapa jenis satwa yang dilindungi 2 (dua) ekor Elang, 1 (satu) ekor Burung Hantu, 1 (satu) ekor Burung Merak dan 2 (dua) ekor Burung Nuri dengan kondisi kaki terikat tali seperti rangkong di tempat swafoto pengunjungan.	Rekomendasi ke unit lain (BKSDA Kalimantan Timur)		
9	P.SW2-19009	#190341	1 March 2019	Pengaduan Langsung - Abdul Azis (site manager PT Kayan Hydro Energy)	Tanjung Selor	Bulungan	Kalimantan Utara	Kegiatan pengeboran dan pemetaan topografi di wilayah IPPKH PT Kayan Hydro Energy	Pengeboran utk konstruksi	Terdapat kegiatan pengeboran untuk kegiatan konstruksi bendungan dan pemetaan topografi di wilayah IPPKH PT Kayan Hydro Energy	Tidak lanjut terhadap kegiatan pengeboran	Kehutanan	-	-	-	Verifikasi administratif telah ditindaklanjuti oleh polda kaltara.	Rekomendasi ke Sektor Lain	Telah berkoordinasi dengan Polda Kaltara dengan hasil tin dari polda kaltara telah mengamankan penanggung jawab kegiatan pengeboran beserta alat-alat yang	
10	P.SW2-19010	#190342	5-Mar-19	Pengaduan Langsung - Ir. Eddy Yudjar	Samarinda	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Sawmill ilegal	Pengolahan kayu ilegal	Terdapat kegiatan ilegal logging di sekitar Muara Wahau di areal PT. Kiani Lestari dengan pemilik sawmill An. JIU di areal kelapa sawit di dalam blok.	Operasi penegakan hukum	Kehutanan	5-Mar-19	ST.82/BPHLHK-IV/SW.2/3/2019 (6-10 Maret 2019)	1. Edy Hartono 2. Iwan Setyawan 3. Dedi Widi Atmoko	Pengaduan tidak terbukti.	Pengaduan Tidak Terbukti		
11	P.SW2-19011	#190548	19-Mar-19	Surat PT ITCI Hutani Manunggal (an M. Hatta Tandri - Manager SSL-CD PT IHC) No. 037/AHT/1203/2019 tanggal 18 Maret 2019	Senoni, Sebulu, Kutai Kartanegara	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	Pendirian bangunan dan penguasaan lahan di kawasan hutan PT IHM	Perambahan Hutan	Terdapat penguasaan lahan dan pendirian bangunan yang berada di dalam kawasan hutan PT ITCI Hutani Manunggal yang dilakukan oleh saudara Binan yang merupakan warga Desa Lebak Cilong Kecamatan Muara Wis Kutai Kartanegara	Penindakan	Kehutanan	22-Mar-19	ST.113/BPHLHK-IV/SW.2/3/2019 (27-31 Maret 2019)	1. Agus Susanto 2. Dedy Diana 3. I Dewa Made Yoga	Pengaduan terbukti. Terdapat bangunan warung milik Bapak Binan dan Ibu Sutini yang berdiri di atas lahan milik konsesi IUPHHK-HT, ITCI Hutani Manunggal; Berdasarkan keterangan pemilik warung, bangunan tersebut dibangun tahun 2017 dan pembukaan lahannya dimulai tahun 1969. Bangunan berdiri diatas tanah milik H. Eman dan mempunyai surat keterangan mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat	Rekomendasi ke Pemerintah Daerah	Draf surat ke KPHP Meratus	
12	P.SW2-19012	#190549	19-Mar-19	Surat BKSDA (an Ir Suardar Trigonajasa - Kepala Balai) tanggal 18 Maret 2019 No. S.472/K.18/TU/DATA.1/03/2019	Samarinda	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Pembukaan kawasan hutan dan pengambilan kayu tanpa izin pada areal PT Multi Kusuma Cemerlang	Perambahan Hutan, illegal logging	Dugaan tindakan pembukaan kawasan hutan dan pengambilan kayu tanpa ijin pada areal IUPHHK-HTI PT Multi Kusuma Cemerlang dan temuan keberadaan orangutan	Penindakan	Kehutanan	22-Mar-19	ST.112/BPHLHK-IV/SW.2/3/2019 (27-31 Maret 2019)	1. Uli Aprilanto 2. Iwan Setyawan 3. Dewi Wahyuningsih	Pengaduan terbukti. Ditemukan (a) tumpukan kayu olahan benjolan ulin sebanyak 40 balok dengan ukuran 5 cm x 10 cm dan 10 cm x 10 cm dengan panjang 4 m; (b) 3 tumpukan ulin bekas pembangan; (c) 32 batang kayu ulin olahan dengan ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang 4 m	Rekomendasi Operasi Yustisi		
13	P.SW2-19013	#190578	19-Mar-19	Surat Direktorat Pengawasan Hukum Pidana (an Yasti Nurhasan - Direktur) tanggal 13 Maret 2019, Nomor S.40/PHP-3/PPNS/2019	Jakarta	Samarinda	Kalimantan Timur	Pembuangan limbah B3 dan tumpahan limbah B3 di area konsesi PT Insani Bara Perkasa Blok Simpang Pasir	Pengelolaan Limbah B3	Hasil verifikasi pengaduan ditemukan 26 drum (7 drum kosong sisinya telah tumpah dan 19 drum berisi limbah B3 sludge bercampur air), terdapat lubang untuk menampung buangan limbah, terdapat label kuning yang bertuliskan PT Universal Tekno Reksajaya Balikpapan dengan jenis limbah sludge IPAL)	Pengakuan Hukum, Penyidikan oleh PPNS	Lingkungan Hidup	15-Mar-19	ST.100/BPHLHK-IV/SW.2/3/2019 (18-26 Maret 2019)	1. Uli Kardiansyah 2. Wahyudi 3. Nicolas W. Lumbanraja 4. Agus Erlanto 5. Eko Yulianto	Pengaduan terbukti. Ditemukan 26 drum limbah B3 yang selaku pembuangnya belum dapat teridentifikasi karena masih terdapat perbedaan spesifikasi drum yang dibuang dengan drum yang dicurigai berada di pengumpul limbah B3 PT. Kanunil Lumasindo Pratama.	Rekomendasi Penegakan Hukum Pidana.	Telah dilakukan penyelidikan oleh Tim PPNS BPHLHK Kalimantan	
14	P.SW2-19014	#190550	26-Mar-19	Surat DHI Nunukan (an Pridaus - Pih Kepala Dinas) tanggal 26 Maret 2019 Nomor. 145/660/DLH/PHPK/III/2019	Nunukan	Nunukan	Kalimantan Utara	PT Nunukan Sawit Mas	Pencemaran Air	Dugaan pencemaran air sungai Sabuluan yang disebabkan adanya kegiatan pabrik pengolahan kelapa sawit PT Nunukan Sawit Mas	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	4 April 2019	ST.128/BPHLHK-IV/SW.2/4/2019 (08-12 April 2019)	1. Mikrosli Agung, S.Hut. 2. Arrozaq Agung Darmawan, S.T. 3. Ammar Saifurrohman, S.T.	Pengaduan Terbukti. Berdasarkan hasil verifikasi pengaduan dugaan pencemaran air sungai oleh pabrik pengolahan kelapa sawit PT Nunukan Sawit Mas telah terbukti mencemari lingkungan sekitarnya (Anak Sungai Sabuluan). PT Nunukan Sawit Mas tidak terbukti menjadi penyebab pencemaran di areal pemukiman masyarakat Desa Binuan, Kecamatan Sembakung Atulai.	Rekomendasi ke Pemerintah Daerah untuk penerapan Sanksi Administrasi	Penerapan Sanksi Administratif SK Bupati Nunukan No. 158/4544/II/2019 tanggal 31 Juli 2019	

NO	No Registrasi			Tanggal Penerimaan	Nama Penguada	Alamat	Lokasi Kejadian		Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kejadian	Uraian Kejadian	Penyelesaian yang diinginkan	Tipologi (K/L/H/LHK)	Verifikasi				REKOMENDASI	Status Penanganan Terakhir	Keterangan
	1	2	3				Kota/Kabupaten	Provinsi						Tanggal SPT	SPT No.	Verifikator	Hasil Verifikasi			
15	P.SW2-19015	#190430		22-Apr-19	Pendampingan pusat - Surat Direktur PPSA Nomor 5.549/PPSA/PP/GKM.0/4/2019 Tanggal 16 April 2019 Perihal Bantuan Staf	Jakarta	Berau	Kalimantan Timur	PT Supra Bara Energi	Pertambangan Batubara	Dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PT Supra Bara Energi	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	22-April-2019	ST.144/BPHLHK-IV/SW.2/4/2019 (24 - 27 April 2019)	1. Frendy Tange Pasarrin, S.Hut. 2. Ammar Salfurrohmam, S.T. 3.	Pengaduan Tidak Terbukti Berdasarkan hasil verifikasi pengaduan, pengaduan dinyatakan Tidak Terbukti karena lahan yang diludukkan berada dalam wilayah IUP PT Supra Bara Energi, tetapi	Pengaduan Tidak Terbukti		
16	P.SW2-19016	#190551		12-Apr-19	Surat DLH Nunukan (an Rustan - Kepala Dinas) tanggal April 2019 Nomor: 277/660/DLH-PHK/IV/2019	Nunukan	Nunukan	Kalimantan Utara	PT Anjas Anita Jaya	Kegiatan tanpa izin dan dokumen lingkungan	PT Anjas Anita Jaya telah melaksanakan kegiatan penambangan sebelum Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan Perubahan diterbitkan	Pengawasan	Lingkungan Hidup	10-May-19	ST.171/BPHLHK-IV/SW.2/5/2019 (13-17 Mei 2019)	1. Arrozaq Agung Darmawan 2. Ammar Salfurrohmam 3. Aditya Darmawan Satriaya	Pengaduan terbukti. Berdasarkan hasil verifikasi pengaduan, PT Anjas Anita Jaya telah terbukti melakukan kegiatan pertambangan sebelum terbit perubahan izin lingkungan.	Rekomendasi ke Pemerintah Daerah untuk penerapan Sanksi Administrasi	Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah SK Bupati Nunukan No. 188.45/347/W/2019 tanggal 14 Juni 2019	
17	P.SW2-19017	#190552		13-Apr-19	Surat Lembaga Adat Paser Bembeisi Desa Labuan (an Inggong - ketua adat) No.06/KPAPP/2019	Pasir	Pasir	Kalimantan Timur	PT Borneo Indah Marjaya	Perambahan Hutan	PT Borneo Indah Marjaya diduga melakukan penggarangan lahan - sebagian/sua tidak diluar HGU dan termasuk di dalam Kawasan Cagar Alam Teluk Apar	Penindakan	Kehutanan	06-May-19	ST.166/BPHLHK-IV/SW.2/5/2019 (8-12 Mei 2019)	1. Ela 2. Abdul Jalal 3. Nizam Hawa	Pengaduan terbukti. Beberapa lokasi pengambilan titik koordinat merupakan buffer zone antara perkebunan PT Borneo Indah Marjaya dan Perkebunan milik warga sekitar sehingga kemungkinan beberapa	Rekomendasi ke BKSDA Kaltim	Draft Surat ke BKSDA Kaltim	
18	P.SW2-19018	#190524		06-May-19	Media Viral Kaltim dan Suara Indonesia dan Surat DLH Kaltim No. 660.2/699/B.IV.2/DLH/2019	Samarinda	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	PT Indominco Mandiri	Pencemaran Udara, Pencemaran Air	PT Indominco Mandiri diduga melakukan aktivitas pertambangan dan perubahan yang menyebabkan tercemarnya udara di sekitar perubahan akibat debu dan tercemarnya air di kanal di Desa	Pengawasan	Lingkungan Hidup	13-May-19	ST.174/BPHLHK-IV/SW.2/5/2019 (14-18 Mei 2019)	1. Dedi Widi Atmoko 2. Hariyati Hutabarat 3. Eva Riska Octiana	Pengaduan Tidak Terbukti. Namun PT Indominco Mandiri melakukan pelanggaran terhadap sebagian kewajiban di dalam izin lingkungan dan izin PHN	Rekomendasi ke Pengawasan		
19	P.SW2-19019	#190030		10-May-19	Pendampingan Pusat - Surat Direktorat PPSA Nomor 5.648/PPSA/PP/GKM.0/5/2019 Tanggal 10 Mei 2019 Perihal Bantuan Staf	Jakarta	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	PT Karya Bersama Dua	Perambahan Hutan	PT Karya Bersama Dua diduga melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dalam kawasan hutan yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	Penindakan	Kehutanan	20-May-19	ST.180/BPHLHK-IV/SW.2/5/2019 (21-25 Mei 2019)	1. Yuliono 2. Ela 3. Nicolas W Lumbanraja	Pengaduan Tidak Terbukti. Berdasarkan fakta pemeriksaan lapangan ke lokasi usulan kegiatan pertambangan PT. Karya Bersama Dua (titik 1 : N:007'55.54" 76"; E:115°56'59.73" dan titik 2 : N:007°0'00.06"; E:115°55'26.45") ditemukan patok yang bertuliskan angka namun tidak terbukti karena tidak ditemukan adanya kegiatan maupun	Pengaduan Tidak Terbukti		
20	P.SW2-19020	#190562		29-May-19	Media Online Kaltim Post tanggal 29 Mei 2019 "http://kaltim.prokal.co/read/news/35211-ini-ialah-sisi-tergelam-didalam-tambang-di-palaran-jumlah-tewas-jadi-34-anak"	Samarinda	Samarinda	Kalimantan Timur	Pertambangan batubara di palaran	Lingkungan	Ditemukan seorang siswa tenggelam di lubang bekas tambang yang berlokasi di Palaran, Kota Samarinda	Penindakan	Lingkungan Hidup	29-May-19	ST.193/BPHLHK-IV/SW.2/5/2019 (30 Mei - 3 Juni 2019)	1. Dedi Widi Atmoko 2. Nicolas W Lumbanraja 3. Adi Ary Fiantoro	Pengaduan terbukti. Terdapat siswa yang tenggelam pada lubang bekas tambang yang berada di wilayah konsesi PT Insani Barperaksa	Rekomendasi ke Pemerintah Daerah	Telah melakukan koordinasi ke Dinas ESDM dan mengirimkan surat ke DLH Kaltim dengan nomor surat keluar S.815/BPHLHK-IV/09/2019 tanggal 19 Mei 2019	
21	P.SW2-19021	#190579		11-Jun-19	Media online Lensakaltara tanggal 10 Juni 2019 "https://lensakaltara.co.id/alsan-membangun-jalan-lahan-gambut-desa-atap-diduga-disialah-fungsikan"	Tarakan	Nunukan	Kalimantan Utara	PT Adindo Hutani Lestari	Perusakan Gambut	PT Adindo Hutani Lestari diduga membuat jalan yang berada pada lahan gambut yang dilindungi di Desa Atap, Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan	Penindakan	Lingkungan Hidup	14-Jun-19	ST.204/BPHLHK-IV/SW.2/6/2019 (19 - 23 Juni 2019)	1. Mikrosil Agung 2. Arrozaq Agung Darmawan 3. Lori Vambudi	Pengaduan tidak terbukti. PT Adindo Hutani Lestari tidak terbukti mempraksais pembangunan jalan alternatif sembakung dan tidak berada pada konsesi PT AHL tetapi berada pada Area Penggunaan Lain.	Rekomendasi ke Pemerintah Daerah	Draft surat ke DPHRPPK Nunukan	
22	P.SW2-19022	#190580		12-Jun-19	Surat dari Forum Masyarakat Pampang Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara tanggal 19 Mei 2019	Samarinda	Samarinda	Kalimantan Timur	Pertambangan Batubara Ilegal yang melintasi jalan umum Kelurahan Budaya Pampang	Tidak memiliki izin lingkungan	Kegiatan pengangkutan batubara yang dilakukan oleh penambang ilegal yang melewati jalan umum Kelurahan Budaya Pampang sehingga meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat	Penangkapan, Pemeriksaan, Penindakan	Lingkungan Hidup	14-Jun-19	ST.203/BPHLHK-IV/SW.2/6/2019 (16 - 20 Juni 2019)	1. Haris Sri Kuntjoro 2. Nizam Hawa 3. Martin	Pengaduan terbukti. Terdapat truk hauling tambang yang parkir pada pertigaan jalan Kelurahan Budaya Pampang dengan jalan akses menuju Muang Dalam; Terdapat truk hauling yang melewati jalan akses muang ke Kelurahan Budaya Pampang terhadap aktivitas pertambangan	Rekomendasi Operasi Yustisi	Telah dilakukan operasi berdasarkan SPT No. ST.284/BPHLHK-IV/SW.2/8/2019 tanggal 2 Agustus 2019	
23	P.SW2-19023	#190654		20-Jun-19	Media Sosial Instagram kabar_samarinda	Samarinda	Samarinda	Kalimantan Timur	Pertambangan ilegal	Tidak memiliki izin lingkungan	Dugaan praktik tambang ilegal di jalan Banggeris (Belakang Kantor Bawasu Kaltim) yang sudah beroperasi sejak sebulan dengan menyebut pematangan lahan untuk kawling	Penindakan	Lingkungan Hidup	20-Jun-19	ST.215/BPHLHK-IV/SW.2/6/2019 (20-24 Juni 2019)	1. Wahyudi 2. Ammar Salfurrohmam 3. Dewi Wahyuningsih	Pengaduan terbukti. Ditemukan praktik tambang ilegal di jalan Banggeris (Belakang Kantor Bawasu Kaltim)	Rekomendasi ke Sektor Lain	Telah ditangani oleh Polresta Samarinda	
24	P.SW2-19024	#190656		25-Jun-19	Surat dari Aliansi LSM Benak LPPKH-SDH No.01/Aliansi-LSM/BENAK-LPPKH-SDH/08/2018 tanggal 27 Mei 2019 (an Affian - Direktur Eksekutif BENAK dan Erin Witono - Ketua Umum LPPKH-SDH)	Berau	Berau	Kalimantan Timur	PT Anugerah Energitama (perkebunan kelapa sawit)	Pelanggaran Izin Kehutanan dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kehutanan	Dugaan pelanggaran penataan hasil hutan yang dilakukan oleh PT Anugerah Energitama	Penindakan	Kehutanan	26-Jun-19	ST.224/BPHLHK-IV/SW.2/6/2019 (27 Juni - 1 Juli 2019)	1. Frendy Tange Pasarrin 2. Arrozaq Agung Darmawan 3. Ammar Salfurrohmam	Pengaduan terbukti. PT Anugerah Energitama belum melaporkan kesepakatan bersama dengan PT Tanjung Bedes Hutani tentang penggunaan koridor ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dirjen PHPL, Kepala Balai PHPL, dan Kepala BPKH; PT Anugerah Energitama melalui kontraktornya PT Tri Manunggal Jati melakukan pengelolaan kayu berupa kayu log/bulat diolah menjadi plat/patok di tempat pengelolaan kayu (saw mill) milik CV	Rekomendasi ke Pemerintah Daerah . Menyuarai Dinas Kehutanan.	Draft surat ke Dishut Kaltim	
25	P.SW2-19025	#190682		26-Jun-19	Pengaduan langsung - Mसान	Loa Duri	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	Perorangan an Yosep (Kasi Pemerintahan Desa Sungai Payang) dan Iswanto (Ketua RT 03 Sentuk Seberang)	Pelanggaran Izin Kehutanan dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kehutanan	Dugaan penerbitan surat tanahgarapan yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan dan Ketua RT 03 Sentuk Seberang di kawasan hutan KIBK, Desa Sungai Payang, Kecamatan	Penegakan Hukum	Kehutanan	26-Jun-19	ST.225/BPHLHK-IV/SW.2/6/2019 (28 Juni - 2 Juli 2019)	1. Edy Hartono 2. Waleisa Mitra 3. Dwi Mustikawati	Pengaduan Tidak terbukti	Pengaduan Tidak terbukti		
26	P.SW2-19026	#190695		3-Jul-19	Media Online https://infotasa.co/2019/03/05/war-ga-isa-kulu-ngadu-ke-gubernur-protas-pencemaran-lingkungan-pt-mhu/ dan http://kaltim.prokal.co/read/news/352294-gara-gara-ini-ubah-embak-embak-demo-kantor-gubernur-kaltim.html	Samarinda	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	PT Multi Harapan Utama	Pencemaran udara, Pencemaran Air	Dugaan pencemaran udara akibat debu crushing plant dan pencemaran air akibat aktivitas di Loa Kulu Terminal Coal milik PT Multi Harapan Utama di RT 17 Desa Loa Kulu Kulu	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	3-Jul-19	ST.241/BPHLHK-IV/SW.2/7/2019 (4-8 Juli 2019)	1. Dedi Widi Atmoko 2. Hariyati Hutabarat 3. Eva Riska Octiana	Pengaduan Tidak Terbukti. Namun ditemukan pelanggaran lain yang dilakukan oleh PT PMU antara lain kondisi eksisting berbeda dengan rencana di dokumen lingkungan yang dimiliki yaitu jumlah dan kapasitas crushing plant yang terdapat pada area LUCT, jumlah dan kapasitas genset yang terdapat di area LUCT dan terdapat penambahan pembangunan crushing plant dengan kapasitas lebih besar di area LUCT yang tidak tercantum dalam dokumen lingkungan; PT Multi Harapan Utama memiliki koordinat titik penataan outlet settling pond yang berbeda dengan koordinat titik penataan yang terdapat di dalam izin; PT Multi Harapan Utama tidak melakukan pengujian kualitas air permukaan terhadap parameter BHC, Aldrin, Aflin, Chlordane, DDT, Heptachlor, Lindane, Methoxychlor, Endrin, dan Toxaphen	Rekomendasi ke Sanksi Administrasi	Telah mengirim surat Kepala BPHLHK Kalimantan ke PPSA dengan Nomor ND.081/BPHLHK-IV/PPSA/7/2019 tanggal 16 Juli 2019	
27	P.SW2-19027	#190700		10-Jul-19	Surat dari Lembaga Kaltim Hijau No. 019/KH-PKT/VI/PMH.2019 tanggal 10 Juli 2019 (an M. Victor D Lumenta - Direktur Eksekutif)	Bontang	Bontang	Kalimantan Timur	PT Pupuk Kaltim	Perambahan Hutan	Dugaan perambahan hutan lindung yang dilakukan oleh PT Pupuk Kaltim untuk tempat pemrosesan limbah B3 secara thermal (insinerator) dan tempat pemrosesan abt (TPA)	Penindakan	Kehutanan	02-Aug-19	ST.286/BPHLHK-IV/SW.2/8/2019 (6 - 10 Agt 2019)	1. Samuudin 2. Rohmad Slamet 3. Machruz Rizki Fawzi	Pengaduan Tidak Terbukti.	Pengaduan Tidak Terbukti		
28	P.SW2-19028	#190701		10-Jul-19	Surat dari Lembaga Kaltim Hijau No. 019/KH-PKT/VI/PMH.2019 tanggal 10 Juli 2019 (an M. Victor D Lumenta - Direktur Eksekutif)	Bontang	Bontang	Kalimantan Timur	PT Kaltim Industrial Estate	Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3	Dugaan pembuangan/dumping limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh PT Kaltim Industrial Estate.	Penindakan	Lingkungan Hidup	02-Aug-19	ST.285/BPHLHK-IV/SW.2/8/2019 (6 - 10 Agt 2019)	1. Yonatan 2. Hariyati Hutabarat 3. Eva Riska Octiana	Pengaduan Tidak Terbukti.	Pengaduan Tidak Terbukti		
29	P.SW2-19029	#190528		29-Jul-19	Surat dari PPSA No. S.1169/PPSA/PP/GKM.0/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 (an Direktur PPSA)	Jakarta	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	CV. Bumi Paramasari Indo	Kerusakan tanah untuk produksi biomassa	CV Bumi Paramasari Indo diduga tidak melakukan reklamasi lahan bekas kegiatan tambang	Verifikasi	Lingkungan Hidup	02-Aug-19	ST.289/BPHLHK-IV/SW.2/8/2019 (6 - 10 Agt 2019)	1. Edy Hartono 2. Dewi Wahyuningsih 3. Nicolas W Lumbanraja	Pengaduan terbukti. CV BPI tidak melakukan reklamasi di lahan bekas tambang. 2 CV BPI juga tidak taat terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta peraturan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Rekomendasi ke Pemerintah Daerah	Telah terdapat surat dari direktur PPSA ke Bupati Kukar dengan nomor S.5079/PPSA/PP/GKM.0/10/2019 tanggal 17 October 2019	
30	P.SW2-19030	#191029		10-Jul-19	Surat dari PT Multi Kusuma Cemerlang No. 09/MRC.COM/IV/2019 tanggal 10 Juli 2019 (an Dedy Inkiwang)	Tepian Langsat, Kutim	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Pembukaan Hutan dan Pengambilan kayu	Perambahan Hutan	Dugaan tindakan pembukaan kawasan hutan dan pengambilan kayu tanpa izin pada areal IUPPHK-HTI PT Multi Kusuma Cemerlang yang dilakukan oleh individu/kelompok tertentu	Penyetidkan	Kehutanan	31-Jul-19	ST.281/BPHLHK-IV/SW.2/7/2019 (31 Jul - 4 Agt 2019)	1. Edy Hartono 2. Nizam Hawa 3. Sumanto	Pengaduan tidak terbukti.	Pengaduan tidak terbukti.		

NO	No Registrasi			Tanggal Penerimaan	Nama Pengadu	Alamat	Lokasi Kejadian		Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kejadian	Uraian Kejadian	Penyelesaian yang dijinjikan	Tipologi (K/L/H/LHK)	Verifikasi			Hasil Verifikasi	REKOMENDASI	Status Penanganan Terakhir	Keterangan
	Sekel	Online					Kota/Kabupaten	Provinsi						Tanggal SPT	SPT No.	Verifikator				
31	P.SW2-19031	#190534	12-Aug-19	Surat dari PPSA No. S.1012/PPSA/PP/GKM/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 (an Direktur PPSA) Pengaduan online dari Siti Nur Hasanah (Profauna Indonesia)	Jakarta	Samarinda	Kalimantan Timur	Perorangan an Vincetia Vita Ninggar	TSL	Profana Indonesia mendapat laporan dari masyarakat bernama Hendra Winata terkait perubahan dan dugaan perdagangan pelanduk (Tragulus sp.) di Samarinda. Diketahui melalui akun Facebook bernama Vincetia Vita Minggar yang memiliki hasil buruannya di grup facebook Busam Buhunan Samarinda pada tanggal 10	Penyidikan	Kehutanan	13-Aug-19	ST.297/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2019 (14 - 18 Agt 2019)	1. Petrus Peledu 2. Dedy Diana 3. Rohmad Slamet	Pengaduan terbukti. Namun kasus tersebut sulit untuk diteruskan ke tingkat penyidikan karena barang bukti sudah musnah / tidak dapat ditemukan	Rekomendasi ke Unit Lain	Berkoordinasi secara langsung dengan BKSDA Kaltim		
32	P.SW2-19032	#191030	12-Aug-19	Berita Online http://koran.kaltara.com/kawasan-hutan-di-bunyur-jadi-areal-tambang/	Bulungan	Bulungan	Kalimantan Utara	Pertambangan Batubara	Kehutanan	Dugaan perubahan kawasan hutan menjadi lokasi pertambangan batubara di Pulau Bunyur	Verifikasi	Kehutanan	13-Aug-19	ST.295/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2019 (14 - 18 Agt 2019)	1. Frendy Tangke Pasarrin 2. Arrozaq Agung Darmawan 3. Ammar Salfurrohman	Pengaduan tidak terbukti	Pengaduan tidak terbukti			
33	P.SW2-19033	#191031	12-Aug-19	Surat pengaduan dari jaksel/pengacara & konsultan hukum MR.R. & rekan selaku kuasa hukum PT Etam Manunggal Jaya tanggal 12 Mei 2019 (an M. Rizal	Tenggarong	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	KUD Padat Karya (Pertambangan Batubara)	Tidak memiliki izin lingkungan	Dugaan kegiatan pertambangan batubara tanpa AMDUK/UK dan UPL di Wilayah Izn Usaha Pertambangan (WIUP) yang bersengketa yang dilakukan oleh KUD Padat Karya	Penghentian aktivitas	Lingkungan Hidup	13-Aug-19	ST.296/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2019 (14 - 18 Agt 2019)	1. Hariyanti Hutabarat 2. Fia Rizka Octiana 3. Nizam Hawa	Pengaduan terbukti.	Rekomendasi ke Pemerintah Daerah DLH Kabupaten Kutai Kartanegara	Draf surat		
34	P.SW2-19034	#191032	23-May-19	Surat dari Masyarakat an Heronisa Soedarwo dan Isnain Karim	Balikpapan	Balikpapan	Kalimantan Timur	PLN UIP Kalbagtim	Pembangunan SUIT	Masyarakat menolak adanya pembangunan SUIT yang dalam prosesnya tidak melibatkan masyarakat	Penghentian aktivitas	non LHK	-	-	-	Pengaduan non LHK, verifikasi administratif	Pengaduan Non LHK			
35	P.SW2-19035	#191033	14-Jun-19	WA dari Kepala BKSDA Kalimantan Timur	Samarinda	Samarinda	Kalimantan Timur	Andri Sugianto	Pemilikan Tumbuhan Satwa liar	Masyarakat an Andri Sugianto diduga memiliki / memelihara satwa liar yaitu <i>Paralutia</i>	Penindakan	Kehutanan	-	-	-	Verifikasi administratif.	Rekomendasi ke unit lain	Telah berkoordinasi secara langsung dengan BKSDA Kaltim		
36	P.SW2-19036	#191034	09-Jul-19	Pengaduan langsung an Ahmad Iibu	Samarinda	Samarinda	Kalimantan Timur	Pencurian Kayu	Pencurian Kayu	Beberapa orang melakukan kegiatan pencurian kayu dengan menggunakan senso dan diangkat menggunakan motor ke perahu di lahan milik masyarakat	penindakan oleh pihak berwajib	non LHK	-	-	-	Pengaduan non LHK, verifikasi administratif	Pengaduan Non LHK			
37	P.SW2-19037	#191035	21-Aug-19	Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan No. 374/DLH-B/PHPKL/VI/2019 tanggal 5 Juni 2019 (an dr. H. Rustan Samsuddin - Kepala	Nunukan	Nunukan	Kalimantan Utara	PT Nunukan Bara Sukses	Pelanggaran Izn Lingkungan	Diduga adanya tahapan kegiatan yang mendahului perencanaan yang diajukan dalam perubahan izin lingkungan	Penghentian aktivitas	Lingkungan Hidup	27-Aug-19	ST.318/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2019 (29 Agt - 2 Sep 2019)	1. Mikrosli Agung 2. Arrozaq Agung Darmawan 3. Ammar Salfurrohman	Pengaduan terbukti.	Rekomendasi kepada pemerintah daerah DLH Kabupaten Nunukan	Draft surat ke DLH Nunukan		
38	P.SW2-19038	#191036	28-Aug-19	Media online https://www.liputan6.com/regional/read/4049046/jadi-ibu-kota-negara-baru-lubang-tambang-di-sambog-makan-korban-lagi?related=tab&utm_expid=92415y6QdGis7w9arwTQ.1&utm_refer=https%3A%2F2Fwww.google.c	Jakarta	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	PT Singlurus Pratama	Lingkungan	Dugaan adanya korban tenggelam di galian bekas tambang di Wilayah Konsesi PT Singlurus Pratama	Verifikasi	Lingkungan Hidup	28-Aug-19	ST.319/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2019 (29 Agt - 2 Sep 2019)	1. Mujiono 2. Budi Santoso 3. Dewi Wahyuningsih	Pengaduan tidak terbukti.	Rekomendasi ke Pemerintah Daerah DLH Provinsi Kalimantan Timur	Draft surat ke DLH Prov kaltim		
39	P.SW2-19039	#191037	28-Aug-19	Pengaduan langsung H Datu Kodrat	Bulungan	Bulungan	Kalimantan Utara	PT Kayan Patria Pratama dan PT Kayan Makmur Sejahtera sebagai kontraktor PT Inhutani 1 dan PT Ici Kayan Hutani	Kerusakan Lingkungan Hidup	dugaan ilegal logging, penyerobotan lahan milik ahli waris dan lalu lintas kendaraan di sekitar gua yang menyebabkan berkurangnya produktivitas sarang burung walet yang dilakukan oleh PT Kayan Patria Pratama dan PT Kayan Makmur Sejahtera sebagai kontraktor PT Inhutani 1 dan PT Ici Kayan Hutani	ganti rugi dan kompensasi	Kehutanan	30-Aug-19	ST.328/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2019 (3 - 7 september 2019)	1. Mikrosli Agung 2. Arrozaq Agung Darmawan 3. Ammar Salfurrohman	Pengaduan tidak terbukti.	Pengaduan tidak terbukti.			
40	P.SW2-19040	#191038	30-Aug-19	Instagram Samarinda Etam	Samarinda	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kerusakan Lingkungan Hidup	Kebakaran lahan di Tahura Bukit Soeharto	Penindakan	Lingkungan Hidup	30-Aug-19	ST.326/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2019 (31 agustus - 4 september 2019)	1. Agus Susanto 2. Lubis 3. Rohmad Slamet	Pengaduan terbukti.	Rekomendasi ke Pemerintah Daerah UPTD Tahura Bukit Soeharto	Berkoordinasi secara langsung dengan UPTD Tahura Bukit Soeharto		
41	P.SW2-19041	#191039	04-Sep-19	Direktorat Pengamanan dan Pencegahan Hutan (WA dari Eko Novi Setiawan)	Jakarta	Kutai Barat	Kalimantan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan di Kutai Barat	Kerusakan Lingkungan Hidup	Dugaan kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat	Verifikasi	Lingkungan Hidup	02-Sep-19	ST.336/BPPHLHK-IV/SW.2/9/2019	1. Dedy Diana 2. Subchan 3. Eddy Hartono	Pengaduan terbukti.	Rekomendasi ke BPPHLHK Kabupaten Nunukan	Telah dilakukan pullback dengan ST.332/BPPHLHK-IV/SW.2/9/2019 tanggal 12 September 2019	Telah dilakukan gelar perkara di jakarta dan diputuskan untuk pengawasan	
42	P.SW2-19042	#191047	05-Sep-19	Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan No. 480/660/DLH-PHPKL/VI/2019 tanggal 30 Agustus 2019 (an dr. H. Rustan Samsuddin - Kepala Dinas)	Nunukan	Nunukan	Kalimantan Utara	PT Permata Nusa Sejaht	Pencemaran Air	Dugaan pencemaran air Sungai Seimanggis yang berasal dari tumpahan minyak CPO dari kegiatan hauling minyak CPO ke tongkang yang dilakukan oleh PT Permata Nusa Sejaht	Verifikasi	Lingkungan Hidup	09-Sep-19	ST.343/BPPHLHK-IV/SW.2/9/2019 (11 - 15 September 2019)	1. Arrozaq Agung Darmawan 2. Ammar Salfurrohman 3. Bayu Saka	Pengaduan terbukti.	Rekomendasi kepada pemerintah daerah DLH Kabupaten Nunukan	Draft surat ke DLH Nunukan		
43	P.SW2-19043	#191048	05-Sep-19	Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan No. 479/660/DLH-PHPKL/VI/2019 tanggal 30 Agustus 2019 (an dr. H. Rustan Samsuddin - Kepala Dinas)	Nunukan	Nunukan	Kalimantan Utara	PT Nunukan Jaya Lestari	Pencemaran Air	Dugaan pencemaran lingkungan akibat adanya luapan air limbah yang dilakukan oleh PT Nunukan Jaya Lestari	Verifikasi	Lingkungan Hidup	09-Sep-19	ST.343/BPPHLHK-IV/SW.2/9/2019 (11 - 15 September 2019)	1. Arrozaq Agung Darmawan 2. Ammar Salfurrohman 3. Bayu Saka	Pengaduan tidak terbukti.	Pengaduan tidak terbukti.			
44	P.SW2-19044	#191049	09-Sep-19	Media sosial Instagram kabar.kaltim	Balikpapan	Balikpapan	Kalimantan Timur	Kematian penyus	TSL	Dugaan penyus mati di perairan halmataram	Verifikasi	Kehutanan	-	-	-	Verifikasi administratif	Rekomendasi ke unit lain	Rekomendasi langsung dengan BKSDA		
45	P.SW2-19045	#191050	11-Sep-19	Direktorat Pengamanan dan Pencegahan Hutan (WA dari Eko Novi Setiawan)	Jakarta	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	PT Nala Palma Cadudasa	Kerusakan Lingkungan Hidup	Dugaan kebakaran lahan yang terjadi di area PT Nala Palma Cadudasa	Verifikasi	Lingkungan Hidup	11-Sep-19	ST.348/BPPHLHK-IV/SW.2/9/2019 (11 - 15 September 2019)	1. Anton Jumaedi 2. Sumarto 3. Dewi Wahyuningsih	Pengaduan terbukti.	Rekomendasi ke Pengkagan Hukum Pidana	Telah dilakukan penyidikan oleh PPNB BPPHLHK Kalimantan		
46	P.SW2-19046	#191129	04-Sep-19	Surat dari Yayasan Kaltim Hijau tanggal 2 September 2019 an M. Victor D Lumenta	Sebuntal	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	PT Mahakam Sumber Jaya	Kerusakan tanah	dugaan adanya kerusakan sumber air tanah/mata air/Equalifer, kerusakan tanaman-tumbuhan di ladang kebun dan kekeringan sungai dan empang akibat adanya kegiatan anblastingsang	Verifikasi	Lingkungan Hidup	12-Sep-19	ST.351/BPPHLHK-IV/SW.2/9/2019 (13-17 September 2019)	1. Dedi Widi Atmoko 2. Abdul lalal 3. Nicolas W. Lumbanraja	Pengaduan tidak terbukti.	Rekomendasi ke Pemerintah Daerah DLH Provinsi Kalimantan Timur	Telah mengirimkan surat ke DLH Kaltim dengan nomor S.929/BPPHLHK-IV/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019		
47	P.SW2-19047	#191051	15-Sep-19	Media Sosial Instagram Samarindatam	Samarinda	Samarinda	Kalimantan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kerusakan Lingkungan Hidup	Kebakaran lahan di sekitar bandara APT Pranoto Samarinda	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	15-Sep-19	-	1. Amur Rahim 2. Wahyudi 3. Petrus Peledu 4. Usman Iskandar	Pengaduan terbukti.	Rekomendasi ke Sektor Lain	Berkoordinasi secara langsung dengan kepolisian setempat		
48	P.SW2-19048	#191052	15-Sep-19	WA dari Kepala Balai PPHLHK Kalimantan	Samarinda	Berau	Kalimantan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kerusakan Lingkungan Hidup	Kebakaran Lahan di lokasi sekitar COPDI Kabupaten Berau	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	16-Sep-19	ST.357/BPPHLHK-IV/SW.2/9/2019 (17-21 September 2019)	1. Mikrosli Agung 2. Arrozaq Agung Darmawan 3. Ammar Salfurrohman	Pengaduan terbukti.	Rekomendasi ke Sektor Lain	Berkoordinasi secara langsung dengan kepolisian setempat		
49	P.SW2-19049	#191053	21-Sep-19	Media Sosial Instagram Samarindatam	Samarinda	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kerusakan Lingkungan Hidup	Dugaan kebakaran lahan di Sanga-Sanga	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	-	21 - 22 sep 2019	1. Anton Jumaedi 2. Edi Santoso	Pengaduan terbukti.	Rekomendasi ke Sektor Lain	Berkoordinasi secara langsung dengan kepolisian setempat		
50	P.SW2-19050	#191054	25-Sep-19	Pengaduan dari Polres Bulungan dan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara	Bulungan	Bulungan	Kalimantan Utara	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kerusakan Lingkungan Hidup	Dugaan kebakaran hutan di Desa Selimau dan Desa Mangkupadi	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	20-Sep-19	ST.363/BPPHLHK-IV/SW.2/9/2019 (22-26 September 2019)	1. Mikrosli Agung 2. Arrozaq Agung Darmawan 3. Ammar Salfurrohman	Pengaduan terbukti.	Rekomendasi ke sektor lain	Sudah dilakukan penyidikan oleh Polda Kaltara dan Polres Bulungan		

NO	No Registrasi		Tanggal Penyerahan	Nama Pengadu	Alamat	Lokasi Kejadian		Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Uraian Kejadian	Penyelesaian yang diinginkan	Tipologi (K/L/H/LHK)	Verifikasi			Hasil Verifikasi	REKOMENDASI	Status Penanganan Terakhir	Keterangan
	Sekel	Online				Kota/ Kabupaten	Provinsi						Tanggal SPT	SPT No.	Verifikator				
51	P.SW2-19051	#191055	20-Sep-19	Pengaduan dari Laporan Harian Pemantauan Hotspot di Kawasan Hutan dan Koneksi Ditjen Gakkum tanggal 18 Sep 2019	Jakarta	Berau	Kalimantan Timur	PT Sumalindo Alam Lestari I	Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan	Dugaan kebakaran hutan dan lahan di area konsesi PT Sumalindo Alam Lestari I	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	25-Sep-19	ST.377/BPPLHK-IV/SW.2/9/2019 (26 - 30 September 2019)	1. Sumanto 2. Nizam Hawa 3. Nicolas W Lumbanraja	Pengaduan terbukti. Telah terjadi kebakaran lahan di wilayah IUPHHK-HTI PT Sumalindo Alam Lestari I juga tidak taat terhadap peraturan	Rekomendasi ke Sanksi Administrasi	Draft surat ke PPSA	
52	P.SW2-19052	#191058	26-Sep-19	Pengaduan dari Laporan Harian Pemantauan Hotspot di Kawasan Hutan dan Koneksi Ditjen Gakkum tanggal 18 Sep 2019 dan 25 Sep 2019	Jakarta	Berau	Kalimantan Timur	PT Tanjung Redeb Hutani	Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan	Dugaan kebakaran hutan dan lahan di area konsesi PT Tanjung Redeb Hutani	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	25-Sep-19	ST.378/BPPLHK-IV/SW.2/9/2019 (27 September - 1 Oktober 2019)	1. Mikrosil Agung 2. Ammar Salfurohman 3. Bayu Saka	Pengaduan Terbukti. Terdapat beberapa lokasi bekas terbakar yang berada di dalam konsesi PT Tanjung Redeb Hutani. PT TRH tidak taat terhadap	Rekomendasi ke Sanksi Administrasi	Draft surat ke PPSA	
53	P.SW2-19053	#191059	26-Sep-19	Pengaduan dari Laporan Harian Pemantauan Hotspot di Kawasan Hutan dan Koneksi Ditjen Gakkum tanggal 25 Sep 2019	Jakarta	Kutai Timur	Kalimantan Timur	PT Sylvaduta Corporation	Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan	Dugaan kebakaran hutan dan lahan di area konsesi PT Sylvaduta Corporation	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	25-Sep-19	ST.379/BPPLHK-IV/SW.2/9/2019 (26 - 30 September 2019)	1. Petrus Peledu 2. Hariyanti Hutabarat 3. Dwi Mustikawati	Pengaduan terbukti. Terdapat lahan terbakar di PT Sylvaduta Corporation pada koordinat 0.386,166.449.	Rekomendasi ke Pemerintah Daerah DHI Provinsi Kalimantan Timur	Draft Surat ke DHI Kaltim	
54	P.SW2-19054	#191060	26-Sep-19	Pengaduan dari Laporan Harian Pemantauan Hotspot di Kawasan Hutan dan Koneksi Ditjen Gakkum tanggal 25 Sep 2019	Jakarta	Kutai Timur	Kalimantan Timur	PT Mahakarya Perdana Gemilang	Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan	Dugaan kebakaran hutan dan lahan di area konsesi PT Mahakarya Perdana Gemilang	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	25-Sep-19	ST.380/BPPLHK-IV/SW.2/9/2019 (26 - 30 September 2019)	1. Welisa Mtra 2. Dewi Wahyuningih 3. Adi Ary Fianto	Pengaduan tidak terbukti	Pengaduan tidak terbukti		
55	P.SW2-19055	#191274	16-Oct-19	Berita online https://kaltim.idtimes.com/news/kalimantan/muhammad-maulana-3-dugaan-limbah-dmip-gulian-relayan-balikpapan-unjuk-rasa-di-pertamina		Balikpapan	Kalimantan Timur	PT Pertamina RU V	Pencemaran Pesisir dan Laut	Dugaan adanya limbah yang mencemari lautan di sekitar areal tangkapan nelayan yang berasal dari limbah dalam proyek Pembangunan Refinery Development Master Plan	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	18-Oct-19	ST.427/BPPLHK-IV/SW.2/10/2019 (23-27 November 2019)	1. Dedy Diana 2. Dewi Wahyuningih 3. Nicolas W Lumbanraja	Pengaduan tidak terbukti	Pengaduan tidak terbukti		
56	P.SW2-19056	#191275	18-Oct-19	WA dari Masyarakat		Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	Pertambangan Batubara	Tidak memiliki izin lingkungan	Adanya truk yang mengangkut batubara melintas dari KM.12 Kotabangun, Tenggarong menuju Desa Selorong , Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang diduga berasal dari kegiatan tambang ilegal	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	18-Oct-19	ST.423/BPPLHK-IV/SW.2/10/2019 (22-26 November 2019)	1. Machruzi Rizki Fawzi 2. Dwi Mustikawati 3. Fily	Pengaduan terbukti. Terdapat jalan umum yang rusak dan rumah masyarakat yang terkena dampak debu akibat aktivitas hauling batubara; ditemukan stokpile batubara di jetty yang diduga akan diangkut dengan menggunakan ponton; terdapat aktivitas tambang ilegal di kilo 23 dan kilo 25 jalan porso tenggarong - kotabangun	Rekomendasi ke BPPHLHK	Telah dilakukan operasi fungsional dengan nomor SPT ST.448/BPPLHK-IV/SW2/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019	Telah dimarkan 1 orang yang kemudian dibuat berita acara pemeriksaan dan surat penyitaan mengemukakan alat
57	P.SW2-19057	#191276	18-Oct-19	Pemantauan Hotspot di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 17 Oktober 2019	Samarinda	Berau	Kalimantan Timur	PT Palma Kharisma Sekawan	Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan	Dugaan kebakaran hutan dan lahan di wilayah PT Palma Kharisma Sekawan	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	17-Oct-19	ST.421/BPPLHK-IV/SW.2/10/2019 (17-21 November 2019)	1. Arrozag Agung Darmawan 2. Ammar Salfurohman 3. Bayu Saka	Pengaduan tidak terbukti. Terjadi kebakaran namun tidak pada PT Palma Kharisma Sekawan karena perusahaan sudah tidak ada, Terdapat perusahaan lainnya seperti PT Hutani Hijau Mas, PT Natura Pacific Nusantara dan PT Tunas Permata Hijau. Namun hasil overlay titik kebakaran terhadap izin lokasi perusahaan-perusahaan tersebut diketahui titik hotspot berada diluar perusahaan-perusahaan tersebut.	Pengaduan Tidak Terbukti		
58	P.SW2-19058	#191277	18-Oct-19	Pemantauan Hotspot di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 17 Oktober 2019	Samarinda	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	PT Itci Hutani Manunggal	Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan	Dugaan kebakaran hutan dan lahan di wilayah PT Itci Hutani Manunggal	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	18-Oct-19	ST.425/BPPLHK-IV/SW.2/10/2019 (22-26 November 2019)	1. Wahyudi 2. Petrus Peledu 3. Nizam Hawa	Pengaduan terbukti. Terdapat kebakaran lahan di area IUPHHK-HTI PT Itci Hutani Manunggal	Rekomendasi Sanksi Administrasi	Draft Surat ke PPSA	
59	P.SW2-19059	#191278	18-Oct-19	Pemantauan Hotspot di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 17 Oktober 2019	Samarinda	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	PT Tunas Prima Sejahtera	Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan	Dugaan kebakaran hutan dan lahan di wilayah PT Tunas Prima Sejahtera	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	18-Oct-19	ST.424/BPPLHK-IV/SW.2/10/2019 (22-26 November 2019)	1. Edy Hartono 2. Ela 3. Eva Ritka Octiana	Pengaduan terbukti. Terdapat lahan terbakar di wilayah izin lokasi dan IUP PT Tunas Prima Sejahtera seluas 298 Ha	Rekomendasi ke Pemerintah Daerah	Draft surat ke DHI Kukar	
60	P.SW2-19060	#191279	18-Oct-19	Pemantauan Hotspot di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 17 Oktober 2019	Samarinda	Kutai Barat	Kalimantan Timur	PT London Sumatera Internasional	Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan	Dugaan kebakaran hutan dan lahan di wilayah PT London Sumatera Internasional	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	18-Oct-19	ST.426/BPPLHK-IV/SW.2/10/2019 (22-26 November 2019)	1. Yudi Aprianto 2. Naval Pradika 3. Hariyanti Hutabarat	Pengaduan terbukti. Terdapat kebakaran lahan di area konsesi PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. pada koordinat -0,40817, 116,071. Berdasarkan hasil perhitungan dari delianasi koordinat pada saat verifikasi lapangan luas area terbakar pada konsesi PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. adalah 258,55 hektar. Perusahaan tidak taat terhadap peraturan perundangan di bidang PPLH	Rekomendasi ke Pemerintah Daerah	Draf surat	
61	P.SW2-19061	#191306	30-Oct-19	Pengaduan dari masyarakat	Samarinda	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	PT Acacia Andalan Utama	Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan	Dugaan kebakaran hutan dan lahan di wilayah PT Acacia Andalan Utama	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	11-Nov-19	ST.466/BPPLHK-IV/SW.2/11/2019 (12-16 November 2019)	1. Petrus Peledu 2. Dedy Diana 3. Nicolas W Lumbanraja	Laporan dalam proses	Verifikasi Lapangan		
62	P.SW2-19062	#191323	11-Nov-19	Pengaduan dari WA masyarakat	Bulungan	Malinau	Kalimantan Utara	Illegal logging	Illegal logging	Illegal logging yang dilakukan masyarakat di areal IUPHHK PT Meranti Sakti Indonesia di Kabupaten Malinau	Kehutanan	Kehutanan	11-Nov-19	ST.464/BPPLHK-IV/SW.2/11/2019 (12-16 November 2019)	1. Mikrosil Agung 2. Aditya Darmawan Sinatrya 3. Lori Vambudi	Laporan dalam proses	Verifikasi Lapangan		
63	P.SW2-19063	#191324	11-Nov-19	Pengaduan dari masyarakat	Bulungan	Bulungan	Kalimantan Utara	Pertambangan Emas	Pencemaran Air	Dugaan pengolahan emas menggunakan bahan kimia Natrium Sianida (NaCN) dan air limbahnya di buangan ke sungai yang beresiko di cekdam	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	11-Nov-19	ST.465/BPPLHK-IV/SW.2/11/2019 (12-16 November 2019)	1. Arrozag Agung Darmawan 2. Ammar Salfurohman 3. Bayu Saka	Laporan dalam proses	Verifikasi Lapangan		
64	P.SW2-19064	#191345	11-Sep-19	Surat dari Forum Masyarakat Pampang tanggal 1 September 2019	Samarinda	Samarinda	Kalimantan Timur	Pertambangan Batubara	Tidak memiliki izin lingkungan	Pertambangan batubara yang menggunakan jalan umum di kelurahan Pampang	Penegakan hukum	Lingkungan Hidup	11-Nov-19	ST.470/BPPLHK-IV/SW.2/11/2019 (12-16 November 2019)	1. Uman Iskandar 2. Hariyanti Hutabarat 3. Machruzi Rizki Fawzi	Laporan dalam proses			
65	P.SW2-19065	#191346	05-Nov-19	Surat dari BKSDA Kalimantan Timur No. S.1623/K.18/TU/DATA.1/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019	Samarinda	Paser	Kalimantan Timur	Perubahan Hutan	Perubahan Hutan	Dugaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dengan salah satu kontraktornya yaitu CV Nurul Siti di dalam kawasan Cagar Alam Teluk	Penindakan	Kehutanan	13-Nov-19	ST.476/BPPLHK-IV/SW.2/11/2019 (15 - 24 November 2019)	1. Sadran 2. Rohmad Slamet 3. Dedi Widi Atmoko 4. Dwi Mustikawati	Ditindaklanjuti melalui Poldasi. LAPORAN DALAM PROSES			
66	P.SW2-19066	#191347	14-Nov-19	Surat dari BKSDA Kalimantan Timur No. S.1735/K.18/TU/DATA.1/11/2019 tanggal 13 November 2019	Samarinda	Paser	Kalimantan Timur	Pertambangan batu bara	Perubahan Hutan	Dugaan kegiatan pertambangan batu bara dengan menggunakan alat berat excavator pada tanggal 10 November 2019 sampai saat ini di wilayah administrasi Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser di	Penindakan	Kehutanan	13-Nov-19	ST.476/BPPLHK-IV/SW.2/11/2019 (15 - 24 November 2019)	1. Sadran 2. Rohmad Slamet 3. Dedi Widi Atmoko 4. Dwi Mustikawati	Ditindaklanjuti melalui Poldasi. LAPORAN DALAM PROSES			
67	P.SW2-19067	#191348	17-Nov-19	Media sosial Facebook	Samarinda	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Perburuan dan Perdagangan Rusa	TSL	Dugaan perburuan dan perdagangan rusa yang dilindungi melalui media sosial facebook atas nama "Fitry Dwiyantini" pada tanggal 16 November 2019	Verifikasi	Kehutanan	18-Nov-19	ST.482/BPPLHK-IV/SW.2/11/2019 (18 -22 November 2019)	1. Petrus Peledu 2. Uman Iskandar 3. Freddy Tangke Parsirrin	Pengaduan terbukti. Fitry Dwiyantini telah melakukan penjualan daging rusa/payau yang dilindungi melalui media sosial facebook; Penjualan daging rusa/payau juga dilakukan oleh orang tua Fitry di depan rumahnya di daerah Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur; Daging rusa/payau yang dijual diperoleh dari hasil perburuan/jerat yang dilakukan bapak Fitry (Pak Ahmad Salim) di daerah Bongan dan Manubar; keluarga Fitry tidak mengetahui bahwa perburuan/menjerat payau dan menjual payau merupakan kegiatan yang melanggar undang-undang.	Rekomendasi ke Unit lain	Draf Surat ke BKSDA Kaltim	

NO 1	No Registrasi			Tanggal Penerimaan 4	Nama Pengadu 5	Alamat 6	Lokasi Kejadian		Nama Usaha dan/atau Kegiatan 9	Jenis Kegiatan 10	Uraian Kejadian 11	Penyelesaian yang diinginkan 12	Tipologi (K/L/H/LHK) 13	Verifikasi			Hasil Verifikasi 17	REKOMENDASI 18	Status Penanganan Terakhir 19	Keterangan 20
	Seksi 2	Online 3	Kota/ Kabupaten 7				Provinsi 8	Tanggal SPT 14						SPT No. 15	Verifikator 16					
68	P.SW2-19068	#191349	26-Jul-19	Pengaduan langsung PT Kayan Hydro Energy an Khaeroni	Bulungan	Bulungan	Kalimantan Utara	Survey di areal IPPKH PT Kayan Hydro Energy	Perubahan Hutan	Dugaan konsultan mengatasnamakan PT kalutan (persero) melakukan mobilisasi mesin bor dengan menggunakan long boat dan kegiatan pengeboran di kawasan hutan lindung yang masuk di wilayah IPPKH PT KHE dan dugaan melakukan pemotongan kayu hutan tanpa koordinasi dengan	Fasilitasi keberatan	Kehutanan	13-Nov-19	ST.478/BPPHLHK-IV/SW.2/11/2019 (18-22 November 2019)	1. Mikrosil Agung 2. Adhifa Darmawan Sinatrya 3. Lori Vambudi	Laporan dalam proses				
69	P.SW2-19069	#191045	12-Nov-19	Surat dari PPSA No. S2169/PPSA/PP/GKM.0/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019	Malang	Samarinda	Kalimantan Timur	Masyarakat etas nama Ryzhal Setyawan	TSL	Dugaan adanya perbuatan trenggiling yang diunggah oleh akun facebook "Ryzhal Setyawan" yang diduga berakademi Samarinda	Verifikasi Lapangan	Kehutanan	18-Nov-19	ST.485/BPPHLHK-IV/SW.2/11/2019 (23-26 November 2019)	1. Dedy Diana 2. Eva Rizka Octiana 3. Dewi Wahyuningsih	Laporan dalam proses				
70	P.SW2-19070	#191407	13-Nov-19	Surat dari Forum Kesatuan Kutai Bersaudara (an Sharipudin - Ketua) tanggal 13 November 2019	Bontang	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Tambang Batu ilegal	Perubahan Hutan	Dugaan adanya kegiatan tambang batu ilegal di wilayah Kecamatan Teluk Pandan yang diduga masuk ke dalam kawasan hutan lindung	Verifikasi Lapangan	Kehutanan			1. Usman Iskandar 2. Frendy Tangke Pasarrin 3. Raisha Renila Inor	Laporan dalam proses				
71	P.SW2-19071	#191456	11-Nov-19	Pengaduan dari WA masyarakat	Samarinda	Samarinda	Kalimantan Timur	pertambangan ilegal	Tidak memiliki izin lingkungan	Dugaan penambangan ilegal di APT Pranoto	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	06-Dec-19	ST.518/BPPHLHK-IV/SW.2/12/2019 (06-13 Desember 2019)	1. Rohmad Slamet 2. Dedi Widi Atmoko 3. Dewi Wahyuningsih	Laporan dalam proses				
72	P.SW2-19072	#191426	18-Nov-19	Media online Kaltim Kece https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/tambang-ilegal-dekat-bendungan-sambaaja-waduk-penuh-sedimentas-terancam-ambruk-tanggal-14-11-2019		Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	pertambangan ilegal	Tidak memiliki izin lingkungan	Dugaan kegiatan tambang ilegal di sekitar bendungan sambaaja	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	06-Dec-19	ST.519/BPPHLHK-IV/SW.2/12/2019 (9-13 Desember 2019)	1. Budi Santoso 2. Sumanto 3. Hariyanti Hutabarat	Laporan dalam proses				
73	P.SW2-19073	#191424	01-Dec-19	Media online https://kaltim.tribunnews.com/2019/11/19/dituding-penyebab-pencemaran-sungai-segah-bupati-berakhir-kegiatan-pemupukan-kebun-sawit?page=4 tanggal 19 November 2019 dan https://berau.prokal.co/read/news/62731-periksa-perusahaan-yang-diduga-cemari-sungai-bupati-bakal-bersurat-ke-khk.html tanggal 1	Berau		Kalimantan Timur	KLK Group (perkebunan kelapa sawit)	Pencemaran air	Dugaan pencemaran sungai segah akibat adanya kegiatan pemupukan kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan KLK grup	Verifikasi Lapangan	Lingkungan Hidup	06-Dec-19	ST.517/BPPHLHK-IV/SW.2/12/2019 (9-13 Desember 2019)	1. Arrozaq Agung Darmawan 2. Ammar Saifurrohman 3. Lori Vambudi	Laporan dalam proses				
74	P.SW2-19074	#191457	05-Dec-19	Pengaduan dari WA masyarakat		Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	Pertambangan ilegal	Perubahan Hutan	Dugaan penambangan ilegal di Wilayah IPPKH PT Insani Baraperkasa	Verifikasi Lapangan	Kehutanan	06-Dec-19	ST.520/BPPHLHK-IV/SW.2/12/2019 (06-13 Desember 2019)	1. Suratno 2. Dedi Sutomo 3. Edy Hartono	Laporan dalam proses				
75	P.SW2-19075	#191497	16-Dec-19	Media sosial instagram "kabar_samarinda" tanggal 14 desember 2019		Samarinda	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	Bongkar Muat Batubara	Pencemaran Pesisir dan Laut	Dugaan terjadinya dinding tongkang jebol yang menyebabkan sebagian batu bara tumpah dan 1 unit dozer masuk ke dalam laut	verifikasi lapangan	Lingkungan Hidup	16-Dec-19	ST.536/BPPHLHK-IV/SW.2/12/2019 (16-18 Desember 2019)	1. Dedi Widi Atmoko 2. Eva Rizka Octiana 3. Dewi Wahyuningsih	Laporan dalam proses			
76	P.SW2-19076	#191498	20-Dec-19	Media sosial youtube an "Lawadi Nusan" tanggal 18 Desember 2019		Pontianak	Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	PT Bakal Makmur Sejahtera (PT Era Sarana Energi)	Perubahan hutan	Dugaan penambangan batubara di hutan bakau Bukaminung yang dilakukan oleh PT Bakal Makmur Sejahtera (PT Era Sarana Energi)	Verifikasi Lapangan	Kehutanan	20-Dec-19	ST.552/BPPHLHK-IV/SW.2/12/2019 (21-24 Desember 2019)	1. Lili Kardiansyah 2. Dedi Widi Atmoko 3. Dewi Wahyuningsih 4. Dwi Mustikawati	Laporan dalam proses			

REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2019
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH KALIMANTAN SEKSI 3 PONTIANAK

NO.	No Registrasi		Tanggal Penerimaan	Nama Pengadu	Alamat	Lokasi Kejadian		Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Uraian Kejadian	Penyelesaian yang diinginkan	Tipologi (K/LN/LHK)	Verifikasi			REKOMENDASI	Status Terakhir	Keterangan	
	Seksi	Online				Tanggal SPT	SPT No.						Verifikator	Hasil Verifikasi					
1	1	#190443	07/01/2019	Dinas PerkimLH Kabupaten Kayong Utara	Kecamatan Sukadana	Kabupaten Kayong Utara	Kalimantan Barat	PT. Marga Mulia, Pak Aflian, Pak Tari, Pak Yanto, Pak Elendi, Pak Nga, Pak Sahlan	Galian mineral bukan logam (Galian C)	Dugaan adanya kegiatan galian mineral bukan logam (galian C) tanpa izin lingkungan yang beresiko terhadap kerusakan lingkungan		LHK	21 January 2019	07/BPPLHK-IV/SW.3/Keu/1/2019	1. Cucu Rochdat 2. Nur Aziz Ribowo 3. Mahayati Puji Lestari	1. Terdapat aktivitas penambangan galian C oleh masyarakat di Kec. Sukadana sesuai dengan pengaduan dari DisperkimLH KKU 2. Enam dari 8 pengusaha (Aflian, Achmad Ichsan, Mat Tari, Yanto, Shadin dan Tja Kimto) sudah mengajukan berkas permohonan Izin Lingkungan kepada DisperkimLH KKU 3. Kab. Kayong Utara belum memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) 4. Berdasarkan overlay dgn Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalbar No : SK. 733/Menhut-II/2014, areal terbuka karena aktivitas galian C pada Area Penggunaan Lain (APL) 5. Wilayah usaha ag. Sdr. Aflian masuk dalam kawasan TN Gunung Palung pada koordinat "01. 109,36821"; berdasarkan overlay pera kawasan hutan dan konservasi no SK. 733/Menhut-II/2014 dengan areal lahan penanggung jawab usaha 6. Terhadap areal yang masuk ke dalam kawasa, akan dilakukan pengawasan rutin dan pemasangan plang larangan kegiatan beraktivitas oleh Seksi Pengelolaan Wilayah 1 Sukadana TN. Gunung Palung	Rekomendasi Pemerintah Daerah (dinas perkim LH KKU)	Pelimpahan ke unit lain Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Surat Tugas No. ST.54/BPPLHK-IV/SW.3/Keu/4/2019 Tanggal 18 April 2019 tentang Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas PRKPLH Kabupaten Kayong Utara	Telah dilakukan verifikasi lapangan
2	2	#190444	07/01/2019	PT. Sinar Kalbar Raya	JL. Sulawesi no 88A, Pontianak	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	-	Kehutanan	Perambahan hutan di dalam IUPHTI PT. Sinar Kalbar Raya dengan menggunakan peralatan mekanis dan sudah berlangsung cukup lama sehingga PT. SKR mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban sesuai denan yang di berikan		Kehutanan	07 February 2019	13/BPPLHK/SW.3/Keu/2/2019	1. Guruh Hendra 2. Ni Made Lia 3. Agus Riwanto	- berdasarkan citra google map Satelite 2019, diperkirakan terdapat perkebunan kelapa sawit dengan luas ± 2.52 Ha dan baru ± 3069 Ha yang telah terverifikasi kepemilikan lahannya oleh ± 24 perorangan dan atau badan usaha - Bahwa dasar pengejaan perkebunan kelapa sawit di dalam areal IUPHHK-HTI PT. SKR dan Kawasan HP. S. Ambawang (S. Sabi) adalah adanya Surat Keterangan Tanah (SKT) dan sebagian kecil telah memiliki Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh BPN Sanggau - Bahwa salah satu penyebab adanya perkebunan kelapa sawit di dalam areal IUPHHK-HTI PT. SKR dan Kawasan HP. S. Ambawang (S. Sabi) adalah vakumnya PT. SKR dari tahun 2000 sampai pengelolaan oleh management baru di tahun 2018 - 6. Bahwa terhadap hasil perkebunan kelapa sawit di wilayah IUPHHK-HTI PT. SKR/ HP. S. Ambawang (S. Sabi) dijual oleh pemilik perkebunan kelapa sawit ke pabrik pengolahan kelapa sawit PUNDI di Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, dan pabrik pengolahan kelapa sawit SSS di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau	Puldis/Pulbaket	sedang dalam tahap koordinasi dengan instansi terkait dan meminta keterangan pemilik lahan	
3	3	#190593	07/01/2019	Balai KSDA Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat	-	Kehutanan	Dugaan adanya penebangan kayu ilegal di kawasan HCV PT. Graha Agro Nusantara		Kehutanan	21 January 2019	09/BPPLHK-IV/SW.3/Keu/1/2019	1. Agus Riwanto 2. Hendri Es Priyanto 3. Ria Maskiah	- PT GAN telah mendapat SK Menteri Kehutanan No. SK879/Menhut/2/2014 tanggal 29 September 2014 tentang pelapasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 3.237 Ha untuk perkebunan kelapa sawit. An. PT GAN di kab. Kubu Raya Kalbar. Dari lusan tsb PT GAN telah menetapkan areal seluas + 315 Ha sbg HCV - Telah terjadi keg. penebangan tanpa izin di dalam areal HCV dan sekitarnya di dalam areal kerja PT GAN - Diemukan tumpukan kayu hasil tebangan ddalam areal HCV PT GAN sebanyak → 165 batang dari jenis kayu rimb campuran - terdapat beberapa sawmill mini yg mengontrol kayu2 kecil berdiameter 10-20 cm dipotong jatan disekitar pabrik PT GAN	Rekomendasi ke Pemerintah Daerah		
4	4	#190594	07/01/2019	Masyarakat Desa Sakataru	Desa Sakataru, Kecamatan Lembah Bawang	Kabupaten Bengkayang	Kalimantan Barat	-	Kehutanan	Dugaan adanya penebangan ilegal di kawasan hutan lindung Gunung Bawang		Kehutanan	21 January 2019	08/BPPLHK/SW.3/Keu/1/2019	1. Wan Novi E. Idal 2. Sukriwan 3. Rahmat Suseno	1. Bahwa masih marak terjadi penerusakan Kawasan Hutan lindung Gunung Bawang oleh Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Bahwa kegiatan illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung Desa Sakataru telah berlangsung cukup lama. 3. Telah dilakukan Perjanjian Adat untuk melarang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penerusakan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang tapi masih dilanggar oleh para pekerja illegal logging. 4. Bahwa telah dilakukan kegiatan pemusnahan dan pengusiran terhadap para pelaku illegal logging oleh Tim SPORC Balai Penegakkan Hukum wilayah Kalimantan Seksi Wilayah 3 Pontianak Tahun 2018 lalu.	Rekomendasi Operasi	Rencana Operasi Yustisi	
5	5	#190595 #190255 (Impahan)	07/01/2019	Sdr. Rizal bustani (082199645476)	PT. Bhatara Alam Lestari, Desa 3 Eka dan Desa Bukit Batu	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	PT. Ari Hijau Alam Lestari	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan penanaman sawit dan pembuatan kanal di areal APL dan HP PT. Bhatara Alam Lestari oleh PT. Ari Hijau Alam Lestari		Kehutanan	21 January 2019	14/BPPLHK/SW.3/Keu/2/2019	1. Cucu Rochdat 2. Rahmat Suseno 3. Hendri Es Priyanto	- PT. AHAL melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit berdasarkan keputusan Bupati Pontianak nomor : 309 tahun 2008 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Aria Hijau Alam Lestari tanggal 8 September 2008, Keputusan Bupati Pontianak nomor 148 tahun 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Aria Hijau Alam Lestari tanggal 11 Mei 2011, Keputusan Bupati Pontianak nomor : 183 tahun 2011 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Aria Hijau Alam Lestari tanggal 11 Juni 2011. - PT. BAL memiliki perizinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.631/ Menhut-II/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Bhatara Alam Lestari Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 7.100 (Tujuh Ribu Seratus) Hektar di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 23 September 2013, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.3659/ MenLHK- PHPLU/HP/PHPL.1/5/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017-2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT. Bhatara Alam Lestari di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 31 Mei 2018. - Hasil tumpang susun/ overlay shp izin lokasi, lampiran peta IUP, lampiran peta perpanjangan izin lokasi dan shp RKUPHHK HTI dengan : a. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.259/Kpts-II/2000, tanggal 23 Agustus 2000 tentang penunjukan kawasan hutan dan perararan Provinsi Kalimantan Barat. - Izin lokasi PT. AHAL berada di APL, sebagian areal tumpang tindih dengan IUPHHK HTI PT. BAL dan berbatasan dengan HP. S. Mempawah.	Pelimpahan Unit Lain (BPKH Wilayah III Pontianak)		

NO.	No Registrasi		Tanggal Penerimaan	Nama Pengadu	Alamat	Lokasi Kejadian			Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Uraian Kejadian	Penyelesaian yang diinginkan	Tipologi (K/L/HL/LHK)	Verifikasi			Hasil Verifikasi	REKOMENDASI	Status Penanganan Terakhir	Keterangan
	Seksi	Online				Kota/ Kabupaten	Provinsi	Tanggal SPT						SPT No.	Verifikator					
6	6	#180741	16/01/2019	Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum		Kabupaten Ketapang	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat		Kehutanan	Dugaan adanya illegal logging. Komandan Bataliyon Pengamanan perbatasan 320 Badak Putih menginformasikan bahwa terdapat kegiatan illegal logging di perbatasan negara Indonesia dengan Malaysia dengan koordinat : E 110°48'30,5" ; N 0°55'54,1"		Kehutanan	07 February 2019	15/BPPLHLK/SW.3/Keu/2/2019	1. Suhardi 2. Suwarda 3. Mardani	1. Bahwa benar telah terjadi kegiatan penambangan kayu jenis Tekam dengan diameter 50 cm di beberapa tempat di sekitar Patok Batas Negara G. 648 berada di wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh warga Malaysia. 2. Para pelaku illegal logging sebanyak 5 orang ditangkap oleh anggota Pos PAMTAS ENTELU yang sedang melakukan kegiatan patroli rutin pengecekan patok batas Negara. 3. Setelah dilakukan pemerkasaan lapangan oleh Danrem 121 ABW dan jajaran Yon PAMTAS 320 Badak Putih dengan Pihak TDM kemudian disepakati bahwa pelaku, dan barang bukti kayu dan kendaraan dilepaskan dan diselesaikan secara kekeluargaan. 4. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan lapangan, di lokasi TKP penambangan, masih terdengar suara chain saw sebanyak 2 unit yang sedang beroperasi. Diperkirakan di sekitar ladang padi warga Malaysia. 5. Berdasarkan hasil ploting dengan peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-1/2014 Tanggal 2 September 2014, semua titik koordinat tersebut berada di luar kawasan hutan. 6. Berdasarkan Peta dari Jantop TNI AD maka koordinat penangkapan tersangka dan tunggu kayu yang sudah di tebang berada di dalam wilayah negara Indonesia'	Pelimpahan pada unit lain	Rekomendasi ke BPPLHLK, penanganan penangkapan pelaku illegal logging di Batas Negara sudah diselesaikan antara TDRM dan TNI	
7	7	#190596	15/02/2019	Balai Taman Nasional Gunung Palung	Kabupaten Ketapang	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat		Kehutanan	Dugaan adanya illegal logging di kawasan TN. Gunung Palung		Kehutanan	15 February 2019	20/BPPLHLK/SW.3/Keu/2/2019	1. Sutomo 2. Rahmat Suseno 3. M. Heriansyah	1. Bahwa telah terjadi penambangan kayu jenis Meranti/ Rimba Campuran (illegal logging) di dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Palung ,tepatnya di Dusun Parit Bugis , Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat. 2. Bahwa salah satu oknum pemodal / cukong dari kegiatan illegal logging di dalam Taman Nasional Gunung Palung ,tepatnya di Dusun Parit Bugis, Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana Kabupaten Ketapang adalah Pa Rusning alias wa Nend. 3. Bahwa ditemukan adanya bekas kegiatan PETH berupa bekas lobang galian, selang, dan jeriken setelah dioverlaykan titik koordinatnya dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan provinsi Kalimantan Barat SK Menhut Nomor 733 Tahun 2014, titik koordinat tersebut berada di luar kawasan hutan lindung Gunung Teberau	Kegiatan Operasi	Rencana Operasi Yustisi		
8	8	#190597	15/02/2019	KPH Sambas	Kabupaten Sambas	Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat		Kehutanan	Dugaan adanya illegal logging di Hutan Lindung Gunung Teberau		Kehutanan	22 March 2019	41/BPPLHLK/SW.3/Keu/3/2019	1. Mardani 2. M. Syahrani 3. Syamsamin	- Berdasarkan hasil koordinasi dengan KPH Sambas bahwa pengaduan yang disampaikan ke BPPLHLK Seksi Wilayah III masih belum sesuai / tidak akurat, karena informasi yang disampaikan hanya berdasarkan aduan yang diperoleh dari masyarakat dan KPH Sambas sendiri belum mengecek lokasi aduan tersebut sehingga dalam pelaksanaan verifikasi pengaduan Tim masih mencari lokasi yang diadukan - Bahwa Hutan Lindung Gunung Teberau sudah dilakukan tata batas dan sudah penetapan berdasarkan SK nomor : SK.2757/Menhut/VII/kuh/2014 tanggal 14 April 2014, luas 459,57 Ha - Bahwa ditemukan adanya bekas kegiatan PETH berupa bekas lobang galian, selang, dan jeriken setelah dioverlaykan titik koordinatnya dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan provinsi Kalimantan Barat SK Menhut Nomor 733 Tahun 2014, titik koordinat tersebut berada di luar kawasan hutan lindung Gunung Teberau	Pengaduan tidak terbukti	Pengaduan tidak terbukti		
9	9	#190598	15/02/2019	KPH Sambas	Kabupaten Sambas	Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat		Kehutanan	Dugaan adanya illegal logging di Hutan Produksi Sungai Sebangkau Sungai Selakau		Kehutanan	22 March 2019	38/BPPLHLK/SW.3/Keu/3/2019	1. Ahmad Sirvani 2. M. Fikri 3. Sutomo	- Berdasarkan hasil koordinasi dengan KPH Sambas bahwa pengaduan yang disampaikan ke BPPLHLK Seksi Wilayah III masih belum sesuai / tidak akurat, karena informasi yang disampaikan hanya berdasarkan aduan yang diperoleh dari masyarakat dan KPH Sambas sendiri belum mengecek lokasi aduan tersebut sehingga dalam pelaksanaan verifikasi pengaduan tim masih mencari lokasi yang diadukan - Dalam kegiatan pengamatan dan pengecekan langsung dilapangan baik di lokasi Hutan Produksi Sungai Sebangkau Sungai Selakau maupun ditempat pemukiman masih ditemukan adanya kegiatan illegal Logging walaupun skala kecil, dan pembukaan ladang untuk perkebunan sawi mandiri - Setelah dilakukan pengambilan titik koordinat di lokasi, Keberadaan pemukiman ,perkebunan dan Pemukiman Dusun Pelanjau sebagian memasuki kawasan Hutan Produksi Sungai Sebangkau- Sungai Selakau	Pengaduan tidak terbukti	Pengaduan tidak terbukti		
10	10	#190600	15/02/2019	KPH Mempawah	Kabupaten Mempawah	Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat		Kehutanan	Dugaan adanya penanaman sawit dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Mempawah		Kehutanan	22 March 2019	40/BPPLHLK/SW.3/Keu/3/2019	1. M. Ali 2. Faji Yani 3. Andi Setiawan	- 1. Hutan lindung Gunung Selindung yang berada di wilayah KPH Mempawah masuk dalam wilayah administrasi Desa Bumbun dan Desa Amawang Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah. 2. Bahwa hutan lindung Gunung Selindung di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah belum ditetapkan sebagai kawasan hutan. 3. Bahwa informasi adanya kegiatan perusakan kawasan hutan yang disebabkan oleh illegal logging di Hutan Lindung Gunung Selindung Kabupaten Mempawah berdasarkan Laporan Pengaduan yang disampaikan oleh KPH wilayah Mempawah pada saat rapat konsolidasi KPH seluruh Kalimantan Barat benar ditemukan adanya tumpukan kayu dalam skala kecil dimana tumpukan kayu tersebut berada di dekat Hutan Lindung Gunung Selindung namun tidak diketahui pasti darimana asal kayu, hal ini disebabkan karena tidak ditemukan adanya pemilik kayu tersebut. 4. Berdasarkan hasil overlay dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat SK Menhut Nomor 733 Tahun 2014 dan google earth terdapat akses jalan besar/ jalan masyarakat, pemukiman penduduk, bangunan sekolah dasar dan perkebunan/ ladang di dalam kawasan hutan lindung Gunung Selindung. 5. Bahwa adanya akses jalan masyarakat, pemukiman lama penduduk, bangunan sekolah dasar dan perkebunan karet yang berada di dalam kawasan hutan lindung Gunung Selindung mendorong KPH Mempawah untuk menjadikan kawasan wilayah ini masuk dalam program TORA	Pengaduan tidak terbukti	Pengaduan tidak terbukti		

NO.	No Registrasi			Tanggal Penerimaan	Nama Pengadu	Alamat	Lokasi Kejadian			Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Uraian Kejadian	Penyelesaian yang diinginkan	Tipologi (K/L/H/LHK)	Verifikasi			REKOMENDASI	Status Penanganan Terakhir	Keterangan
	Seksi	Online					Kota/ Kabupaten	Provinsi	Tanggal SPT						SPT No.	Verifikator	Hasil Verifikasi			
11	11	#190601	15/02/2019	KPH Ketapang	Kabupaten Ketapang	Kabupaten Ketapang	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat		Kehutanan	Dugaan adanya illegal logging di hutan Lindung Kebangkau		Kehutanan	11 June 2019	81/BPPLHK/SW.3/Kou/6/2019	1. M. Siraj 2. Cucu Rochdat 3. Mardani	1. Hutan Lindung Kebangkau berada di wilayah administrasi Desa Pendamar Indah Kecamatan Sandai dan Desa Menyumbang Kecamatan Hulu Sungau. 2. Terdapat perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Agra Jaya Baktitama (PT.AJB) yang berbatasan langsung dengan HL.Kebangkau. 3. Terdapat jalan masuk ke hutan lindung Kebangkau di titik koordinat x 110,644334 y -1,049162 dengan lebar jalan ± 6 m (jalan tanah), jalan tersebut biasa digunakan oleh masyarakat dan akses menuju PT. Wanasokan Hasilindo. 4. Terdapat 12 pondok ladang semi permanen di dalam hutan lindung Kebangkau, sebagian milik masyarakat Desa Pendamar Indah dan Desa Menyumbang dengan tanaman karet, pisang, durian dll dengan luas masing-masing ladang ± 2 Ha. 5. Menemukan 45 batang kayu Meranti ukuran 20 x20 x 4 m dan 30 batang kayu jabol ukuran 15 x 20 x 3 m di HL. Kebangkau. 6. Menemukan 136 batang kayu ulin dengan berbagai ukuran dan 42 batang kayu jabol ukuran 15 x 20 x 3 m di HPT. G. Tinjil-G.Naning-Lubuk Lintang yang diduga kayu tersebut berasal dari HL.Kebangkau. 7. Menemukan 7 buah bagan pekerja dengan atap terpal di HPT. G. Tinjil-G.Naning-Lubuk Lintang yang berbatasan langsung dengan HL.Kebangkau.	Rekomendasi Operasi		
12	12	#190602	15/02/2019	KPH Kapuas Hulu	Kabupaten Hulu	Kabupaten Hulu	Kabupaten Hulu	Kalimantan Barat		Kehutanan	Dugaan adanya illegal logging di hutan produksi wilayah Padua Mendalam Kabupaten Kapuas Hulu		Kehutanan	04 September 2019	148/BPPLHK/SW.3/Kou/9/2019	1. Wan Novi Erfan 2. Albertus Agus Riwanto 3. Rahmat Suseno	1. Pengaduan tidak terbukti 2. Telah terjadi kegiatan penebangan di sekitar Wilayah Desa Tanjung Karang di wilayah padua S. Mendalam, sesuai aduan dari pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan Kapuas Hulu Utara. 3. Ditemukan bekas pondok dan jalan angkutan kayu yang masih baru serta tunggul bekas tebangan yang diduga kayu hasil tebangannya digunakan untuk membangun jalan angkutan di lokasi tersebut. 4. Berdasarkan hasil plotting titik koordinat yang diperoleh, lokasi kegiatan penebangan tersebut berada pada Areal Penggunaan Lain (APL). 5. Tidak ditemukan adanya kegiatan penebangan liar di dalam Kawasan Hutan Produksi S. Mendalam.	Pengaduan tidak terbukti		
13	13	#190604	15/02/2019	KPH Melawi	Kabupaten Melawi	Kabupaten Melawi	Kabupaten Melawi	Kalimantan Barat		Kehutanan	Dugaan adanya illegal logging di Hutan Lindung wilayah Kecamatan Nanga Pinoh Barat		Kehutanan	11 June 2019	62/BPPLHK/SW.3/Kou/6/2019	1. Suhardi 2. Ahmad Siwani 3. Sutomo	1. Berdasarkan overlay dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014, serta digitasi titik koordinat di lapangan yang dipadukan citra satelit ESRI, hulu Sungai Raya digunakan menjadi tempat kegiatan Illegal Mining oleh oknum masyarakat. Dikoordinat x 111,3808 dan y -0,8023 berada pada kawasan APL. 2. ii. Berdasarkan temuan aliran Sungai Raya ditulu Dusun Pongin verifikasi pengaduan dikoordinat x 111,3729 dan y -0,8023 menunjukan telah terjadi pencemaran air sehingga menjadi keruh, mengingat belum pernah dilakukan penelitian air bersih di Laboratorium Dinas Penuhahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kab. Kabupaten Melawi sehingga belum bisa dipastikan air tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi untuk kebutuhan masyarakat.	Pengaduan tidak terbukti		
14	14	#190606	15/02/2019	KPH Ketapang	Kabupaten Ketapang	Kabupaten Ketapang	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat		Kehutanan	Dugaan adanya illegal logging di habitat Orangutan di Sungai Putri, HPK Sungai Tulak		Kehutanan	4 October 2019	179/BPPLHK/SW.3/Kou/10/2019	1. Guruh Hendra Setiawan 2. Rahmat Siwani 3. Andri Setiawan	a) bahwa Kawasan HPK. S. Tolak, HP S.Sentap, HP S.Sentap – Kancang dan HP S. Kancang berada di kawasan Ekosistem Gambut Sungai Putri dimana berdasarkan survei populasi orangutan Kalimantan di kawasan Hutan Gambut Sungai Putri Fauna Flora Internasional – Indonesia Programme pada 2008 diperkirakan terdapat sekitar 668 individu orangutan menempati kawasan ini. Hal ini dikuatkan dengan temuan 489 sarang. Ukuran populasi orangutan liar ini, termasuk terbesar kedua setelah populasi Taman Nasional Gunung Palung. Rata-rata kepadatan populasinya 2,27 individu per kilometer persegi. b) Bahwa benar terdapat penebangan liar / Illegal logging di dalam Kawasan di dalam Kawasan HPK. S. Tolak, HP S.Sentap, HP S.Sentap – Kancang dan HP S. Kancang, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. c) Diduga pemodal / cukong kegiatan penebangan liar / Illegal logging tersebut adalah Sdr. SARJAN dengan alamat Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, adalah Sdr. SUDI dengan alamat Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang dan Sdr. JUANDA Alias ANDOI Alias ANDA dengan alamat Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. d) Bahwa kayu ciliahan hasil kegiatan penebangan liar / illegal logging tersebut diangkut dari TPK disekitar tempat penebangan ke penggergajian (sawmill) milik pemodal / bisa langsung ke konsumen dengan menggunakan pickup atau dumptruck	1. Pengumpulan bahan keterangan (Pubbake) 2. Operasi Yustisi	Telah dilakukan verifikasi	
15	15	#190607	28/02/2019	Aliansi Masyarakat Mukok Bersatu	Kabupaten Sanggau	Kabupaten Sanggau	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	PT Citra Nusa Inti Sawit (PT. CNIS)	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan adanya pembukaan perkebunan sawit oleh PT. CNIS di dalam kawasan Hutan Produksi S. Sekayam - S. Mengkiyang		Kehutanan	22 March 2019	39/BPPLHK/SW.3/Kou/3/2019	1. M. Siraj 2. Suhardi 3. Guruh Hendra	- Terdapat perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan HP S. Sekayam - S. Mengkiyang, Desa Layak Orang Kec. Mukok dengan luas → 69 Ha dan desa Engkode Kec. Mukok dengan luas → 350 Ha yang dulunya merupakan plasma dari PT CNIS dan sejak awal 2017 dikelola oleh pemilik lahan yang dulunya anggota KUD Tut Wuri Handayani dgn jumlah → 100 org dgn luas terkeci → 1 Ha dan terluas → 27 Ha - Bahwa tanaman kelapa sawit tersebut ditanam pada tahun 2000 - 2003 (tahap I dan II) oleh PT CNIS manajemen lama (PT Citra Riau Sarana Grup), kemudian mulai 2004 - 2017 dikelola oleh PT CNIS Salmi Grup bersama dengan KUD Tut Wuri Handayani - Berdasarkan surat kepala BPKH WII III no. :S.169/BPKH.3/SPK/HPLA.1/2/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang telah status kawasan hutan terhadap perkebunan PT CNIS, terdapat lumpang tanah izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit an. PT CNIS berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Sanggau No. 400-62/IL-1999 tanggal 29 Oktober 1999 dengn peta kawasan hutan berdasarkan surat keputusan menteri Kehutanan No. SK 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 seluas → 1244 Ha	Pelimpahan pada unit lain (BPN Sanggau, Pemda Kabupaten Sanggau)	Perlu penyelesaian yang komprehensif dan berfilas multidoor baik oleh BPN Sanggau, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah daerah Sanggau, dikarenakan sebagian perkebunan kelapa sawit tersebut telah memiliki sejarah pengalihan yang panjang (sejak tahun 2000an)	

NO.	No Registrasi		Tanggal Penerimaan	Nama Pengadu	Alamat	Lokasi Kejadian			Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Uraian Kejadian	Penyelesaian yang diinginkan	Tipologi (K/L/H/LHK)	Verifikasi			REKOMENDASI	Status Penanganan Terakhir	Keterangan	
	Seksi	Online				Tanggal SPT	SPT No.	Verifikator						Hasil Verifikasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
16	16	#190609	21/02/2019	WS	Kabupaten Sambas	Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat			Kehutanan	Dugaan adanya penambahan menggunakan 2 buah alat berat (excavator)		Kehutanan	16 June 2019	ST. 83/BPPLHK-IV/SW.3 Keu/6/2019	1. Syarif Iskandar 2. Ni Made Lia Rimbawati 3. Hendri ES Priyanto	a. Terhadap lokasi yang dilaporkan dengan foto hamparan tanah di bawah jembatan Prepet tidak ditemukan aktifitas galian c atau alat berat, melainkan hanya hamparan tanah untuk penimbunan di lokasi di bawah jembatan. b. Ditemukan tumpukan galian c berupa batu putih (serutu) dan bekas lokasi galian pada posisi sebelah kiri jalan raya di dekat Pembangunan Jembatan Daerah Sungai Prepet Desa Temajak Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, pada koordinat N 01,91401 dan E 109,49651, dengan luas sekitar ± 600 M ² dan lubang bekas galian c pada posisi sebelah kanan jalan raya Daerah Sungai Prepet Desa Temajak Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, pada koordinat N 01,91220 dan E 109,49754, dengan luas sekitar ± 200 M ² masuk kedalam kawasan hutan Produksi Sungai Gunung Raya – Sungai Bemban. Pada lokasi yang ditemukan tumpukan batu putih (serutu) tidak ditemukan adanya kegiatan atau orang yang melakukan aktivitas galian c pada lokasi tersebut. c. Bahwa terhadap lokasi tumpukan galian c berupa batu putih (serutu) dan bekas lokasi galian c berupa lubang bekas galian c merupakan bekas galian yang dikerjakan oleh PT. DCM (Damai Citra Mandiri) untuk Proyek paket pekerjaan perawatan jalan raya temajak tahun 2018 dengan menggunakan excavator milik PT. DCM untuk penimbunan jalan. Terhadap perbuatan tersebut merupakan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa izin menteri Kegiatan Penambangan melangar pasal 89 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, dan sudah dilakukan proses hukum oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.	Pelipahan pada sektor lain (Polda Kalimantan Barat)	Ditangani oleh Polda Kalimantan Barat	
17	17	#190683	21/02/2019	M. Sandi	Kelurahan Kauman	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	PT. Lanang Argo Bersatu (PT. LAB)	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan adanya : - PT. LAB penggarapan kebun sawit di area hutan - PT. LAB melakukan penanaman sawit di sepanjang sempadan sungai - PT. LAB melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan - PT. LAB mendirikan pabrik tanpa adanya Amdal, Izin Lingkungan		LHK	22 February 2019	21/BPPLHK/SW.3/Keu/2/2019	1. Mardani 2. Wan Novi E, Eldal 3. Nur Aziz Ribowo	- Berdasarkan overlay dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SK.733/Menhut-II/2014 Tanggal : 2 September 2014, wilayah konsesi PT. Lanang Agro Bersatu dan pengecekan pada koordinat tersebut diatas berada di dalam Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). - PT. Lanang Agro Bersatu tidak memiliki Izin Pemuangan Air Limbah ke badan sungai. - Dari hasil verifikasi ke Sungai Keduk koordinat (S 1,238849", E 110,525148"), Sungai Limut pada koordinat (S 1,264561", E 110,454491") , Sungai Rombang pada koordinat (S 1,260499", E 110,463805") dan Sungai Karim Kecil dengan koordinat (S 1,20777 , E 110,53597) yang berada dalam wilayah konsesi PT. Lanang Agro Bersatu, ditemukan penanaman sawit dekat dengan sempadan sungai yang tidak disertai dengan tanggul. - Tim verifikasi mendapatkan informasi dari Kepala Desa Istana bahwa pernah mendapatkan laporan dari warga terkait adanya gatal-gatal, tetapi belum mengetahui apakah penyebabnya air limbah sungai keduk atau dari pola hidup yang salah. - Terkait dengan laporan gatal-gatal dari masyarakat, arahan dari Kepala Desa Istana untuk datang langsung ke Puskesmas Kecamatan Sandia bertemu dengan Dokter. Informasi dari Kepala Puskesmas dan Dokter Puskesmas sepanjang bulan Januari dan Februari terdapat 8 (delapan) orang yang sudah berobat terkait dengan gatal-gatal, dimana 3 orang berasal dari Desa Istana (Sungai Keduk) dan 5 orang lainnya berasal dari masyarakat sekitar Sandia. Vonis dari Dokter penyakit gatal-gatal bukan semata-mata dari Sungai Keduk, tetapi bisa berasal dari pola hidup yang kurang sehat. Berdasarkan informasi dari Bidan Ningsih terdapat 1 (satu) keluarga atas nama Sdr. Heri warga RT 011 Sandia Kiri terkena gatal-gatal satu keluarga (6 orang) di dekat sungai Pawan sejak bulan	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah	Laporan ke BPPLHK Wilayah Kalimantan		
18	18	#190685	2/28/2019	Dinas Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Kab. Ketapang	Kelurahan Kauman	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat		Kehutanan	Dugaan adanya perkebunan kelapa sawit di areal Hutan Sungai Tengar, Sungai Pasugan, Kecamatan Tumbang Ti		Kehutanan	11 June 2019	78/BPPLHK/SW.3/Keu/6/2019	1. H.M Dedi Hardinianto 2. Jhony Asbar 3. Erwin Anton T.	Tim verifikasi menemukan adanya lahan perkebunan kelapa sawit milik perseorangan an. Sdr. Leo di dalam kawasan Hutan Produksi S. Tengar – S. Pasugan Dusun Kekara Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Ti Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Lahan perkebunan kelapa sawit yang didapati seluas ± 140 Ha sudah ditanami bibit kelapa sawit seluas ± 130 Ha sejak Agustus 2017. Di lokasi kebun kelapa sawit juga didapati adanya bangunan-bangunan seperti kantor, mess karyawan dan saringan bungus walat serta ditemukan juga adanya alat berat berupa 2 unit bulldozer dan 1 unit excavator. Kebun kelapa sawit juga memiliki areal untuk Nursery / persemaian bibit kelapa sawit lengkap dengan instalasi pengirairan. Dari pengamatan tim verifikasi walaupun kebun kelapa sawit tersebut milik perseorangan namun pengelolaannya sudah sangat terorganisir dengan baik.	Rekomendasi Publikaasi	Laporan ke BPPLHK Wilayah Kalimantan		
19	19	#190686	2/28/2019	BKSDA Kalimantan Barat melalui surat nomor S.1761/BKSDA.KAL.BAR/GAKKUM/5/2019 tanggal 28 Mei 2019	Pontianak	Pontianak	Kalimantan Barat		Kehutanan	Dugaan adanya PETI oleh masyarakat di Cagar Alam Mandor		Kehutanan	04 September 2019	ST. 150/BPPLHK-IV/SW.3/KEU/9/2019	1. Rudiansyah 2. Cucu Rochdat 3. Mardani	1. Pengaduan terkait adanya PETI di CA Mandor terbukti 2. 3 (tiga) buah mesin dromping, 1 (satu) buah pondok pekerja atap terpal, 2 (dua) ken minyak, 3 (tiga) buah penyaring/ luncuran karpet/ kian (1 buah mesin dromping sedang beraktifitas dengan jumlah pekerja 5 orang) a n kelompok Uhan di titik koordinat long 109,364659 lat 0,282020 yang setelah di overlay/ ditumpang susunkan titik koordinat lapangan dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 Tanggal 2 September 2014) berada di dalam kawasan CA Mandor. 3. 4 (empat) set mesin Dromping yang sedang beraktifitas, 4 buah peluncur karpet/ kian, 1 buah pondok pekerja atap terpal, 13 (tiga belas) unit sepeda motor, 16 (delapan belas) orang pekerja yang berasal dari Desa Mandor dan Desa Simpang Kasturi a n kelompok Oder di titik koordinat long 109,367289 lat 0,272561 daerah S.Tengkorak yang setelah di overlay/ ditumpang susunkan titik koordinat lapangan dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 Tanggal 2 September 2014) berada di dalam kawasan CA Mandor.	Rekomendasi kegiatan operasi	Terhadap kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di dalam kawasan Cagar Alam Mandor diperlukan tindakan repressi berupa Operasi Fungsional Pengamanan Kawasan Hutan yang selanjutnya dilakukan pengembangan (justisi) terhadap para pemilik mesin maupun penadiah pembeli emas		

NO.	No Registrasi			Tanggal Penerimaan	Nama Pengadu	Alamat	Lokasi Kejadian		Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Uraian Kejadian	Penyelesaian yang diinginkan	Tipologi (K/L/H/LHK)	Verifikasi			Hasil Verifikasi	REKOMENDASI	Status Penanganan Terakhir	Keterangan
	1	2	3				4	5						6	7	8				
20	20	#190687	3/1/2019	Masyarakat Kecamatan Sekayam	Kecamatan Sekayam	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat			Perekubunan Kelapa Sawit Masyarakat	Dugaan adanya perkebunan kelapa sawit masyarakat di dalam kawasan hutan HPT Gung Peping, HL Gunung Nahi, di Dusun Runtit dan Dusun Rirtau Desa Bungang Kecamatan Sekayam		Kehutanan	11 June 2019	ST.79/BPPLHK-IV/SW.3/Keu/6/2019	1. Suwanda 2. Syarif Ardiansyah 3. Wan Novi Erfan Idris	1. 1. Bahwa pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat tentang dugaan adanya penanaman kelapa sawit di dalam kawasan hutan telah terbukti, berdasarkan Peta kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dengan nomor SK. 733/Menhut-1/2014 semua titik koordinat lapangan lokasi penanaman sawit berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Pasing dan Hutan Lindung Gunung Nahi di Desa Bungang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. 2. 2. Bahwa tim telah melakukan verifikasi adanya dugaan penanaman sawit yang dilakukan oleh warga masyarakat yang berada di wilayah Desa Bungang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dan menemukan sekitar ± 69 Hektar tanaman sawit berusia 5 tahun lebih berada di dalam Hutan Produksi Terbatas Gunung Pasing dan ± 82 Hektar tanaman sawit tahun tanam 2014 dengan luas ± 69 Hektar berada di dalam Hutan Lindung Gunung Nahi. Adapun lahan yang sudah di jadikan ladang dan kebun serta sawah yang diduga berada di dalam kawasan hutan lebih luas lagi. 3. 3. Bahwa dari keterangan Kepala Desa Bungang dan Kaur, Pembanguna Desa Bungang yang khusus menangani sengketa lahan, bahwa wilayah Administratif Desa Bungang sebagian besar masih berada di dalam Hutan Lindung Gunung Nahi, dan pada bulan Desember 2018 sudah dilakukan pengukuran oleh Tim Kehutanan dari BPKH Wilayah III Pontianak untuk diusulkan melalui program TORA seluas 749 hektar dikeluarkan dari kawasan hutan.	Rekomendasi kegiatan operasi	Laporan ke BPPLHK Wilayah Kalimantan	
21	21	#190688	2/2/2019	Masyarakat	Sambas	Sambas	Kalimantan Barat			Perekubunan Kelapa Sawit Masyarakat	Dugaan adanya kegiatan penambangan dengan alat berat di HL Ds. Asansuang dan Jembatan Sungai Prepet Kecamatan Sajingan Besar		Kehutanan	11 June 2019	84/BPPLHK/SW.3/Keu/6/2019	1. Rudiansyah 2. Rahmat Suseno 3. M. Ridwan	1. Bahwa benar telah terjadi kegiatan penambangan galian C di Taman Wisata Alam Asansuang, Dusun Sungai Tengah, Desa Sebusubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat dilakukan oleh warga Dusun Sungai Tengah, Desa Sebusubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. 3. Pada saat ini kegiatan pembukaan penambangan galian C, di Taman Wisata Alam Gunung Asansuang, Dusun Sungai Tengah, Desa Sebusubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, tidak ada lagi aktivitas penambangan galian C. di lokasi tersebut. 4. Penggunaan lahan di lokasi penambangan diperkirakan seluas ± 10 Hektar di 2 (dua) lokasi lahan yang sudah lakukan penambangan dan berdasarkan hasil dari pengambilan titik koordinat di 2 (dua) lokasi tersebut. 5. Berdasarkan overlay dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SK.733/Menhut-1/2014, Tanggal : 2 September 2014, pengecekan pada titik koordinat tersebut diatas berada di dalam Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asansuang	Rekomendasi kegiatan operasi	Laporan ke BPPLHK Wilayah Kalimantan	
22	22	#190689	3/22/2019	Kelompok Tani Anugerah Tani Afrizal (085382144231)	Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan	Ketapang	Kalimantan Barat			Perekubunan Kelapa Sawit	Dugaan adanya aktivitas penambangan ilegal (PETI) di dalam kawasan administrasi Desa Pematang Gadung, aliran Sungai Kepuluk pada koordinat 1°52'23,6" 110°16'22,2"	penertiban dan tindak lanjut terhadap pelaku PETI	Kehutanan	11 June 2019	ST.76/BPPLHK-IV/SW.3/Keu/6/2019	1. Arrafi Nursyahdi 2. Andri Saitawan 3. Saifuddin	1. Ditemukan ratusan pondok, kolam, kegiatan Penambangan Ilegal (Emas dan Zircon) yang beroperasi serta beberapa alat berat yang berada di dalam kawasan HP Sungai Tengah - Sungai Pesuguan. 2. Kegiatan Penambangan Ilegal (Emas dan Zircon) tersebut telah merambah masuk ke hulu Sungai Kepuluk, sehingga air limbah dari kegiatan Penambangan Ilegal tersebut terindikasi mencemari Sungai Kepuluk 3. Berdasarkan keterangan pelapor dan pekerja PETI yang ada dilokasi memaparkan bahwa terdapat ± 400 orang lebih yang masih melakukan kegiatan PETI. 4. Adanya tanda batas (plakat biru di pohon) hutan desa yang berbasis konservasi yang diusulkan seluas ± 7000 Ha oleh masyarakat Desa Pematang Gadung yang berbatasan langsung dengan kegiatan Penambangan Ilegal (Emas dan Zircon). 5. Ditemukan air Hulu Sungai Kepuluk terindikasi tercemar kegiatan Pertambangan Ilegal (Emas dan Zircon) terlintas dari penampakan visual yang berwarna coklat susu di koordinat (1°52'52" 110°16'10"), dan berdasarkan keterangan dari masyarakat Desa Pematang Gadung air sungai tersebut tidak dapat digunakan karena dirasa licin dan berminyak.	Rekomendasi kegiatan operasi	Laporan ke BPPLHK Wilayah Kalimantan	
23	23	#190417 #190169 (Zam, no register yang bener yang mana ?)	3/26/2019	Surat Dir. PPSA No. S/441/PPSA/PP/GK M.0/3/2019	Jakarta	Desa Pk Mayam, Kab. Landak	Kalimantan Barat		PT. Saraswati Agro Estate	Perekubunan Kelapa Sawit	Pengaduan dari masyarakat dugaan pembukaan lahan gambut untuk perkebunan	Penindakan sesuai dengan UU peraturan yang berlaku	LHK	05 April 2019	ST.49/BPPLHK-IV/SW.3/Keu/4/2019	1. Maharyati Puji Lestari 2. Nur Aziz Ribowo	-Tidak melaksanakan sebagian kewajiban dalam Dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan dan tidak melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 bulan sekali - Tidak memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air - Tidak memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran udara - Tidak melakukan pengelolaan B3 - Tidak memenuhi ketentuan pengelolaan LB3 - Tidak memenuhi ketentuan Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan - Melakukan pembukaan lahan dan penanaman di FLEG - belum memiliki surat keputusan penetapan titik penataan tinggi muka air tanah	SA Administratif Paksaan Pemerintah	Telah dilakukan Pengawasan Oleh PPSA,	
24	24	#190690	08 April 2019	Bapak Doi 082148301979 Agustinus Jawa Pos 08965635455	Ketapang	Matan Hilir Selatan	Kalimantan Barat		Koperasi Produsen Linggarjati	Perkebunan Kelapa Sawit	Adanya Pembukaan kanal Gambut yang merupakan habitat orang utan		LHK	08 April 2019	ST.50/BPPLHK-IV/SW.3/Keu/4/2019	1. Suwanda 2. Rahmat Suseno 3. Hendri ES Priyanto	- Ditemukan area kebun yang telah ditanami kelapa sawit seluas ± 72 ha dan telah dibangun kanal/drainase yang masuk kedala, Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional Nomor. SK.130/10/MENLHK/SETJEN/02/2017 - Kegiatan dan/atau usaha tidak memiliki dokumen lingkungan - Kegiatan tidak memiliki izin lingkungan	Saksi Administratif Paksaan Pemerintah dan Pidana	Telah melaporkan kepada Balai PPHLHK W/i Kalimantan Tembusan Dir. PPH berdasarkan no. surat S.72/BPPLHK-IV/SW.3/5/2019 Tanggal 8 Mei 2019 Tentang Laporan Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Adanya Pembukaan Lahan Gambut di Ketapang	
			08 April 2019	Oki Korwas PPNS Polda Kalbar	Pontianak	Sungai Ambawang kab. Kubu Raya	Kalimantan Barat			Perekubunan Kelapa Sawit	Telah Terjadi Kegiatan galian dengan menggunakan alat berat di koordinat-0.38847 109,34067 di kecamatan Sungai Ambawang kab. Kubu Raya, Kabupaten Sanggau		Kehutanan				Pengaduan dibatalkan	Pengaduan dibatalkan		

NO.	No Registrasi			Tanggal Penerimaan	Nama Pengadu	Alamat	Lokasi Kejadian		Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Uraian Kejadian	Penyelesaian yang diinginkan	Tipologi (K/L/H/LHK)	Verifikasi			REKOMENDASI	Status Penanganan Terakhir	Keterangan
	1	2	3				4	5						6	7	8			
25	25	#190691	12 April 2019	Yerry Sulesman, SH dan GAKUM Disperkim -LH KKU	Kayong Utara	Desa Ratu Barat Kec. Simpang Hilir	Kalimantan Barat	PT Jalin Vaneo	Kehutanan	Terdapat sawmill di HGU PT. Jalin Vaneo (PT. JV), di Koordinat 1. 0°57'57.58" E 110°05'28.5" 2. 0°57'28.8" E 110°04'55.1" 3. 0°56'56.0" E 110°05'22.5" no. 3 diduga berada di Hutan Produksi		Kehutanan	11 June 2019	ST.80/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/6/2019	1. Muhammad Ali 2. Agus Riwanto 3. Jumiaryso	1. Pengaduan terbukti karena : a. Tim menemukan 3 (tiga) buah sawmill aktif, jalan kuda-kuda untuk mengeluarkan kayu, bagan penambang, tumpukan kayu di lahan dan sisa tebangannya berupa kayu bukit di Batas HGU PT. Jalin Vaneo yang berbatasan dengan HP.S.Dawak-S.Mendawak b. Berdasarkan hasil overlay titik koordinat temuan lapangan dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 Tanggal 2 September 2014) bahwa temuan sawmill E milik Sdr.Limin dan saudara Pendi berada di Areal Penggunaan Lain (APL) berdekatan dengan HP.S.Dawak-S.Mendawak, sawmill milik Sdr. Ujang (Desa Nipah Kuning) berada di HP.S.Dawak-S.Mendawak jalan kuda-kuda dan bekas tebangannya berada di HP.S.Dawak-S.Mendawak akibat dari kegiatan perambatan hasil hutan tersebut, diperkirakan terjadi kerusakan kawasan ± 20 Ha pada kawasan HP.S.Dawak-S.Mendawak 2. Bahwa lokasi sawmill tempat pemotongan dan pengeringan di sepanjang sungai semandak dan berada diluar HGU perusahaan sudah berada sekitar tahun 2014	Rekomendasi kegiatan operasi		
26	26	#190692	22 April 2019	Bapak Sandi (LSM AMPUH)	Ketapang	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	PT Jaga Usaha Sandai	Tambang Bauksit	Dugaan adanya perusakan lingkungan hidup dan kawasan hutan oleh PT JUS, Kecamatan Sandai	Peninggikan sesuai aturan dan undang-undang	LHK	-	-	-	-	Pengaduan tidak terbukti, lokasi yang diadukan tidak masuk dalam kawasan hutan	Terverifikasi oleh BLH Kab. Ketapang	
27	27	#190693	24 April 2019	Setiadi PT Danpac Resources	Jakarta	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	Galian mineral bukan logam (Galian C)		Dugaan adanya galian C dan pembuatan jalan di HP Sungai Ambawang, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir		Kehutanan	11 June 2019	ST.77/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/6/2019	1. Darmawan Susilo 2. Jonif R. Sianturi 3. Ary Fidaria Ilimi	1. Terdapat pembuatan jalan dan pelebaran jalan yang berada di kawasan hutan produksi Sungai Ambawang dengan lebar ± 20 m dan panjang jalan ± 1 Km yang berada pada titik EKS. PT. Danpac Resources hingga titik simpang jalan yang dapat ditunjukkan pada peta C. 2. Terdapat 1 unit excavator Komatsu, 1 unit Buldozer Komatsu dan 2 unit dump truck. 3. Kegiatan pembuatan dan pelebaran jalan tersebut dilakukan oleh PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (PT. SJAL). 4. Jalan yang telah dibuat tersebut berada didalam kawasan Hutan Produksi Sungai Ambawang, desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang diduga tanpa memiliki izin panning pakai.	Sanksi Administrasi (Paksaan Pemerintah) dan rekomendasi penyidikan		
28	28	#190694	29 May 2019	PT Sinar Kalbar Raya Surat No : 069/ADM-SKR/IV/2019 Tanggal 29 Mei 2019	Sanggau	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	-		1. Diduga terdapat kegiatan Galian C 2. Dijumpai excavator dan dump truck masing-masing 1 unit pada pukul 12.00 wib. Perkiraan sudah berlangsung selama 2 minggu di Desa Teluk Bakung dengan koordinat : N: 00° 02'16,1"; E: 109° 52'55,9 2. Pemodal bernama Pak Hsein yang beralamat di Pontianak		Lingkungan				Verifikasi administrasi	Tidak terbukti	Tidak dilakukan verifikasi lapangan karena berdasarkan informasi Alat berat sudah tidak di lokasi	
29	29	#190702	26 May 2019	Masyarakat melalui DLH Kabupaten Ketapang	Ketapang	Desa Sungai Kelik Kec Nanga Tayap, Kab Ketapang	Kalimantan Barat	PT Agro Lestari Mandiri	Perkebunan Kelapa Sawit	Perusahaan PT ALM diduga melakukan penanaman kelapa sawit di Hutan Lindung Bukit Baru Menangis	Di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kehutanan	01 July 2019	ST.97/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/7/2019	1. Jonif R. Sianturi 2. Nur Aziz Ribowo 3. Saifuddin	1. Pengaduan Tidak Terbukti 2. Berdasarkan overlay dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SK.733/Menhut-II/2014 Tanggal : 2 September 2014, wilayah konsesi PT. Agrolestari Mandiri dan pengecekan pada koordinat tersebut diatas berada di dalam Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) (berdasarkan overlay titik HGU dan Peta Kawasan Hutan)	Pengaduan tidak terbukti		
30	30	#190707	25 June 2019	Media Online hmsnews.com Tanggal 25 Juni 2019	-	Desa Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang	Kalimantan Barat	PT Patiware dan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)	Kebun dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan PETI	Dugaan limbah kegiatan PETI dan limbah PT Patiware yang mencemari Sungai Raya		Lingkungan	01 July 2019	ST.98/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/7/2019	1. Suwanda 2. Ade Wahyuningsih 3. Maharyati Puji Lestari	1. Pengaduan terkait pencemaran tidak terbukti 2. PT Patiware telah melakukan pengolahan limbah dan memanfaatkan limbah PKS sebagai land aplikasi 3. Terdapat kegiatan PETI di area APL	Pengaduan tidak terbukti		
31	31	#191061	27 June 2019	Media Online mediakabarnews.com tentang ikan dan Hewan Mati Mendadak, Di Duga Akibat Sungai Tercemar Limbah PKS PT CUS-JV	-	Kecamatan Simpang Hilir Telok Melano-Sukadana, Kabupaten Kayong Utara	Kalimantan Barat	PT Cipta Usaha Sejaht	Kebun dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Dugaan limbah PKS PT CUS telah mencemari sungai		Lingkungan	08 July 2019	ST.104/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/7/2019	1. Muhammad Ad SH 2. Nur Aziz Ribowo, S.Si 3. Sukriwan	Berdasarkan fakta temuan lapangan dapat disimpulkan pengaduan masyarakat terhadap PT Cipta Usaha Sejaht yang berlokasi di Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat perihal PT Cipta Usaha Sejaht melakukan pencemaran lingkungan akibat adanya kesukaan kolam pengolahan air limbah pada tanggal 22 Mei 2019 dinyatakan terbukti dikarenakan : a) Telah dilakukan verifikasi oleh Tim BPPHLHK Wilayah Kalimantan Saksi Wilayah III Pontianak di Kolam Pengolahan Air Limbah yang rusak dan berdasarkan hasil uji laboratorium dari Sucofindo ditemukan parameter yang melebihi baku mutu. b) Ditemukan batas antara tumpahan dari kolam pengolahan air limbah yang rusak dengan badan sungai dengan jarak 100 meter.	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah	Penyusunan draft surat	
32	32	#191062	15 July 2019	Media Sosial suarakalbar.co.id	-	Desa Nusapati Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat	PT Kalimantan Kelapa Jaya	Pengolahan Kelapa	Perusahaan diduga melakukan pembangunan limbah melalui pipa ke part warga sehingga menimbulkan bau dan warga merasa gatal-gatal saat menggunakan air part untuk kebutuhan MCK		Lingkungan	15 July 2019	ST.106/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/7/2019	1. Jhony Asbar 2. Maharyati Puji Lestari 3. Nur Aziz Ribowo 4. Dedi Suhardi	1. PT Kalimantan Kelapa Jaya telah memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah 2. PT Kalimantan Kelapa Jaya tidak memiliki Izin IPAL 3. PT Kalimantan Kelapa Jaya tidak menyerahkan laporan UKL-UPL sejak semester II tahun 2017 4. Terdapat 4 kesepakatan antara warga, perwakilan desa, DLH, Polsek Sungai Pinyuh serta PT KKJ dalam penanganan air limbah	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah	Telah mendapatkan sanksi administrasi	
33	33	#191063	17 July 2019	Perintah lisan Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan	Samarinda	Dusun Gunung Loncek, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat	-	Lingkungan	Diduga terjadi kebakaran lahan yang diakibatkan karena pembakaran lahan yang dilakukan oleh warga Dusun Gunung Loncek, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Ambawang		Lingkungan	17 July 2019	ST.110/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/7/2019	1. Muhammad Siraj 2. Suhardi 3. Darmawan Susilo 4. Arrafi Nursyahadi 5. Guruh Hendra Selawan 6. Nur Aziz Ribowo 7. Dedi Suhardi	1. Pengaduan terbukti 2. Telah terjadi kebakaran lahan yang diakibatkan karena kegiatan pembakaran lahan yang dilakukan oleh Sdr. Ubar anak Endel dengan cara pembakaran lahan menggunakan parang dengan luas areal ± 180 M2, kemudian serasah hasil pembakaran lahan dikumpulkan dibakar dengan menggunakan korek api	Pidana	Persidangan	Telah dilakukan penyidikan oleh BPPHLHK Wilayah Kalimantan

NO.	No Registrasi			Tanggal Penerimaan	Nama Pengadu	Alamat	Lokasi Kejadian		Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kejadian	Uraian Kejadian	Penyelesaian yang diinginkan	Tipologi (K/LH/LHK)	Verifikasi			REKOMENDASI	Status Penanganan Terakhir	Keterangan
	1	2	3				7	8						14	15	16			
34	34	#191065	1 August 2019	Masyarakat (Pengamatan dari Satelit Lapan)	6	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	PT Global Kalimantan Makmur	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Ditemukan titik panas (hotspot) yang diduga berada pada wilayah konsesi PT Global Kalimantan Makmur	Penegakan hukum LHK	LHK	02 August 2019	ST.116/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/8/2019	1. Wan Novi 2. Nur Aziz Ribowo 3. Ary Fidaria Ilimi	1. Pengaduan terbukti 2. Pengaduan mengenai titik hotspot Lapan di PT GKM terbukti karena : a. terdapat titik api di areal enclave/ ladang masyarakat OK32 di dalam IUP-P pada koordinat Long : 0,734637 Lat : 110,466181 dan Long : 0,725988 Lat : 110,46529 atas nama Bapak Achmad b. terdapat titik api di areal enclave/ ladang masyarakat OF20d dalam IUP-P pada koordinat Long: 0,719491 Lat :110,469551 atas nama Bapak Eno c. terdapat titik api di areal enclave/ ladang masyarakat OF21d dalam IUP-P pada koordinat Long: 0,716728 Lat :110,46906 atas nama Bapak Jumartoro	Sanksi Administratif paksaan Pemerintah	Telah mendapat sanksi administrasi Paksaan Pemerintah dari Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1231/DPRK/2019 tanggal 13 September 2019	Telah dilakukan Pengawasan Oleh PPSA
35	35	#191322	5 August 2019	Laporan harian dari Intelligence Center BPPHLHK tentang pemantauan hotspot di kawasan Hutan dan lahan Konsesi tanggal 5 Agustus 2019		Kecamatan Siantan dan Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat	PT Mitra Andalan Sejahtera	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Dugaan adanya kebakaran lahan di areal konsesi PT Mitra Andalan Sejahtera		LHK	06 August 2019	ST.120/BPPHLHK IV/SW.3/keu/8/2019	1. Cucu Rochdat 2. Sutomo 3. Sukriwan	2. Terdapat kebakaran pada areal konsesi PT. Mitra Andalan Sejahtera 3. Telah dilakukan penyegelan	Sanksi Administratif	Telah mendapat sanksi administrasi Paksaan Pemerintah dari Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1233/DPRK/2019 tanggal 13 September 2019	Telah dilakukan Pengawasan Oleh PPSA
36	36	#191328	8 August 2019	Laporan harian dari Intelligence Center BPPHLHK tentang pemantauan hotspot di kawasan Hutan dan lahan Konsesi tanggal 5 dan 8 Agustus 2019		Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	PT Sungai Putri Agro Sawit	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan adanya kebakaran lahan di areal konsesi PT Sungai Putri Agro Sawit		LHK	09 August 2019	ST.122/BPPHLHK IV/SW.3/keu/8/2019	1. Ibrahim Sindang 2. Jhony Asbar 3. M. Syahrani	1). Bahwa berdasarkan titik Koordinat pengecekan lapangan diploting dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 733/ Menhut-II/ 2014 Tanggal 2 September 2014, Lokasi Kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang berada di Areal Penggunaan Lain (APL). 2). Luas areal bukaan Kebakaran Hutan dan Lahan diperkirakan kurang lebih 227 Ha. Berada di Area Penggunaan Lain (APL) di Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang. 3). Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Matan Hilir Utara terjadi di minggu keempat bulan Juli 2019. Sudah berlangsung 2 (dua) Minggu, selain mengancam pemukiman penduduk Sungai Putri dan Tanjung Baik Budi, juga mengancam Habitat Orang Utan, Beruang Madu dan keberadaan satwa yang dilindungi undang-undang. 4). Data dokumen perijinan PT. Tri Agronusa Sejahtera dan PT. Sungai Putri Agro Sawit tidak ada, yang ada di areal tersebut adalah Izin Usaha Perkebunan (IUP) Tabu PT. Bina Muda Perkasa (Eks. PT. Sungai Putri Agro Sawit) Nomor : 572/Diabun-D/2016 tanggal 23 Agustus 2016 seluas kurang lebih 14.650 Ha di Lokasi Kecamatan Muara Pawan dan Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang, dan izin ini diberikan tidak untuk melaksanakan kegiatan budidaya tanaman perkebunan, akan tetapi sebagai syarat untuk pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonsversi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan IUP ini hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan. 5). Berdasarkan keterangan JAMANI Kasi Perijinan dan FARY AKHYARSAS, SP. MP Kabid. Perkebunan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang, PT. Sungai Putri Agro Sawit telah berahzi izin lokasinya sejak tahun 2012 dan secara	Sanksi Administratif	Telah mendapat sanksi administrasi Paksaan Pemerintah dari Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1235/DPRK/2019 tanggal 13 September 2019	Telah dilakukan Pengawasan Oleh PPSA
37	37	#191329	Laporan harian dari Intelligence Center BPPHLHK tentang pemantauan hotspot di kawasan Hutan dan lahan Konsesi tanggal 5 dan 8 Agustus 2019		Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat	PT Bumi Mekar Hijau	Lingkungan	Dugaan adanya kebakaran lahan di areal konsesi PT Bumi Mekar Hijau		LHK	09 August 2019	ST.123/BPPHLHK IV/SW.3/keu/8/2019	1. Rudiansyah 2. Wan Novi Erfan Ildal 3. Dahliansyah	1. PT. Bumi Mekar Hijau sejak tahun 2016 tidak beroperasi lagi dan telah di cabut izin nya sebagai mana Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4/1/C/PMDN/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 179/MEH/2007 Tanggal 1 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Mekar Hijau atas areal Hutan Produksi seluas ± 25.580 Hektar di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. 2. Hasil di lapangan bahwa pada areal konsesi Eks PT. Bumi Mekar Hijau terdapat hotspot-hotspot akibat dari pembukaan lahan oleh masyarakat untuk perkebunan dengan cara dibakar. 3. Lokasi kebakaran lahan pada areal konsesi Eks PT. Bumi Mekar Hijau berada pada sebagai berikut : a. Kecamatan Jawa Desa Sarang Burung Danau. b. Kecamatan Tangarang Desa Semata c. Kecamatan Teluk Keramat, Desa Tri Mandayan, Desa Punggan, Dusun Tambangan.		Penusahan tidak aktif		
38	38	#191330	Laporan harian dari Intelligence Center BPPHLHK tentang pemantauan hotspot di kawasan Hutan dan lahan Konsesi tanggal 5 dan 8 Agustus 2019		Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	PT Sinar Karya Mandiri	Lingkungan	Dugaan adanya kebakaran lahan di areal konsesi PT Sinar Karya Mandiri		LHK	09 August 2019	ST.124/BPPHLHK IV/SW.3/keu/8/2019	1. Muhammad Ali 2. Mardani 3. Hendarto Gunawan	1. Pengaduan terbukti 2. Terdapat kebakaran pada areal konsesi PT. Sinar Karya Mandiri 3. Lokasi Kebakaran terletak di blok: K07, K08, K11, L07, L08,L10, L11, dan L12 4. Diperkirakan luas yang terbakar adalah 800 Ha. 5. PT. SKM telah melaporkan kebakaran di areal konsesi ke Polsek Muara Pawan dan telah membuat laporan kebakaran sesuai dengan formir Permentan No. 05 Tahun 2018. 6. Untuk pengendalian kebakaran PT. SKM telah meminta bantuaandi Manggala Agri, KTPA dan BPBD Kab. Ketapang 7. PT. SKM telah memiliki struktur organisasi pemadam kebakaran	Sanksi Administratif	Sedang dalam proses penyidikan oleh BPPHLHK Wilayah Kalimantan Sekelai Wilayah III Pontianak	Telah mendapat sanksi administrasi Paksaan Pemerintah dari Gubernur Kalimantan Barat nomor : 1237/DPRK/2019 tanggal 13 September 2019	
39	39	#191331	Laporan harian dari Intelligence Center BPPHLHK tentang pemantauan hotspot di kawasan Hutan dan lahan Konsesi tanggal 5 Agustus 2019		Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat	PT Muara Sungai Landak	HTI	Dugaan adanya kebakaran lahan di areal konsesi PT Muara Sungai Landak		LHK	09 August 2019	ST.125/BPPHLHK IV/SW.3/keu/8/2019	1. Suhardi 2. Sutejo 3. Hendri Es Priyanto	1. Ditemukan luas lahan yang terbakar ± 30 Ha 2. Kebakaran lahan terjadi di lokasi HGU dan IUP PT MSL pada koordinat : X = 109,2497 Y = 0,1797 X = 109,2538 Y = 0,1778 X = 109,25415 Y = 0,17774 X = 109,26501 Y = 0,17123	Sanksi Administratif	Telah mendapat sanksi administrasi Paksaan Pemerintah dari Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1242/DPRK/2019 tanggal 13 September 2019	Telah dilakukan Pengawasan oleh PPSA	

NO.	No Registrasi		Tanggal Penerimaan	Nama Pengadu	Alamat	Lokasi Kejadian		Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Uraian Kejadian	Penyelesaian yang diinginkan	Tipologi (K/L/H/LHK)	Verifikasi		Hasil Verifikasi	REKOMENDASI	Status Penanganan Terakhir	Keterangan	
	Seksi	Online				Tanggal SPT	SPT No.						Verifikator						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
40	40	#191066	14 August 2019	Media Online borneonstv.com tanggal 23 Mei 2019		Kecamatan Teluk Pakeda, Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat	PT Rezeki Kencana	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Dugaan adanya pencemaran lingkungan akibat limbah PT Rezeki Kencana		LH	15 August 2019	ST.136/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/8/2019	1. Maharyati Puji Lestari 2. Ay Fidiara Ilni 3. Andri Setiawan	Berdasarkan fakta temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengaduan masyarakat melalui media sosial borneonstv.com tanggal 23 Mei 2019 terhadap PT. Rezeki Kencana yang berlokasi di Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakeda, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat perhal telah terjadi Pencemaran Lingkungan oleh PT. Rezeki Kencana dan dinyatakan terbukti dikarenakan: Terdapat terdapat limbah air limbah pada kolam IPAL 1 karena adanya penyumbatan pipa pada koordinat long: 109.25027 lat: 0.26722 pada tanggal 12 Mei 2019. Keterangan Kepala Desa Sungai Deras : a. Terjadi luberan air limbah yang berasal dari kolam IPAL PT Rezeki Kencana. b. Perusahaan telah melakukan pembersihan limbah dari parit dengan cara dipompa dan dikembalikan ke kolam IPAL 1.	Pelimpahan Pemerintah Daerah (DLH Kubu Raya)	Telah mendapat surat dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya Nomor :660.1/7876/DPKPLH-B tanggal 3 Oktober 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Dugaan Pencemaran Lingkungan	
41	41	#191067	27 August 2019	A. Cholis, SH./PBHK	Pontianak	Kecamatan Wajok Hilir kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat	PT Mitra Andalana Sejahtera	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Dugaan adanya perkebunan kelapa sawit didalam kawasan hutan produksi tetap sungai Peniti Besar Sungai Temila seluas kurang lebih 27,22 Ha	Penyelesaian sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kehutanan	28 October 2019	ST.210/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/10/2019	1. A. Agus Riwanto 2. Maharyati Puji Lestari 3. Yuliansyah (KPH Mempawah)	Berdasarkan hasil overlay titik koordinat yang diambil oleh Tim Verifikasi, seluas 1 (satu) titik koordinat yang terindikasi berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Peniti Besar Sungai Temila yaitu pada koordinat E : 109,27932 , U : 0,09358	Pulbaket/Puldasi	Sedang dalam tahap koordinasi dengan BPHKH Wilayah III Pontianak terkait Telaahan Kawasan melalui surat Nomor 231/BPPHLHK-IV/SW.3/11/2019 tanggal 18 November 2019	
42	42	#191068	3 August 2019	Surat Direktur PPSA NO S.1014/PPSA/PP/G KM 10/7/2019 tanggal 6 Juli 2019	Jakarta Pusat	Singka Zoo, Kota Singkawang	Kalimantan Barat	Kebun Binatang Tanjung Baju	Penanganan sawa dilindungi	Kebun binatang Tanjung baju diduga tidak melakukan perawatan terhadap sawa dilindungi seperti beruang madu sehingga kondisinya mengesankan	tidak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku	LHK	16 September 2019	ST.164/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/9/2019	1. Tatag Setiadi 2. Wani Novi Erfan Fidal 3. Hendarto Gunawan	1. Pengaduan terbukti 2. Pada saat Beruang Madu (Helarctos malayanus) dalam therapy/ perawatan (sesuai rekam medik) pihak pengelola Sinka Island Park/ Sinka Zoo Singkawang tidak melaporkan kepada pihak BKSDA Kalbar 3. Adanya Surat Keterangan Kesehatan Satwa Nomor : 3/SINKA ZOO/X/2019, tanggal 2 Oktober 2019 dan Rekam Medik Beruang Madu/ Dodo, bulan Januari s.d Mei 2019 yang dikeluarkan oleh pihak Sinka Island Park setelah dilakukan kegiatan Penanganan Pengaduan oleh BPPHLHK Saka Wilayah III Pontianak terkait Dugaan Penelantaran Terhadap Satwa Dilindungi Oleh Pengelola Kebun Binatang Tanjung Baju yaitu tanggal 17 s/d 21 September 2019 maka ditemukan adanya kelalaian dari pihak pengelola Sinka Island Park.	Sanksi Administratif		
43	43	#191069	20 August 2019	Surat dari Dusun Kekura Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang	Dusun Kekura, Kecamatan Tumbang Titi	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	Perorangan	Perkebunan Sawit	Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah hutan produksi		Kehutanan	4 October 2019	ST.180/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/10/2019	1. Cucu Rochdat 2. Sukriwan 3. Muhammad Heriansyah	1. Bahwa masih adanya kegiatan perkebunan sawit dalam kawasan hutan di Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang berdasarkan Laporan Pengaduan yang disampaikan oleh Kepala Dusun Kekura Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Bapak A. Muslim Susanto melalui surat nomor : 65 tanggal 15 Juli 2019 perihal Aktifitas Perkebunan Dalam Kawasan dinyatakan Terbukti dari hasil verifikasi dengan temuan : a. Bangunan kantor kebun dan mess karyawan titik koordinat y - 1.915718 x 110.705505, lokasi pembilatan di titik koordinat y - 1.915378 x 110.705608, bangunan sarang burung walet di titik koordinat y -1.915655, 1 (satu) unit bulldozer di titik koordinat y - 1.915462 x 110.705846, 1 (satu) unit excavator di titik koordinat y - 1.91549 x 110.706874, pondok kerja karyawan di titik koordinat y - 1.915450 x 110.706602 setelah dioverlay/ ditumpang susunkan titik koordinat lapangan dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 Tanggal 2 September 2014) berada di dalam kawasan hutan produksi dan belum dilakukan penetapan kawasan hutan. b. Jalan masuk ke kebun (lebar ± 6 m, panjang ± 750 m) di titik koordinat y -1.92400 x 110.69500 setelah dioverlay/ ditumpang susunkan titik koordinat lapangan dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 Tanggal 2 September 2014) berada di dalam kawasan hutan lindung Gunung Raya yang sudah dilakukan penetapan dengan Nomor SK : 352/Kpts-II/1994 tanggal 23 Agustus 1994. 2. Bahwa perkebunan sawit tersebut adalah milik perseorangan dimana Pemilik sekaligus Pimpinan/ Penanggung Jawab Usaha : Sdr. Izhah Saifawati alias Unyil alamat Sidih – Nanga Tayap, Humas : Sdr. Musli dan Sdr. Babuara alamat Desa Mahawa, Tata Usaha TU	Pidana / Penyidikan	Telah dilakukan verifikasi	
44	44	#191070	21 August 2019	Surat dari PT Kalimantan Subur permai	Pontianak	Kabupaten Landak	Kalimantan Barat	PT Kalimantan Subur Permai	Perkebunan Kelapa Sawit	Pemmasalahan tenurtrial dan perubahan kawasan didalam areal IUPHHK HT. PT KSP		Kehutanan	4 September 2019	ST.149/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/9/2019	1. Suhardi, S.Hut 2. Suwanda 3. Sutomo	a. Bahwa pengaduan yang dilaporkan oleh PT. KSP tentang dugaan adanya penanaman kelapa sawit di dalam kawasan konsesi PT. KSP yang dilakukan oleh Kelompok Tani Acin/ Sumadi Cs dan Pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat sebagai aksesibilitas pengelolaan sawit oleh Heri Januar telah terbukti, berdasarkan Peta kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dengan nomor SK. 733/Menhut-II/2014 semua titik koordinat lapangan lokasi penanaman sawit berada di dalam kawasan Hutan Produksi Sungai Ambawang dan juga berada di dalam ijin konsesi PT. KSP. b. Bahwa luas penanaman sawit oleh Kelompok Acin/Sumadi ± 5 Hektar, sedangkan pembukaan lahan oleh Heri Januar sekitar 2 Hektar. Sedangkan pembukaan lahan sawit oleh Kelompok Witono sudah ditangani oleh Dikrimus Pold Kalbar. c. Tim verifikasi di lapangan menemukan kegiatan penambangan tanpa ijin di dalam areal konsesi PT. KSP yang dilakukan dengan menggunakan alat berat Excavator dan alat angkut Dump Truck di lahan yang diklaim milik Bapak Atet mantan Kepala BPN Kubu Raya. Menurut keterangan pekerja sekaligus penjaga di lokasi hasil tambang (Galian C) diangkut untuk penimbunan jalan PT. Saraswati Ngabang. Kegiatan ini belum dilaporkan oleh PT. KSP. d. Tim verifikasi menemukan indikasi illegal logging di dalam ijin konsesi PT. KSP yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berasal dari Sambas dengan Pimpinan Bapak Lapok. Lokasi ini berdekatan dengan lokasi pembukaan lahan oleh kelompok Tani Acin/ Sumadi Cs. Kegiatan illegal login tersebut juga tidak dilaporkan oleh PT. KSP dengan alasan mereka baru sekitar satu minggu masuk.	Rekomendasi Operasi	Telah dilakukan verifikasi	

NO.	No Registrasi		Tanggal Penerimaan	Nama Pengadu	Alamat	Lokasi Kejudian			Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kejudian	Uraian Kejudian	Penyelesaian yang diinginkan	Tipologi (K/L/H/LHK)	Verifikasi		Hasil Verifikasi	REKOMENDASI	Status Penanganan Terakhir	Keterangan	
	1	2				3	4	5						6	7					8
45	45	#191071	21 August 2019	Surat dari PT Kalimantan Subur Permai No. 022/KSP-KBR/VIII/2019	Pontianak	Kabupaten Landak	Kalimantan Barat	PT Kalimantan Subur Permai Kelapa Sawit	Perkebunan Kelapa Sawit	Pembuatan jalan yang mengikuti parit kolektor oleh oknum-oknum pengelola pemilik sawit yang masuk ke areal ijin IUPHHK-HTI PT KSP			Kehutanan	04-Sep-19	ST.149/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/9/2019	1. Suhardi, S.Hut 2. Suwarda 3. Sutomo	a. Bahwa pengaduan yang dilaporkan oleh PT. KSP tentang dugaan adanya penanaman kelapa sawit di dalam kawasan konsesi PT. KSP yang dilakukan oleh Kelompok Tani Acin/ Sumadi Cs dan Pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat sebagai aksesibilitas pengelolaan sawit oleh Hari Januar telah terbukti, berdasarkan Peta kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dengan nomor SK. 733/Menhut-1/2014 semua titik koordinat lapangan lokasi penanaman sawit berada di dalam kawasan Hutan Produksi Sungai Ambawang dan juga berada di dalam ijin konsesi PT. KSP. b. Bahwa luas penanaman sawit oleh Kelompok Acin/Sumadi ± 5 Hektar, sedangkan pembukaan lahan oleh Hari Januar sekitar 2 Hektar. Sedangkan pembukaan lahan sawit oleh Kelompok Witono sudah ditangani oleh Ditkrimsus Polda Kalbar. c. Tim verifikasi lapangan menemukan kegiatan penambangan tanpa ijin di dalam areal konsesi PT. KSP yang dilakukan dengan menggunakan alat berat Excavator dan alat angkut Dump Truk di lahan yang diklaim milik Bapak Atet mantan Kepala BPN Kubu Raya. Menurut keterangan pekerja sekaligus penjaga di lokasi hasil tambang (Galian C) diangkut untuk penimbunan jalan PT. Saraswati Ngabang. Kegiatan ini belum dilaporkan oleh PT. KSP. d. Tim verifikasi menemukan indikasi illegal logging di dalam ijin konsesi PT. KSP yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berasal dari Sambas dengan Pimpinan Bapak Lapok. Lokasi ini berdekatan dengan lokasi pembukaan lahan oleh kelompok tani Acin/ Sumadi Cs. Kegiatan illegal logging tersebut juga tidak dilaporkan oleh PT. KSP dengan alasan mereka baru sekitar satu minggu masuk.	Rekomendasi Operasi	Telah dilakukan verifikasi	
46	46	#191072	21 August 2019	Surat dari PT KSP No. 621/KSP-KBR/VIII/2019	Pontianak	Kabupaten Landak	Kalimantan Barat	PT Kalimantan Subur Permai Kelapa Sawit	Perkebunan Kelapa Sawit	Permasalahan tenurial dan perambatan kawasan didalam areal IUPHHK HT. PT KSP			Kehutanan	04-Sep-19	ST.149/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/9/2019	1. Suhardi, S.Hut 2. Suwarda 3. Sutomo	a. Bahwa pengaduan yang dilaporkan oleh PT. KSP tentang dugaan adanya penanaman kelapa sawit di dalam kawasan konsesi PT. KSP yang dilakukan oleh Kelompok Tani Acin/ Sumadi Cs dan Pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat sebagai aksesibilitas pengelolaan sawit oleh Hari Januar telah terbukti, berdasarkan Peta kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dengan nomor SK. 733/Menhut-1/2014 semua titik koordinat lapangan lokasi penanaman sawit berada di dalam kawasan Hutan Produksi Sungai Ambawang dan juga berada di dalam ijin konsesi PT. KSP. b. Bahwa luas penanaman sawit oleh Kelompok Acin/Sumadi ± 5 Hektar, sedangkan pembukaan lahan oleh Hari Januar sekitar 2 Hektar. Sedangkan pembukaan lahan sawit oleh Kelompok Witono sudah ditangani oleh Ditkrimsus Polda Kalbar. c. Tim verifikasi lapangan menemukan kegiatan penambangan tanpa ijin di dalam areal konsesi PT. KSP yang dilakukan dengan menggunakan alat berat Excavator dan alat angkut Dump Truk di lahan yang diklaim milik Bapak Atet mantan Kepala BPN Kubu Raya. Menurut keterangan pekerja sekaligus penjaga di lokasi hasil tambang (Galian C) diangkut untuk penimbunan jalan PT. Saraswati Ngabang. Kegiatan ini belum dilaporkan oleh PT. KSP. d. Tim verifikasi menemukan indikasi illegal logging di dalam ijin konsesi PT. KSP yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berasal dari Sambas dengan Pimpinan Bapak Lapok. Lokasi ini berdekatan dengan lokasi pembukaan lahan oleh kelompok tani Acin/ Sumadi Cs. Kegiatan illegal logging tersebut juga tidak dilaporkan oleh PT. KSP dengan alasan mereka baru sekitar satu minggu masuk.	Rekomendasi Operasi	Telah dilakukan verifikasi	
47	47	#191332	26 August 2019	Laporan Hasil Tindak Pidana Verifikasi Lacaangan Karhutala Dinas Penunahan Rakyat, Kawasa Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	PT Mitra Austral Sejahtera, PT Kebun Ganda Prima, PT Kapuas Plantation	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan adanya kebakaran lahan di area konsesi PT Mitra Austral Sejahtera, PT Kebun Ganda Prima, PT Kapuas Plantation			LHK	04 September 2019	ST.151/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/9/2019	1. Jhony Asbar 2. Ade Wahyuningstih 3. Hendri Es Priyanto	PT Mitra Austral Sejahtera 1. bekas lahan kebakaran di PT. Mitra Austral Sejahtera dan PT. Kebun Ganda Prima, disimpulkan bahwa kebakaran yang terjadi berada di dalam IUP perusahaan dengan luas ± 6,8 Hektar terdiri dari 4 persil. PT Kebun Ganda Prima 1. Luas kebakaran PT. Kebun Ganda Prima pada tanggal 11 Agustus 2019 adalah ± 2,2 Hektar 2. Bekas lahan yang terbakar, meskipun berada di dalam IUP perusahaan tetapi lahan-lahan tersebut adalah milik masyarakat, dengan dibuktikan adanya Surat Pernyataan dari masyarakat 3. PT Kapuas Plantation Berdasarkan informasi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Sanggau bahwa pada saat ini PT. Kapuas Plantation yang berlokasi di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau sudah tidak ada aktifitas perusahaan terkait usaha perkebunan	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah	PT Kebun Ganda Prima telah mendapat sanksi administrasi Paksaan Pemerintah dari Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1282/DPRKPLH/2019 tanggal 4 Oktober 2019 PT Mitra Austral Sejahtera telah mendapat sanksi administrasi Paksaan Pemerintah dari Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1284/DPRKPLH/2019 tanggal 4 Oktober 2019	
48	48	#191333	03 September 2019	Laporan harian Intelligence Center Dijen Gakkum LHK tentang pengamanan Hotspot di kawasan hutan dan konsesi	Jakarta	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	PT Putra Sari Lestari dan PT Sukses Karya Sawit	Perkebunan Sawit	Dugaan adanya kebakaran lahan di area konsesi PT Putra Sari Lestari dan PT Sukses Karya Sawit			LHK	04 September 2019	ST.152/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/9/2019	1. Pela Haliantika 2. Ni Made Lia Rimbawati 3. Guruh Hendra S.	PT Putra Sari Lestari telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.GAS.3051/X/2019/Ditkrimsus-4 tanggal 10 September 2019 PT Sukses Karya Sawit 1. Terdapat lahan yang terbakar seluas 35 Ha di areal HGU 2. Belum memiliki sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang memadai sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.	Sanksi Administratif	PT Putra Sari Lestari dalam tahap penyidikan oleh Polda Kalbar PT Sukses Karya Sawit telah mendapat Sanksi Paksaan Pemerintah Kalimantan Barat Nomor 1283/DPRKPLH/2019 Tanggal 4 Oktober 2019	
49	49	#191334	09 September 2019	Perintah Lisan Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK via WA	Jakarta	Kabupaten Melawi	Kalimantan Barat	PT Rafi Kamajaya Abadi	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan adanya kebakaran lahan di area konsesi PT Rafi Kamajaya Abadi			LHK	09 September 2019	ST.156/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/9/2019	1. Suhardi, S.Hut 2. Mahayati Puji Lestari 3. Dedi Suhardi	1. Pengaduan terbukti, terdapat kebakaran lahan pada IUP dengan luas ± 900 Ha di PT Rafi Kamajaya Abadi pada lokasi sebagai berikut : No. Lokasi 1 Lat : 00,22189° N ; Long : 111,66447° E 2 Lat : 00,20031° N ; Long : 111,66478° E 3 Lat : 00,21154° N ; Long 111,66461° E 4 Long : 00,20770° N ; Lat : 111,66460° E 5 Long : 00,19320° N ; Lat : 111,67356° E 2. Belum memiliki Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang memadai. 3. Belum membuat dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali.	Sanksi Administratif	- sedang dilakukan penyidikan oleh pihak Polda Kalbar - Telah mendapat sanksi Paksaan Pemerintah Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1279/DPRKPLH/2019 tanggal 4 Oktober 2019 - Telah dilakan pengambilan sampel oleh ahli untuk Penyelesaian Singketa Lingkungan Hidup	

NO.	No Registrasi		Tanggal Penerimaan	Nama Pengadu	Alamat	Lokasi Kejadian		Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Uraian Kejadian	Penyelesaian yang diinginkan	Tipologi (K/LH/LHK)	Verifikasi			REKOMENDASI	Status		
	Seksi	Online				Tanggal SPT	SPT No.						Verifikator	Hasil Verifikasi	Penanganan		Terakhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
50	50	#191335	11 September 2019	Laporan harian Intelligence Center Dijen Gakum LHK tentang pemantauan Hotspot di kawasan hutan dan konsesi	Jakarta	Kabupaten Kayong Utara	Kalimantan Barat	PT Jalin Vaneo	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan adanya kebakaran lahan di area konsesi PT Jalin Vaneo		LHK	09 September 2019	ST.160/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/9/2019	1. Mardani 2. Diar Aronta 3. Saifuddin	1. Belum memiliki sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang memadai sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. 2. PT. Jalin Vaneo belum melaporkan pelaksanaan RKL – RPL Semester I Tahun 2019 3. Telah ditemukan lahan bekas terbakar di blok N.94 yang telah ditanami sawit dengan tahun tanam 2018 pada koordinat -0.97667, 110.1772 yang merupakan areal HGU milik PT. Jalin Vaneo luasan terbakar + 30 Hektar. 4. Telah terjadi kebakaran lahan pada koordinat 0.98394, 110.18304 yang merupakan areal HGU milik PT. Jalin Vaneo, yang merupakan vegetasi masih berupa semak belukar, luasan yang terbakar diperkirakan + 120 Hektar	Sanksi Administratif	Telah mendapat sanksi paksaan pemerintah Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1276/DPRKPLH/2019 tanggal 4 Oktober 2019	Telah dilakukan Pengawasan Oleh PPSA
51	51	#191336	11 September 2019	Laporan harian Intelligence Center Dijen Gakum LHK tentang pemantauan Hotspot di kawasan hutan dan konsesi	Jakarta	Kabupaten Kayong Utara	Kalimantan Barat	PT Kalimantan Agro Lestari, PT Mahaison Pawan Khalulistiwa, PT Sawit Mitra Abadi	Perkebunan Sawit (PT KAL, PT SMA), HPH (PT MPK)	Dugaan adanya kebakaran lahan di area konsesi PT Kalimantan Agro Lestari, PT Mahaison Pawan Khalulistiwa, PT Sawit Mitra Abadi		LHK	09 September 2019	ST.161/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/9/2019	1. Hari Novianto 2. M. Irvani 3. Nur Aziz Ribowo	PT MPK 1. Belum memiliki sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang memadai sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. 2. Ditemukan area terbakar di sekitar kanal di dalam lokasi IUPHHK-HA PT. MPK dengan luas 488 Ha PT SMA : 1. Belum memiliki sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang memadai sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. 2. Terdapat area yang terbakar pada wilayah konsesi didalam IUP dan HGU Perusahaan dengan luas 10 Ha	Sanksi Administratif	Telah dilakukan verifikasi lapangan	
52	52	#191337	11 September 2019	Laporan harian Intelligence Center Dijen Gakum LHK tentang pemantauan Hotspot di kawasan hutan dan konsesi	Jakarta	Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat	PT Rezeki Kencana dan PT Mitra Aneka Rezeki	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan adanya kebakaran lahan di area konsesi PT Rezeki Kencana dan PT Mitra Aneka Rezeki		LHK	16 September 2019	ST.163/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/9/2019	1. Agus Riwanto 2. Rahmat Suseno 3. Ary Fidaria	PT RK 1. Ditemukan lahan bekas terbakar di blok tanam E49 2. Ditemukan lahan bekas terbakar di blok E 50 di luar HGU 3. Ditemukan lahan bekas terbakar di Blok E51 4. Ditemukan lahan bekas terbakar pada blok G65-G66 PT MAR 1. Terdapat lahan bekas terbakar di Kawasan Hutan Lindung dan telah dipasang papan himbauan dari Polres Mempawah yang letaknya berdekatan dengan HGU PT MAR 2. Terdapat bekas lahan terbakar di batas kebun/masyarakat	Ditangani sektor lain (Polres Mempawah)	PT Rezeki Kencana Sedang dalam penyelidikan oleh Polres Mempawah	
53	53	#191338	19 September 2019	Pemantauan titik panas (hotspot) melalui satelit LAPAN	Pontianak	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	PT Andes Agro Investama (Cargill Group, PT Agri Sejahtera Manunggal (BGA Group)	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan adanya kebakaran lahan di area konsesi PT Andes Agro Investama (Cargill Group, PT Agri Sejahtera Manunggal (BGA Group)		LHK	23 September 2019	ST.168/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/9/2019	1. Tatag Setiadi 2. Mardani 3. Saifuddin	PT AAI 1. Belum memiliki sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang memadai sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. 2. Ditemukan lahan terbakar di area HCV Rawa Bangkul dengan Luas 89,9 Ha PT ASM 1. Belum memiliki sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang memadai sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. 2. Ditemukan areal yang terbakar yang berada di kebun plasma Koperasi Mandiri dengan luas 1 Ha, di Blok tanam E45a 1,3 Ha, E46a 1,01 Ha, B58a 0,83 Ha, B59a 0,20 Ha, D64a 0,53, A33b 0,31 Ha, A31b 1,05 Ha (Total 5,23 Hektar)	Sanksi Administratif	Telah dilakukan verifikasi lapangan	
54	54	#191339	19 September 2019	Pemantauan titik panas (hotspot) melalui satelit LAPAN	Pontianak	Kabupaten Sintang	Kalimantan Barat	PT Grand Mandiri Utama	Perkebunan Kelapa Sawit	Dugaan adanya kebakaran lahan di area konsesi PT Grand Mandiri Utama		LHK	23 September 2019	ST.169/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/9/2019	1. Rahmat Suseno 2. Hendri ES Priyanto 3. Ary Fidaria	1. Ditemukan areal terbakar pada area tanahm Blok L dengan Luas 30 Ha 2. Ditemukan lahan terbakar di areal tanam blok J dengan luas 7,6 dan telag di segel POLDA kalbar	Sanksi Administratif	Telah dilakukan verifikasi lapangan	
55	55	#191340	28 September 2019	Pengaduan Masyarakat Melalui WA	Kabupaten Sanggau	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	-	Galian mineral bukan logam (Galian C)	Dugaan adanya perambahan kawasan Hutan berupa Galian C di Kawasan Hutan Produksi Sungai Ambawang	Penyelesaian sesuai peraturan yang berlaku	LHK	30 September 2019	ST.177/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/9/2019	1. Mardani 2. Wan Novi Erfan Idris 3. Ade Wahyuningah	1. Berdasarkan hasil temuan verifikasi disimpulkan bahwa benar adanya perambahan kawasan hutan berupa Galian C di kawasan Hutan Produksi Sungai Ambawang, Kabupaten Sanggau dan sekitarnya yang dilakukan oleh oknum masyarakat merupakan permintaan kebutuhan dari perusahaan PT. Pundi yang berlokasi di daerah Desa Lingga Kabupaten Kubu Raya 3. Kegiatan Galian C di kawasan Hutan Produksi Sungai Ambawang, Kabupaten Sanggau dan sekitarnya ini selain pemanfaatan galian, kegiatan ini juga bertujuan untuk pembukaan lahan yang akan digunakan untuk pemukiman masyarakat setempat. 4. Luas lahan Hutan Produksi yang dilakukan pengalihan tanah yang ditemukan pada saat verifikasi yaitu sekitar 0,5 Ha.	Kegiatan Operasi Refresif	Telah dilakukan verifikasi lapangan	
56	56	#191280	28 October 2019	Pengaduan masyarakat Entikong	Entikong	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	-	-	Dugaan adanya illegal logging di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau	Penyelesaian sesuai peraturan yang berlaku	Kehutanan	28 October 2019	212/BPPHLHK/S W.3/Keu/10/2019	1. Sukriwan 2. Hendri ES Priyanto 3. Kuswadi, SP (KPH Sanggau Barat)	Bahwa masih adanya kegiatan illegal logging di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dan sekitarnya berdasarkan Laporan Pengaduan dari masyarakat Kecamatan Entikong bahwa telah terjadi dugaan adanya illegal logging di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dinyatakan Terbukti dari hasil verifikasi dengan temuan : - Ditemukan 1 mobil Pick Up yang sedang mengangkut kayu olahan ukuran campuran (Bubuk dan Akar) sebanyak ± 35 batang milik warga Kecamatan Entikong untuk pembuatan bangunan waflet. - Bahwa pengangkutan kayu yang dilakukan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan. Adapun berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengecekan lapangan bahwa kayu tersebut berasal dari Desa Nyari dan Merayu dimana ditemukan bekas pemotongan kayu/ penggesekan di pinggir jalan menuju Desa Nyari dan Merayu titik koordinat Y : 0.932906, X : 110.206736, yang berada di kebun masyarakat (APL).	Pelimpahan pada unit lain (KPH Sanggau Barat)	Telah dilakukan verifikasi lapangan	

NO.	No Registrasi			Tanggal Penerimaan	Nama Pengadu	Alamat	Lokasi Kejadian			Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Uraian Kejadian	Penyelesaian yang diinginkan	Tipologi (K/L/H/LHK)	Verifikasi		Hasil Verifikasi	REKOMENDASI	Status Penanganan Terakhir	Keterangan
	1	2	3				14	15	16						17	18				
57	57	#191281	15 Oktober 2019	Laporan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat	-	-	Dugaan adanya penambangan mangrove di Desa Kubu	Perencanaan sesuai peraturan yang berlaku	Kehutanan	18 October 2019	ST.197/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/10/2 019	1. Joni R. Sianturi 2. Wan Novi Erfan Hidayat 3. Hendri ES Priyanto	Berdasarkan fakta administrasi, fakta lapangan dan keterangan yang diperoleh, disimpulkan bahwa pengaduan terhadap kegiatan penambangan mangrove dan pembuatan jalan yang diduga secara tidak sah tidak prosedural (ilegal) didalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Provinsi Kalimantan Barat oleh PT. Ichiko Agro Lestari (IAL) tidak terbukti. - Bahwa PT. Ichiko Agro Lestari (IAL) dalam hal pembangunan jalan pengangkutan hasil produksi perkebunan pada kawasan hutan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-1/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang telah dirubah dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEB.KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan serta perubahannya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7/MENLHK/SETJEN.KUM.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEB.KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.	Pelimpahan pada unit lain (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan UPT KPH Kubu Raya)	Telah dilakukan verifikasi		
58	58	#191284	23 August 2019	Media Sosial mediakabnews.com	Kalimantan Barat	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	PT Mulia Bhakti Kahuripan	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Dugaan adanya pencemaran lingkungan hidup akibat limbah PT Mulia Bhakti Kahuripan di aliran sungai Badak	Perencanaan sesuai peraturan yang berlaku	Lingkungan Hidup	21 October 2019	ST.198/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/10/2 019	1. Maharyati Puji Lestari 2. Ary Fidiara Ilim 3. Saifuddin	a. Berdasarkan fakta temuan lapangan dapat disimpulkan pengaduan masyarakat terhadap PT Mulia Bhakti Kahuripan yang berlokasi di Jl. Mulia Bhakti Kahuripan, Desa Sukarame, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut : 1) Terkait dengan Pencemaran air akibat limbah PT Mulia Bhakti Kahuripan pada Sungai Badak dan Sungai Kenaya ditemukan fakta sebagai berikut: a) PT Mulia Bhakti Kahuripan melakukan pemanfaatan terhadap air limbah hasil kegiatan pabrik ke area perkebunan (Land Application). b) Pada saat dilakukan verifikasi lapangan tim tidak menemukan adanya potensi bypass air limbah yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Mulia Bhakti Kahuripan menuju Sungai Kenaya ditunjukkan dengan kondisi air Sungai Kenaya yang masih bersih. 2) Berdasarkan fakta administrasi dan fakta lapangan dapat disimpulkan bahwa PT Mulia Bhakti Kahuripan tidak taat terhadap peraturan perundangan dan perizinan yang berlaku.	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah	BPPHLHK wilayah Kalimantan telah membuat surat rekomendasi kepada Dinas Perkim-LH Kabupaten Ketapang Nomor : S.1079/BPPHLHK-IV/11/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Rekomendasi penerapan sanksi administratif PT MBK		
59	59	#191286	16 October 2019	Pelaporan dari PT Wana Mukti Lestari	Kabupaten Ketapang	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	-	-	Dugaan adanya kegiatan ilegal logging di dalam IUPHHK-HA PT Wana Mukti Lestari	Perencanaan sesuai peraturan yang berlaku	Kehutanan	21 October 2019	ST.199/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/9/20 19	1. Guruh Hendra Setaiawan 2. Nur Aziz Ribowo 3. Denny Fitrianyah	Bahwa terbukti terdapat kegiatan penambangan liar / illegal logging di dalam areal IUPHHK-HA PT. Wana Mukti Lestari dan atau berada di wilayah Kawasan hutan HPT. S. Jelai Hulu – S. Pawan Hulu dan HP. ST. Batu Lapis Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan modus operasi pemodal memanfaatkan terbukanya akses jalan TMD sepanjang 20 Kilometer dari Batu Lapis ke Beginci Darat untuk mengambil kayu bekas pembukaan ladang oleh masyarakat dan menambang kayu kayu besar yang berada di sebelah kiri kanan jalan TMD kemudian diangkut ke penggepangan milik pemodal atau dapat langsung diantar kepada pemesan melalui pemodal di wilayah Sandai atau Pontianak melalui Sawmil yang berada di Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya	Operasi yustisi pengamanan hutan dengan didahului kegiatan pengumpulan bahan keterangan	Telah dilakukan verifikasi lapangan		
60	60	#191288	28 June 2019	Media Sosial pontianak.tribunews.com	Kalimantan Barat	Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat	RSUD dr. Rubini	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dugaan adanya gangguan tingkat kebauan akibat aktivitas insinerator RSUD dr. Rubini	Perencanaan sesuai peraturan yang berlaku	Lingkungan Hidup	28 October 2019	ST.211/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/10/2 019	1. Nur Aziz Ribowo 2. Ary Fidiara Ilim 3. Saifuddin	a. Berdasarkan fakta temuan lapangan dapat disimpulkan pengaduan masyarakat terhadap RSUD dr. Rubini yang berlokasi di Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, perihal : 1) RSUD dr. Rubini Mempawah menggunakan insinerator untuk membakar limbah medis yang mengakibatkan polusi udara dinyatakan terbukti, RSUD dr. Rubini Mempawah tidak pernah melakukan pemantauan emisi udara cerobong insinerator dan sedang dalam proses mengajukan izin pengelolaan limbah B3 dengan jenis kegiatan pengolahan limbah B3. 2) RSUD dr. Rubini Mempawah melakukan pembakaran limbah medis menggunakan insinerator yang berdampak pada tingkat kebauan kepada masyarakat disekitarnya ditemukan fakta sebagai berikut : a. RSUD dr. Rubini Mempawah melakukan kegiatan pembakaran limbah medis sejak Juni 2016 hingga Juli 2019 tanpa memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. RSUD dr. Rubini Mempawah sejak Juli 2019 hingga tim verifikasi lapangan turun, tidak lagi melakukan pengolahan limbah medis menggunakan insinerator milik RSUD dr. Rubini Mempawah, namun menggunakan insinerator milik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit, dan Kelangka Berencana Kabupaten Mempawah; c. RSUD dr. Rubini Mempawah hingga sekarang mengoperasikan insinerator untuk kegiatan pembakaran limbah medis setiap 2 minggu sekali dalam rangka maintenance insinerator agar tidak rusak, bahan yang dibakar adalah limbah medis sebanyak + 5 kg setiap kali running; d. RSUD dr. Rubini Mempawah menempatkan posisi insinerator dengan jarak 35 meter dari pemukiman terdekat; e. RSUD dr. Rubini Mempawah tidak pernah melakukan pemantauan baku mutu emisi cerobong insinerator selama	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah	BPPHLHK wilayah Kalimantan telah membuat surat rekomendasi kepada Dinas Perkebunan dan LH Kabupaten Mempawah Nomor : S.1119/BPPHLHK-IV/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Rekomendasi penerapan sanksi administratif RSUD Dr. Rubini Mempawah		
61	61	#191411	30 October 2019	Surat KPH Wilayah Mempawah Nomor 522/295/KPH-MPW/S/2019	Kabupaten Mempawah	Kecamatan Sadanang, Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat	-	-	Dugaan adanya penambangan pasir di dalam kawasan hutan di kecamatan Sadanang	Perencanaan sesuai peraturan yang berlaku	Kehutanan	12 November 2019	ST.231/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/11/2 019	1. Sukriwan 2. Ade Wahyuningih 3. Rahmat Suseno	a) Berdasarkan hasil temuan verifikasi disimpulkan bahwa benar adanya perambahan kawasan hutan berupa penambangan pasir di kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah, Kabupaten Mempawah dan sekitarnya yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan Hutan Produksi. b) Penambangan pasir di kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah berawal dari pembangunan jalan yang merupakan proyek propinis, yang kemudian dimanfaatkan kembali oleh masyarakat setempat untuk komersil dan bantuan bangunan mesjid. c) Kegiatan penambangan pasir di kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah yang merupakan galian pasir dengan rata-rata angkutan 10 dam per hari diharga Rp. 70.000,- per kubik. d) Lias lahan Hutan Produksi yang dilakukan penggalian pasir yang ditemukan pada saat verifikasi untuk setiap lokasi yaitu sekitar 1-2 Ha.	Operasi represif	Telah Verifikasi lapangan		

NO.	No Registrasi			Tanggal Penerimaan	Nama Pengadu	Alamat	Lokasi Kejadian			Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Jenis Kegiatan	Uraian Kejadian	Penyelesaian yang diinginkan	Tipologi (K/L/H/LHK)	Verifikasi			REKOMENDASI	Status Penanganan Terakhir	Keterangan
	1	2	3				4	5	6						7	8	9			
62	62	#191427	12 November 2019	Media Sosial ri.co.id (Perusahaan Tambang di Kabupaten Sanggau diduga Babat Hutan)		Desa Tayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	PT. Persada Pratama Cemerlang	Pertambangan Bijih Bauksit	Dugaan adanya perusakan lingkungan akibat kegiatan pembukaan jalan di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL)		Lingkungan Hidup	15 November 2019	ST.232/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/11/2 019	1. Mardani 2. A. Agus Riwanio 3. Ary Fidaria Ilim	Berdasarkan fakta dan temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa penguduan dugaan Perusakan Hutan Akibat Kegiatan Pembukaan Jalan Di Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Di Desa Tayan, Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat terbukti bahwa : - PT. Persada Pratama Cemerlang telah melakukan pembukaan lahan di Areal Penggunaan Lain yang diperuntukan sebagai jalan penghubung antar blok penambangan. - PT. Persada Pratama Cemerlang telah mengajukan IPK pada beberapa blok rencana penambangan dan sudah mendapatkan tanggapan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Nomor: 709/Dishut-IT/GK/2018, tgl 23 April 2018 dan Nomor: 244/Dishut-IT/GK/ 2019, tgl 8 Februari 2019. - PT. Persada Pratama Cemerlang tidak memiliki Izin Pemanfaatan Kayu dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat atas pembukaan lahan yang diperuntukan sebagai jalan penghubung antar blok penambangan.	Pelimpahan pada unit lain (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat) Nomor : S.1096/BPPHLHK-IV/12/2019 tanggal 10 desember 2019 tentang Penanganan pelanggaran izin pemanfaatan kayu di APL oleh PT PPC	Telah mengirimkan surat kepada Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Barat		
63	63	#191437	30 October 2019	Surat KPH Wilayah Mempawah Nomor 522/295/KPH-MPW/S/2019	Kabupaten Mempawah	Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat			Dugaan adanya kegiatan Illegal Logging di Hutan Produksi mempawah Hilir		Kehutanan	18 November 2019	ST.235/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/11/2 019	1. Suhardi 2. Guruh Hendra 3. Sutomo	a) Bahwa di dalam Kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah Kecamatan Mempawah Hilir, Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah dan sekitarnya, Provinsi Kalimantan Barat benar terdapat penebangan liar / illegal logging. Dugaan pemodal / cukong kegiatan penebangan liar / Illegal logging tersebut adalah Sdr. Wahid dengan alamat Desa Pasir Kecamatan Mempawah hilir Kabupaten Mempawah, Hamid Desa Pasir Kecamatan Mempawah hilir, Degol Desa Pasir Kecamatan Mempawah hilir, Muslimin Desa Pasir Kecamatan Mempawah hilir Sisi Desa Pasir Kecamatan Mempawah hilir Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. b) Bahwa kayu olahan hasil kegiatan penebangan liar / Illegal logging tersebut diangkat dari TPK disekitar tempat penebangan ke penggergajian (sawmill) milik pemodal / bisa langsung ke konsumen dengan menggunakan pickup atau dumptruck. c) Bahwa kegiatan penebangan liar / Illegal logging tersebut belum pernah dilakukan penertiban / operasi yustisi selama kegiatan ini berlangsung sampai saat ini	Operasi yustisi pengamanan hutan dengan dihadiri kegiatan pengumpulan bahan keterangan	Telah Verifikasi lapangan		
64	64	#191453	19 November 2019	Pengaduan Masyarakat Nanga Pinoh	Kabupaten Melawi	Kabupaten Melawi	Kalimantan Barat			Dugaan adanya peredaran hasil hutan ilegal di Kabupaten Melawi		Kehutanan	20 November 2019	ST.236/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/11/2 019	1. Mardani 2. Andri Setiawan 3. Muhihammad Ridwan	a) Bahwa peredaran hasil hutan kayu olahan di Kabupaten Melawi diduga diambil dari kawasan Hutan Produksi Nanga Pinoh Sungai Sokan Kecamatan nanga Sayan dan hutan lindung Penyelenggara Kecamatan Nanga Sokan. b) Bahwa benar terdapat peredaran hasil hutan kayu olahan liar / illegal tidak memiliki perizinan resmi dari instansi terkait. Kecamatan Nanga Sayan, Kecamatan Nanga Pinoh, dan Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. c) Diduga pemodal / cukong kegiatan penebangan liar / illegal tersebut adalah Sdr. Iyek dengan alamat Desa Pintas, Kecamatan Nanga Sayan, Kabupaten Melawi. d) Bahwa Sdr. Maknyah (Susan) telah melakukan penyalahgunaan dokumen yang tidak sesuai asal usul bahan baku yang dikirim. Dokumen asal Kabupaten Kapuas Hulu dan bahan baku berasal dari Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. e) Bahwa peredaran hasil hutan kayu olahan hasil kegiatan penebangan liar / illegal logging tersebut diangkat dari TPK disekitar tempat penebangan ke penggergajian (sawmill) milik pemodal / bisa langsung ke konsumen dengan menggunakan pickup untuk keperluan lokal atau dumptruck menuju Kabupaten Sintang dan Kota Pontianak.	Pulbaket, Penegakan Hukum Pidana	Telah Verifikasi lapangan		
65	65	#191440	30 October 2019	Surat KPH Wilayah Mempawah Nomor 522/295/KPH-MPW/S/2019	Kabupaten Mempawah	Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat			Dugaan adanya perkebunan sawit di dalam kawasan hutan produksi Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah		Kehutanan	20 November 2019	ST.237/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/11/2 019	1. Cucu Rohdat 2. Agus Riwanio 3. Rahmat Suseno	1. Pengaduan terbukti 2. Ditemukan perkebunan sawit pada : a. Y 0.371185° Y 109,04836 (an. Jupanda) b. Y 0.375043 X 109,041795 (an. An. Gimam) c. Y 0.386641 X 109,061442 (an. Mateus) d. Y 0.372296 X 109,069618 (an. Hendra) e. Y 0.364639 X 109,079058 (Muldoko) 3. Usia tanaman 4 - 5 tahun 4. lahan kebun merupakan jual beli secara pribadi dr masyarakat dan pengelola kebun dengan dasar surat keterangan tanah (SKT) dan Surat Pernyataan Tanah	Kegiatan Pulbaket, Operasi	Telah Verifikasi lapangan		
66	66	#191442	13 November 2019	monalisnews.com tanggal 13 November 2019		Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang	Kalimantan Barat			Dugaan adanya pembabatan hutan bakau (mangrove) di desa Sungai Duri		Lingkungan Hidup	20 November 2019	ST.238/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/11/2 019	1. Nur Aziz Ribowo 2. Ary Fidaria Ilim 3. Sukriwan	a) Terhadap sumber pengaduan terkait adanya penebangan hutan mangrove di Desa Sungai Duri, kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang pada koordinat 0°34'40,442" N , 108°55'45,764" E dinyatakan terbukti b. Terdapat penebangan hutan mangrove dengan luas ± 1.300 m2 (perhitungan dengan track GPS) yang terdiri dari 2 (dua) kepemilikan lahan atas nama Sdr. Asy'ari (850 m2) dan Sdr. Tjung Kong Lung (450 m2) sekitar pada tanggal 27 Oktober 2019. c. Sdr. Asy'ari dan Sdr. Tjung Kong Lung telah memiliki bukti Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dengan luas ± 300 m2 pembelian dari Sdr. Tjhen Chal Sie tahun 2019 dan ± 486,7 m2 pembelian dari Sdr. Lal Tet Kiuk, Haminah, Liu Siu Tjin, Liu Bui Nen Busri, Liu Tshui Tjin pada tahun 2019. d. Pada saat verifikasi dilakukan, tanggal 25 November 2019 lahan mangrove yang sudah terbuka telah dilakukan kegiatan pembanguan berupa penanaman dan pengerasan untuk tujuan reko (berdasarkan informasi pekerja di lokasi).	Rekomendasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah	Telah Verifikasi lapangan		
67	67	#191464	5 December 2019	Jono Darsono (Ketua DPW Kader Militan Jokowi (KAMJO) Provinsi Kalimantan Barat)	Kota Pontianak	Kecamatan Batu Ampar, Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat			Dugaan adanya illegal logging oleh masyarakat Batu Ampar	Penindakan sesuai dengan UU peraturan yang berlaku	Kehutanan	5 December 2019	ST.254/BPPHLHK IV/SW.3/Keu/12/2 019	1. Suhardi 2. Mardani 3. Ade Wahyuningsih 4. Nur Aziz 5. Ary Fidaria 6. Ridwan	a) Terhadap adanya pembukaan lahan yang membatel Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Bumbun perlu dilakukan kegiatan lebih mendalam. b) Perlu dilakukan upaya penegakan hukum terkait kegiatan Illegal Logging di Karang Anyar Dusun Cabeng Ruan, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. c) Perlu adanya koordinasi antar instansi terkait pengawasan dan monitoring Kawasan Hutan yang berada di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat kedepan.	Rekomendasi Operasi	Telah Verifikasi lapangan		

REKAP PENGAWASAN RUTIN OLEH BPPHLK Wilayah Kalimantan 2019

NO	NAMA PERUSAHAAN	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	JENIS INDUSTRI	SEKTOR (IPJ/SDA)	SUB SEKTOR SESUAI P.18	TIPOLOGI KASUS	JUMLAH IZIN	IZIN DAERAH	IZIN KLHK	KETAATAN	USULAN SANKSI	TAHUN	TGL PENGAWASAN
1	PT Baroid Indonesia	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	Pengelola LB3	IPJ	Prasarana dan Jasa	Pengawasan Reguler	5	4	1	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	02-Feb-19
2	Eni Muara Bakau B.V.	Balikpapan (Kota)	Kalimantan Timur	Migas	SDA	Minyak dan Gas	Pengawasan Reguler	15	7	8	Taat	Apresiasi	2019	18-Feb-19
3	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Pulang Pisau	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	Pelabuhan	IPJ	Prasarana dan Jasa	Pengawasan Reguler	1	0	1	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	24-Feb-19
4	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Samarinda	Samarinda (Kota)	Kalimantan Timur	Pelabuhan	IPJ	Prasarana dan Jasa	Pengawasan Reguler	2	1	1	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	15-Feb-19
5	PT Antam Tbk UBPB	Sanggau	Kalimantan Barat	Tambang	SDA	Mineral dan Batubara	Pengawasan Reguler	8	8	0	Tidak Taat	Teguran Tertulis	2019	14-Mar-19
6	PT Kalimantan Fishery	Banjarmasin (Kota)	Kalimantan Selatan	Perikanan	SDA	Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Reguler	3	3	0	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	08-Mar-19
7	PT Pertamina (Persero) MOR VI TBBM Tarakan	Tarakan (Kota)	Kalimantan Utara	Migas	SDA	Minyak dan Gas	Pengawasan Reguler	4	4	0	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	16-Mar-19
8	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur	Balikpapan (Kota)	Kalimantan Timur	PLTU	SDA	Energi	Pengawasan Reguler	5	5	0	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	31-Jan-19
9	PT Mitra Inti Sejati Plantation	Bengkayang	Kalimantan Barat	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Pengawasan Reguler	3	3	0	Tidak Taat	Teguran Tertulis	2019	22-Feb-19
10	PT Indo Muro Kencana	Murung Raya	Kalimantan Tengah	Tambang	SDA	Mineral dan Batubara	Pengawasan Reguler	4	3	1	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	16-Mar-19
11	PT Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk	Pontianak	Kalimantan Barat	Minyak Sawit	IPJ	Manufaktur	Pengawasan Reguler	3	3	0	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	29-Mar-19
12	PT Kitadin Embalut	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	Tambang	SDA	Mineral dan Batubara	Pengawasan Reguler	7	7	0	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	23/03/2019
13	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Cabang Banjarmasin	Tanah Laut	Kalimantan Selatan	Makanan	IPJ	Manufaktur	Pengawasan Reguler	6	6	0	Tidak Taat	Teguran Tertulis	2019	30/03/2019
14	PLTD Keledang	Samarinda (Kota)	Kalimantan Timur	Energi	SDA	Energi	Pencemaran	3	3	0	Tidak Taat		2019	11-May-19
15	PT Jorong Barutama Greston	Tanah Laut	Kalimantan Selatan	Tambang	SDA	Mineral dan Batubara	Pencemaran	10	8	2	Tidak Taat	Teguran Tertulis	2019	26-Apr-19
16	PT Kalimantan Sawit Abadi	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	8	7	1	Tidak Taat		2019	26-Apr-19
17	PLTD Karangasam	Samarinda (Kota)	Kalimantan Timur	Energi	SDA	Energi	Pencemaran	3	3	0	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	28-Mar-19
18	PT Pelindo III Kotabaru	Kotabaru	Kalimantan Selatan	Kepelabuhan	IPJ	Prasarana dan Jasa	Pencemaran	2	0	2	Tidak Taat		2019	24-May-19
19	PT Multi Harapan Utama	Samarinda (Kota)	Kalimantan Timur	Tambang	SDA	Mineral dan Batubara	Pencemaran	2	1	1	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	23-Mar-19
20	PT Lanna Harita Indonesia	Samarinda (Kota)	Kalimantan Timur	Tambang	SDA	Mineral dan Batubara	Pencemaran	4	4	0	Tidak Taat		2019	04-May-19
21	PT PLN (Persero) UPDK Mahakam Unit Layanan PLTG Samberra	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	PLTG	SDA	Energi	Pencemaran	3	3	0	Tidak Taat	Sanksi Administrasi	2019	12-May-19
22	PT Bukit Baiduri Energi	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	Tambang	SDA	Mineral dan Batubara	Pencemaran	8	8	0	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	02-May-19
23	PT Maju Asri Jaya Utama	Balikpapan (Kota)	Kalimantan Timur	Pengelola LB3	IPJ	Prasarana dan Jasa	Pencemaran	2	0	2	Tidak Taat	Teguran Tertulis	2019	24-May-19
24	PT Pelabuhan Penajam Banua Taka	Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	Pengelola LB3	IPJ	Prasarana dan Jasa	Pencemaran	6	5	1	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	14-Jun-19

REKAP PENGAWASAN KARHUTLA OLEH BPPHLHK Wilayah Kalimantan Tahun 2019

NO	NAMA PERUSAHAAN	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	JENIS INDUSTRI	SEKTOR (IP)/SDA	SUB SEKTOR SESUAI P.18		TIPOLOGI KASUS	INDIKASI LUAS LAHAN TERBAKAR	JUMLAH IZIN	IZIN DAERAH	IZIN KLHK	KETAATAN	USULAN SANKSI	TAHUN	TGL PENGAWASAN
						KARHUTLA	Perkebunan									
1	PT Kalimantan Sawit Abadi	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla		8	7	1	Tidak Taat		2019	26-Apr-19	
2	PT Menteng Kencana Mas	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	100 ha di luar lokasi	2	2	0	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	08-Aug-19	
3	PT Industrial Forest Plantation	Kapuas	Kalimantan Tengah	HTI	KARHUTLA	Kehutanan	Karhutla	5 ha	3	2	1	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah dan Pidana	2019	09-Aug-19	
4	PT Ichtiar Gusti Pudi	Landak	Kalimantan Barat	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	40	4	4	0	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah dan Pidana	2019	24-Aug-19	
5	PT Mitra Andalan Sejahtera	Mempawah	Kalimantan Barat	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	100 ha di dalam lokasi IUP dan 107 ha di luar lokasi IUP	3	3	0	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	23-Aug-19	
6	PT Global Kalimantan Makmur	Sanggau	Kalimantan Barat	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	Tidak ada estimasi	3	3	0	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	23-Aug-19	
7	PT Muara Sungai Landak	Mempawah	Kalimantan Barat	HTI	KARHUTLA	Kehutanan	Karhutla	29,7 ha	3	2	1	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	23-Aug-19	
8	PT Bumi Perkasa Gemilang	Kubu Raya	Kalimantan Barat	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	58 ha	1	1	0	Tidak Taat		2019	06-Sep-19	
9	PT Nityasa Idola	Landak	Kalimantan Barat	HTI	KARHUTLA	Kehutanan	Karhutla	Tidak ada estimasi	3	2	1	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	06-Sep-19	
10	PT Kumai Sentosa	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	2688 ha	1	1	0	Tidak Taat	Pencabutan Izin, Penegakan Hukum Pidana, dan Gugatan Ganti Rugi Kerusakan Lingkungan	2019	19-Sep-19	
11	PT Nala Palma Cadudasa	Kutai Timur	Kalimantan Timur	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	178,20 ha	2	2	0	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah dan Penegakan Hukum Pidana	2019	21-Sep-19	
12	PT Menteng Jaya Sawit Perdana	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	587 ha	2	2	0	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah	2019	04-Oct-19	
13	PT Nusantara Sawit Persada	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	19 ha	3	2	1	Tidak Taat		2019	04-Oct-19	
14	PT Windu Nabatindo Lestari	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	54 ha	4	3	1	Tidak Taat		2019	05-Oct-19	
15	PT Arjuna Utama Sawit	Katingan	Kalimantan Tengah	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	45,24 ha	4	4	0	Tidak Taat		2019	05-Oct-19	
16	PT Bulungan Citra Agro Persada	Bulungan	Kalimantan Utara	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	3083,617 ha	1	1	0	Tidak Taat		2019	04-Oct-19	
17	PT Agri Bumi Sentosa	Barito Kuala	Kalimantan Selatan	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	2668 ha	6	6	0	Tidak Taat	Pembekuan Izin	2019	04-Oct-19	
18	PT Jalin Valeo	Kayong Utara	Kalimantan Barat	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	238 ha	5	3	2	Tidak Taat	Paksaan Pemerintah dan penegakan hukum perdata	2019	04-Oct-19	
19	PT Sapta Karya Damai	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	97 ha	3	3	0	Tidak Taat		2019	11-Oct-19	
20	PT Mega Ika Khansa	Seruyan	Kalimantan Tengah	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	274,81 ha	3	2	1	Tidak Taat		2019	11-Oct-19	
21	PT Borneo Indo Tani	Banjor	Kalimantan Selatan	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	4414,137 ha	3	3	0	Tidak Taat		2019	11-Oct-19	
22	PT Monrad Intan Barakat	Banjor	Kalimantan Selatan	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	2779,28	1	1	0	Tidak Taat		2019	11-Oct-19	
23	PT Tasnida Agro Lestari	Barito Kuala	Kalimantan Selatan	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	2305,58 ha	2	2	0	Tidak Taat		2019	01-Nov-19	
24	PT Borneo Sawit Perdana	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	1647 ha	2	2	0	Tidak Taat		2019	31-Oct-19	
25	PT Gawi Bahandep Sawit Mekar	Seruyan	Kalimantan Tengah	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	1228,05 ha	3	3	0	Tidak Taat		2019	01-Nov-19	
26	PT Rimba Sawit Utama Planindo	Seruyan	Kalimantan Tengah	Perkebunan	KARHUTLA	Perkebunan	Karhutla	2262,8 ha	1	1	0	Tidak Taat		2019	31-Oct-19	

REKAP P21 BPPHLHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2019

NO	INSTANSI	KASUS	KATEGORI	TERSANGKA	ASAL SURAT	NOMOR P21	TANGGAL P21
1	Seksi Wilayah 2 Kalimantan	Perambahan Hutan	Pertambangan	Suardi Bin Basiruddin	Kejati Kaltim	B-050/Q.4.4/Ep.1/01/2019	14 Januari 2019
2	Seksi Wilayah 2 Kalimantan	Perambahan Hutan	Pertambangan	Abdul Sani Bin Hasbullah	Kejati Kaltim	B-048/Q.4.4/Ep.1/01/2019	14 Januari 2019
3	Seksi Wilayah 3 Kalimantan	Illegal Logging	Kehutanan	Adam Anak Singkin	Kejati Kalbar	B-637/Q.1.4/Euh.1/02/2019 Kejati Kalbar	28 Februari 2019
4	Seksi Wilayah 3 Kalimantan	Illegal Logging	Kehutanan	Wandi Hartono Als Kariting Bin Nurdin	Kejati Kalbar	B-638/Q.1.4/Euh.1/02/2019 Kejati Kalbar	28 Februari 2019
5	Seksi Wilayah 1 Kalimantan	Illegal Logging	Kehutanan	Erwin Wijaya anak dari (alm) Rozak	Kejati Kalteng	B-884/Q.2.4/Euh.1/03/2019 Kejati Kalteng	18 Maret 2019
6	Seksi Wilayah 2 Kalimantan	Illegal Logging	Kehutanan	Amirudin Bin Alimudin	Kejati Kaltim	B-466/Q.4.4/Euh.1/03/2019	26 Maret 2019
7	Seksi Wilayah 2 Kalimantan	Illegal Logging	Kehutanan	Dian M Khomeini Bazargan P Bin Wan Hafiz Nawawi Als Abang	Kejati Kaltim	B-467/Q.4.4/Euh.1/03/2019	26 Maret 2019
8	Seksi Wilayah 2 Kalimantan	Illegal Logging	Kehutanan	Elwin Mashurin Bin Mashurin	Kejati Kaltim	B-468/Q.4.4/Euh.1/03/2019	26 Maret 2019
9	Seksi Wilayah 1 Kalimantan	Illegal Logging	Kehutanan	Mansyah Als Anjul Bin Sadiyah	Kejati Kalteng	B-1088/Q.2.4/Euh.1/4/2019	08 April 2019
10	Seksi Wilayah 3 Kalimantan	TSL	Kehutanan	Orszulak Jakub Michal Anak Roman, Has Rafal Piotr, Bogdanow Piotr Henryk Anak Jacek dan Grzegorz Mariusz Traczyk Anak Kazimierz	Kejati Kalbar	B-1232/Q.1.4/Euh.1/04/2019	26 April 2019
11	Seksi Wilayah 3 Kalimantan	TSL	Kehutanan	Udong Bin Kadus	Kejati Kalbar	B-1184/Q.1.4/Euh.1/04/2019	25 April 2019
12	BPPHLHK Kalimantan Seksi Wilayah II	Perambahan Hutan	Kehutanan	RICKY GUNWAN ANAK DARI DJAP HON MEU	Kejati Kaltim	B.761/Q.4.4/EP.1/04/2019	29 April 2019
13	Seksi Wilayah I Palangkaraya	Illegal Logging	Kehutanan	IRWAN Bin (Alm) H. MANSYUR	Kejati Kalteng	B-1260 /Q.2.4/Euh. 1/04/2019	30 April 2019
14	Seksi Wilayah I Palangkaraya	TSL	Kehutanan	M. AINUL YAQIN Bin AHDA ZAID	Kejati Kalteng	B-1944/Q.2.4/Eku.1/07/2019	30 Juli 2019
15	Seksi Wilayah I Palangkaraya	TSL	Kehutanan	SURYADI Als YADI Bin (Alm) ASPAN	Kejati Kalteng	B-1943/Q.2.4/Eku.1/07/2019	30 Juli 2019

NO	INSTANSI	KASUS	KATEGORI	TERSANGKA	ASAL SURAT	NOMOR P21	TANGGAL P21
16	Seksi Wilayah I Palangkaraya	Illegal Logging	Kehutanan	ISMAIL Bin (Alm) H. JAWAN	Kejati Kalteng	B-2038/Q.2.4/Eku.1/08/2019	02 Agustus 2018
17	Seksi Wilayah I Palangkaraya	TSL	Kehutanan	MOCHAMAD CHOIRUL BASORI Alias ALUN Bin (Alm) YAKUP	Kejati Kalteng	B-1993/Q.2.4/Eku.1/07/2019	05 Agustus 2019
18	Seksi Wilayah II Samarinda	Illegal Logging	Kehutanan	MUHAMAD YUSUF bin MUSLIMIN	Kejati Kaltim	B-1.338 /O.4.4 /Eku.1/08/2019	12 Agustus 2019
19	Seksi Wilayah II Samarinda	Illegal Logging	Kehutanan	IYON KARISMAN bin DEDI SULAIMAN	Kejati Kaltim	B-1.340 /O.4.4 /Eku.1/08/2019	12 Agustus 2019
20	Seksi Wilayah II Samarinda	Illegal Logging	Kehutanan	USMAN bin HATTA	Kejati Kaltim	B-1.339 /O.4.4 /Eku.1/08/2019	12 Agustus 2019
21	Seksi Wilayah III Pontianak	Illegal Logging	Kehutanan	CLAUDIUS MISTERITOL Alias ITOL Anak WILHEMUS MANGO	Kejati Kalbar	B-1876/Q.1.4/ Euh.1/08/2019,	2 Agustus 2019
22	Seksi Wilayah III Pontianak	TSL	Kehutanan	HAN SON Alias AHAN ANAK SUI KHUN	Kejati Kalbar	B-1870/Q.1.4/ Euh.1/08/2019,	4 Agustus 2019
23	Seksi Wilayah II Samarinda	TSL	Kehutanan	DOMILATAKE PETRUS anak dari BEDA OLA	Kejati Kaltara	No. B- 1308/Q.4.4/Ep.1/3/2019	19 Agustus 2019
24	Seksi Wilayah II Samarinda	Illegal Logging	Kehutanan	Nurhayati Binti Ancung		No. B- 1443/Q.4.4/Ep.1/8/2019,	30 Agustus 2019
25	Seksi Wilayah II Samarinda	Illegal Logging	Kehutanan	Yusran Bin Sulaiman		No. B- 1441/Q.4.4/Ep.1/8/2019	30 Agustus 2019
26	Seksi Wilayah II Samarinda	Illegal Logging	Kehutanan	Rahmat Hidayat Anak Dari Sugeng		No. B- 1442/Q.4.4/Ep.1/8/2019	30 Agustus 2019
27	Seksi Wilayah III Pontianak	TSL	Kehutanan	ANES ALIUNG ANAK MARAM	Kejati Kalbar	B-2094/O.1.4/ Eku.1/08/2019	22 Agustus 2019
28	Seksi Wilayah III Pontianak	Illegal Logging	Kehutanan	ISWANDI Alias ANES Bin ZAINUDIN	Kejati Kalbar	B-2001/O.1.4/Eku.1/08/2019	22 Agustus 2019
29	Seksi Wilayah III Pontianak	Karhutla	Kehutanan	UBER ANAK ENDEL	Kejati Kalbar	B-2252/O.1.4/Eku.1/09/2019	17 September 2019
30	Seksi Wilayah III Pontianak	Illegal Logging	Kehutanan	SUKARNA ALIAS MUK NA BIN HANAFIYAH	Kejati Kalbar	B-2099/O.1.4/Eku.1/09/2019	02 September 2019
31	Seksi Wilayah III Pontianak	Illegal Logging	Kehutanan	RASIDI BIN SAB'AN	Kejati Kalbar	B-2223/O.1.4/Eku.1/09/2019	04 September 2019

NO	INSTANSI	KASUS	KATEGORI	TERSANGKA	ASAL SURAT	NOMOR P21	TANGGAL P21
32	Seksi Wilayah III Pontianak	Illegal Logging	Kehutanan	AMUD ANAK ASIRI	Kejati Kalbar	B-2224/O.1.4/Eku.1/09/2019	04 September 2019
33	Seksi Wilayah III Pontianak	Illegal Logging	Kehutanan	INDUL ANAK ROSITA	Kejati Kalbar	B-2188/O.1.4/Eku.1/09/2019	3 September 2019
34	Seksi Wilayah III Pontianak	Illegal Logging	Kehutanan	TARSIANUS ANAK AYON	Kejati Kalbar	B-2187/O.1.4/Eku.1/09/2019	03 September 2019
35	Seksi Wilayah III Pontianak	Illegal Logging	Kehutanan	PETRUS ROSA VERY ANAK PETRUS	Kejati Kalbar	B-2284/O.1.4/Eku.1/09/2019	25 September 2019
36	Seksi Wilayah III Pontianak	Illegal Logging	Kehutanan	SYAHRIL ANAK ASRI	Kejati Kalbar	B-2285/O.1.4/Eku.1/09/2019	25 September 2019
37	Seksi Wilayah III Pontianak	Illegal Logging	Kehutanan	YOSEF EFENSIUS ANAK YUSTINUS BASOBE	Kejati Kalbar	B-2288/O.1.4/Eku.1/09/2019 tanggal 25 September 2019	25 September 2019
38	Seksi Wilayah I Palangkaraya	Illegal Logging	Kehutanan	SYAHRIMAL Alias IMAL Bin (Alm) HALIDINNOR	Kejati Kalteng	B-2461/O.2.4/Eku.1/09/2019	18 September 2019
39	Seksi Wilayah I Palangkaraya	Illegal Logging	Kehutanan	SIHIR WIJAYANTO Bin (Alm) ISMAN	Kejati Kalteng	B-2460/O.2.4/Eku.1/09/2019	18 September 2019
40	Seksi Wilayah I Palangkaraya	TSL	Kehutanan	ANDI SUTOPO RAMADHAN Bin SUGENG	Kejati Kalteng	B-2443/O.2.4/Eku.1/08/2019	03-Aug-19
41	Seksi Wilayah I Palangkaraya	Illegal Logging	Kehutanan	TONNY SUGIANTORO Alias TONY Bin (Alm) NYOTO WIYONO	Kejati Kalteng	B-3032 /O.2.4/Eku.1/11/2019	25-Nov-19
42	Seksi Wilayah II Samarinda	Perambahan Hutan	Pertambangan	NUR IFANSYAH BIN NURDIN		B-2.177/O.4.4/Eku.1/12/2019	16 Desember 2019
43	Seksi Wilayah III Pontianak	Perambahan Hutan	Pertambangan	CV. Agung Persada yang diwakili oleh Adi Jamhari, SH Bin Basirun	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	B-623/Q.1.4/Euh.1/02/2019	26-Feb-19
44	Seksi Wilayah III Pontianak	Perambahan Hutan	Pertambangan	PT. Cahaya Mandiri Lestari yang diwakili oleh Rion Sardi Als H. Yuyun Bin Zainudi	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	B-624/Q.1.4/Euh.1/02/2019	26-Feb-19



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH KALIMANTAN**



**Komplek Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jl. P. Untung Surapati, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Telp/ Fax: 0541-2776537; E-mail: bp2hlhk.kalimantan@gmail.com**